



Kutai Kartanegara

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Tahun Anggaran 2024



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Diponegoro No. 34 Telp. (0541) 661036 Fex 661787 Tenggarong Kode Pos 75514
Email : inspektorat@kukarkab.go.id Website : inspektorat.kukarkab.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk Tahun Anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab manajemen.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan Penyelenggaraan Pemerintah daerah telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan Penyelenggaraan Pemerintah daerah ini .

Tenggarong, 27 Maret 2025

Inspektur,



H. Heriansyah, SE. M.Si. CGCAE., CPSp.

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19790801 200112 1 001



Kata Pengantar



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wata'ala Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah Pusat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 merupakan pertanggungjawaban kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam kerangka otonomi daerah selama periode 1 (satu) tahun anggaran.

LPPD ini memuat capaian kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2024 dengan mengusung tema ***“Pengembangan Ekonomi Unggulan Daerah Berbasis Desa dan Kecamatan”***.





Substansi materi laporan ini menginformasikan mengenai kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang memuat indikator kinerja makro, indikator kinerja kunci urusan pemerintahan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2021, selain itu laporan ini juga memuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Pelaksanaan Tugas Pembantuan serta Laporan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Ucapan terima kasih dan penghargaan disampaikan kepada Perangkat Daerah dan semua pihak terkait yang telah memberikan dukungan, pemikiran, saran serta kritik sebagai upaya mewujudkan masyarakat Kutai Kartanegara yang sejahtera dan berbahagia.

Disadari sepenuhnya akan segala keterbatasan dan kemampuan dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang merupakan tugas berkesinambungan dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, saran masukan yang bersifat membangun sangat kami harapkan sebagai bahan perbaikan kinerja dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2024 kami sampaikan, semoga dapat memberikan informasi sebagai bahan evaluasi, pembinaan dan pengawasan dalam rangka peningkatan kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Bupati Kutai Kartanegara

Drs. Edi Damansyah, M.Si





Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	iii
Daftar Tabel	vi
Daftar Gambar	xv
Daftar Grafik	xvi
BAB I Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.1.1. Penjelasan Umum	1
A. Undang-Undang Pembentukan Daerah.....	1
B. Kondisi Geografis	1
C. Jumlah Penduduk	4
D. Jumlah Kecamatan, Jumlah Perangkat Daerah dan Jumlah Pegawai Pemerintah.....	5
E. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	12
F. Pelaksanaan Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan	15
1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah	22
A. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah.....	22
B. Visi dan Misi Kepala Daerah.....	23
C. Program Pembangunan Daerah berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah	27
D. Kegiatan Pembangunan Daerah berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan	40
1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal	42
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH.....	48
2.1. Capaian Kinerja Makro	48
2.1.1. Indeks Pembangunan Manusia	49
2.1.2. Angka Kemiskinan	52
2.1.3. Angka Pengangguran	53
2.1.4. Pertumbuhan Ekonomi	54
2.1.5. Pendapatan Per kapita	55
2.1.6. Ketimpangan Pendapatan	56
2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	57
2.2.1. Indikator Kinerja Kunci Keluaran	57
2.2.2. Indikator Kinerja Kunci Hasil.....	86
2.2.3. Indikator Kinerja Kunci Urusan Penunjang	102
2.3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	105
2.3.1. Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024	105
2.3.2. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja	107
2.3.3. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) Yang Telah Dicapai	233





BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS	
PEMBANTUAN.....	242
3.1. Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan	242
BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR	
PELAYANAN MINIMAL	243
4.1. Urusan Pendidikan	243
4.1.1. Jenis Pelayanan Dasar.....	243
4.1.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal.....	243
4.1.3. Realisasi.....	246
4.1.4. Alokasi Anggaran	250
4.1.5. Dukungan Personil	255
4.1.6. Permasalahan dan Solusi.....	256
4.2. Urusan Kesehatan.....	256
4.2.1. Jenis Pelayanan Dasar.....	256
4.2.2. Target Pencapaian SPM	257
4.2.3. Realisasi.....	266
4.2.4. Alokasi Anggaran	285
4.2.5. Dukungan Personil	286
4.2.6. Permasalahan dan Solusi.....	287
4.3. Urusan Pekerjaan Umum	288
4.3.1. Jenis Pelayanan	288
4.3.2. Target Pencapaian	288
4.3.3. Realisasi.....	290
4.3.4. Alokasi Anggaran`	293
4.3.5. Dukungan Personil	295
4.3.6. Permasalahan dan Solusi.....	295
4.4. Urusan Perumahan Rakyat.....	296
4.4.1. Jenis Pelayanan	296
4.4.2. Target Pencapaian	296
4.4.3. Realisasi.....	297
4.4.4. Alokasi Anggaran	301
4.4.5. Dukungan Personil	303
4.4.6. Permasalahan dan Solusi.....	303
4.5. Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.....	304
4.5.1. Jenis Pelayanan	304
4.5.2. Target Pencapaian	305
4.5.3. Realisasi.....	308
4.5.4. Alokasi Anggaran	314
4.5.5. Dukungan Personil	319
4.5.6. Permasalahan dan Solusi	321
4.6. Urusan Sosial	325
4.6.1. Jenis Pelayanan	325
4.6.2. Target Pencapaian	326
4.6.3. Realisasi.....	333
4.6.4. Alokasi Anggaran	346
4.6.5. Dukungan Personil	346
4.6.6. Permasalahan dan Solusi.....	348





BAB V PENUTUP	350
----------------------------	------------





Daftar Tabel

Tabel 1. Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara Pasca UU IKN.....	3
Tabel 2. Jumlah Penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024	4
Tabel 3. Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan Desa.....	5
Tabel 4. Jumlah PNS Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024	6
Tabel 5. Jumlah PPPK Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024	9
Tabel 6. Jumlah Tenaga Harian Lepas Berdasarkan Perangkat Daerah Tahun 2024	9
Tabel 7. Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2024	13
Tabel 8. Realisasi Belanja Daerah Tahun 2024.....	14
Tabel 9. Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2024.....	15
Tabel 10. Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024	15
Tabel 11. Indikator Tujuan Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026	27
Tabel 12. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan, Urusan dan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026	29
Tabel 13. Prioritas dan Fokus Pembangunan Tahun 2024 Kabupaten Kutai Kartanegara.....	41
Tabel 14. Sasaran Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024.....	42
Tabel 15. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan dalam Penerapan SPM Kabupaten Kutai Kartanegara.....	43
Tabel 16. Arah Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal	44
Tabel 17. Alokasi Anggaran Penunjang Penerapan SPM Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024	47
Tabel 18. Capaian Indikator Kinerja Makro	48
Tabel 19. Realisasi Capaian Indikator Kinerja Makro atas Target RPJMD 2021-2026	49
Tabel 20. Indikator Pembentuk IPM Tahun 2020-2024	50
Tabel 21. Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 dan 2024	51
Tabel 22. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 s.d 2024	53





Tabel 23. PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara Atas Dasar Harga Konstan (Juta Rupiah) 2023-2024.....	54
Tabel 24. Angka Ketimpangan Pendapatan Tahun 2024	57
Tabel 25. Capaian Indikator Kinerja Kunci Keluaran	57
Tabel 26. Capaian Indikator Kinerja Kunci Hasil	86
Tabel 27. Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024.....	106
Tabel 28. Skala Ordinal Pengukuran Kinerja Sasaran Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024	108
Tabel 29. Rekapitulasi Capaian Kinerja Sasaran Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024.....	109
Tabel 30. Pengkategorian Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024	110
Tabel 31. Predikat Nilai Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024	112
Tabel 32. Rekapitulasi Capaian IKU Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024.....	112
Tabel 33. Realisasi Indikator Sasaran 1 Tahun 2024	113
Tabel 34. Hasil evaluasi penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	114
Tabel 35. Hasil Evaluasi SAKIP Kabupaten/Kota	115
Tabel 36. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 1 terhadap target RPJMD.....	115
Tabel 37. Program dan Anggaran Sasaran 1 Tahun 2024	115
Tabel 38. Realisasi Indikator Sasaran 2 Tahun 2024	119
Tabel 39. Hasil Survei Penilaian Integritas Kabupaten/ Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2024	124
Tabel 40. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 2 terhadap target RPJMD.....	125
Tabel 41. Program dan Anggaran Sasaran 2 Tahun 2024	125
Tabel 42. Capaian <i>Monitoring Center for Prevention KPK Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2024</i>	128
Tabel 43. Realisasi Indikator Sasaran 3 Tahun 2024	129
Tabel 44. Hasil Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik kabupaten/ kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024.....	131
Tabel 45. Perbandingan Hasil Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik kabupaten/ kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 dengan 2023	132
Tabel 46. Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik.....	134





Tabel 47. Hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024.....	135
Tabel 48. Perbandingan Hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024 dengan Tahun 2022 dan 2023	135
Tabel 49. Hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kabupaten/ Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024	136
Tabel 50. Hasil IKM Per Unsur Pelayanan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024.....	137
Tabel 51. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 3 terhadap target RPJMD.....	138
Tabel 52. Program dan Anggaran Sasaran 3 Tahun 2024	138
Tabel 53. Realisasi Indikator Sasaran 4 Tahun 2024	141
Tabel 54. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 4 terhadap target RPJMD.....	158
Tabel 55. Program dan Anggaran Sasaran 4 Tahun 2024	158
Tabel 56. Realisasi Program Beasiswa Tahun 2022-2024	161
Tabel 57. Realisasi Indikator Sasaran 5 Tahun 2024	161
Tabel 58. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 5 terhadap target RPJMD.....	163
Tabel 59. Program dan Anggaran Sasaran 5 Tahun 2024	163
Tabel 60. Realisasi Indikator Sasaran 6 Tahun 2024	165
Tabel 61. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 6 terhadap target RPJMD.....	167
Tabel 62. Program dan Anggaran Sasaran 6 Tahun 2024	167
Tabel 63. Realisasi Indikator Sasaran 7 Tahun 2024	168
Tabel 64. Rekapitulasi Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024	174
Tabel 65. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 7 terhadap target RPJMD.....	175
Tabel 66. Program dan Anggaran Sasaran 7 Tahun 2024	175
Tabel 67. Realisasi Indikator Sasaran 8 Tahun 2024	177
Tabel 68. Jumlah dan Perubahan Pengangguran di Kabupaten Kutai Kartanegara 2010-2024.....	178
Tabel 69. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 8 terhadap target RPJMD.....	183
Tabel 70. Program dan Anggaran Sasaran 8 Tahun 2024	183
Tabel 71. Realisasi Indikator Sasaran 9 Tahun 2024	185
Tabel 72. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 9 terhadap target RPJMD.....	187





Tabel 73. Program dan Anggaran Sasaran 9 Tahun 2024	187
Tabel 74. Realisasi Indikator Sasaran 10 Tahun 2024	189
Tabel 75. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 10 terhadap target RPJMD.....	193
Tabel 76. Program dan Anggaran Sasaran 10 Tahun 2024	193
Tabel 77. Realisasi Indikator Sasaran 11 Tahun 2024	194
Tabel 78. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 11 terhadap target RPJMD.....	197
Tabel 79. Program dan Anggaran Sasaran 11 Tahun 2024	197
Tabel 80. Realisasi Indikator Sasaran 12 Tahun 2024	198
Tabel 81. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 12 terhadap target RPJMD.....	199
Tabel 82. Program dan Anggaran Sasaran 12 Tahun 2024	199
Tabel 83. Realisasi Indikator Sasaran 13 Tahun 2024	201
Tabel 84. Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024	202
Tabel 85. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Anggaran terkait penyediaan air bersih Tahun 2024	206
Tabel 86. Rekapitulasi Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2023 dan 2024	210
Tabel 87. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Anggaran terkait rumah layak huni Tahun 2023-2024	210
Tabel 88. Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Tahun 2024 ...	212
Tabel 89. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 13 terhadap target RPJMD.....	213
Tabel 90. Program dan Anggaran Sasaran 13 Tahun 2024	213
Tabel 91. Realisasi Indikator Sasaran 14 Tahun 2024	214
Tabel 92. Data Desa Terhubung Dan Tidak Terhubung Jalur Darat	215
Tabel 93. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 14 terhadap target RPJMD.....	218
Tabel 94. Program dan Anggaran Sasaran 14 Tahun 2024	218
Tabel 95. Realisasi Indikator Sasaran 15 Tahun 2024	220
Tabel 96. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 15 terhadap target RPJMD.....	224
Tabel 97. Program dan Anggaran Sasaran 15 Tahun 2024	224
Tabel 98. Sungai yang nilai parameter <i>Fecal Coli</i> di atas Baku Mutu	226
Tabel 99. Realisasi Indikator Sasaran 16 Tahun 2024	227





Tabel 100. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 16 terhadap target RPJMD.....	229
Tabel 101. Program dan Anggaran Sasaran 16 Tahun 2024	229
Tabel 102. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024 dibandingkan Tahun 2023.....	231
Tabel 103. Analisis Efisiensi Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2024	233
Tabel 104. Anggaran dan Realisasi Anggaran Pengadaan Barang/Jasa.....	235
Tabel 105. Rekapitulasi Capaian Kinerja Sasaran Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024.....	236
Tabel 106. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 dibanding dengan Target Akhir RPJMD 2021-2026	238
Tabel 107. Capaian Tujuan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 RPJMD 2021-2026.....	241
Tabel 108. Target Pencapaian SPM Urusan Pendidikan.....	244
Tabel 109. Indeks Pencapaian SPM Urusan Pendidikan	246
Tabel 110. Capaian Penerima Layanan SPM Pendidikan Anak Usia Dini.....	247
Tabel 111. Capaian Mutu Layanan SPM Pendidikan Anak Usia Dini.....	247
Tabel 112. Capaian Penerima Layanan SPM Pendidikan Dasar	248
Tabel 113. Capaian Mutu Layanan SPM Pendidikan Dasar.....	248
Tabel 114. Capaian Penerima Layanan SPM Pendidikan Kesetaraan ..	249
Tabel 115. Capaian Mutu Layanan SPM Pendidikan Kesetaraan	250
Tabel 116. Alokasi Anggaran Pencapaian SPM Urusan Pendidikan.....	250
Tabel 117. Jumlah Personil Pendukung Pencapaian SPM Urusan Pendidikan	255
Tabel 118. Target Pencapaian SPM Urusan Kesehatan	257
Tabel 119. Indeks Pencapaian SPM Urusan Kesehatan	267
Tabel 120. Capaian Penerima Layanan SPM Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil.....	268
Tabel 121. Capaian Mutu Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	268
Tabel 122. Capaian Penerima Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	269
Tabel 123. Capaian Mutu Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	270
Tabel 124. Capaian Penerima Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir ..	271
Tabel 125. Capaian Mutu Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir.....	271
Tabel 126. Capaian Penerima Pelayanan Kesehatan Balita	272
Tabel 127. Capaian Mutu Pelayanan Kesehatan Balita.....	272





Tabel 128. Capaian Penerima Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	273
Tabel 129. Capaian Mutu Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	274
Tabel 130. Capaian Penerima Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif.....	276
Tabel 131. Capaian Mutu Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif ...	276
Tabel 132. Capaian Penerima Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	277
Tabel 133. Capaian Mutu Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	277
Tabel 134. Capaian Penerima Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi.....	278
Tabel 135. Capaian Mutu Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi.....	278
Tabel 136. Capaian Penerima Pelayanan Kesehatan pada Diabetes Melitus.....	279
Tabel 137. Capaian Mutu Pelayanan Kesehatan pada Diabetes Melitus.....	280
Tabel 138. Capaian Penerima Pelayanan Kesehatan pada Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	281
Tabel 139. Capaian Mutu Pelayanan Kesehatan pada Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	281
Tabel 140. Capaian Penerima Pelayanan Kesehatan pada Orang Terduga Tuberkulosis	282
Tabel 141. Capaian Mutu Pelayanan Kesehatan pada Orang Terduga Tuberkulosis	282
Tabel 142. Capaian Penerima Pelayanan Kesehatan pada Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemah Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV).....	284
Tabel 143. Capaian Mutu Pelayanan Kesehatan pada Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemah Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV).....	284
Tabel 144. Alokasi Anggaran Pencapaian SPM Urusan Kesehatan	285
Tabel 145. Jumlah Personil Pendukung Pencapaian SPM Urusan Kesehatan.....	286
Tabel 146. Target Pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum	288
Tabel 147. Realisasi Indeks Pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum	290
Tabel 148. Capaian Penerima Pelayanan Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari.....	291





Tabel 149. Capaian Mutu Layanan Pelayanan Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	291
Tabel 150. Capaian Penerima Pelayanan Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	292
Tabel 151. Capaian Mutu Layanan Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	292
Tabel 152. Alokasi Anggaran Penunjang Pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum	294
Tabel 153. Dukungan Personil Pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum	295
Tabel 154. Target Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat	296
Tabel 155. Realisasi Indeks Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat.....	298
Tabel 156. Capaian Penerima Layanan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana.....	298
Tabel 157. Capaian Mutu Layanan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana.....	299
Tabel 158. Capaian Penerima Layanan Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah	300
Tabel 159. Capaian Mutu Layanan Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah.....	301
Tabel 160. Alokasi Penunjang Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat.....	301
Tabel 161. Dukungan Personil Penunjang Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat.....	303
Tabel 162. Target Pencapaian SPM Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.....	305
Tabel 163. Realisasi Indeks Pencapaian SPM Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.....	308
Tabel 164. Capaian Penerima Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	309
Tabel 165. Capaian Mutu Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	309
Tabel 166. Capaian Penerima Pelayanan Informasi Rawan Bencana ...	311
Tabel 167. Capaian Mutu Layanan Pelayanan Informasi Rawan Bencana.....	311
Tabel 168. Capaian Penerima Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	311
Tabel 169. Capaian Mutu Penerima Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	312





Tabel 170. Capaian Penerima Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	312
Tabel 171. Capaian Mutu Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	312
Tabel 172. Capaian Penerima Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	313
Tabel 173. Capaian Mutu Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	314
Tabel 174. Alokasi Anggaran Penunjang Pencapaian SPM Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	315
Tabel 175. Personil Pendukung Pencapaian SPM Sub Urusan Trantibum	319
Tabel 176. Personil Pendukung Pencapaian SPM Sub Urusan Bencana Daerah	320
Tabel 177. Jumlah Petugas Operasional telah Mengikuti Diklat Kebencanaan	320
Tabel 178. Dukungan Personil Penunjang SPM Sub Urusan Kebakaran	320
Tabel 179. Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Urusan Trantibum Sub Urusan Bencana Daerah	323
Tabel 180. Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Urusan Trantibum Sub Urusan Kebakaran Daerah	324
Tabel 181. Target Pencapaian SPM Urusan Sosial	326
Tabel 182. Realisasi Indeks Pencapaian SPM Urusan Sosial	334
Tabel 183. Capaian Penerima Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti Sosial	335
Tabel 184. Capaian Mutu Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti Sosial	335
Tabel 185. Capaian Penerima Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di luar Panti Sosial	337
Tabel 186. Capaian Mutu Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di luar Panti Sosial	338
Tabel 187. Capaian Penerima Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di luar Panti Sosial	339
Tabel 188. Capaian Mutu Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di luar Panti Sosial	340
Tabel 189. Capaian Penerima Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	342
Tabel 190. Capaian Mutu Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	342





Tabel 191. Capaian Penerima Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana Alam dan Sosial Daerah	344
Tabel 192. Capaian Mutu Layanan Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana Alam dan Sosial Daerah	344
Tabel 193. Alokasi Anggaran Penunjang Urusan Sosial	346
Tabel 194. Dukungan Personil Penunjang SPM Urusan Sosial	347





Daftar Gambar

Gambar 1. Peta Kabupaten Kutai Kartanegara.....	2
Gambar 2. Peta Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yang masuk Wilayah IKN	3
Gambar 3. Perangkat Daerah, Jumlah Layanan dan Total Responden SPAK dan SPKP Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024	120
Gambar 4. Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024.....	120
Gambar 5. Tabulasi Hasil SPAK dan SPKP Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024.....	121
Gambar 6. Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024	130





Daftar Grafik

Grafik 1. Pertumbuhan IPM Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020-2024.....	51
Grafik 2. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020-2024	55
Grafik 3. Pendapatan Per Kapita Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019-2024	56
Grafik 4. Predikat SAKIP	114
Grafik 5. IPAK Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2024	121
Grafik 6. Detail Hasil SPI Per Komponen Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2024.....	123
Grafik 7. Skor Per Dimensi Komponen Internal SPI Kabupaten Kutai Kartanegara 2022-2024.....	124
Grafik 8. <i>Monitoring Center for Prevention</i> KPK Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2021-2023	127
Grafik 9. Perbandingan Hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kab/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2024	136
Grafik 10. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Kutai Kartanegara, 2010 - 2024	142
Grafik 11. Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, 2021 - 2024	143
Grafik 12. Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2010-2024	146
Grafik 13. Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/ Kota Provinsi Kalimantan Timur 2010-2024	147
Grafik 14. Perkembangan Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2010-2024	148
Grafik 15. Harapan Lama Sekolah Kabupaten/ Kota Provinsi Kalimantan Timur 2010-2024	149
Grafik 16. Persentase Penduduk 7-23 tahun Menurut Karakteristik dan Status Pendidikan, 2024.....	150
Grafik 17. Indeks Dimensi IPK Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024	156
Grafik 18. IPK Kabupaten Kutai Kartanegara 2022-2024	157
Grafik 19. Indeks Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara 2010-2024	162
Grafik 20. Perkembangan Angka Harapan Hidup di Kabupaten Kutai Kartanegara 2010-2024.....	163





Grafik 21. Indeks Pembangunan Gender Kab Kutai Kartanegara Tahun 2010-2024	166
Grafik 22. Indeks Gini Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2024	170
Grafik 23. Indeks Gini Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024	170
Grafik 24. Indeks Desa Membangun Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2024	174
Grafik 25. TPT Kab Kutai Kartanegara dan Prov. Kal-tim Tahun 2005 s.d 2024	180
Grafik 26. Perkembangan TPT Kabupaten/ Kota Provinsi Kaltim, 2021-2025.....	181
Grafik 27. PDRB per kapita Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017-2024.....	182
Grafik 28. Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen) Tahun 2021-2023	186
Grafik 29. Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara ke Obyek dan Daya Tarik Wisata di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018-2024	190
Grafik 30. Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Obyek dan Daya Tarik Wisata di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018-2024	191
Grafik 31. Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Obyek dan Daya Tarik Wisata di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018-2024	192
Grafik 32. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kreatif Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018-2024	195
Grafik 33. Target dan Realisasi Investasi PMA dan PMDN Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020-2024.....	199
Grafik 34. Rehabilitasi RTLH Tahun 2020-2024	211
Grafik 35. Perbandingan Kondisi Jalan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020-2024	216
Grafik 36. Persentase Kondisi Jalan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020-2024	217
Grafik 37. Persentase Kondisi Jalan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020-2024	218
Grafik 38. Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara Indeks Kualitas Tutupan Lahan Tahun 2022 – 2024	222
Grafik 40. Indeks Resiko Bencana Kabupaten/ Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2024	229





BAB I

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

1.1.1. Penjelasan Umum

A. Undang-Undang Pembentukan Daerah

Kabupaten Kutai Kartanegara sebelumnya bernama Kabupaten Kutai, dibentuk dan ditetapkan sebagai Daerah Tingkat II Kutai berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan.

Dengan memperhatikan perkembangan jumlah penduduk, luas wilayah serta potensi ekonomi guna menjamin perkembangan dan kemajuan diwilayah Provinsi Kalimantan Timur, wilayah Kabupaten Kutai sebagian dimekarkan menjadi daerah otonomi baru berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang.

Untuk membedakan penyebutan Kabupaten-kabupaten hasil pemekaran Kabupaten Kutai, Kabupaten Kutai berubah nama menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai Menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara.

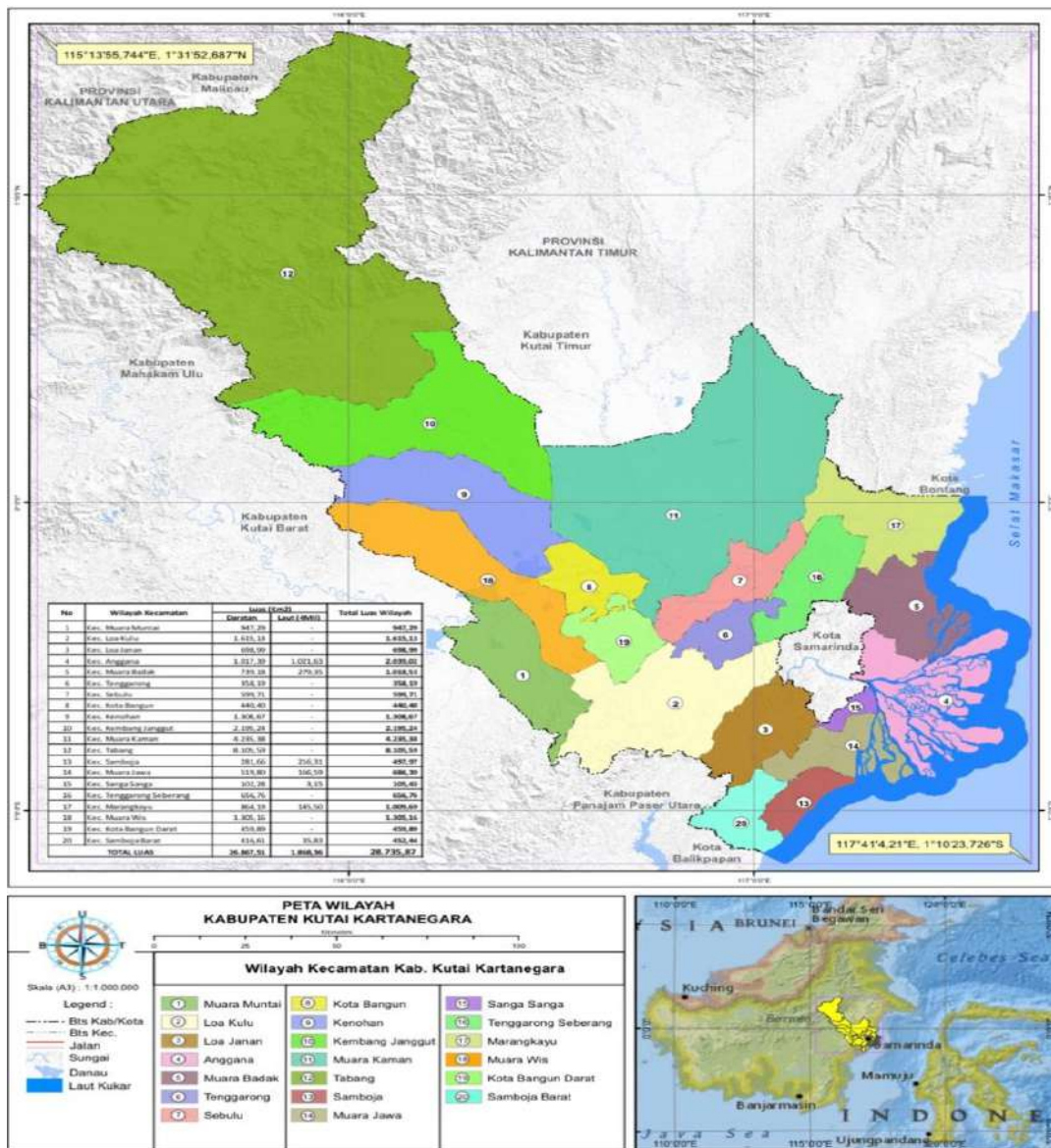
B. Kondisi Geografis

Kabupaten Kutai Kartanegara terletak antara 115⁰ 13'55" Bujur Timur sampai dengan 117⁰ 41'4" Bujur Timur dan 1⁰ 31'52" Lintang Utara sampai dengan 1⁰ 10'23" Lintang Selatan. Berdasarkan validasi perhitungan dari Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 14 September 2021, luas wilayah daratan Kabupaten Kutai Kartanegara ± 26.867,51 km² dan luas wilayah laut ± 1.868,356 km² dengan total luas wilayah ± 28.735,87 km²





Gambar 1. Peta Kabupaten Kutai Kartanegara



Sumber : Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Kukar, 2024

Kabupaten Kutai Kartanegara secara administratif berbatasan dengan Sebelah Utara Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara, Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kutai Timur, Kota Bontang dan Selat Makassar, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kota Balikpapan dan Barat berbatasan dengan Kabupaten Mahakam Ulu dan Kabupaten Kutai Barat.

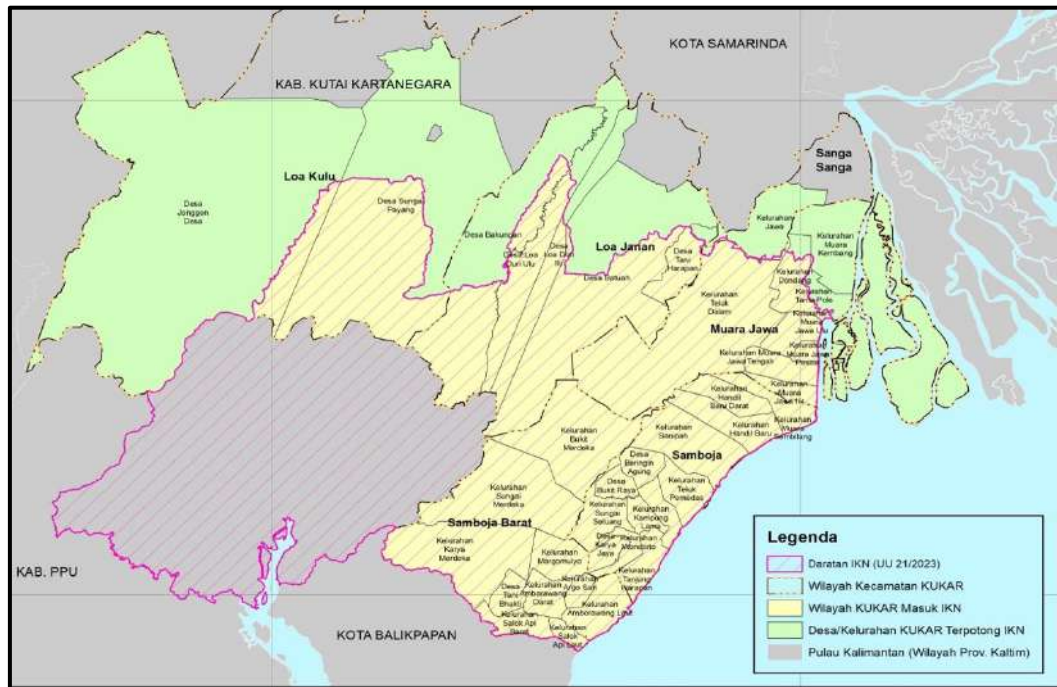
Ditetapkannya Ibu Kota Nusantara di Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sebagaimana diubah pada Undang-Undang Republik





Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, Ibu Kota Negara Nusantara memiliki wilayah daratan seluas ± 252.660 ha dan wilayah lautan ± 69.769 ha yang dimana sebagian besar wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara masuk dalam delineasi wilayah Ibu Kota Negara Nusantara.

Gambar 2. Peta Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yang masuk Wilayah IKN



Terdapat 6 (enam) Kecamatan Kabupaten Kutai Kartanegara yang masuk dalam delineasi wilayah Ibu Kota Negara Nusantara, secara rinci luas wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yang masuk dalam delineasi wilayah Ibu Kota Negara Nusantara sebagai berikut:

Tabel 1. Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara Pasca UU IKN

No	Kecamatan	Kawasan	Luas ($\pm km^2$)	
			Wilayah Diluar UU	Wilayah Masuk UU IKN
1	Tabang	Daratan	8.107	
2	Kembang Janggut	Daratan	2.195	
3	Kenohan	Daratan	1.309	
4	Muara Muntai	Daratan	947	
5	Muara Wis	Daratan	1.305,16	





No	Kecamatan	Kawasan	Luas (±km ²)	
			Wilayah Diluar UU	Wilayah Masuk UU IKN
6	Kota Bangun	Daratan	440	
7	Kota Bangun Darat	Daratan	460	
8	Muara Kaman	Daratan	4.235	
9	Sebulu	Daratan	600	
10	Tenggarong Seberang	Daratan	657	
11	Tenggarong	Daratan	358	
12	Marang Kayu	Daratan	864	
13	Muara Badak	Daratan	739	
14	Anggana	Daratan	1.017,39	
15	Loa Kulu	Daratan	1.365	250
16	Loa Janan	Daratan	321	378
17	Sanga-Sanga	Daratan	101,28	1
18	Muara Jawa	Daratan	222,80	297
19	Samboja	Daratan	-	281,66
20	Samboja Darat	Daratan	-	416,61
			25.290	1.625

Sumber : Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Kukar, 2024

C. Jumlah Penduduk

Berdasarkan hasil pencatatan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, Jumlah penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara Semester II Tahun 2024 sebesar 806.964 jiwa di 20 (dua puluh) wilayah kecamatan. Komposisi diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2. Jumlah Penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024

No	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Total
1	Muara Muntai	11.207	10.313	21.520
2	Loa Kulu	30.160	27.709	57.869
3	Loa Janan	40.950	36.835	77.785
4	Anggana	20.804	18.934	39.738
5	Muara Badak	27.132	25.090	52.222
6	Tenggarong	59.672	56.858	116.530
7	Sebulu	23.175	20.779	43.954
8	Kota Bangun	12.421	11.882	24.303
9	Kenohan	6.718	5.908	12.626
10	Kembang Janggut	14.829	13.296	28.125





No	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Total
11	Muara Kaman	25.312	22.352	47.664
12	Tabang	7.436	6.466	13.902
13	Samboja	22.237	20.492	42.729
14	Muara Jawa	23.439	21.728	45.167
15	Sanga Sanga	11.064	10.396	21.460
16	Tenggarong Seberang	38.493	35.674	74.167
17	Marang Kayu	15.573	14.454	30.027
18	Muara Wis	5.326	4.653	9.979
19	Kota Bangun Darat	7.643	7.095	14.738
20	Samboja Barat	17.153	15.306	32.459
Jumlah Penduduk		420.744	386.220	806.964

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, DKB SMT II 2024

D. Jumlah Kecamatan, Jumlah Perangkat Daerah dan Jumlah Pegawai Pemerintah

Wilayah administrasi di Kabupaten Kutai Kartanegara dibagi menjadi 20 Kecamatan dan 193 Desa dan 44 Kelurahan, berikut ini ditampilkan tabel pembagian luas wilayah per kecamatan dan jumlah desa/kelurahan.

Tabel 3. Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan Desa

No	Kecamatan	Luas Wilayah Daratan (km ²)	Luas Wilayah Laut (km ²)	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan
1	Muara Muntai	947,29	-	13	-
2	Loa Kulu	1.615,13	-	15	-
3	Loa Janan	698,99	-	8	-
4	Anggana	1.017,39	1.021,63	8	-
5	Muara Badak	739,18	279,35	13	-
6	Tenggarong	358,19	-	2	12
7	Sebulu	599,71	-	14	-
8	Kota Bangun	440,40	-	11	-
9	Kenohan	1.308,67	-	9	-
10	Kembang Janggut	2.195,24	-	11	-
11	Muara Kaman	4.235,38	-	20	-
12	Tabang	8.105,59	-	19	-
13	Samboja	281,66	216,31	3	10
14	Muara Jawa	519,80	166,59	-	8
15	Sanga-Sanga	102,28	3,15	-	5
16	Tenggarong Seberang	656,76	-	18	-
17	Marangkayu	864,19	145,50	11	-





No	Kecamatan	Luas Wilayah Daratan (km ²)	Luas Wilayah Laut (km ²)	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan
18	Muara Wis	1.305,16	-	7	-
19	Kota Bangun Darat	459,89	-	10	-
20	Samboja Barat	416,61	-	1	9
Jumlah		26.968,51	1.868,36	193	44

Sumber : Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Kukar, 2024

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 berjumlah sebanyak 56 OPD dan 3 Rumah Sakit Daerah sebagai Organisasi Bersifat Khusus Pelayanan Kesehatan.

Jumlah pegawai di Kabupaten Kutai Kartanegara pada Tahun 2024 terdiri PNS sebanyak 11.309 orang, PPPK sebanyak 3.045 orang dan THL sebanyak 6.766 orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4. Jumlah PNS Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024

No	Nama Perangkat Daerah	Urusan	PNS Laki-laki	PNS Perempuan	Jumlah
1.	Sekretariat Daerah	Pendukung Urusan Pemerintahan	320	199	519
2.	Sekretariat DPRD	Pendukung Urusan Pemerintahan	96	68	164
3.	Inspektorat	Penunjang	56	36	92
4.	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Penunjang	40	13	53
5.	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Pemerintahan Umum	157	111	268
6.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Trantibum Sub Urusan Bencana	95	60	155
7.	Badan Pendapatan Daerah	Penunjang	63	51	114
8.	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	Penunjang	49	23	72
9.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Penunjang	40	13	53





No	Nama Perangkat Daerah	Urusan	PNS Laki-laki	PNS Perempuan	Jumlah
10.	Badan Riset Inovasi Daerah	Penunjang	157	111	268
11.	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	Kearsipan dan Perpustakaan	44	42	86
12.	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Kelautan dan Perikanan	63	35	98
13.	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	Kepemudaan dan Olah Raga	48	29	77
14.	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Adm. Kependudukan dan Pencatatan Sipil	35	30	65
15.	Dinas Kesehatan	Kesehatan	243	564	807
16.	Dinas Ketahanan Pangan	Ketahanan Pangan	26	27	53
17.	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	43	23	66
18.	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	32	32	64
19.	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	85	31	116
20.	Dinas Pariwisata	Pariwisata	86	44	130
21.	Dinas Pekerjaan Umum	Pekerjaan Umum	215	111	326
22.	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	Trantibum Sub Urusan Kebakaran	62	11	73
23.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	53	47	100
24.	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	11	24	35
25.	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	31	37	68
26.	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pendidikan dan Kebudayaan	1.822	2.956	4.778
27.	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	24	25	49
28.	Dinas Perhubungan	Perhubungan	87	31	118
29.	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Perindustrian dan Perdagangan	62	43	105





No	Nama Perangkat Daerah	Urusan	PNS Laki-laki	PNS Perempuan	Jumlah
30.	Dinas Perkebunan	Perkebunan	69	47	116
31.	Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang	Pertanahan Dan Penataan Ruang	39	28	67
32.	Dinas Pertanian Dan Peternakan	Pertanian dan Peternakan	254	134	388
33.	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Perumahan dan Pemukiman	75	82	157
34.	Dinas Sosial	Sosial	49	20	69
35.	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja	Transmigrasi dan Tenaga Kerja	37	27	64
36.	Satuan Polisi Pamong Praja	Trantibum Sub Urusan Trantibumlinmas	124	9	133
37.	Kantor Kecamatan Anggana	Urusan Kewilayahan	18	15	33
38.	Kantor Kecamatan Kembang Janggut	Urusan Kewilayahan	22	6	28
39.	Kantor Kecamatan Kenohan	Urusan Kewilayahan	16	1	17
40.	Kantor Kecamatan Kota Bangun	Urusan Kewilayahan	21	4	25
41.	Kantor Kecamatan Kota Bangun Darat	Urusan Kewilayahan	17		17
42.	Kantor Kecamatan Loa Janan	Urusan Kewilayahan	15	15	30
43.	Kantor Kecamatan Loa Kulu	Urusan Kewilayahan	36	17	53
44.	Kantor Kecamatan Marangkayu	Urusan Kewilayahan	11	11	22
45.	Kantor Kecamatan Muara Badak	Urusan Kewilayahan	13	12	25
46.	Kantor Kecamatan Muara Jawa	Urusan Kewilayahan	33	41	74
47.	Kantor Kecamatan Muara Kaman	Urusan Kewilayahan	50	11	61
48.	Kantor Kecamatan Muara Muntai	Urusan Kewilayahan	26	13	39
49.	Kantor Kecamatan Muara Wis	Urusan Kewilayahan	22	8	30
50.	Kantor Kecamatan Samboja	Urusan Kewilayahan	45	36	81





No	Nama Perangkat Daerah	Urusan	PNS Laki-laki	PNS Perempuan	Jumlah
51.	Kantor Kecamatan Samboja Barat	Urusan Kewilayahan	47	23	70
52.	Kantor Kecamatan Sanga-Sanga	Urusan Kewilayahan	31	17	48
53.	Kantor Kecamatan Sebulu	Urusan Kewilayahan	29	8	37
54.	Kantor Kecamatan Tabang	Urusan Kewilayahan	33	8	41
55.	Kantor Kecamatan Tenggarong	Urusan Kewilayahan	181	154	335
56.	Kantor Kecamatan Tenggarong Seberang	Urusan Kewilayahan	41	14	55
57.	RSUD Aji Muhammad Parikesit Tenggarong	Organisasi Bersifat Khusus Pelayanan Kesehatan	122	167	289
58.	RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja	Organisasi Bersifat Khusus Pelayanan Kesehatan	33	54	87
59.	RSUD Dayaku Raja Kota Bangun	Organisasi Bersifat Khusus Pelayanan Kesehatan	10	12	22
Jumlah			5.559	5.750	11.309

Sumber : BKPSDM Kab. Kutai Kartanegara, 2024

Selain Pegawai Negeri Sipil, dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara juga didukung oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja dan Tenaga Harian Lepas dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. Jumlah PPPK Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024

No	Nama Perangkat Daerah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Dinas Kesehatan	328	1.003	1.331
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	484	1.202	1.686
3	Dinas Pertanian dan Peternakan	20	8	28
Jumlah		832	2.213	3.045

Tabel 6. Jumlah Tenaga Harian Lepas Berdasarkan Perangkat Daerah Tahun 2024

No	Nama Perangkat Daerah	Urusan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Sekretariat Daerah	Pendukung Urusan Pemerintahan	152	128	280





No	Nama Perangkat Daerah	Urusan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
2.	Sekretariat DPRD	Pendukung Urusan Pemerintahan	56	67	123
3.	Inspektorat	Penunjang	18	12	30
4.	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Penunjang	17	15	32
5.	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Pemerintahan Umum	9	11	20
6.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Trantibum Sub Urusan Bencana	45	15	60
7.	Badan Pendapatan Daerah	Penunjang	41	18	59
8.	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	Penunjang	40	14	54
9.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Penunjang	12	4	16
10.	Badan Riset Inovasi Daerah	Penunjang	13	22	35
11.	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	Kearsipan dan Perpustakaan	26	14	40
12.	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Kelautan dan Perikanan	45	19	64
13.	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	Kepemudaan dan Olah Raga	55	19	74
14.	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Adm. Kependudukan dan Pencatatan Sipil	19	19	38
15.	Dinas Kesehatan	Kesehatan	244	443	687
16.	Dinas Ketahanan Pangan	Ketahanan Pangan	11	14	25
17.	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	35	8	43
18.	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	12	13	25
19.	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	41	45	86
20.	Dinas Pariwisata	Pariwisata	51	27	78
21.	Dinas Pekerjaan Umum	Pekerjaan Umum	47	35	82
22.	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	Trantibum Sub Urusan Kebakaran	255	36	291





No	Nama Perangkat Daerah	Urusan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
23.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	26	23	49
24.	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	14	6	20
25.	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	35	19	54
26.	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pendidikan dan Kebudayaan	1150	1978	3128
27.	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	10	9	19
28.	Dinas Perhubungan	Perhubungan	135	86	221
29.	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Perindustrian dan Perdagangan	40	39	79
30.	Dinas Perkebunan	Perkebunan	42	26	68
31.	Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang	Pertanahan Dan Penataan Ruang	34	16	50
32.	Dinas Pertanian Dan Peternakan	Pertanian dan Peternakan	115	92	207
33.	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Perumahan dan Pemukiman	64	64	128
34.	Dinas Sosial	Sosial	11	18	29
35.	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja	Transmigrasi dan Tenaga Kerja	22	15	37
36.	Satuan Polisi Pamong Praja	Trantibum Sub Urusan Trantibumlinmas	217	53	270
37.	Kantor Kecamatan Anggana	Urusan Kewilayahan	4	2	6
38.	Kantor Kecamatan Kembang Janggut	Urusan Kewilayahan	7	3	10
39.	Kantor Kecamatan Kenohan	Urusan Kewilayahan	13	1	14
40.	Kantor Kecamatan Kota Bangun	Urusan Kewilayahan	11	10	21
41.	Kantor Kecamatan Kota Bangun Darat	Urusan Kewilayahan	4	7	11
42.	Kantor Kecamatan Loa Janan	Urusan Kewilayahan	10	7	17
43.	Kantor Kecamatan Loa Kulu	Urusan Kewilayahan	28	12	40





No	Nama Perangkat Daerah	Urusan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
44.	Kantor Kecamatan Marangkayu	Urusan Kewilayahan	8	11	19
45.	Kantor Kecamatan Muara Badak	Urusan Kewilayahan	5	9	14
46.	Kantor Kecamatan Muara Jawa	Urusan Kewilayahan	38	55	93
47.	Kantor Kecamatan Muara Kaman	Urusan Kewilayahan	21	14	35
48.	Kantor Kecamatan Muara Muntai	Urusan Kewilayahan	11	5	16
49.	Kantor Kecamatan Muara Wis	Urusan Kewilayahan	15	4	19
50.	Kantor Kecamatan Samboja	Urusan Kewilayahan	51	41	92
51.	Kantor Kecamatan Samboja Barat	Urusan Kewilayahan	35	21	56
52.	Kantor Kecamatan Sanga-Sanga	Urusan Kewilayahan	15	28	43
53.	Kantor Kecamatan Sebulu	Urusan Kewilayahan	3	7	10
54.	Kantor Kecamatan Tabang	Urusan Kewilayahan	3	10	13
55.	Kantor Kecamatan Tenggarong	Urusan Kewilayahan	99	84	183
56.	Kantor Kecamatan Tenggarong Seberang	Urusan Kewilayahan	3	8	11
57.	RSUD Aji Muhammad Parikesit Tenggarong	Organisasi Bersifat Khusus Pelayanan Kesehatan	100	202	302
58.	RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja	Organisasi Bersifat Khusus Pelayanan Kesehatan	225	328	553
59.	RSUD Dayaku Raja Kota Bangun	Organisasi Bersifat Khusus Pelayanan Kesehatan	111	118	229
Jumlah			3.979	4.429	8.408

E. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pendapatan Daerah terdiri dari 3 (tiga) jenis, yaitu Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 sebesar Rp.12.702.063.635.451,50 atau 88,75% dari target yang telah





ditetapkan sebesar Rp.14.312.025.946.608,00 secara rinci target dan realisasi pendapatan daerah Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 7. Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2024

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pendapatan Asli Daerah	732.901.415.061,00	787.600.170.609,48	107,46%
	Pajak Daerah	160.000.000.000,00	165.870.568.096,40	103,67%
	Retribusi Daerah	7.542.820.000,00	5.879.733.796,00	77,95%
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	32.000.000.000,00	88.383.259.737,59	276,20%
	Lain-lain PAD yang Sah	533.358.595.061,00	527.466.608.979,49	98,90%
2	Pendapatan Transfer	13.329.124.531.547,00	11.833.530.509.534,30	88,78%
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	12.504.259.028.547,00	11.186.675.996.465,30	89,46%
	Dana Perimbangan	12.274.362.955.547,00	10.956.779.923.465,30	89,27%
	Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	0,00%
	Dana Desa	195.105.755.000,00	195.105.755.000,00	100,00%
	Intensif Fiskal	34.790.318.000,00	34.790.318.000,00	100,00%
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	824.865.503.000,00	646.854.513.069,00	78,42%
	Pendapatan Bagi Hasil	766.425.503.000,00	588.414.513.069,00	76,77%
	Bantuan Keuangan	58.440.000.000,00	58.440.000.000,00	100,00%
3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	250.000.000.000,00	80.932.955.307,69	32,37%
	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00%
	Lain-lain Pendapatan Sesuai Ketentuan Perpu	250.000.000.000,00	80.932.955.307,69	32,37%
	Total	14.312.025.946.608,00	12.702.063.635.451,50	88,75%

Sumber : LKPD Kab. Kutai Kartanegara Ta. 2024 Unaudited

Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 sebesar Rp. 12.808.056.939.981,10 88,14% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp.14.531.000.000.000,00 Secara rinci target dan realisasi belanja daerah Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:





Tabel 8. Realisasi Belanja Daerah Tahun 2024

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Operasi	7.308.463.985.598,24	6.241.519.304.899,94	87,20%
	Belanja Pegawai	2.315.252.391.445,96	2.027.620.403.312,00	87,73%
	Belanja Barang dan Jasa	4.673.176.313.252,26	3.942.510.396.024,94	87,10%
	Belanja Subsidi	134.594.500,00	101.040.120,00	75,07%
	Belanja Hibah	293.603.569.400,02	246.099.465.443,00	83,82%
	Belanja Bantuan Sosial	26.297.117.000,00	25.188.000.000,00	95,78%
2	Belanja Modal	6.088.385.154.796,76	5.289.137.808.823,25	87,30%
	Belanja Modal Tanah	69.771.831.992,00	62.606.649.543,00	89,73%
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.485.656.834.108,66	1.276.782.023.180,00	87,71%
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.961.404.549.197,50	1.646.496.068.022,73	83,94%
	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	2.541.849.901.434,60	2.281.781.596.417,52	89,77%
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	11.047.354.497,00	5.811.543.160,00	52,61%
	Belanja Modal Aset Lainnya	18.654.683.567,00	15.659.928.500,00	83,95%
3	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000,00	0,00	0,00%
	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000,00	0,00	0,00%
4	Belanja Transfer	1.124.150.859.605,00	1.119.682.510.459,00	99,60%
	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kab./Kota dan Desa	16.000.000.000,00	16.000.000.000,00	100,00%
	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kab./Kota Kepada Pemerintah Desa	754.282.000,00	754.282.000,00	100,00%
	Belanja Bantuan Keuangan Antar Daerah Kab./Kota	302.828.903,00	0	0,00%
	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kab./Kota Kepada Desa	1.107.093.748.702,00	1.102.928.228.459,00	99,62%
Total		14.531.000.000.000,00	12.808.056.939.981,10	88,14%

Sumber : LKPD Kab. Kutai Kartanegara Ta. 2024 Unaudited





Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Netto Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 sebesar Rp.271.928.787.749,45 atau 124,18% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp.218.974.053.392,00 Pengeluaran Pembiayaan untuk penyertaan modal. Secara rinci target dan realisasi pembiayaan daerah Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 9. Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2024

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Penerimaan Pembiayaan	295.974.053.392,00	295.973.787.749,45	100,00%
	- Sisa lebih perhitungan pembayaran tahun sebelumnya	295.974.053.392,00	295.973.787.749,45	100,00%
2	Pengeluaran Pembiayaan	77.000.000.000,00	24.045.000.000,00	31,23%
	- Penyertaan Modal Daerah	77.000.000.000,00	24.045.000.000,00	31,23%
Pembiayaan Netto		218.974.053.392,00	271.928.787.749,45	124,18%

Sumber : LKPD Kab. Kutai Kartanegara Ta. 2024 Unaudited

F. Pelaksanaan Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan

Pelaksanaan Program dan kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan penjabaran dari setiap urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah.

Urusan Pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota meliputi Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Pelayanan Dasar, Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan. Berikut disampaikan rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2024.

Tabel 10. Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024

No	Urusan Pemerintahan / Bidang Urusan	Nama Program	Alokasi Anggaran Belanja	Realisasi Belanja
I	Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar		8.986.770.371.566	7.542.309.583.048
1	Pendidikan		2.870.311.908.631	2.167.389.396.178





No	Ururan Pemerintahan / Bidang Urusan	Nama Program	Alokasi Anggaran Belanja	Realisasi Belanja
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.432.054.507.561	863.766.260.489
		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	650.000.000	-
		PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	250.000.000	158.234.600
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.437.357.401.070	1.303.464.901.089
2	Kesehatan		2.045.334.803.832	1.778.689.961.207
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	3.619.138.900	2.771.672.235
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	967.478.549.872	865.411.423.482
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	6.022.667.900	4.526.686.672
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.067.586.333.160	905.498.369.818
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	628.114.000	481.809.000
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		3.526.856.441.816	3.116.485.204.987
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	760.212.920.235	655.188.128.672
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	53.737.850.782	44.818.967.081
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	52.929.406.000	49.757.025.631
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	100.360.572.514	87.359.170.864
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	241.991.674.842	214.559.318.510
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	325.980.259.879	261.518.997.749
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1.600.000.000	1.108.968.725
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	422.709.634.124	387.504.205.500
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.562.334.123.440	1.409.865.842.309
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	5.000.000.000	4.804.579.946
4	Perumahan dan Kawasan Permukiman		348.092.830.920	302.904.593.827
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	15.685.660.000	12.496.800.620
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	9.766.497.560	6.636.506.838
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	223.285.524.651	198.794.523.731
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	63.655.148.709	56.999.808.228
		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	35.700.000.000	27.976.954.410
5	Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat			
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	7.661.936.560	5.582.152.472
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	23.838.144.771	22.757.238.414
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	17.871.593.836	16.758.632.913
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	96.643.687.235	88.202.246.692
6	Sosial		50.159.023.965	43.540.156.358
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	7.814.000.000	6.842.546.992





No	Ururan Pemerintahan / Bidang Urusan	Nama Program	Alokasi Anggaran Belanja	Realisasi Belanja
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1.360.000.000	1.139.523.722
		PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	50.000.000	36.448.230
		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	1.862.000.000	1.683.186.782
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	23.200.938.375	19.376.911.008
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	10.572.980.000	9.530.162.652
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	5.299.105.590	4.931.376.972
II	WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		1.196.462.589.644	1.086.732.187.056
1	Tenaga Kerja		51.190.180.033	41.841.445.691
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	11.271.341.700	9.912.045.830
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	16.052.340.000	11.567.169.818
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	8.672.399.000	7.715.264.852
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.094.099.333	12.552.570.451
		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	100.000.000	94.394.740
2	Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak		28.475.488.947	25.227.562.224
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	1.130.000.000	996.002.742
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	9.060.321.884	8.446.174.632
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	250.000.000	230.582.968
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	1.327.816.000	1.162.455.849
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.622.220.063	11.892.156.653
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	1.315.700.000	1.059.752.324
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	1.769.431.000	1.440.437.056
3	Pangan		29.397.030.598	26.331.694.504
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	4.000.000.000	3.524.499.993
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	300.000.000	291.608.878
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	6.250.000.000	5.903.265.035
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	6.354.793.136	6.003.391.014
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.492.237.462	10.608.929.584
4	Pertanahan		45.154.065.618	37.728.368.175
		PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	1.150.000.000	1.075.967.600
		PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	125.000.000	30.786.000
		PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	491.989.000	382.476.272
		PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	824.799.664	726.799.154
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.783.911.954	13.932.851.573
		PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	25.328.365.000	20.608.195.852
		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	500.000.000	457.048.950
		PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	950.000.000	514.242.774





No	Ururan Pemerintahan / Bidang Urusan	Nama Program	Alokasi Anggaran Belanja	Realisasi Belanja
5	Lingkungan Hidup		122.345.770.404	111.662.795.429
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	491.770.940	442.788.873
		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	288.000.000	202.141.600
		PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	75.000.000	20.532.000
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	2.387.501.719	1.630.927.842
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	87.391.180.586	81.963.366.542
		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	375.000.000	340.730.367
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	3.767.991.447	3.263.366.778
		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	650.000.000	439.399.380
		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	342.000.000	308.120.097
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	25.667.716.652	22.246.075.197
		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	909.609.060	805.346.753
6	Kependudukan dan Pencatatan Sipil		21.207.163.978	17.785.325.873
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	828.579.610	761.254.509
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	1.280.000.000	1.052.601.428
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	625.000.000	294.117.135
		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	160.000.000	91.605.760
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18.313.584.368	15.585.747.041
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		173.096.573.391	164.101.188.370
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	30.767.536.174	29.743.504.397
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	51.348.458.500	46.637.289.811
		PROGRAM PENATAAN DESA	59.691.837.000	59.295.587.641
		PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	808.510.650	740.960.084
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	30.480.231.067	27.683.846.437
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		34.505.040.734	29.745.372.305
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	7.171.450.000	6.701.445.140
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	10.473.414.000	8.880.592.960
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	4.273.701.000	3.672.498.148
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.586.475.734	10.490.836.057
9	Perhubungan		216.805.081.451	207.355.119.036
		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	20.425.000.000	19.046.457.821
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	54.591.563.573	48.576.523.927





No	Ururan Pemerintahan / Bidang Urusan	Nama Program	Alokasi Anggaran Belanja	Realisasi Belanja
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	141.788.517.878	139.732.137.288
10	Komunikasi dan Informatika		215.911.558.580	206.435.383.915
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	108.824.352.470	104.602.759.325
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	80.600.357.336	78.527.739.629
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	26.486.848.774	23.304.884.961
11	Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah		30.625.226.877	25.547.124.663
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	805.000.000	554.294.557
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.805.000.000	2.212.767.022
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	779.002.800	516.198.000
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	575.000.000	365.389.825
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	8.020.000.000	7.475.774.522
		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	320.000.000	216.770.676
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	17.321.224.077	14.205.930.061
12	Penanaman Modal		23.352.398.850	19.384.925.473
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	894.053.636	828.794.837
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	2.542.853.000	799.508.254
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	1.150.000.000	1.148.040.385
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	1.229.923.000	876.932.873
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.453.909.214	14.653.713.106
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	1.081.660.000	1.077.936.018
13	Kepemudaan dan Olahraga		112.323.381.298	104.813.064.130
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	53.079.916.085	49.921.386.914
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	14.988.540.000	14.190.169.975
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	4.278.263.900	4.105.562.114
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	39.976.661.313	36.595.945.127
14	Statistik		2.300.000.000	1.947.244.470
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	2.300.000.000	1.947.244.470
15	Persandian		1.050.000.000	1.009.529.849
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	1.050.000.000	1.009.529.849
16	Kebudayaan		55.056.328.000	35.312.937.948
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	2.349.428.000	1.152.995.764
		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	850.000.000	623.004.948
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	46.206.900.000	31.342.574.312
		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	5.650.000.000	2.194.362.924





No	Urusan Pemerintahan / Bidang Urusan	Nama Program	Alokasi Anggaran Belanja	Realisasi Belanja
17	Perpustakaan		31.392.300.885	28.448.045.193
		PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	530.000.000	524.340.700
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	8.707.000.000	7.842.165.270
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	22.155.300.885	20.081.539.223
18	Kearsipan		2.275.000.000	2.055.059.808
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	1.275.000.000	1.195.431.862
		PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	75.000.000	42.314.000
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	925.000.000	817.313.946
III	Urusan Pemerintahan Pilihan		1.122.466.877.382	984.113.437.635
1	Kelautan dan Perikanan		580.901.792.188	523.350.683.842
		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	20.577.163.050	19.573.376.805
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	354.419.927.378	318.826.289.000
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	166.478.317.750	150.754.899.262
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	9.752.896.650	8.868.244.466
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	29.673.487.360	25.327.874.309
2	Pariwisata		144.468.720.958	112.872.530.373
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	37.211.500.798	36.083.821.519
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	7.085.471.000	6.084.644.151
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	22.729.749.000	21.849.139.935
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	51.419.780.000	27.267.201.549
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	26.022.220.160	21.587.723.219
3	Pertanian		299.594.430.631	260.472.095.589
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	2.168.219.454	1.817.746.165
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	1.737.300.000	1.628.404.184
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	120.321.653.336	99.965.173.467
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	73.389.229.139	66.509.449.225
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	80.483.750.052	71.622.278.154
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	20.794.278.650	18.523.844.957
		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	700.000.000	405.199.437
4	Kehutanan		347.000.000	50.156.203
		PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	347.000.000	50.156.203
5	Perdagangan		21.583.581.999	19.578.758.843
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	2.130.000.000	1.809.541.722
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	15.678.581.999	14.525.954.261
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	150.000.000	145.633.000





No	Ururan Pemerintahan / Bidang Urusan	Nama Program	Alokasi Anggaran Belanja	Realisasi Belanja
		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	325.000.000	306.458.000
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	2.800.000.000	2.353.896.555
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	500.000.000	437.275.305
6	Perindustrian			
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	900.000.000	398.455.260
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	28.772.622.606	24.703.398.402
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	44.498.729.000	41.738.354.023
7	Transmigrasi		1.400.000.000	949.005.100
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	300.000.000	284.095.500
		PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	1.100.000.000	664.909.600
IV	Pendukung Urusan Pemerintah		566.887.789.516	499.575.846.381
1	Sekretariat Daerah		348.001.937.943	299.683.344.605
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	139.007.137.830	115.578.401.524
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	200.722.413.728	176.232.547.498
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	8.272.386.385	7.872.395.583
2	Sekretariat DPRD		218.885.851.573	199.892.501.776
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	70.626.202.232	60.499.809.296
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	148.259.649.341	139.392.692.480
V	Penunjang Urusan Pemerintahan		1.412.432.837.747	1.353.056.067.244
1	Perencanaan		43.692.331.850	36.834.723.365
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	6.569.655.033	4.540.589.988
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	30.917.194.267	26.812.351.921
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	6.205.482.550	5.481.781.456
2	Keuangan		1.297.403.246.014	1.255.470.861.454
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	31.368.970.462	27.312.201.201
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1.143.386.466.941	1.126.881.333.634
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	7.066.776.000	6.248.208.259
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	115.581.032.611	95.029.118.360
3	Kepegawaian		25.904.721.696	20.440.701.356
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	8.390.011.000	5.882.729.974
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	17.514.710.696	14.557.971.382
4	Pendidikan dan Pelatihan		9.992.168.000	8.273.846.996
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	9.992.168.000	8.273.846.996
5	Pelatihan dan Pengembangan		35.440.370.187	32.035.934.073
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	19.534.210.438	18.640.046.291





No	Urusan Pemerintahan / Bidang Urusan	Nama Program	Alokasi Anggaran Belanja	Realisasi Belanja
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.906.159.749	13.395.887.782
VI	Pengawasan Urusan Pemerintahan		74.186.558.938	53.536.468.326
1	Inspektorat		74.186.558.938	53.536.468.326
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	58.686.558.938	47.078.757.984
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	11.500.000.000	4.808.467.577
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	4.000.000.000	1.649.242.765
VII	Urusan Kewilayahan		1.064.953.718.621	1.012.903.466.875
1	Kecamatan		1.064.953.718.621	1.012.903.466.875
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	50.000.000	49.580.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	134.506.470.723	130.632.744.643
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	1.482.000.029	1.353.352.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	218.914.587.110	184.794.706.554
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	702.976.781.458	689.727.337.502
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	7.023.879.301	6.345.746.176
VIII	Urusan Pemerintahan Umum		106.839.256.579	97.809.038.637
1	Kesatuan Bangsa dan Politik		106.839.256.579	97.809.038.637
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	700.000.000	599.540.000
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	2.603.122.200	2.093.162.395
		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	8.778.680.000	7.093.473.122
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	3.063.010.000	2.715.249.193
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	75.135.281.911	70.936.300.063
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.559.162.468	14.371.313.864

Sumber: LRA Kabupaten Kutai Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2024 *Unaudited*

1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah

A. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Dalam perumusan perencanaan kebijakan pembangunan lima tahun, permasalahan pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki urgensi vital dalam menyusun setiap tahapan kebijakan agar relevan dan mampu secara optimal mencapai visi pembangunan yang diharapkan. Permasalahan yang dirumuskan harus mampu menggambarkan setiap detail kondisi Kutai Kartanegara sehingga setiap kebijakan yang dirumuskan relevan dengan penyelesaian permasalahan pembangunan.





Setelah menelaah kajian data dan informasi pada gambaran umum kondisi daerah serta menelaah hasil analisis permasalahan pembangunan daerah pada masing-masing bidang urusan sesuai dengan kondisi objektif daerah, diperoleh gambaran permasalahan utama pembangunan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, yakni: *“Belum Optimalnya Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat Kutai Kartanegara”*.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Permasalahan utama pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam 6 (enam) pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Belum optimalnya perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik;
2. Belum optimalnya pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia;
3. Belum meratanya kualitas kesejahteraan masyarakat;
4. Belum optimalnya pembangunan perekonomian daerah;
5. Belum optimalnya pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah;
6. Tingginya potensi penurunan kualitas lingkungan hidup.

B. Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Dengan mempertimbangkan hasil pelaksanaan pembangunan periode sebelumnya, potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara, maka Visi yang hendak dicapai dalam periode 2021–2026 adalah:

***“Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang
Sejahtera dan Berbahagia”***

Visi tersebut mengandung dua elemen utama pembangunan yang ingin diwujudkan oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih yaitu masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Masyarakat yang Berbahagia. Adapun penjelasan dari masing-masing elemen visi di atas ada sebagai berikut:





Masyarakat yang Sejahtera, kondisi masyarakat Kutai Kartanegara yang mudah mengakses hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, pangan, dan sumber daya ekonomi secara adil dan berkesinambungan. Diharapkan dari kemudahan mendapatkan kebutuhan dasar masyarakat dan akses terhadap sumber daya ekonomi maka masyarakat semakin sejahtera.

Masyarakat yang Berbahagia, Kondisi masyarakat Kutai Kartanegara yang harmoni, hidup dengan penuh ketenteraman diselimuti rasa kebersamaan, kepedulian, dan gotong-royong berlandaskan iman dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Diharapkan dari menjaga keharmonisan dan peningkatan terhadap pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat membuat warga Kabupaten Kutai Kartanegara semakin berbahagia.

Selain Visi dan Misi, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara merumuskan filosofi pembangunan tahun 2021-2026 yaitu **KUKAR IDAMAN**. Idaman secara etimologi berarti sesuatu yang diharapkan, yang didambakan, yang dicita-citakan. Sedangkan secara terminologi merupakan untuk akronim dari Inovatif, Daya saing dan Mandiri (Idaman). Kukar Idaman adalah satu gerakan yang mengoptimalkan seluruh potensi daerah, dengan mendorong kreativitas dan inovasi seluruh pelaku pembangunan dalam menciptakan daya saing dan kemandirian daerah yang didasari semangat kolaborasi dan sinergisitas antara pemerintah kabupaten, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat untuk mewujudkan Kutai Kartanegara yang lebih baik.

Memperhatikan visi serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, maka dalam upaya mewujudkan Visi pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026, Misi pembangunan sebagai berikut:

1. Memantapkan birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani;
2. Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul dan Berbudaya;





3. Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
4. Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas antar Wilayah;
5. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan.

Penjelasan masing-masing dari misi di atas diuraikan sebagai berikut:

Misi 1: Memantapkan birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani.

Birokrasi merupakan sistem pemerintahan yang dijalankan berpegang teguh pada hierarki dan jenjang jabatan. Birokrasi yang bersih, efektif, efisien dan melayani di Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia. Program prioritas dalam misi pertama yang dirumuskan adalah Program Digitalisasi Pelayanan Publik (DISAPA), program ASN Bahagia, serta Program Kukar Bebaya, dimana program tersebut merupakan program dedikasi KUKAR IDAMAN yang dicetuskan Bupati terpilih di masa kampanye.

Misi 2: Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul dan Berbudaya.

Misi kedua dari Visi Bupati terpilih fokus pada pembangunan sumber daya manusia. Di era modern ini, sumber daya manusia yang berakhlak mulia, unggul dan berbudaya merupakan aset bagi daerah. Hal ini dikarenakan sumber daya manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi perangkat daerah sebagai penggerak, pemikir dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi pemerintah tersebut. Sehingga semakin berkualitas SDM maka tujuan pembangunan dapat tercapai. Adapun program dedikasi KUKARIDAMAN antara lain, Program 1000 Guru Sarjana, Program KUKAR BERKAH, program beasiswa KUKAR IDAMAN, Program Keluarga Peduli Kesehatan, Program Kukar Siap Kerja, Program Kukar Berbudaya, Program Gerakan Etam Mengaji IDAMAN (GEMA IDAMAN) serta Program Kesejahteraan Sosial.





Misi 3: Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Misi ketiga adalah Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Penguatan pembangunan ekonomi diharapkan dapat dicapai melalui peningkatan kemandirian dan inovasi ekonomi kerakyatan, yang bertumpu pada upaya mendorong usaha-usaha yang mengurangi ketergantungan pada pemanfaatan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui (*non-renewable resources*), dan mengalihkannya secara bertahap kepada pemanfaatan sumberdaya yang dapat diperbaharui (*renewableresources*). Program yang mendukung misi ketiga sebagai program dedikasi KUKAR IDAMAN antara lain: Program Pembangunan Pertanian Berbasis Kawasan, Program Hilirisasi Produk Pertanian, Program Kutai Kartanegara Kaya Festival (K3F), Program Usaha Kecil IDAMAN dan Program Kukar Kreatif IDAMAN.

Misi 4: Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas antar Wilayah

Akses terhadap infrastruktur, baik infrastruktur permukiman, air bersih, listrik ataupun fasilitas lainnya dapat menjadi indikator kemampuan pemerintah daerah dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Seiring dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk, maka semakin meningkat pula kebutuhan-kebutuhan baik berupa kebutuhan jalan dalam kondisi baik, permukiman yang layak, akses terhadap air bersih, energi listrik untuk penerangan dan lain-lain. Rencana program yang dibuat sebagai program dedikasi KUKAR IDAMAN dalam mendukung misi keempat antara lain: Program Pemantapan Konektivitas Wilayah, Program Fasilitasi Perumahan Rakyat, Program Air Bersih Desa, dan Program Klik Kampungku.

Misi 5: Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan

Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki potensi sumber daya alam (SDA) yang sangat melimpah. Kegiatan-kegiatan pemanfaatan SDA selain menimbulkan dampak positif bagi perekonomian dan pendapatan Kabupaten Kutai Kartanegara juga dapat menimbulkan dampak negatif berupa kerusakan lingkungan dan bencana alam. serta semakin luasnya





lahan-lahan yang tidak produktif (lahan kritis) Pengelolaan SDA perlu mendapat perhatian yang mendalam khususnya dalam pemanfaatan dan upaya perlindungannya dari kerusakan lingkungan hidup. Program yang diusulkan untuk mendukung misi kelima sebagai program dedikasi KUKAR IDAMAN antara lain: Program Desa Ramah Lingkungan, Program Kukar Peduli Lingkungan dan Program Dunia Usaha Ramah Lingkungan.

Berdasarkan visi dan misi sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka arahan tujuan pembangunan dan indikator tujuan yang kemudian menjadi indikator makro pembangunan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara selama 5 (lima) tahun ke depan.

Indikator makro pembangunan merupakan indikator yang mengindikasikan terkait keberhasilan pembangunan secara umum yang dapat diperbandingkan secara nasional sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Penetapan target indikator pembangunan ini diharapkan mampu memotret pencapaian visi dan misi kepala daerah dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Target kinerja makro penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 11. Indikator Tujuan Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026

Indikator	Kondisi Awal	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Target 2026
Indeks Pembangunan Manusia	73,59	75,34	75,85	76	76,2	76,59
Angka Kemiskinan	7,35	6,90	6,50	6,45	6,4	6,35
Angka Pengangguran	5,2	4,94	4,65	4,4	4,25	4,1
Pertumbuhan Ekonomi	1,5	1,06	1,38	1,89	2,4	3
Pendapatan Perkapita	188,64	187,21	191,44	197,62	202,16	204,69
Ketimpangan Pendapatan	0,29	0,290	0,290	0,290	0,290	0,80

Sumber : Perda No. 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026

C. Program Pembangunan Daerah berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

Perumusan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan





program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan.

Sebagai tindaklanjut dalam pelaksanaan strategi dan arah kebijakan maka dilaksanakan melalui program prioritas yang mempunyai keterkaitan langsung dalam mencapai tujuan dan sasaran. Pada pembangunan tahun 2024, Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki kebijakan dan program prioritas yang dijabarkan sebagai berikut:





Tabel 12. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan, Urusan dan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026

Visi / Misi / Tujuan / Sasaran / Strategi	Arah Kebijakan	Urusan	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja					Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2022	2023	2024	2025	2026		
							K	K	K	K	K	K	
Visi: "Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia"													
Misi 1: Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani													
Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien , inovatif, akuntabel, bersih dan melayani				Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	BB (60,95)	BB (62,00)	BB (63,00)	BB (64,00)	BB (65,00)	BB (70,02)	BB (70,02)	
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah				Nilai Sakip	Nilai	B (65,89)	B (66,89)	BB (70)	BB (73)	BB (77)	A (80,01)	A (80,01)	
Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi Perangkat Daerah	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Persen	76	77	78	79	80	81	81	Sekretariat Daerah
				Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Kegiatan Kepala Daerah/Pimpinan	Persen	83	87	92	96	98	100	100	
				Persentase nilai Sakip perangkat daerah predikat BB dan A	Persen	50	60	70	80	90	100	100	
		Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Perencanaan	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Pelaksanaan rekomendasi kebijakan pada sasaran daerah	Persen	n/a	100	100	100	100	100	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				Persentase pelaksanaan rekomendasi kebijakan bidang sosial budaya dan pemerintahan pada Renja-PD	Persen	n/a	100	100	100	100	100	100	
			Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pelaksanaan rekomendasi kebijakan bidang ekonomi dan Sumber Daya Alam pada Renja-PD	Persen	n/a	100	100	100	100	100	100	
				Persentase pelaksanaan rekomendasi kebijakan bidang Sarana dan Prasarana pada Renja-PD	Persen	n/a	100	100	100	100	100	100	
		Unsur Penunjang Urusan Pemerintah Kepegawaian	Program Kepegawaian Daerah	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan ASN Kab.	Persen	91.5	92	93	94	95	96	96	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
		Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah				Indeks Persepsi Anti Korupsi	Nilai	5.93	6,25	6,50	6.75	6.80	7.00
Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penataan manajemen keuangan dan aset daerah	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Keuangan	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Konsistensi Perencanaan dengan Panganggaran	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
				Persentase pengelola keuangan Perangkat Daerah mendapatkan pembinaan penatausahaan	Persen	90	100	100	100	100	100	100	





Visi / Misi / Tujuan / Sasaran / Strategi	Arah Kebijakan	Urusan	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja					Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2022	2023	2024	2025	2026		
							K	K	K	K	K	K	
				keuangan									
			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tingkat pemenuhan peraturan dan pedoman pengelolaan BMD sesuai Permendagri 19/2016	Persen	75	100	100	100	100	100	100	
				Persentase Perangkat Daerah melaksanakan perencanaan dan penatausahaan BMD sesuai ketentuan	Persen	85	100	100	100	100	100	100	
				Persentase Perangkat Daerah yang aktif melakukan rekonsiliasi laporan BMD	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
				Persentase pengelola BMD Perangkat Daerah mendapatkan pembinaan penatausahaan BMD	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
		Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Cakupan Penyelenggaraan Pengawasan	Persen	90	96	96	96	97	97	97	Inspektorat
			Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan SPIP	Persen	45	55	65	75	85	100	100	
Meningkatnya kualitas pelayanan Publik				Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik	Nilai	8.5	8.85	8.90	8.95	9.00	9.05	9.05	
Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Peningkatan jangkauan dan mutu Layanan pemerintahan dan layanan publik yang lebih baik, cepat, mudah, murah, dan bermutu berbasis IT	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Cakupan Aplikasi yang dikelola OPD	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan KTP-EL	Persen	97.97	99	99	99	99	99	99
		Persentase Kepemilikan KIA			Persen	20	50	70	90	99	99	99	
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Persentase Layanan Informasi dan Inovasi Adminduk	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
		Program Pengelolaan Profil Kependudukan		Persentase Penyediaan Data Kependudukan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
		Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Jumlah Aplikasi	Aplikasi	3	3	3	3	3	3	3	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu





Visi / Misi / Tujuan / Sasaran / Strategi	Arah Kebijakan	Urusan	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja					Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2022	2023	2024	2025	2026		
							K	K	K	K	K		
Misi: 2 Meningkatnya Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia, Unggul dan Berbudaya													
Meningkatkan kualitas pembangunan manusia yang berdaya saing				Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	7.59	75.34	75.85	76.00	76.20	76.59	76.59	
Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan, Ketahanan Sosial dan Pelestarian Kebudayaan				Indeks Pendidikan	Nilai	0.085	0.693	0.697	0.700	0.704	0.706	0.706	
				Indeks Pembangunan Kebudayaan	Nilai	n/a	50.00	50.00	51.00	51.50	53.00	53.00	
Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil	Peningkatan jangkauan dan akses layanan pendidikan yang bermutu	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Capaian Indeks Mutu Pendidikan (IMP) SD (Angka Indeks Max 7)	Persen	84.43	85.86	87	88.43	89.71	89.71	89.71	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Capaian Indeks Mutu Pendidikan (IMP) SMP (Angka Indeks Max 7)	Persen	84.43	85.86	87	88.43	89.71	89.71	89.71	
				Capaian Indeks Mutu Pendidikan (IMP) PAUD (Angka Indeks Max 100)	Persen	72.92	78.72	80.6	82.02	83.02	83.92	83.92	
				Capaian Indeks Mutu Pendidikan (IMP) Kesetaraan (Angka Indeks Max 100)	Persen	62.28	64.08	65.98	65.98	68.38	68.38	68.38	
				Jumlah Bantuan Beasiswa Stimulan Kukar IDAMAN Pendidikan Dasar	Orang	0	3000	3000	3000	3000	3000	15000	
			Program Pengembangan Kurikulum	Persentase Satuan Pendidikan yang Melaksanakan kurikulum Muatan Lokal (MuLok)	Persen	0	0	0	0	0	0	0	
			Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Memiliki Izin Pendirian dan Operasional	Persen	10	10	10	10	10	10	10	
	Penguatan modal sosial budaya, solidaritas sosial dan ketahanan sosial dalam kehidupan kemasyarakatan	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	Program Pengembangan Kebudayaan	Jumlah Pelaksanaan Event Budaya di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara	Event	2	2	2	2	2	2	2	Dinas Sosial
				Persentase Desa Budaya Yang Aktif (Existing 5 Desa Budaya	Persen	10	10	10	10	10	10	10	
		Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS Yang Berperan Dalam Usaha Kesejahteraan Sosial	Persen	20	20	20	20	20	20	20	
			Program Rehabilitasi Sosial	Persentase (%) Penyandang Distabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Dan Gelandangan Pengemis Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Di Luar Panti (Indikator Spm)	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
			Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase Pmks Yang Memperoleh Layanan Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persen	77	80	85	90	95	100	100	





Visi / Misi / Tujuan / Sasaran / Strategi	Arah Kebijakan	Urusan	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja					Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2022	2023	2024	2025	2026		
							K	K	K	K	K		
				Cakupan Layanan Jaminan Sosial Bagi Masyarakat Miskin Non Potensial	Persen	n/a	100	100	100	100	100	100	
		Urusan Sekretariat Daerah	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kebijakan Tata Pemerintahan Yang Ditindaklanjuti	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Sekretariat Daerah
				Persentase Rumusan kebijakan bidang kesra yang diimplementasikan	Persen	85	100	100	100	100	100	100	
				Persentase Regulasi Daerah (PERDA dan PERBUP)	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
				Persentase Kerja sama yang di tindak lanjuti	Persen	75	80	85	90	90	90	90	
Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat				Indeks Kesehatan	Nilai	0.805	0,811	0,814	0,817	0.821	0.824	0.824	
Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil	Peningkatan jangkauan dan akses layanan kesehatan yang bermutu	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Presentasi Balita Sunting	Persen	16.19	15.6	15.1	14.6	14.1	13.8	13.8	Dinas Kesehatan
				Indeks Keluarga sehat	Persen	0.21	0.25	0.3	0.35	0.4	0.5	0.5	
				Indeks Pelayanan kesehatan reproduksi	Persen	0.72	0.73	0.74	0.75	0.76	0.77	0.77	
				Indeks Pelayanan kesehatan balita	Persen	0.73	0.74	0.75	0.76	0.77	0.78	0.78	
				Indeks Pelayanan Penyakit Menular	Persen	0.55	0.57	0.59	0.61	0.63	0.65	0.65	
				Indeks Pelayanan penyakit tidak menular	Persen	0.44	0.46	0.48	0.5	0.52	0.54	0.54	
				Indeks Pelayanan Kesehatan lingkungan	Persen	0.85	0.86	0.87	0.88	0.89	0.9	0.9	
				Indeks Pelayanan Kesehatan Primer	Persen	0.34	0.36	0.38	0.4	0.43	0.45	0.45	
				Indeks Perilaku kesehatan	Persen	0.44	0.45	0.46	0.47	0.48	0.49	0.49	
				Persentase Puskesmas Akreditasi Paripurna dan Utama	Persen	18,75	21,88	25	28,13	31,25	34,38	34,38	
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase SDM yang Terlatih Sesuai Kompetensinya	Persen	68	68	70	75	80	85	85	
	Promosi dan penerapan perilaku hidup bersih, sehat, aman dan produktif	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Capaian RTPHBS	Persen	26	30	32	34	36	40	40	
Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan				Indeks Pembangunan Gender	Nilai	78.9	79	79,05	79,1	79,15	79,2	79,2	
Pengembangan sumber daya manusia yang	Peningkatan keterampilan perempuan dan	Urusan Pemerintahan Bidang	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Cakupan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik,	Persen	8.48	12.18	15.74	19.31	22.92	26.49	26.49	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan





Visi / Misi / Tujuan / Sasaran / Strategi	Arah Kebijakan	Urusan	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja					Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2022	2023	2024	2025	2026		
							K	K	K	K	K	K	
sehat, produktif, terampil	pemenuhan hak-hak anak	Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak		Hukum, Sosial, Ekonomi dan Organisasi Kemasyarakatan								Perlindungan Anak	
			Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Capaian Nilai Kabupaten Layak Anak	Nilai	710	730	750	770	790	810		810
			Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	Persen	97.78	100	100	100	100	100		100
Meningkatkan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat				Tingkat Kebahagiaan	Nilai	n/a	71	72	73	74	75	75	
				Tingkat Kemiskinan	Persen	7.35	6,9	6,5	6,45	6,4	6,35	6,35	
Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat dan kualitas hidup masyarakat				Indeks Gini	Nilai	0.290	0,29	0,28	0,28	0,27	0,27	0,27	
				Indeks Desa Membangun	Nilai	0.685	0,705	0,725	0,745	0,765	0,785	0,785	
Percepatan pembangunan desa dan kawasan perdesaan	Percepatan pembangunan desa sebagai basis produksi pangan dan pemberdayaan masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan masyarakat hukum adat	Persentase Posyandu Aktif	Persen	39	45.22	51.51	57.79	64.07	70.35	70.35	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
			Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa Tertib Administrasi Pemerintahan Dalam Kategori Baik	Persen	16	50	70	80	90	95	95	
				Pertumbuhan Pendapatan BUMDesa	Persen	n/a	10	10	10	10	10	50	
		Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Kecukupan Konsumsi Energi	Persen	1971	2050	2150	2175	2200	2225	2225	
		Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Penataan Desa	Kecukupan Konsumsi Protein	Persen	54.7	55.5	57	57.1	57.2	57.25	57.25	
	Program Peningkatan Kerja sama Desa		Persentase Desa yang memiliki Tata Ruang Desa	Persen	n/a	1.55	5.18	10.36	25.91	38.86	38.86		
			Persentase Realisasi Kesepakatan Kerja sama Desa	Persen	n/a	100	100	100	100	100	100		
	Menurunnya Pangangguran di masyarakat				Tingkat Pangangguran Terbuka	Persen	5.20	4,94	4,65	4,4	4,25	4,1	
PDRB per Kapita					Rp. (Juta)	188.64	187,21	191,44	197,62	202,16	204,69	204,69	
Peningkatan kapasitas dan kompetensi angkatan kerja	Pengembangan kewirausahaan dan manajemen bisnis bagi kaum muda	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Pengembangan Kepemudaan	Persen	36.47	71.95	74.39	76.83	79.27	81.71	81.71	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
		Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Persen	8.98	12.82	16.66	20.5	24.34	28.19	28.19	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
				Penyediaan Pusat Latihan Tenaga Kerja KUKAR IDAMAN	Unit	n/a	1	2	3	3	3	3	





Visi / Misi / Tujuan / Sasaran / Strategi	Arah Kebijakan	Urusan	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja					Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							2022	2023	2024	2025	2026				
							K	K	K	K	K			K	
Misi 3: Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif															
Meningkatkan Perekonomian Daerah Berbasis Pada Sektor Terbarukan				Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Non Migas dan Batu Bara	Persen	0.62	3,74	5,46	5,81	5,72	5,89	5,89			
Meningkatnya pengelolaan pertanian berbasis potensi unggulan daerah				Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Persen	0.21	5,69	6,15	6,6	7,05	7,5	7,5			
Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan	Peningkatan Produktivitas nilai tambah dan pendapatan dari pertanian, perkebunan, peternakan dan kehutanan	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Luas Tanam Padi	Hektar (Ha)	38,706.00	39,867.18	40,254.24	40,641.30	41,802.48	42,576.60	42,576.60	Dinas Pertanian dan Peternakan		
				Luas Tanam Jagung	Hektar (Ha)	2878	3000	7500	13000	20000	30000	30000			
				Luas Tanam Palawija	Hektar (Ha)	14	25	35	45	55	65	65			
				Luas Tanam Hortikultura	Hektar (Ha)	23,449.03	26,197.87	26,987.26	27,781.65	29,278.24	30,200.81	30,200.81			
				Peningkatan Populasi Ternak Besar	Ekor	33576	34416	35275	36157	37061	37988	37988			
				Peningkatan Populasi Ternak Kecil	Ekor	17115	17551	17990	18441	18900	19375	19375			
						Peningkatan Populasi Ternak Unggas	Ekor	15534000	15999000	16480000	16975000	17483000	18009000	18009000	
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Luas Areal Kelapa Sawit Rakyat	Hektar (Ha)	28516	28570	28645	28720	28795	28880	28880	Dinas Perkebunan		
				Luas Areal Kelapa Sawit PBS	Hektar (Ha)	190797	214116	237435	268526	307390	346255	346255			
				Luas Areal Karet	Hektar (Ha)	17833	17898	17928	17958	17988	18033	18033			
				Luas Areal Lada	Hektar (Ha)	3375	3402	3412	3427	3442	3452	3452			
				Luas Areal Kelapa Dalam	Hektar (Ha)	7261	7286	7291	7301	7306	7311	7311			
				Luas Areal Kopi	Hektar (Ha)	72	78	89	110	115	125	125			
				Luas Areal Kakao	Hektar (Ha)	70	80	85	95	95	100	100			
				Luas Areal Aren	Hektar (Ha)	237	237	243	248	248	253	253			
				Luas Areal Kelor	Hektar (Ha)	2	5	7	9	9	9	9			
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Panjang Jalan Usaha Tani Yang Dibangun	Meter	99500	28267	33000	20000	12500	10500	104267	Dinas Pertanian dan Peternakan		
				Jumlah Embung Pertanian Yang Dibangun	Unit	5	14	23	23	21	19	100			
				Panjang Jaringan Irigasi yang dibangun	Meter	78375	14664	20000	17000	10000	7500	69164			
				Jumlah DAM Parit yang dibangun	Unit	16	4	5	6	4	3	22			
				Jumlah Pintu Air yang dibangun	Unit	128	19	35	33	19	19	125			
						Panjang Jalan Produksi Perkebunan Yang Dibangun	Meter	100000	3600	3600	4000	4000	4800	20000	Dinas Perkebunan





Visi / Misi / Tujuan / Sasaran / Strategi	Arah Kebijakan	Urusan	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja					Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2022	2023	2024	2025	2026		
							K	K	K	K	K		
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Embung Perkebunan Yang Dibangun	Unit	20	3	4	4	5	4	20	Dinas Pertanian dan Peternakan
			Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Derajat Kesehatan Ternak	Persen	90	92	94	95	96	97	97	
				Cakupan Pengawasan Hewan dan Produk Hewan	Jenis	3	5	5	5	5	5	5	
			Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persen	75	80	85	90	95	100	100	
			Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Kenaikan Kelas Kelompok Tani	Persen	1	2	3	3	4	5	17	Dinas Perkebunan
				Persentase Kenaikan Kelas Kelompok Tani	Persen	1.91	4.8	9.8	14.6	19.6	24.6	24.60	
			Program Perizinan Usaha Pertanian	Cakupan Pelaku Usaha Pertanian yang di Bina	Persen	75	80	85	90	95	100	100	Dinas Pertanian dan Peternakan
		Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	80000	82400	86520	95172	104689	115158	115158	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	136960	150,656	165,721	185,608	207,881	232,827	232,827	
			Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Cakupan Wilayah Suberdaya Perikanan Yang Diawasi	Kecamatan	5	5	20	20	20	20	20	
				Persentase Penyelesaian Kasus Illegal / Destruktif Fishing	Persen	n/a	92	93	95	98	100	100	
			Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Produksi Pengolahan Hasil Perikanan	Ton	21678	22762	23900	25095	26350	27668	27668	
				Ekspor Produk Kelautan dan Perikanan	Ton	1500	1530	1607	1687	1771	1860	1860	
		Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Produk dalam negeri yang dipasarkan di pasar rakyat dan di toko modern	Persen	n/a	95	97	98	98	99	99	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	persentase sarana distribusi perdagangan di wilayah kerja yang dikembangkan dan dikelola	Persen	31	43	54	65	75	86	86	
				Pertumbuhan pendapatan pasar	Persen	2.48	3.33	3.35	3.62	4.22	4.22	4.22	
				Indeks Kualitas Pasar	Nilai	43	48	53	58	62	67	67	
		Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Dokumen perencanaan dan pengembangan industri	Dokumen	2	2	2	2	1	1	8	





Visi / Misi / Tujuan / Sasaran / Strategi	Arah Kebijakan	Urusan	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja					Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2022	2023	2024	2025	2026		
							K	K	K	K	K	K	
		Urusan Pemerintahan Bidang Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase UMKM yang Difasilitasi	Persen	n/a	1.81	1.99	1.99	1.99	1.99	9.77	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
			Program Pengembangan UMKM	Persentase Pertumbuhan Omzet	Persen	n/a	0.3	0.6	0.9	1.1	1.4	1.4	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Meningkatnya Daya Saing Pariwisata Daerah				Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata	Persen	-0.99	2,34	2,51	3,42	4	4,23	4,23	
Penguatan daya saing ekonomi daerah yang unggul, bernilai tambah dan berkelanjutan	Peningkatan Produktivitas pariwisata berbasis alam, sosial, budaya dan olah raga yang berkelanjutan	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	Program Peningkatan Daya tarik Destinasi Pariwisata	Persentase DTW yang Memenuhi Aksesibilitas, Amenitas dan Atraksi	Persen	28	59.14	64	82	100	100	100	Dinas Pariwisata
			Program Pemasaran Pariwisata	Okupansi	Persen	20	23.28	26.28	29.28	32.28	35.28	35.28	
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Pertumbuhan Pelaku EKRAF	Persen	7	7	7	7	7	7	7	
Berkembangnya Ekosistem Ekonomi Kreatif				Laju Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	Persen	4.44	6,11	6,55	7,09	7,48	7,56	7,56	
Penguatan daya saing ekonomi daerah yang unggul, bernilai tambah dan berkelanjutan	Peningkatan produktivitas industri kreatif	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Pelaku Ekonomi Kreatif Yang Terfasilitas	Persen	n/a	4	4	5	6	7	7	Dinas Pariwisata
Meningkatnya daya saing investasi daerah				Tingkat Pertumbuhan Investasi	Persen	1.69	1,71	1,73	1,75	1,77	1,79	1,79	
Penguatan daya saing ekonomi daerah yang unggul, bernilai tambah dan berkelanjutan	Peningkatan kemudahan perijinan investasi dan pengembangan kerja sama investasi	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	Program Pengembangan Iklim Penanaman modal	Jumlah Proyek PMDN/PMA	Proyek	602	625	640	652	665	685	3267	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Investor PMDN/PMA	Investor	112	200	260	310	340	350	350	
			Program Pelayanan Penanaman Modal	Jumlah Penerbitan izin	Izin	678	750	850	950	1050	1150	4750	
Misi 4: Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas antar Wilayah													
Meningkatkan Pemerataan Infrastruktur dan Penataan Wilayah				Indeks Kesulitan Geografis	Nilai	37.80	35,8	34,8	33,8	32,8	31,8	31,8	
				Persentase penurunan kawasan kumuh	Persen	0.0058	0.0057	0.0057	0.0056	0.0055	0.0054	0.0054	
Meningkatnya kualitas permukiman masyarakat dan ketersediaan air bersih				Cakupan layanan air bersih	Persen	87.60	89,32	90,74	92,16	93,58	95	95	
				Persentase rumah layak huni	Persen	89.80	90,35	90,62	90,89	91,16	91,44	91,44	
Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Penyediaan dan penataan perumahan dan permukiman, air bersih dan sanitasi yang	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Program Pengembangan Perumahan	Cakupan Layanan Perumahan Layak Huni Bagi Korban Bencana	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Cakupan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat	Persen	100	100	100	100	100	100	100	





Visi / Misi / Tujuan / Sasaran / Strategi	Arah Kebijakan	Urusan	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja					Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2022	2023	2024	2025	2026		
							K	K	K	K	K	K	
	sehat, layak dan aman			terdampak relokasi program pemerintah kabupaten									
			Program Kawasan Permukiman	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani	Persen	26.30	31.77	37.25	42.72	48.19	53.67	53.67	
			Program Perumahan Dakawasan Permukiman Kumuh	Persentase RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Persen	7.4	7.2	7	6.7	6.4	6.1	6.1	
				Jumlah Pelaksanaan Bedah Rumah KUKAR IDAMAN	Unit	25	517	517	517	517	517	2585	
			Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Pertumbuhan Rumah yang memiliki akses jalan Perumahan dalam kondisi baik	Persen	n/a	4.92	4.69	4.48	4.29	4.11	4.11	
		Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	Persen	87.9	89.32	90.74	92.16	93.58	95	95	
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Penyediaan SPAM Perdesaan (50 Unit)	Persen	0	0.54	0.7	1.03	1.26	1.48	1.48	
			Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Persen	81.7	83.4	85	86.7	88.3	90	90	
				Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan Strategis Daerah	Persen	62.12	65.28	65.75	66.22	66.67	67.11	67.11	
		Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	Program Pengelolaan Persampahan	Jumlah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Yang Dibangun	Lokasi	1	1	2	1	1	1	6	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
				Timbulan sampah	Persen	78.5	88.18	94.84	97.6	99.52	99.96	99.96	
Meningkatnya aksesibilitas dan konektivitas wilayah				Indeks Aksesibilitas Wilayah	Nilai	83.17	84,18	85,18	86,18	87,18	88,18		
Penguatan Kesiapan Pembangunan IKN	Penyiapan perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah sebagai acuan Pembangunan kawasan di lokasi IKN	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Ketaatan Terhadap RTRW	Persen	60.33	65	70	75	80	85	85	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
	Pembangunan prasarana dan sarana konektivitas (keterkaitan antar wilayah)	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	Rasio	0.75	0.76	0.78	0.8	0.82	0.85	0.85	Dinas Pekerjaan Umum
Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten				Rasio	0.01	0.02	0.03	0.05	0.06	0.08	0.08		





Visi / Misi / Tujuan / Sasaran / Strategi	Arah Kebijakan	Urusan	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja					Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2022	2023	2024	2025	2026		
							K	K	K	K	K	K	
				Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten	Rasio	0	0	0.01	0.02	0.03	0.04	0.04	
			Program Penyelenggaraan Jalan	Kondisi Kemantapan Jalan	Persen	63.4	63.6	64.2	64.7	65	65.1	65.1	
Misi 5: Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan													
Meningkatkan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan				Persentase Penurunan Emisi GRK	Persen	5	5	5	5	5	5	25	
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	72.82	73.14	73.47	73.81	74.15	74.51	74.51	
Pengelolaan Sumber daya alam dan lingkungan secara lestari dan berkelanjutan	Pemulihan daya dukung lingkungan	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang disusun	Persen	100	100	60	100	100	66.7	94.4	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah pohon yang ditanam pada program penanaman satu juta pohon pada wilayah penghijauan dan reklamasi	Pohon	0	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	1,000,000	
			Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Jumlah Dokumen Kajian timbulan limbah B3 dari kegiatan UMKM yang menghasilkan limbah B3 di kabupaten Kutai Kartanegara	Dokumen	0	4	4	4	3	3	18	
			Program Pembinaan Dan pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan izin Perlindungan Dan Pengelola lingkungan Hidup (PPLH)	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	Persen	19.32	19.3	19.3	19.3	19.3	19.3	19.3	
			Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Jumlah Penghargaan yang diberikan	Penghargaan	101	124	126	128	129	119	626	
				Jumlah Desa/kelurahan yang mendapatkan penghargaan desa ramah lingkungan kategori utama	Desa / Kelurahan	0	0	5	5	5	6	21	
Meningkatnya ketahanan bencana daerah				Indeks Risiko Bencana	Nilai	110.00	108,55	106,42	104,28	102,14	100.00	100.00	
Pengelolaan Sumber daya alam dan lingkungan secara lestari dan berkelanjutan	Penguatan mitigasi dan ketangguhan dalam penanggulangan bencana	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
		Urusan Pemerintahan	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Layanan Informasi Rawan Bencana	Persen	5.11	8.1	12.1	15.1	18.1	21.1	21.1	





Visi / Misi / Tujuan / Sasaran / Strategi	Arah Kebijakan	Urusan	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja					Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2022	2023	2024	2025	2026		
							K	K	K	K	K		
		Bidang Ketenteraman dan Ketertiban umum serta perlindungan masyarakat		Cakupan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persen	8.55	10.6	13.6	16.6	19.6	22.6	22.6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
			Program Pencegahan, Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Pemenuhan Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Persen	10.86	12.2	15.8	17.6	19.3	20.1	20.1	
				Jumlah pembentukan Balakarcana (Barisan Sukarela Pemadam Kebakaran)	Kelompok	74	10	15	20	25	30	100	
				Cakupan Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persen	100	100	100	100	100	100	100	

Sumber : Perda No 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026





D. Kegiatan Pembangunan Daerah berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan

Dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara, sasaran prioritas pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan arah pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam RPJMD Tahun 2021-2026 pada tahap pembangunan ke-3, sehingga pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 ada sebagai berikut:

“Pengembangan Ekonomi Unggulan Daerah Berbasis Desa dan Kecamatan”.

Berdasarkan tema pembangunan yang telah dirumuskan, maka terlihat bahwa pada tahun 2024 pembangunan Kutai Kartanegara diarahkan pada “Pengembangan Ekonomi Unggulan Daerah Berbasis Desa dan Kecamatan” di Kabupaten Kutai Kartanegara bertujuan untuk memaksimalkan potensi lokal yang ada di setiap desa dan kecamatan guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih merata dan berkelanjutan.

Kebijakan ini menekankan pada identifikasi dan pengembangan produk unggulan yang memiliki daya saing tinggi dan permintaan pasar yang baik, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Dengan demikian, setiap desa dan kecamatan didorong untuk menggali dan mengoptimalkan sumber daya alam, budaya, dan kearifan lokal yang dimiliki untuk menciptakan produk-produk yang bernilai tambah tinggi. Pendekatan berbasis desa dan kecamatan ini juga melibatkan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendampingan bagi pelaku usaha lokal, penguatan kelembagaan ekonomi desa, serta pengembangan infrastruktur penunjang seperti jalan, irigasi, dan fasilitas produksi. Selain itu, pemerintah daerah bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta dan lembaga pendidikan, untuk menciptakan ekosistem yang kondusif bagi berkembangnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengurangan kesenjangan ekonomi antarwilayah, serta terwujudnya ketahanan ekonomi yang lebih kuat dan





adaptif terhadap perubahan global. Perumusan prioritas harus memahami kondisi aktual dan permasalahan pembangunan yang sedang terjadi, dengan memperhatikan kondisi yang *ter-update* dan rumusan kebijakan pembangunan dalam RPJMD terutama pada agenda pembangunan Tahun 2024, sehingga dalam perumusan prioritas pembangunan diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan pembangunan. Dengan begitu target tujuan dan sasaran pembangunan dapat tercapai dengan maksimal.

Tabel 13. Prioritas dan Fokus Pembangunan Tahun 2024 Kabupaten Kutai Kartanegara

Prioritas Kabupaten Kutai Kartanegara		Fokus Pembangunan	
1	Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	1	Penataan manajemen organisasi dan penguatan koordinasi perangkat daerah.
		2	Penataan manajemen keuangan dan aset daerah
		3	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan layanan publik yang lebih baik, cepat, mudah, murah dan bermutu berbasis IT
2	Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif terampil	4	Peningkatan jangkauan dan akses layanan pendidikan yang bermutu
		5	Penguatan modal sosial budaya, solidaritas sosial dan ketahanan sosial dalam kehidupan kemasyarakatan
		6	Peningkatan jangkauan dan akses layanan kesehatan yang bermutu
		7	Peningkatan keterampilan perempuan dan pemenuhan hak-hak anak
3	Percepatan pembangunan desa dan kawasan perdesaan	8	Percepatan pembangunan desa sebagai basis produksi pangan dan pemberdayaan masyarakat
		9	Penguatan kecamatan pusat pertumbuhan dan pengembangan kawasan strategis daerah
4	Penguatan daya saing ekonomi daerah yang unggul, bernilai tambah dan berkelanjutan	10	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan
		11	Peningkatan produktivitas pariwisata berbasis alam, sosial budaya, dan olah raga yang berkelanjutan
		12	Peningkatan produktivitas industri kreatif
		13	Peningkatan kemudahan perijinan investasi dan pengembangan kerja sama investasi
5	Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	14	Penyediaan dan Penataan perumahan dan permukiman, air bersih dan sanitasi yang sehat, layak dan aman
6	Penguatan kesiapan pembangunan IKN	15	Penyiapan perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah sebagai acuan pembangunan kawasan di lokasi IKN
		16	Pembangunan prasarana dan sarana konektivitas (keterkaitan) wilayah
7	Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara lestari dan berkelanjutan	17	Pemulihan daya dukung lingkungan

Sumber: Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 15 Tahun 2024 tentang Perubahan RKPd Tahun 2024

Sasaran pembangunan merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya indikator kinerja utama (IKU) berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian sasaran Perangkat Daerah melalui program pembangunan yang dilaksanakan.





Tabel 14. Sasaran Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024

Sasaran		Indikator	Kondisi Awal	Target 2024	Target P-RKPD 2024
1	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai Sakip	67,86	BB (73,00)	BB (73,00)
2	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks Persepsi Anti Korupsi	8,38 (realisasi 2022)	6,75	8,4
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik	9,81 (realisasi 2022)	8,95	9,85
4	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan, Ketahanan Sosial dan Pelestarian Kebudayaan	Indeks Pendidikan	0,688	0,7	0,7
		Indeks Pembangunan Kebudayaan	53,23	51	54,50
5	Meningkatnya Kualitas layanan Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	0,812	0,817	0,817
6	Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender	80,64	79,10	80,66
7	Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat dan kualitas hidup masyarakat	Indeks Gini	0,284	0,280	0,280
		Indeks Desa Membangun	0,779	0,745	0,765
8	Meningkatnya Pengelolaan Pertanian Berbasis Potensi Unggulan Daerah	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2,91	6,6	3,00
9	Meningkatnya Daya Saing Pariwisata Daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata	6,6	3,42	4,00
10	Berkembangnya Ekosistem Ekonomi Kreatif	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	6,8	7,09	7,09
11	Meningkatnya daya saing investasi daerah	Tingkat Pertumbuhan Investasi	51,38	1,75	1,75
12	Meningkatnya kualitas permukiman masyarakat dan ketersediaan air bersih	Cakupan layanan air bersih	97,49	92,16	92,16
		Persentase Rumah Layak Huni	93,49	90,89	93,5
13	Meningkatnya Aksesibilitas dan Konektivitas Wilayah	Indeks Aksesibilitas Wilayah	76,49	86,18	78,00
14	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72,41	73,81	73,81

Sumber: Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 15 Tahun 2024 tentang Perubahan RKPD Tahun 2024

1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditujukan untuk mendorong lebih terciptanya daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam menyejahterakan masyarakat, khususnya peningkatan pelayanan publik melalui pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan Pemerintahan Wajib dan menjadi pelayanan dasar ada 6 (enam) urusan, yaitu: Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman,





Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dan Bidang Sosial.

Berkaitan hal tersebut, Pemerintah Daerah wajib memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang berkaitan pelayanan dasar dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan Peraturan Pemerintah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Sejak berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah melakukan penyesuaian terhadap regulasi diantaranya: Menetapkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pencabutan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dengan menetapkan kembali melalui Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 169/SK-BUP/HK/2023 tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2023-2026.

Secara umum pelaksanaan dan penerapan SPM telah tertuang dalam penjabaran Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026, penitikberatan kebijakan umum terkait dengan upaya pemenuhan SPM dapat terlihat dalam pemahaman atas Visi Kepala Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026.

Tabel 15. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan dalam Penerapan SPM Kabupaten Kutai Kartanegara

Visi/Misi Tujuan / Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Urusan SPM
Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia			
Misi 2 : Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul Dan Berbudaya			
Meningkatkan kualitas pembangunan manusia yang berdaya saing			
Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan, Ketahanan Sosial dan Pelestarian Kebudayaan	Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Produktif dan terampil	Peningkatan jangkauan dan akses layanan pendidikan yang bermutu	Pendidikan





Visi/Misi Tujuan / Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Urusan SPM
Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat		Penguatan modal sosial budaya, solidaritas sosial dan ketahanan sosial dalam kehidupan kemasyarakatan	Sosial
		Peningkatan jangkauan dan akses layanan kesehatan yang bermutu	Kesehatan
Misi 4 : Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar Dan Konektivitas Antar Wilayah			
Meningkatkan Pemerataan Infrastruktur Wilayah			
Meningkatnya kualitas permukiman masyarakat dan ketersediaan air bersih	Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Penyediaan dan penataan perumahan dan permukiman, air bersih dan sanitasi yang sehat, layak dan aman	Pekerjaan Umum dan Perumahan
Misi 5 : Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berwawasan Lingkungan			
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup			
Meningkatnya ketahanan bencana daerah	Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara lestari	Penguatan mitigasi dan ketangguhan dalam penanggulangan bencana	Trantibum

Sumber : Perda No 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026

Tabel 16. Arah Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Arah Kebijakan	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja					OPD Pengampu
				2022	2023	2024	2025	2026	
Peningkatan jangkauan dan akses layanan pendidikan yang bermutu	Indeks Mutu Pendidikan (IMP) SD	Persen	84,43	85,86	87	88,43	89,71	90,71	Disdikbud
	Indeks Mutu Pendidikan (IMP) SMP	Persen	84,43	84,86	86	87,43	88,71	89,71	
	Indeks Mutu Pendidikan (IMP) PAUD	Persen	76,92	78,72	80,6	82,02	83,02	83,92	
	Indeks Mutu Pendidikan (IMP) Kesetaraan	Persen	62,28	64,08	65,98	67,38	68,38	69,28	
	Jumlah Bantuan Beasiswa Stimulan Kukar Idaman Pendidikan Dasar	Orang	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
Penguatan modal sosial budaya, solidaritas sosial dan ketahanan sosial dalam kehidupan kemasyarakatan	Persentase PSKS yang berperan dalam Usaha Kesejahteraan Sosial	Persen	84	86	88	90	92	94	Dinas Sosial
	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen	100	100	100	100	100	100	





Arah Kebijakan	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja					OPD Pengampu
				2022	2023	2024	2025	2026	
	Persentase PMKS yang memperoleh layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persen	77	80	85	90	95	100	
	Cakupan Layanan Jaminan Sosial Bagi Masyarakat Miskin Non Potensial	Persen	n/a	100	100	100	100	100	
Peningkatan jangkauan dan akses layanan kesehatan yang bermutu	Presentasi Balita Stunting	Persen	16,19	15,6	15,1	14,6	14,1	13,8	Dinas Kesehatan
	Indeks Keluarga sehat	Persen	0,21	0,25	0,3	0,35	0,4	0,5	
	Indeks Pelayanan kesehatan reproduksi	Persen	0,72	0,73	0,74	0,75	0,76	0,77	
	Indeks Pelayanan kesehatan balita	Persen	0,73	0,74	0,75	0,76	0,77	0,78	
	Indeks Pelayanan Penyakit menular	Persen	0,55	0,57	0,59	0,61	0,63	0,65	
	Indeks Pelayanan penyakit tidak menular	Persen	0,44	0,46	0,48	0,5	0,52	0,54	
	Indeks Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persen	0,85	0,86	0,87	0,88	0,89	0,9	
	Indeks Pelayanan Kesehatan Primer	Persen	0,34	0,36	0,38	0,4	0,43	0,45	
	Indeks Perilaku Kesehatan	Persen	0,44	0,45	0,46	0,47	0,48	0,49	
	Persentase Puskesmas Akreditasi Paripurna dan Utama	Persen	18,75	21,88	25,00	28,13	31,25	34,38	
Penyediaan dan penataan perumahan dan permukiman, air bersih dan sanitasi yang sehat, layak dan aman	Cakupan Layanan Perumahan Layak Huni Bagi Korban Bencana	Persen	100	100	100	100	100	100	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	Cakupan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program Pemerintah kabupaten	Persen	100	100	100	100	100	100	
	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	Persen	87,9	89,32	90,74	92,16	93,58	95	





Arah Kebijakan	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja					OPD Pengampu
				2022	2023	2024	2025	2026	
	Persentase Penyediaan SPAM Perdesaan (50 Unit)	Persen	0	0,54	0,7	1,03	1,26	1,48	
	Persentase Jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Persen	81,7	83,4	85	86,7	88,3	90	
Penguatan mitigasi dan ketangguhan dalam penanggulangan Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	Persen	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
	Persentase Layanan Informasi Rawan Bencana	Persen	5,11	8,1	12,1	15,1	18,1	21,1	BPBD
	Cakupan Pencegahan Kesiapsiagaan terhadap bencana	Persen	8,55	10,6	13,6	16,6	19,6	22,6	
	Persentase Pelayanan dan Penyelamatan dan Evakuasi korban bencana	Persen	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Pemenuhan Tingkat Waktu Tanggap (Response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran	Persen	10,86	12,2	15,8	17,6	19,3	20,1	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	Jumlah pembentukan balakarcana	Kelompok	74	10	15	20	25	30	
	Cakupan layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persen	100	100	100	100	100	100	

Sumber: Perda No. 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026

Dalam rangka menjamin pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah, maka Pemerintah Daerah wajib mencantumkan dan menganggarkan urusan SPM ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dan Penganggaran. Hal ini didasarkan dalam pasal 298 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan





Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal.

Tabel 17. Alokasi Anggaran Penunjang Penerapan SPM Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024

Urusan	Sub Urusan	Alokasi Anggaran	OPD Pengampu
Pendidikan		1,420,316,241,211	Dinas Pendidikan
Kesehatan		41,146,538,970	Dinas Kesehatan
Pekerjaan Umum		294,921,080,842	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Perumahan		8,516,497,560	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Trantibum	Trantibum	17,871,623,836	Satuan Polisi Pamong Praja
	Bencana Daerah	7,661,936,560	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Kebakaran	22,378,144,771	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Sosial		5,373,406,590	Dinas Sosial

Sumber: Pelaporan penerapan SPM pada aplikasi e-SPM-2024





BAB II

CAPAIAN KINERJA

PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

2.1. Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

Capaian kinerja makro meliputi indeks pembangunan manusia, angka kemiskinan, angka Pengangguran, pertumbuhan ekonomi, pendapatan per-kapita dan ketimpangan pendapatan. Capaian Kinerja Makro berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik, adapun Capaian Laju Kinerja Makro menggunakan rumus sesuai Pedoman Penyusunan LPPD Tahun 2024 yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Indikator Kinerja Makro sebagai berikut:

Tabel 18. Capaian Indikator Kinerja Makro

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2024	Laju Kinerja
1	Indeks Pembangunan Manusia	75,95	76,57	0,816
2	Angka Kemiskinan	7,61	7,28	-4,336
3	Angka Pengangguran	4,05	4,11	1,481
4	Pertumbuhan Ekonomi	5,13	5,62	9,552
5	Pendapatan Perkapita	270,71	259,19	-4,255
6	Ketimpangan Pendapatan (gini ratio)	0,284	0,307	8,099

Sumber : BPS Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah menetapkan Target Capaian Kinerja Makro pada Dokumen RPJMD 2021-2026, penetapan target indikator pembangunan diharapkan mampu memotret pencapaian visi dan misi kepala daerah dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.





Realisasi Capaian Kinerja Makro Kabupaten Kutai Kartanegara jika dibandingkan dengan penetapan target Indikator Kinerja Makro pada Dokumen RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

Tabel 19. Realisasi Capaian Indikator Kinerja Makro atas Target RPJMD 2021-2026

Indikator	Kondisi Awal	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Target 2025	Target 2026
Indeks Pembangunan Manusia	73,59	75,31	75,95	76	76,57	76,2	76,59
Angka Kemiskinan	7,35	7,96	7,61	6,45	7,28	6,4	6,35
Angka Pengangguran	5,2	4,14	4,05	4,4	4,11	4,25	4,1
Pertumbuhan Ekonomi	1,5	3,7	5,13	1,89	5,62	2,4	3
Pendapatan Perkapita	188,64	322,08	270,71	197,62	259,19	202,16	204,69
Ketimpangan Pendapatan (gini ratio)	0,29	0,269	0,284	0,28	0,307	0,27	0,27

Sumber : Perda No. 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026

Sampai dengan Tahun 2024 Tahun ke-3 RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara jika dibandingkan target yang akan dicapai sampai dengan akhir Tahun RPJMD pada Tahun 2026 dari 6 Indikator Kinerja Makro sebagian besar sudah tercapai pada tahun 2024. Berikut disajikan capaian masing-masing Indikator Kinerja Makro Tahun 2024 di Kabupaten Kutai Kartanegara.

2.1.1. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks yang digunakan untuk mengukur kualitas hidup penduduk di suatu negara atau daerah. Nilai IPM berfungsi sebagai indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (BPS, 2022) yakni dengan menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh kesehatan, pendidikan, dan pendapatan. Indeks ini dibentuk oleh tiga dimensi dasar yaitu:

- a. Umur Panjang dan Hidup Sehat yang digambarkan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir.





- b. Pengetahuan yang diukur berdasarkan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). RLS merupakan rata-rata lamanya pendidikan formal yang dijalani oleh penduduk usia 25 tahun ke atas, sedangkan HLS menggambarkan harapan atas rata-rata lamanya pendidikan formal yang dapat ditempuh oleh penduduk sejak usia tujuh tahun ke atas.
- c. Standar hidup layak yang diperoleh dari besar pengeluaran per kapita yang disesuaikan (PPP).

Tabel 20. Indikator Pembentuk IPM Tahun 2020-2024

Tahun	Umur Harapan Hidup	Harapan Lama Sekolah	Rata-Rata Lama Sekolah	Pengeluaran Perkapita
2020	72,34	13,59	9,22	Rp.10.720,00
2021	72,64	13,60	9,23	Rp.11.048,00
2022	72,65	13,63	9,24	Rp.11.677,00
2023	72,75	13,64	9,26	Rp.12.323,00
2024	72,94	16,65	9,27	Rp.12.957,00

Sumber : BPS Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024

Umur Harapan Hidup saat lahir yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun, selama kurun waktu 2020 hingga 2024 Umur Harapan Hidup penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara meningkat 0,6 tahun dari tahun 2020 sebesar 72,34 menjadi 72,94 di tahun 2024.

Harapan Lama Sekolah mengalami peningkatan, harapan semakin banyak penduduk yang melanjutkan sekolah pada jenjang yang lebih tinggi, pada Tahun 2024 Harapan Lama Sekolah Kabupaten Kutai Kartanegara mencapai 13,65 tahun. Rata-rata Lama Sekolah juga terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, hingga tahun 2024 Rata-rata Lama Sekolah mencapai 9,27 tahun.

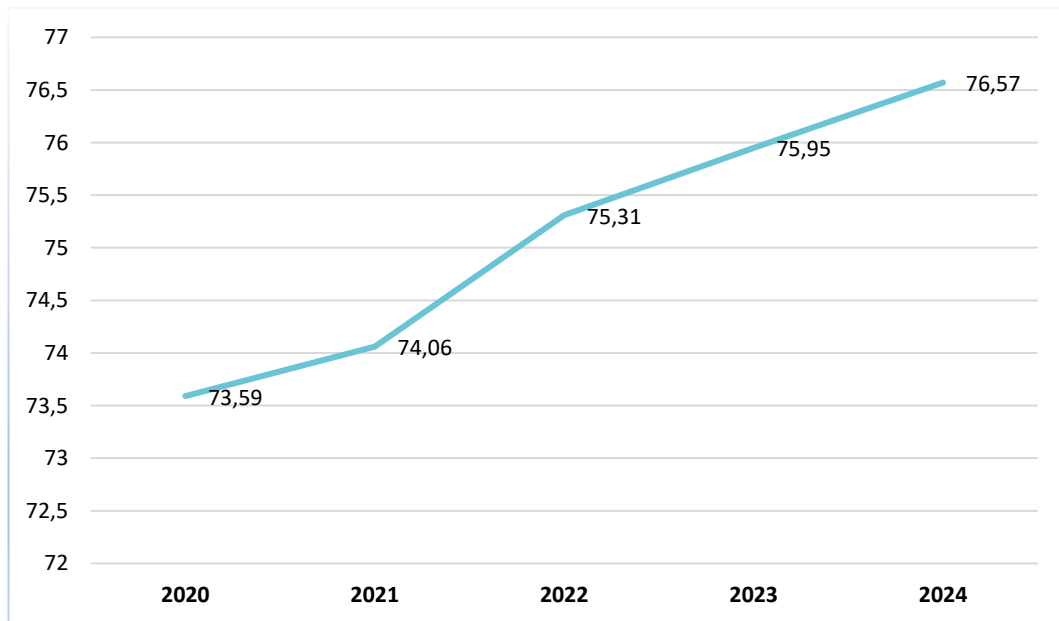
Dimensi ketiga yaitu pendapatan per kapita, selama periode 2020 hingga 2024 pendapatan per kapita meningkat sebesar Rp. 2.237 dari Tahun 2020 sebesar Rp. 10.720,00 menjadi Rp. 12.957,00 di Tahun 2024





Adapun perkembangan capaian IPM Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 s.d 2024 sebagai berikut:

Grafik 1. Pertumbuhan IPM Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020-2024



Sumber : BPS Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024

Capaian IPM Kabupaten Kutai Kartanegara pada Tahun 2024 adalah 76,57 meningkat 0,62 poin dari tahun sebelumnya yaitu 75,95 yang didukung oleh beberapa 3 (tiga) dimensi dasar yang mengalami peningkatan. Berdasarkan klasifikasi status pembangunan manusia yang ditetapkan Badan Pusat Statistik capaian IPM Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 sudah berstatus “tinggi”, jika dibandingkan dengan nilai IPM kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 21. Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 dan 2024

No.	Kabupaten/Kota	2023	2024
1	Paser	74,56	75,13
2	Kutai Barat	73,97	74,76
3	Kutai Kartanegara	75,95	76,57
4	Kutai Timur	75,33	75,9
5	Berau	76,71	77,17
6	Penajam Paser Utara	74,33	74,94
7	Mahakam Ulu	70,02	70,79
8	Balikpapan	82,03	82,62





No.	Kabupaten/Kota	2023	2024
9	Samarinda	82,61	83,11
10	Bontang	81,63	82,49
11	Kalimantan Timur	78,2	78,79

Sumber : BPS Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024

2.1.2. Angka Kemiskinan

Secara ekonomi, kemiskinan merujuk pada suatu kondisi ketidakmampuan penduduk dalam memenuhi standar hidup rata-rata penduduk di suatu wilayah. Hal ini dapat dilihat pada kemampuan pendapatan masyarakat yang rendah dalam memenuhi kebutuhan pokok sehingga berdampak pada ketidakmampuan penduduk dalam memenuhi standar hidup rata-rata yang meliputi standar kesehatan, pendidikan dan ekonomi.

Target penurunan angka kemiskinan merupakan prioritas Pemerintah Pusat yang diturunkan pada seluruh wilayah baik di tingkat provinsi, kota dan kabupaten, dan tingkat desa. Pada Kabupaten Kutai Kartanegara, kemiskinan merupakan masalah besar yang harus segera ditangani. Kegagalan mengatasi kemiskinan akan dapat menyebabkan munculnya berbagai persoalan sosial, ekonomi, dan politik di tengah-tengah masyarakat. Kondisi kemiskinan di Kutai Kartanegara terus mengalami kenaikan dan diperparah dengan kondisi pandemi covid-19. Namun sejak tahun 2022, perbaikan terhadap target kemiskinan telah berhasil dicapai.

Penjabaran angka kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 menggunakan data jumlah penduduk miskin yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Kartanegara. Pada Tahun 2024 angka kemiskinan 7,28 % mengalami penurunan 0,33 % dari angka kemiskinan Tahun 2024 yaitu 7,61.

Secara umum tingkat kemiskinan Kabupaten Kutai Kartanegara baik dari sisi Jumlah maupun persentase terus menurun, Isu kemiskinan menjadi perhatian yang cukup besar dalam pembangunan daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara, hal tersebut diindikasikan dari beragam program pengentasan kemiskinan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang diharapkan mendukung memecahkan permasalahan-permasalahan dalam pengembangan ekonomi masyarakat yang





memerlukan tambahan modal khususnya diprioritaskan kepada masyarakat yang bergerak di usaha mikro, pedagang kaki lima dan wirausaha baru.

2.1.3. Angka Pengangguran

Indikator utama ketenagakerjaan yang sering digunakan sebagai ukuran keberhasilan dalam menangani permasalahan ketenagakerjaan adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan rasio antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja/usia produktif 15 tahun ke atas. Selain TPAK, dalam analisis angkatan kerja dikenal pula indikator untuk mengukur Pengangguran yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Pengangguran terbuka didefinisikan sebagai orang yang mencari pekerjaan atau yang sedang mempersiapkan usaha atau yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin lagi mendapatkan pekerjaan, termasuk mereka yang baru mendapat kerja tetapi belum mulai bekerja.

Angka TPAK dan TPT bisa mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah, serta besarnya persentase angkatan kerja yang masuk dalam kategori Pengangguran. Idealnya capaian hasil pembangunan suatu wilayah dikatakan tinggi apabila angka TPAK tinggi dan TPT yang rendah.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Tahun 2023 tercatat 4,05 mengalami penurunan 0,09 poin dari Tahun 2022 yang tercatat sebesar 4,14. Menunjukkan semakin banyak tenaga kerja yang termanfaatkan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tabel 22. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 s.d 2024

No	Wilayah	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kabupaten Kutai Kartanegara	5,70	5,66	4,14	4,05	4,11
2	Provinsi Kalimantan Timur	6,87	6,83	5,71	5,31	5,14
3	Kabupaten Paser	4.52	5.70	4.88	6,61	4,53





No	Wilayah	2020	2021	2022	2023	2024
4	Kabupaten Kutai Barat	4.97	5.14	4.62	6,16	5,58
5	Kabupaten Kutai Timur	5.45	5.35	6.48	5,93	5,76
6	Kabupaten Berau	5.08	5.82	5.02	4,95	5,15
7	Kabupaten Penajam Paser Utara	6.22	2.95	2.12	2,07	2,05
8	Kabupaten Mahakam Ulu	3.49	3.14	2.44	2,09	2,51
9	Balikpapan	9.00	8.94	6.90	6,09	6,22
10	Samarinda	8.26	8.16	6.78	5,92	5,75
11	Kota Bontang	9.46	9.92	7.81	7,74	7,06

Sumber : BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas),

2.1.4. Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam satu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku (ADHB) maupun atas dasar harga konstan (ADHK). Dari nilai PDRB ADHB dapat dihitung kontribusi ekonomi menurut sektor perekonomian, sedangkan nilai PDRB ADHK akan dapat didapatkan penghitungan untuk pertumbuhan ekonomi.

Tabel 23. PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara Atas Dasar Harga Konstan (Juta Rupiah) 2023-2024

No	Lapangan Usaha	2023	2024
1	Pertanian, kehutanan dan perikanan	14.030.426,66	14.443.340,99
2	Pertambangan dan penggalian	92.756.961,98	97.001.598,77
3	Industri pengolahan	4.478.945,04	5.310.255,74
4	Pengadaan Listrik dan Gas Electricity & Gas	98.656,32	125.424,79
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	57.402,53	61.584,10
6	Konstruksi	9.897.622,01	10.596.374,07
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.965.951,33	5.443.159,23
8	Transportasi dan Pergudangan	1.481.119,41	1.604.020,45
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	367.105,92	427.779,92
10	Informasi dan Komunikasi	1.410.918,12	1.528.186,20
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	432.060,97	455.579,90
12	Real Estat	656.301,27	697.534,30
13	Jasa Perusahaan	38.953,68	42.466,97
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.843.722,58	2.169.784,53





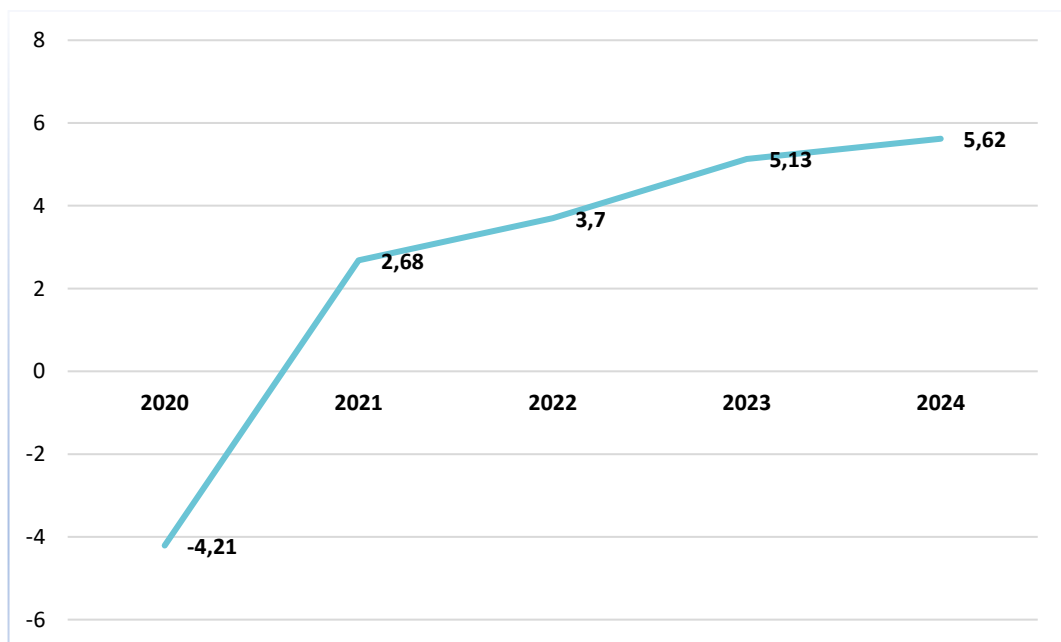
No	Lapangan Usaha	2023	2024
15	Jasa Pendidikan	1.387.737,29	1.482.313,96
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.199.063,17	1.280.999,18
17	Jasa lainnya	303.097,64	339.370,80
Produk Domestik Regional Bruto ADHK		135.406.045,93	143.009.773,88

Sumber: BPS Kabupaten Kutai Kartanegara 2024

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa PDRB ADHK yang dihasilkan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 mencapai 135.406.045,93 juta rupiah, nilai ini naik 31.471.009,50 juta rupiah dari Tahun 2023.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara pada Tahun 2024 meningkat sampai dengan 5,62%. Peningkatan pertumbuhan pada tahun 2023 ini tidak terlepas dari adanya program prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Berikut tren pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana grafik berikut.

Grafik 2. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Kabupaten Kutai Kartanegara 2024

2.1.5. Pendapatan Per kapita

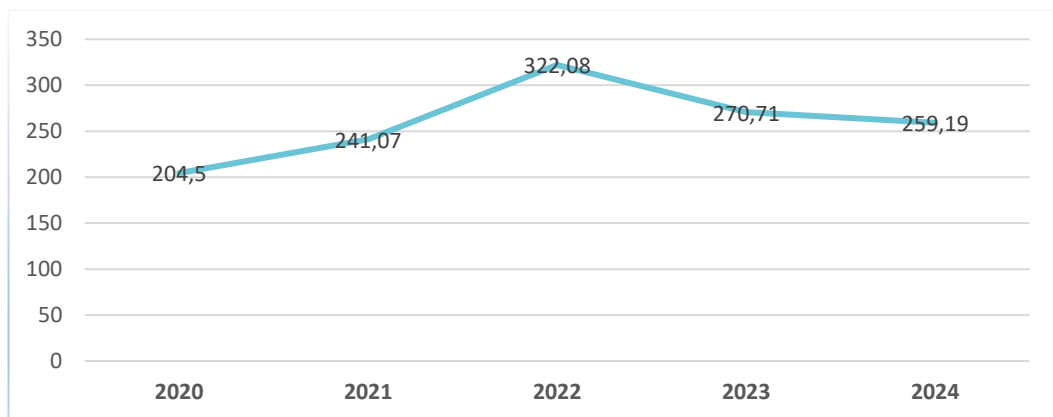
Pengukuran PDRB per kapita dilakukan dengan membagi nilai PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun dalam suatu wilayah per periode tertentu. Data yang digunakan untuk mengukur PDRB per kapita





Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 pada dokumen ini merupakan PDRB atas dasar harga berlaku yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Kartanegara (2024).

Grafik 3. Pendapatan Per Kapita Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019-2024



Sumber: BPS Kabupaten Kutai Kartanegara 2024

Pertumbuhan PDRB per kapita Kabupaten Kutai Kartanegara selama kurun waktu 2019-2022 terus mengalami tren positif, hal ini memberikan gambaran bahwa pertumbuhan rata-rata Kabupaten Kutai Kartanegara terus mengalami peningkatan. Namun demikian pada Tahun 2023 dan Tahun 2024 terjadi penurunan akibat gejolak perekonomian global, serta harga komoditas dari sektor pertambangan dan penggalian yang mengalami penurunan yang berdampak signifikan pada PDRB per-kapita Kabupaten Kutai Kartanegara.

2.1.6. Ketimpangan Pendapatan

Ketimpangan Pendapatan (Gini Rasio) merupakan salah satu indikator untuk melihat ketimpangan/kesenjangan distribusi pendapatan penduduk di suatu wilayah. Pergerakan Ketimpangan Pendapatan merupakan salah satu indikator perubahan distribusi pendapatan penduduk.

Jika Ketimpangan Pendapatan mengalami penurunan mengindikasikan bahwa kualitas distribusi pendapatan penduduk mengalami perbaikan, sekaligus menandakan berkurangnya kesenjangan sosial. Nilai Rasio Gini berkisar antara 0 hingga 1. Nilai Rasio Gini yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi.





Tabel 24. Angka Ketimpangan Pendapatan Tahun 2024

No	Wilayah	2021	2022	2023	2024
1	Kabupaten Kutai Kartanegara	0.283	0.269	0,284	0,307
2	Kabupaten Paser	0.288	0.282	0,292	0,271
3	Kabupaten Kutai Barat	0.317	0.300	0,277	0,266
4	Kabupaten Kutai Timur	0.328	0.304	0,336	0,283
5	Kabupaten Berau	0.377	0.352	0,327	0,317
6	Kabupaten Penajam Paser Utara	0.263	0.274	0,299	0,258
7	Kabupaten Mahakam Ulu	0.270	0.288	0,330	0,285
8	Balikpapan	0.325	0.334	0,323	0,324
9	Samarinda	0.322	0.346	0,323	0,330
10	Kota Bontang	0.340	0.324	0,299	0,330

Sumber: BPS Kabupaten Kutai Kartanegara 2024

Ketimpangan Pendapatan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 tercatat 0,307 mengalami penurunan 0,023 poin jika dibandingkan dengan gini rasio Tahun 2023 yaitu sebesar 0,284.

2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

2.2.1. Indikator Kinerja Kunci Keluaran

Pada Indikator Kinerja Kunci Keluaran yang merupakan kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara meliputi 6 Urusan Wajib Pelayanan Dasar, 18 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, dan 8 Urusan Pilihan. Adapun rincian Capaian Indikator Kinerja Kunci Keluaran pada tabel berikut:

Tabel 25. Capaian Indikator Kinerja Kunci Keluaran

No IKK	Urusan	IKK Output		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1.a.1	Pendidikan	1.	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi	451,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
1.a.1	Pendidikan	2.	Jumlah peserta didik PAUD yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	16.554,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
1.a.1	Pendidikan	3.	Jumlah peserta didik PAUD yang menerima pembebasan biaya pendidikan	3.310,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
1.a.1	Pendidikan	4.	Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD	-41,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
1.a.1	Pendidikan	5.	Jumlah pendidik pada PAUD	1.945,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
1.a.1	Pendidikan	6.	Jumlah pendidik PAUD yang memiliki ijazah diploma empat	1.365,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	





No IKK	Urusan	IKK Output		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
			(D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini			
1.a.1	Pendidikan	7.	Jumlah kepala sekolah PAUD yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pemerintah yang berwenang	177,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
1.a.2	Pendidikan	1.	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	588,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
1.a.2	Pendidikan	2.	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	5.666,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
1.a.2	Pendidikan	3.	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	2.407,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
1.a.2	Pendidikan	4.	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	1.206,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
1.a.2	Pendidikan	5.	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan	1.015,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
1.a.2	Pendidikan	6.	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar	5.412,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
1.a.2	Pendidikan	7.	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	2.239,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
1.a.2	Pendidikan	8.	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	5.761,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
1.a.2	Pendidikan	9.	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	2.095,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
1.a.2	Pendidikan	10.	jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	946,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
1.a.2	Pendidikan	11.	jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	764,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
1.a.2	Pendidikan	12.	jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	866,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
1.a.2	Pendidikan	13.	jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	395,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
1.a.2	Pendidikan	14.	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	71.40%	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	





No IKK	Urusan	IKK Output		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1.a.2	Pendidikan	15.	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	63.27%	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
1.a.2	Pendidikan	16.	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	95.25%	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
1.a.2	Pendidikan	17.	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	81.02%	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
1.a.2	Pendidikan	18.	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	538,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
1.a.2	Pendidikan	19.	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	231,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
1.a.4	Pendidikan	1.	Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi	30,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
1.a.4	Pendidikan	2.	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	1.386,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
1.a.4	Pendidikan	3.	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima pembebasan biaya pendidikan	353,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
1.a.4	Pendidikan	4.	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan	143,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
1.a.4	Pendidikan	5.	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan	180,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
1.a.4	Pendidikan	6.	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	110,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
1.a.4	Pendidikan	7.	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	95.25%	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
1.a.4	Pendidikan	8.	Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah D-IV atau S1	28,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
1.b.1	Kesehatan	7.	Jumlah RS Rujukan kab/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	3,00	Dinas Kesehatan	
1.b.2	Kesehatan	7.	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	3,00	Dinas Kesehatan	
1.b.3	Kesehatan	1.	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	2.278.623,00	Dinas Kesehatan	





No IKK	Urusan	IKK Output		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1.b.3	Kesehatan	2.	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal	73.495,00	Dinas Kesehatan	
1.b.4	Kesehatan	1.	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	34.755,00	Dinas Kesehatan	
1.b.4	Kesehatan	2.	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	1.549,00	Dinas Kesehatan	
1.b.5	Kesehatan	1.	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	67.146,00	Dinas Kesehatan	
1.b.5	Kesehatan	2.	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	5.708,00	Dinas Kesehatan	
1.b.6	Kesehatan	1.	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	708.079,00	Dinas Kesehatan	
1.b.6	Kesehatan	2.	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	5.546,00	Dinas Kesehatan	
1.b.7	Kesehatan	1.	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	7.656.525,00	Dinas Kesehatan	
1.b.7	Kesehatan	2.	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	5.709,00	Dinas Kesehatan	
1.b.8	Kesehatan	1.	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	275.994,00	Dinas Kesehatan	
1.b.8	Kesehatan	2.	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	5.619,00	Dinas Kesehatan	
1.b.9	Kesehatan	1.	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	102.806,00	Dinas Kesehatan	
1.b.9	Kesehatan	2.	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	5.619,00	Dinas Kesehatan	
1.b.10	Kesehatan	1.	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	58.444,00	Dinas Kesehatan	
1.b.10	Kesehatan	2.	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	1.621,00	Dinas Kesehatan	
1.b.11	Kesehatan	1.	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	194.305,00	Dinas Kesehatan	
1.b.11	Kesehatan	2.	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	1.688,00	Dinas Kesehatan	
1.b.12	Kesehatan	1.	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	198,00	Dinas Kesehatan	
1.b.12	Kesehatan	2.	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	753,00	Dinas Kesehatan	
1.b.13	Kesehatan	1.	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	334.764,00	Dinas Kesehatan	
1.b.13	Kesehatan	2.	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	5.060,00	Dinas Kesehatan	
1.b.14	Kesehatan	1.	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	142.003,00	Dinas Kesehatan	
1.b.14	Kesehatan	2.	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	5.628,00	Dinas Kesehatan	





No IKK	Urusan	IKK Output		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1.c.1	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	21.811,83	Dinas Pekerjaan Umum	
1.c.1	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	2.	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	134.236,50	Dinas Pekerjaan Umum	
1.c.1	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	3.	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (HA)	1.724,58	Dinas Pekerjaan Umum	
1.c.1	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	4.	Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kab/kota (ha)	58,70	Dinas Pekerjaan Umum	
1.c.1	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	5.	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/oa pengelolaan SD Air WS Kewenangan kabupaten/kota	Tidak Ada	Dinas Pekerjaan Umum	
1.c.1	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	6.	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	Tidak Ada	Dinas Pekerjaan Umum	
1.c.1	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	7.	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kab/kota	Tidak Ada	Dinas Pekerjaan Umum	
1.c.3	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.	Persentase panjang jaringan irigasi primer kondisi baik	6,93	Dinas Pekerjaan Umum	
1.c.3	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	2.	Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	6,93	Dinas Pekerjaan Umum	
1.c.3	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	3.	Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	0,00	Dinas Pekerjaan Umum	
1.c.4	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.	Penetapan dokumen RISPAM kabupaten/kota (Ada /Tidak)	Ada	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	
1.c.4	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	2.	Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/Kota (Ada/Tidak)	Ada	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	
1.c.4	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	3.	Jumlah BUMD dan/atau UPTD Kab/Kota Penyelenggara SPAM (Ada/Tidak)	Ada	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	
1.c.4	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	4.	Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan Penyelenggaraan SPAM	1,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	
1.c.4	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	5.	Jumlah kerjasama penyelenggaraan SPAM dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lain.	Nihil	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	
1.c.5	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S	6.203,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	
1.c.5	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	2.	Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	466,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	





No IKK	Urusan	IKK Output		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1.c.5	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	3.	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T	6.671,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	
1.c.5	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	4.	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	423,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	
1.c.5	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	5.	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja	423,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	
1.c.5	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	6.	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	209,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	
1.c.5	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	7.	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	Nihil	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	
1.c.5	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	8.	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman	68.2%	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	
1.c.5	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	9.	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman	0.45%	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	
1.c.5	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	10.	Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	3.35%	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	
1.c.5	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	11.	Kinerja penyediaan sarana Pangangkutan lumpur tinja	50%	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	
1.c.5	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	12.	Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	66.67%	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	
1.c.5	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	13.	Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	0.45%	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	
1.c.5	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	14.	Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	0.23%	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	
1.c.6	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.	Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	1,00	Dinas Pekerjaan Umum	
1.c.6	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	2.	Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting	197,00	Dinas Pekerjaan Umum	
1.c.6	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	3.	Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung (Ada/Tidak)	1,00	Dinas Pekerjaan Umum	
1.c.6	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	4.	Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung (Ada/Tidak)	1,00	Dinas Pekerjaan Umum	
1.c.6	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	5.	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan	0,00	Dinas Pekerjaan Umum	
1.c.6	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	6.	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah provinsi	0,00	Dinas Pekerjaan Umum	





No IKK	Urusan		IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1.c.6	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	7.	Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota	141,00	Dinas Pekerjaan Umum	
1.c.6	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	8.	Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/dirawat	141,00	Dinas Pekerjaan Umum	
1.c.7	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan Kepala Daerah dalam SK Jalan Kewenangan Kab/Kota	63.2	Dinas Pekerjaan Umum	
1.c.7	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	2.	Panjang jalan yang dibangun	3.394,00	Dinas Pekerjaan Umum	
1.c.7	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	3.	Panjang jembatan yang dibangun	107.2	Dinas Pekerjaan Umum	
1.c.7	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	4.	Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	99.785,00	Dinas Pekerjaan Umum	
1.c.7	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	5.	Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	72,00	Dinas Pekerjaan Umum	
1.c.7	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	6.	Panjang jalan yang direkonstruksi/direhabilitasi	31.296,00	Dinas Pekerjaan Umum	
1.c.7	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	7.	Panjang jembatan yang direhabilitasi	40,00	Dinas Pekerjaan Umum	
1.c.7	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	8.	Panjang jalan yang dipelihara	4.056,00	Dinas Pekerjaan Umum	
1.c.7	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	9.	Panjang jembatan yang dipelihara	0,00	Dinas Pekerjaan Umum	
1.c.8.1	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.	Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah kabupaten/kota	3.429,00	Dinas Pekerjaan Umum	
1.c.8.1	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	2.	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota	601,00	Dinas Pekerjaan Umum	
1.c.8.1	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	3.	Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah kabupaten/kota	601,00	Dinas Pekerjaan Umum	
1.c.8.1	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	4.	Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir	1,00	Dinas Pekerjaan Umum	
1.c.8.1	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	5.	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota	53,00	Dinas Pekerjaan Umum	
1.c.8.1	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	6.	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN	47,00	Dinas Pekerjaan Umum	
1.c.8.1	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	7.	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk	53,00	Dinas Pekerjaan Umum	





No IKK	Urusan	IKK Output		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
			tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya			
1.c.8.1	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	8.	Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	652,00	Dinas Pekerjaan Umum	
1.c.8.1	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	9.	Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota	58,00	Dinas Pekerjaan Umum	
1.c.8.1	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	10.	Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabupaten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya.	601,00	Dinas Pekerjaan Umum	
1.c.8.1	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	11.	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis	601,00	Dinas Pekerjaan Umum	
1.c.8.1	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	12.	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kab/kota	601,00	Dinas Pekerjaan Umum	
1.c.8.1	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	13.	Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota	26,00	Dinas Pekerjaan Umum	
1.c.8.1	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	14.	Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	69,00	Dinas Pekerjaan Umum	
1.c.8.1	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	15.	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	1,00	Dinas Pekerjaan Umum	
1.c.8.1	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	16.	Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	0,00	Dinas Pekerjaan Umum	
1.c.8.1	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	17.	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	1,00	Dinas Pekerjaan Umum	





No IKK	Urusan	IKK Output		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1.c.8.1	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	18.	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota	69,00	Dinas Pekerjaan Umum	
1.c.8.1	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	19.	Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota	69,00	Dinas Pekerjaan Umum	
1.c.8.1	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	20.	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota	69,00	Dinas Pekerjaan Umum	
1.c.8.1	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	21.	Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota	26,00	Dinas Pekerjaan Umum	
1.c.8.1	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	22.	Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	69,00	Dinas Pekerjaan Umum	
1.c.8.1	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	23.	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	1,00	Dinas Pekerjaan Umum	
1.c.8.1	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	24.	Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	0,00	Dinas Pekerjaan Umum	
1.c.8.1	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	25.	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	1,00	Dinas Pekerjaan Umum	
1.d.1	Perumahan Rakyat	1.	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	589,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	
1.d.1	Perumahan Rakyat	2.	Jumlah rumah yang terkena bencana alam	Nihil	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	
1.d.1	Perumahan Rakyat	3.	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	Nihil	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	
1.d.1	Perumahan Rakyat	4.	Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	Nihil	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	
1.d.1	Perumahan Rakyat	5.	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	Nihil	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	
1.d.1	Perumahan Rakyat	6.	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	Nihil	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	
1.d.1	Perumahan Rakyat	7.	Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	Nihil	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	
1.d.1	Perumahan Rakyat	8.	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	Nihil	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	





No IKK	Urusan	IKK Output		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1.d.1	Perumahan Rakyat	9.	Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	7,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	
1.d.2	Perumahan Rakyat	1.	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Nihil	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	
1.d.2	Perumahan Rakyat	2.	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Nihil	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	
1.d.2	Perumahan Rakyat	3.	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Nihil	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	
1.d.2	Perumahan Rakyat	4.	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	94,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	
1.d.2	Perumahan Rakyat	5.	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Nihil	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	
1.d.2	Perumahan Rakyat	6.	Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah	7,44	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	
1.d.3	Perumahan Rakyat	1.	Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha	15,5 ha	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	
1.d.3	Perumahan Rakyat	2.	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	30,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	
1.d.3	Perumahan Rakyat	3.	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	12,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	
1.d.4	Perumahan Rakyat	1.	Jumlah rumah di kab/kota	185.433,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	
1.d.4	Perumahan Rakyat	2.	Jumlah unit PK RTLH	7.372,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	
1.d.4	Perumahan Rakyat	3.	Jumlah rumah tidak layak huni	2.525,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	
1.d.4	Perumahan Rakyat	4.	Jumlah rumah yang tidak dihuni	0,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	
1.d.4	Perumahan Rakyat	5.	Rasio rumah dan KK	1,41	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	
1.d.4	Perumahan Rakyat	6.	Jumlah rumah pembangunan baru	24,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	
1.d.5	Perumahan Rakyat	1.	Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	10,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	





No IKK	Urusan	IKK Output		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1.d.5	Perumahan Rakyat	2.	Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	3.364,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	
1.d.5	Perumahan Rakyat	3.	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	3.362,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	
1.d.5	Perumahan Rakyat	4.	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site)	3.345,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	
1.d.5	Perumahan Rakyat	5.	Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	2.003,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	
1.d.5	Perumahan Rakyat	6.	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	933,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	
1.d.5	Perumahan Rakyat	7.	Jumlah pengembang yang tersertifikasi	5,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	
1.d.5	Perumahan Rakyat	8.	Jumlah pengembang yang terregistrasi	6,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	
1.d.5	Perumahan Rakyat	9.	Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	6,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	
1.e.1	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani	992,00	Satpol PP	
1.e.1	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	2.	Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	2.795,00	Satpol PP	
1.e.1	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	3.	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	37,00	Satpol PP	
1.e.1	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	4.	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	10,00	Satpol PP	
1.e.1	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	5.	Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	11,00	Satpol PP	
1.e.1	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	6.	Tersedianya sarana prasarana minimal	554,00	Satpol PP	
1.e.3	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.	Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.e.3	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan	2.	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	





No IKK	Urusan	IKK Output		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
	Perlindungan Masyarakat		bencana sesuai jenis ancaman bencana			
1.e.4	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.	Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	100,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.e.4	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	2.	Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	kosong	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.e.4	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	3.	Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	kosong	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.e.4	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	4.	Persentase warga negara yang ikut pelatihan	100,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.e.4	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	5.	Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	100,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.e.4	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	6.	Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	kosong	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.e.5	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.	Persentase kecepatan respons kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	100,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.e.5	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	2.	Persentase kecepatan respons kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	100,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.e.5	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	3.	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	100,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.e.5	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	4.	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	1.449,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.e.6	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.	Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota	518,00	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	
1.e.6	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	2.	Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	15,00	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	





No IKK	Urusan	IKK Output		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1.e.6	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	3.	Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	63,00	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	
1.e.6	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	4.	Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap kelurahan/desa	1,00	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	
1.e.6	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	5.	Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	62,00	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	
1.e.6	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	6.	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	115,00	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	
1.e.6	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	7.	Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dimas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	1.126,00	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	
1.e.6	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	8.	Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	8,00	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	
1.f.1	Sosial	1.	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	52,00	Dinas Sosial	
1.f.1	Sosial	2.	Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang untuk masuk dalam data terpadu FM dan OTM	6.462,00	Dinas Sosial	
1.f.1	Sosial	3.	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	2,00	Dinas Sosial	
1.f.1	Sosial	4.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	6.462,00	Dinas Sosial	
1.f.1	Sosial	5.	Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	6,00	Dinas Sosial	
1.f.1	Sosial	6.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	927,00	Dinas Sosial	
1.f.1	Sosial	7.	Jumlah rumah singgah/shelter/ tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	2,00	Dinas Sosial	
1.f.1	Sosial	8.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	120,00	Dinas Sosial	





No IKK	Urusan	IKK Output		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1.f.1	Sosial	9.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	88,00	Dinas Sosial	
1.f.1	Sosial	10.	Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter	150,00	Dinas Sosial	
1.f.1	Sosial	11.	Jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia	1,00	Dinas Sosial	
1.f.1	Sosial	12.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	78,00	Dinas Sosial	
1.f.1	Sosial	13.	Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di rumah singgah	0,00	Dinas Sosial	
1.f.1	Sosial	14.	Jumlah pekerja sosial profesional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	387,00	Dinas Sosial	
1.f.1	Sosial	15.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/ Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial	114,00	Dinas Sosial	
1.f.1	Sosial	16.	Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	114,00	Dinas Sosial	
1.f.1	Sosial	17.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	6.462,00	Dinas Sosial	
1.f.1	Sosial	18.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar	4.110,00	Dinas Sosial	
1.f.1	Sosial	19.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	2.987,00	Dinas Sosial	
1.f.1	Sosial	20.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	21,00	Dinas Sosial	
1.f.1	Sosial	21.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	0,00	Dinas Sosial	
1.f.2	Sosial	1.	Jumlah korban bencana yang mendapat makanan	2.338,00	Dinas Sosial	
1.f.2	Sosial	2.	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	1.018,00	Dinas Sosial	





No IKK	Urusan	IKK Output		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1.f.2	Sosial	3.	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	33,00	Dinas Sosial	
1.f.2	Sosial	4.	Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	16,00	Dinas Sosial	
1.f.2	Sosial	5.	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	127,00	Dinas Sosial	
1.f.2	Sosial	6.	Jumlah Pekerja Sosial Profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	387,00	Dinas Sosial	
2.a.1	Tenaga Kerja	1.	Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota.	1,00	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
2.a.1	Tenaga Kerja	2.	Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja.	Tidak Ada	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
2.a.1	Tenaga Kerja	3.	Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota.	19,00	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
2.a.2	Tenaga Kerja	1.	Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster	100%	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
2.a.2	Tenaga Kerja	2.	Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	100,00	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
2.a.2	Tenaga Kerja	3.	Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	3,22	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
2.a.2	Tenaga Kerja	4.	Persentase LPK yang terakreditasi	0,00	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
2.a.2	Tenaga Kerja	5.	Persentase LPK yang memiliki perizinan	100,00	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
2.a.2	Tenaga Kerja	6.	Jumlah Panganggur yang dilatih	1.304,00	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
2.a.2	Tenaga Kerja	7.	Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	100,00	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
2.a.2	Tenaga Kerja	8.	Persentase penyerapan lulusan	51,38	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
2.a.2	Tenaga Kerja	9.	Lulusan bersertifikat kompetensi	1.304,00	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
2.a.2	Tenaga Kerja	10.	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan	0,00	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
2.a.2	Tenaga Kerja	11.	Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)	0,00	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
2.a.3	Tenaga Kerja	1.	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	0,00	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
2.a.3	Tenaga Kerja	2.	Data tingkat produktivitas total	0,00	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
2.a.4	Tenaga Kerja	1.	Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	82,38	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
2.a.4	Tenaga Kerja	2.	Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	81,25	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
2.a.4	Tenaga Kerja	3.	Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat,	16,00	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	





No IKK	Urusan	IKK Output		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
			federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan			
2.a.4	Tenaga Kerja	4.	Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah.	85,56	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
2.a.4	Tenaga Kerja	5.	Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	100,00	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
2.a.4	Tenaga Kerja	6.	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	19,96	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
2.a.4	Tenaga Kerja	7.	Jumlah mogok kerja	0,00	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
2.a.4	Tenaga Kerja	8.	Jumlah penutupan perusahaan	0,00	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
2.a.4	Tenaga Kerja	9.	Jumlah perselisihan kepentingan	0,00	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
2.a.4	Tenaga Kerja	10.	Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan	1,00	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
2.a.4	Tenaga Kerja	11.	Jumlah perselisihan PHK	83,00	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
2.a.4	Tenaga Kerja	12.	Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	384,00	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
2.a.4	Tenaga Kerja	13.	Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	6,00	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
2.a.4	Tenaga Kerja	14.	Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang diberdayakan	1,00	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
2.a.4	Tenaga Kerja	15.	Persentase perselisihan hubungan Industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	44,68	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
2.a.5	Tenaga Kerja	1.	Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota	1.626,00	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
2.a.5	Tenaga Kerja	2.	Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota	3.528,00	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
2.a.5	Tenaga Kerja	3.	Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota	40,00	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
2.a.5	Tenaga Kerja	4.	Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota	2,00	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
2.a.5	Tenaga Kerja	5.	Jumlah Pejabat Fungsional Pangantar Kerja	2,00	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
2.a.5	Tenaga Kerja	6.	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota	0,00	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
2.a.5	Tenaga Kerja	7.	Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/Kota.	1,00	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
2.a.5	Tenaga Kerja	8.	Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	0,00	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	





No IKK	Urusan	IKK Output		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
2.a.5	Tenaga Kerja	9.	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	0,00	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
2.a.5	Tenaga Kerja	10.	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata	0,00	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
2.a.5	Tenaga Kerja	11.	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan	0,00	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
2.a.5	Tenaga Kerja	12.	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	0,00	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
2.a.5	Tenaga Kerja	13.	Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	0,00	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
2.a.5	Tenaga Kerja	14.	Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk	0,00	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
2.g.1	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	37,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	
2.g.1	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.	Jumlah program PUG ada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota	250,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	
2.g.2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	0,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	
2.g.2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	0,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	
2.g.2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	100,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	
2.g.2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4.	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	0,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	
2.g.2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5.	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)	0,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	
2.g.3	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	0,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	
2.g.3	Pemberdayaan Perempuan dan	2.	Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih	0,00	Dinas Pemberdayaan	





No IKK	Urusan	IKK Output		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
	Perlindungan Anak				Perempuan Dan Perlindungan Anak	
2.g.3	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	45,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	
2.g.3	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4.	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota	0,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	
2.g.3	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5.	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	0,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	
2.g.3	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	6.	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandarisasi	0,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	
2.g.3	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7.	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	100,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	
2.h.1	Pangan	1.	Tersedianya infrastruktur perudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	11,00	Dinas Ketahanan Pangan	
2.h.1	Pangan	2.	Tersedianya dan tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	308,68	Dinas Ketahanan Pangan	
2.h.1	Pangan	3.	Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	Nihil	Dinas Ketahanan Pangan	
2.h.1	Pangan	4.	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	Ada	Dinas Ketahanan Pangan	
2.h.1	Pangan	5.	Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	1,00	Dinas Ketahanan Pangan	
2.h.1	Pangan	6.	Tertanganinya kerawanan pangan	1,00	Dinas Ketahanan Pangan	
2.h.1	Pangan	7.	Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	21,00	Dinas Ketahanan Pangan	
2.h.1	Pangan	8.	Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	9,00	Dinas Ketahanan Pangan	
2.i.1	Pertanahan	1.	SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota	100%	Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang	
2.i.1	Pertanahan	2.	SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek	100%	Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang	
2.i.1	Pertanahan	3.	SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee.	100%	Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang	
2.i.1	Pertanahan	4.	Dokumen Izin membuka tanah	100%	Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang	





No IKK	Urusan	IKK Output		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
2.i.1	Pertanahan	5.	Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota	100%	Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang	
2.j.1	Lingkungan Hidup	a.	Indeks Kualitas Air	52,05	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	
2.j.1	Lingkungan Hidup	b.	Indeks Kualitas Udara	92,73	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	
2.j.1	Lingkungan Hidup	c.	Indeks Tutupan Hutan	75,17	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	
2.j.2	Lingkungan Hidup	7.	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota	1	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	
2.j.3	Lingkungan Hidup	1.	Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	12	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	
2.j.3	Lingkungan Hidup	2.	Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di provinsi terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota	75%	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	
2.j.3	Lingkungan Hidup	3.	Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/ kota	Tidak ada	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	
2.j.3	Lingkungan Hidup	4.	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	Tidak ada	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	
2.j.3	Lingkungan Hidup	5.	Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota yang ditangani.	100%	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	
2.k.1.1	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.	Penerbitan akta perkawinan	17.799,00	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	
2.k.1.1	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.	Penerbitan akta perceraian	224,00	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	
2.k.1.1	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.	Penerbitan akta kematian	36.509,00	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	
2.k.1.1	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.	Penyajian data kependudukan	806.964,00	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	
2.l.1	Pemberdayaan masyarakat dan desa	1.	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	92,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa	
2.l.1	Pemberdayaan masyarakat dan desa	2.	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa	63,00	Dinas Pemberdayaan	





No IKK	Urusan	IKK Output		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
			yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya		Masyarakat Dan Pemerintahan Desa	
2.l.1	Pemberdayaan masyarakat dan desa	3.	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	6.797,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa	
2.l.1	Pemberdayaan masyarakat dan desa	4.	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	1.294,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa	
2.m.1	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	1.	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	ADa	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
2.m.1	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	2.	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	61,90	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
2.m.1	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	3.	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	17,00	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
2.m.1	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	4.	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	72,13	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
2.m.1	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	5.	Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	27,00	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
2.m.2	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	1.	Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	115%	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
2.m.2	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	2.	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	72,05%	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
2.m.2	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	3.	Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	114,00	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
2.m.2	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	4.	Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	84,05%	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
2.m.3	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	1.	Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	59,91%	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
2.m.3	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	2.	Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	24,29%	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
2.n.1	Perhubungan	1.	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C	3,00	Dinas Perhubungan	





No IKK	Urusan	IKK Output		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
2.n.1	Perhubungan	2.	Terlaksananya pelayanan uji berkala	4.917,00	Dinas Perhubungan	
2.n.1	Perhubungan	3.	Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	19,00	Dinas Perhubungan	
2.n.1	Perhubungan	4.	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	0,50	Dinas Perhubungan	
2.o.1	Komunikasi dan Informatika	1.	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100%	Dinas Komunikasi Dan Informatika	
2.o.1	Komunikasi dan Informatika	2.	Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	100%	Dinas Komunikasi Dan Informatika	
2.o.1	Komunikasi dan Informatika	3.	Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	23	Dinas Komunikasi Dan Informatika	
2.o.2	Komunikasi dan Informatika	7.	Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015	-	Dinas Komunikasi Dan Informatika	
2.o.2	Komunikasi dan Informatika	2.	Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	100%	Dinas Komunikasi Dan Informatika	
2.o.2	Komunikasi dan Informatika	3.	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	100%	Dinas Komunikasi Dan Informatika	
2.o.2	Komunikasi dan Informatika	4.	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	95,84	Dinas Komunikasi Dan Informatika	
2.o.2	Komunikasi dan Informatika	5.	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	100%	Dinas Komunikasi Dan Informatika	
2.o.2	Komunikasi dan Informatika	6.	Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	100%	Dinas Komunikasi Dan Informatika	
2.o.2	Komunikasi dan Informatika	7.	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	6	Dinas Komunikasi Dan Informatika	





No IKK	Urusan	IKK Output		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
2.o.2	Komunikasi dan Informatika	8.	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	100%	Dinas Komunikasi Dan Informatika	
2.o.2	Komunikasi dan Informatika	9.	Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	100%	Dinas Komunikasi Dan Informatika	
2.o.2	Komunikasi dan Informatika	10.	Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	23	Dinas Komunikasi Dan Informatika	
2.o.2	Komunikasi dan Informatika	11.	Persentase data yang dapat berbagi pakai	53	Dinas Komunikasi Dan Informatika	
2.o.2	Komunikasi dan Informatika	12.	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	91.07	Dinas Komunikasi Dan Informatika	
2.o.2	Komunikasi dan Informatika	13.	Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	100%	Dinas Komunikasi Dan Informatika	
2.o.2	Komunikasi dan Informatika	14.	Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	100%	Dinas Komunikasi Dan Informatika	
2.o.3	Komunikasi dan Informatika		Persentase Komunitas Masyarakat/mitra Strategis Pemerintah Daerah Kab./Kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah Kab / Kota	100%	Dinas Komunikasi Dan Informatika	
2.o.3	Komunikasi dan Informatika		Persentase Konten Informasi terkait program dan kebijakan pemerintah Kab./Kota sesuai denha Strategi Komunikasi (STRAKOM)	113	Dinas Komunikasi Dan Informatika	
2.o.3	Komunikasi dan Informatika	7.	Persentase Diseminasi dan Layanan Informasi Publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (Starkom) dan SOP yang telah ditetapkan	113	Dinas Komunikasi Dan Informatika	
2.p.1	Koperasi, usaha kecil dan menengah	1.	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	61,36%	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	
2.p.1	Koperasi, usaha kecil dan menengah	2.	Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	25,00%	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	
2.p.1	Koperasi, usaha kecil dan menengah	3.	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	14,94%	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	
2.p.1	Koperasi, usaha kecil dan menengah	4.	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	31,29%	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	
2.p.1	Koperasi, usaha kecil dan menengah	5.	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah	7,84%	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	





No IKK	Urusan	IKK Output		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
			keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota			
2.p.1	Koperasi, usaha kecil dan menengah	6.	Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0,32%	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	
2.p.1	Koperasi, usaha kecil dan menengah	7.	Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0,00	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	
2.p.1	Koperasi, usaha kecil dan menengah	8.	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	0,00	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	
2.p.1	Koperasi, usaha kecil dan menengah	9.	Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	13,76%	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	
2.p.1	Koperasi, usaha kecil dan menengah	10.	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	2,96%	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	
2.p.1	Koperasi, usaha kecil dan menengah	11.	Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0,44%	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	
2.p.1	Koperasi, usaha kecil dan menengah	12.	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	10,95%	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	
2.p.1	Koperasi, usaha kecil dan menengah	13.	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0,74%	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	
2.p.2	Koperasi, usaha kecil dan menengah	1.	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	0,41%	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	
2.p.2	Koperasi, usaha kecil dan menengah	2.	Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	5,27%	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	
2.p.2	Koperasi, usaha kecil dan menengah	3.	Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	0,13%	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	
2.p.2	Koperasi, usaha kecil dan menengah	4.	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	1,88%	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	
2.p.2	Koperasi, usaha kecil dan menengah	5.	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	1,63%	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	
2.p.2	Koperasi, usaha kecil dan menengah	6.	Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	2,66%	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	





No IKK	Urusan	IKK Output		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
2.p.2	Koperasi, usaha kecil dan menengah	7.	Persentase usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendampingan kelembagaan dan usaha	0,32%	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	
2.q	Penanaman Modal	1.	PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	0,00	Dinas Penanaman Modal Dan Satu Pintu	
2.q	Penanaman Modal	2.	Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas insentif penanaman modal	0,00	Dinas Penanaman Modal Dan Satu Pintu	
2.q	Penanaman Modal	3.	Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	0,00	Dinas Penanaman Modal Dan Satu Pintu	
2.q	Penanaman Modal	4.	Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	1,00	Dinas Penanaman Modal Dan Satu Pintu	
2.q	Penanaman Modal	5.	Kegiatan pameran penanaman modal	2,00	Dinas Penanaman Modal Dan Satu Pintu	
2.q	Penanaman Modal	6.	Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	1,00	Dinas Penanaman Modal Dan Satu Pintu	
2.q	Penanaman Modal	7.	Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	413,00	Dinas Penanaman Modal Dan Satu Pintu	
2.q	Penanaman Modal	8.	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	12.757,00	Dinas Penanaman Modal Dan Satu Pintu	
2.q	Penanaman Modal	9.	Laporan realisasi penanaman modal	13.650.976.500.000,00	Dinas Penanaman Modal Dan Satu Pintu	
2.q	Penanaman Modal	10.	Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten/kota	253,00	Dinas Penanaman Modal Dan Satu Pintu	
2.q	Penanaman Modal	11.	Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	341,00	Dinas Penanaman Modal Dan Satu Pintu	
2.q	Penanaman Modal	12.	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan kabupaten/kota	18,00	Dinas Penanaman Modal Dan Satu Pintu	
2.r.1	Kepemudaan dan Olah Raga	1.	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	45,00	Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga	
2.r.1	Kepemudaan dan Olah Raga	2.	Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	37,00	Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga	
2.r.2	Kepemudaan dan Olah Raga	1.	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	18,00	Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga	
2.r.2	Kepemudaan dan Olah Raga	2.	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	147,00	Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga	
2.r.3	Kepemudaan dan Olah Raga	1.	Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan	250,00	Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga	
2.r.3	Kepemudaan dan Olah Raga	2.	Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	16,00	Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga	





No IKK	Urusan	IKK Output		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
2.s.1	Statistik	1.	Tersedianya buku profil daerah	1	Dinas Komunikasi Dan Informatika	
2.s.1	Statistik	2.	Jumlah survei statistik sektoral yang dilakukan	39	Dinas Komunikasi Dan Informatika	
2.s.1	Statistik	3.	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	87	Dinas Komunikasi Dan Informatika	
2.s.1	Statistik	4.	Jumlah survei statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	39	Dinas Komunikasi Dan Informatika	
2.s.1	Statistik	5.	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	87	Dinas Komunikasi Dan Informatika	
2.s.1	Statistik	6.	Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik	100%	Dinas Komunikasi Dan Informatika	
2.s.1	Statistik	7.	Persentase kelengkapan metadata variabel dari kegiatan statistik	100%	Dinas Komunikasi Dan Informatika	
2.t	Persandian	1.	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	100%	Dinas Komunikasi Dan Informatika	
2.t	Persandian	2.	Persentase System elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip2 manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	75,71%	Dinas Komunikasi Dan Informatika	
2.t	Persandian	3.	Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan risiko kategori rendah	17,12	Dinas Komunikasi Dan Informatika	
2.t	Persandian	4.	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah daerah berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan	100%	Dinas Komunikasi Dan Informatika	
2.u	Kebudayaan	1.	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	175,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
2.u	Kebudayaan	2.	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)	22,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
2.u	Kebudayaan	3.	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	11,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
2.u	Kebudayaan	4.	Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	210,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	





No IKK	Urusan	IKK Output		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
2.u	Kebudayaan	5.	Register cagar budaya (pendaftaran, pengisian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	15,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
2.u	Kebudayaan	6.	Perlindungan cagar budaya provinsi (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran	4,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
2.u	Kebudayaan	7.	Layanan perizinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data	1,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
2.u	Kebudayaan	8.	Pengembangan cagar budaya provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi)	4,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
2.u	Kebudayaan	9.	Pemanfaatan cagar budaya provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	12,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
2.u	Kebudayaan	10.	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	472,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
2.u	Kebudayaan	11.	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan	57,42%	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
2.u	Kebudayaan	12.	Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum kabupaten/kota	57,42%	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
2.u	Kebudayaan	13.	Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	7,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
2.u	Kebudayaan	14.	Pembentukan tim ahli cagar budaya provinsi	7,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
2.u	Kebudayaan	15.	Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	5,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
2.u	Kebudayaan	16.	Pemetaan SDM cagar budaya dan permuseuman	9,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
2.u	Kebudayaan	17.	Peningkatan kompetensi SDM cagar budaya dan permuseuman kabupaten/kota	2,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
2.u	Kebudayaan	18.	Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	95,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
2.u	Kebudayaan	19.	Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	3,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
2.v.1	Perpustakaan	1.	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	1,07	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	
2.v.1	Perpustakaan	2.	Persentase ketermanfaatkan perpustakaan oleh masyarakat	10,74	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	
2.v.1	Perpustakaan	3.	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	0,0017	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	
2.v.1	Perpustakaan	4.	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	7,24	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	
2.v.1	Perpustakaan	5.	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	62,00	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	
2.v.2	Perpustakaan	1.	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/ dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya	21,00	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	





No IKK	Urusan	IKK Output		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
2.v.2	Perpustakaan	2.	Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	2,00	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	
2.v.2	Perpustakaan	3.	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	4.349,00	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	
2.w.1	Kearsipan	1.	persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	94,25	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	
2.w.1	Kearsipan	2.	persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	100,00	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	
2.w.1	Kearsipan	3.	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	100,00	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	
2.w.1	Kearsipan	4.	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	37,95	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	
2.w.2	Kearsipan	1.	Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	100,00	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	
2.w.2	Kearsipan	2.	Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	100,00	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	
2.w.2	Kearsipan	3.	Penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten/kota yang sesuai NSPK di provinsi	100,00	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	
2.w.2	Kearsipan	4.	Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan provinsi yang sesuai NSPK	100,00	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	
2.w.2	Kearsipan	5.	Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah provinsi yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	100,00	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	
2.w.2	Kearsipan	6.	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah provinsi yang sesuai NSPK	100,00	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	
3.a	Kelautan dan Perikanan	1.	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	41,695	Dinas Kelautan Dan Perikanan	
3.a	Kelautan dan Perikanan	2.	Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	100,00%	Dinas Kelautan Dan Perikanan	
3.a	Kelautan dan Perikanan	3.	Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/ kota yang diterbitkan	0,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan	
3.a	Kelautan dan Perikanan	4.	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan	500,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan	
3.a	Kelautan dan Perikanan	7.	pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan)	500,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan	





No IKK	Urusan	IKK Output		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
3.a	Kelautan dan Perikanan	5.	Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi	1.428.243.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan	
3.b.1	Pariwisata	1.	Jumlah entitas pengelolaan destinasi	kosong	Dinas Pariwisata	
3.b.1	Pariwisata	2.	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	5,00	Dinas Pariwisata	
3.b.1	Pariwisata	3.	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota	kosong	Dinas Pariwisata	
3.b.1	Pariwisata	4.	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	3.803,00	Dinas Pariwisata	
3.b.1	Pariwisata	5.	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	kosong	Dinas Pariwisata	
3.b.1	Pariwisata	6.	Jumlah event luar negeri yang diikuti provinsi	Tidak Ada	Dinas Pariwisata	
3.b.1	Pariwisata	7.	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri	kosong	Dinas Pariwisata	
3.b.1	Pariwisata	8.	Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	kosong	Dinas Pariwisata	
3.b.1	Pariwisata	9.	Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	kosong	Dinas Pariwisata	
3.b.1	Pariwisata	10.	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	kosong	Dinas Pariwisata	
3.c.1	Pertanian	1.	Sarana pertanian yang diberikan	72.77	Dinas Pertanian Dan Kesehatan Hewan	
3.c.1	Pertanian	2.	Prasarana pertanian yang digunakan	220,00	Dinas Pertanian Dan Kesehatan Hewan	
3.c.1	Pertanian	3.	Penerbitan izin usaha pertanian	0,00	Dinas Pertanian Dan Kesehatan Hewan	
3.c.1	Pertanian	4.	Persentase prasarana yang digunakan	2,20	Dinas Pertanian Dan Kesehatan Hewan	
3.c.1	Pertanian	5.	Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian di kab/kota	0,00	Dinas Pertanian Dan Kesehatan Hewan	
3.c.2	Pertanian	1.	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	6.98	Dinas Pertanian Dan Kesehatan Hewan	
3.d	Kehutanan	1.	Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura	kosong	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	
3.d	Kehutanan	2.	Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga	kosong	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	
3.d	Kehutanan	3.	Pemulihan ekosistem pada Tahura	kosong	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	
3.d	Kehutanan	4.	Menurunnya gangguan kawasan TAHURA	kosong	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	
3.e	Energi dan Sumber Daya Mineral	7.	Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kab/kota	Nihil	Energi Dan Sumber Daya Mineral (DIHAPUS)	





No IKK	Urusan	IKK Output		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
3.f.1	Perdagangan	1.	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin Pusat perbelanjaan	100,00	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	
3.f.1	Perdagangan	1.	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin Swalayan	kosong	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	
3.f.1	Perdagangan	2.	Persentase penerbitan TDG	100,00	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	
3.f.1	Perdagangan	3.	Persentase gudang yang tidak mempunyai TDG	kosong	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	
3.f.1	Perdagangan	4.	Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk :	0,00	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	
3.f.1	Perdagangan	5.	Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kab/Kota	kosong	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	
3.f.1	Perdagangan	6.	Persentase penerbitan SPKA yang tepat waktu	0,00	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	
3.f.1	Perdagangan	7.	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	12.5	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	
3.f.1	Perdagangan	8.	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	3,52	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	
3.f.2	Perdagangan	1.	Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	69.65	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	
3.f.3	Perdagangan	1.	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	42,00	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	
3.f.3	Perdagangan	2.	Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	100,00	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	
3.g.1	Perindustrian	1.	Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota	kosong	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	
3.g.2	Perindustrian	1.	Persentase terselesaikannya dokumen RIPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA	0,00	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	
3.g.3	Perindustrian	1.	Persentase Jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan	kosong	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	
3.g.3	Perindustrian	2.	Persentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri Kecil dan menengah yang diterbitkan	kosong	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	
3.g.6	Perindustrian	1.	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kab/kota yg masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan Kawasan industri di kab/kota	3,97	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	
3.h	Transmigrasi	1.	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya	1,00	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	





No IKK	Urusan	IKK Output		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
3.h	Transmigrasi	2.	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	Tidak Ada	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
3.h	Transmigrasi	3.	Jumlah satuan pemukiman yang dibina	tidak ada	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	

Sumber: lppd.kukarkab.go.id

2.2.2. Indikator Kinerja Kunci Hasil

Pada Indikator Kinerja Kunci Hasil yang merupakan kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara meliputi 6 Urusan Wajib Pelayanan Dasar, 18 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, dan 8 Urusan Pilihan. Adapun rincian Capaian Indikator Kinerja Kunci Hasil pada tabel berikut:

Tabel 26. Capaian Indikator Kinerja Kunci Hasil

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1.a.1	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD = $\frac{\text{Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD}}{\text{Jumlah anak usia 5-6 tahun pada provinsi yang bersangkutan}} \times 100\%$ = $\frac{23.889}{29.601} \times 100\%$ = 80,70	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.a.2	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar = $\frac{\text{Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar}}{\text{Jumlah anak usia 7-12 tahun pada provinsi yang bersangkutan}} \times 100\%$ = $\frac{93.627}{93.424} \times 100\%$ = 100,22	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.a.3	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama = $\frac{\text{Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama}}{\text{Jumlah anak usia 13-15 tahun pada provinsi yang bersangkutan}} \times 100\%$ = $\frac{46.924}{48.273} \times 100\%$ = 97,21	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.a.4	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan = $\frac{\text{Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan}}{\text{Jumlah anak usia 7-18 tahun}} \times 100\%$	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	





No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		dalam pendidikan kesetaraan	yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada provinsi yang bersangkutan $= \frac{1.425}{3.329} \times 100\%$ $= 42,81$		
1.b.1	Kesehatan	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan ----- x 100 % Jumlah Penduduk di kabupaten/kota $= \frac{799}{806.964} \times 100\%$ $= 0,99$	Dinas Kesehatan	
1.b.2	Kesehatan	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	Jumlah RS Rujukan yang terakreditasi ----- x 100 % Jumlah RS di kabupaten/kota $= \frac{3}{3} \times 100\%$ $= 100$	Dinas Kesehatan	
1.b.3	Kesehatan	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ----- x 100 % Jumlah ibu hamil di kabupaten/kota $= \frac{12.683}{13.528} \times 100\%$ $= 93,75$	Dinas Kesehatan	
1.b.4	Kesehatan	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan ----- x 100 % Jumlah ibu bersalin di kabupaten/kota $= \frac{11.646}{12.913} \times 100\%$ $= 90,19$	Dinas Kesehatan	
1.b.5	Kesehatan	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar ----- x 100 % Jumlah bayi baru lahir di kabupaten/kota $= \frac{12.079}{12.298} \times 100\%$ $= 98,22$	Dinas Kesehatan	
1.b.6	Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar ----- x 100 % Jumlah balita di kabupaten/kota $= \frac{58.732}{61.719} \times 100\%$ $= 95,16$	Dinas Kesehatan	





No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1.b.7	Kesehatan	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar $\frac{\text{Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan}}{\text{Jumlah anak usia pendidikan dasar di kabupaten/kota}} \times 100 \%$ $= \frac{138.785}{141.697} \times 100\%$ $= 99,01$	Dinas Kesehatan	
1.b.8	Kesehatan	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar $\frac{\text{Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan}}{\text{Jumlah orang usia 15-59 tahun di kabupaten/kota}} \times 100 \%$ $= \frac{489.710}{533.001} \times 100\%$ $= 91,88$	Dinas Kesehatan	
1.b.9	Kesehatan	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah warga negara usia 60 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar $\frac{\text{Jumlah warga negara usia 60 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan}}{\text{Jumlah orang warga negara usia 60 tahun di kabupaten/kota}} \times 100 \%$ $= \frac{51.225}{58.326} \times 100\%$ $= 87,83$	Dinas Kesehatan	
1.b.10	Kesehatan	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar $\frac{\text{Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan}}{\text{Jumlah penderita hipertensi di kabupaten/kota}} \times 100 \%$ $= \frac{57.987}{57.987} \times 100\%$ $= 100$	Dinas Kesehatan	
1.b.11	Kesehatan	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar $\frac{\text{Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan}}{\text{Jumlah penderita DM di kabupaten/kota}} \times 100 \%$ $= \frac{16.641}{16.641} \times 100\%$ $= 100$	Dinas Kesehatan	
1.b.12	Kesehatan	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar $\frac{\text{Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan}}{\text{Jumlah penderita ODGJ di kabupaten/kota}} \times 100 \%$ $= \frac{867}{867} \times 100\%$ $= 100$	Dinas Kesehatan	
1.b.13	Kesehatan	Persentase orang terduga TBC mendapatkan	Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Dinas Kesehatan	





No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		pelayanan TBC sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah penderita TBC di kabupaten/kota}}{\text{Jumlah penderita TBC di kabupaten/kota}} \times 100 \%$ $= \frac{23.722}{23.722} \times 100\%$ $= 100$		
1.b.14	Kesehatan	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar}}{\text{Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV di kabupaten/kota}} \times 100 \%$ $= \frac{17.467}{17.467} \times 100\%$ $= 100$	Dinas Kesehatan	
1.c.1	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	$\frac{\text{Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha)}}{\text{Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha)}} \times 100 \%$ $= \frac{0}{1} \times 100\%$ $= 0$	Dinas Pekerjaan Umum	Berdasarkan PermenPUPR No.04/PRT/M/2015 Kab. Kutai Kartanegara Tidak mempunyai kewenangan WS
1.c.2	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	$\frac{\text{Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten/Kota (m)}}{\text{Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan kabupaten/kota (m)}} \times 100 \%$ $= \frac{0}{1} \times 100\%$ $= 0$	Dinas Pekerjaan Umum	Berdasarkan PermenPUPR No.04/PRT/M/2015 Kab. Kutai Kartanegara Tidak mempunyai kewenangan WS
1.c.3	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	$\frac{\text{Luas irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasikan dan pelihara (ha) di tahun eksisting}}{\text{luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota}} \times 100 \%$ $= \frac{9.415,11}{13.429,43} \times 100\%$ $= 70,11$	Dinas Pekerjaan Umum	
1.c.4	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan	Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	





No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	dalam sebuah kabupaten/kota. ----- x 100 % Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten/kota tersebut. $= \frac{156.924}{195.660} \times 100\%$ $= 80,20$		
1.c.5	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT+ jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD ----- x 100 % Jumlah rumah di Kabupaten A $= \frac{165.215}{185.433} \times 100\%$ $= 89,10$	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
1.c.6	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	Jumlah pemanfaatan IMB yang sesuai peruntukannya ----- x 100 % Jumlah IMB yang berlaku $= \frac{1.738}{1.738} \times 100\%$ $= 100$	Dinas Pekerjaan Umum	
1.c.7	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	Jumlah panjang jalan dalam kondisi mantap ----- x 100 % Jumlah total panjang jalan kabupaten/kota $= \frac{1.388,515}{2.196,94} \times 100\%$ $= 63,20$	Dinas Pekerjaan Umum	
1.c.8.1	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kab./kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis ----- x 100 % Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di wilayah Kabupaten/Kota $= \frac{601}{17.528} \times 100\%$ $= 3,43$	Dinas Pekerjaan Umum	
1.c.8.2	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa terjadi kecelakaan konstruksi ----- x 100 % Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya $= \frac{652}{652} \times 100\%$ $= 100$	Dinas Pekerjaan Umum	





No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1.d.1	Perumahan Rakyat	Hunian untuk Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n ----- x 100 % Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n $= \frac{0}{1} \times 100\%$ $= 0$	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Tidak adanya bencana yang terjadi yang penetapan status bencananya ditetapkan oleh kepala daerah.
1.d.2	Perumahan Rakyat	Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	Rumah Tangga Penerima Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni ----- x 100 % Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan $= \frac{94}{94} \times 100\%$ $= 100$	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
1.d.3	Perumahan Rakyat	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha) ----- x 100 % Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha $= \frac{12}{15,5} \times 100\%$ $= 77,42$	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
1.d.4	Perumahan Rakyat	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Jumlah unit rumah tidak layak huni ----- x 100 % Jumlah total unit rumah kabupaten/kota $= \frac{2.525}{185.433} \times 100\%$ $= 1,36$	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
1.d.5	Perumahan Rakyat	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU ----- x 100 % Jumlah unit rumah kab/kota $= \frac{573}{3.535} \times 100\%$ $= 16,21$	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
1.e.1	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Jumlah pengaduan yang ditangani ----- x 100 % Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk $= \frac{16}{16} \times 100\%$ $= 100$	Satpol PP	





No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1.e.2	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan ----- x 100% Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi $= \frac{37}{60} \times 100\%$ $= 61,67$	Satpol PP	
1.e.3	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana ----- x 100 % Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana sesuai target yang ditetapkan $= \frac{169.019}{501.417} \times 100\%$ $= 33,71$	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.e.4	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana ----- x 100 % Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana $= \frac{550}{501.417} \times 100\%$ $= 0,11$	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.e.5	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana ----- x 100 % Jumlah satu dokumen RPB lengkap dan sudah disahkan $= \frac{1.449}{1.449} \times 100\%$ $= 100$	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.e.6	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah ditambah jumlah layanan pemadaman di kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau di bawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah ----- x 100 % Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/kota $= \frac{100}{114} \times 100\%$	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	





No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
			= 92,48		
1.e.7	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Rata-rata waktu tanggap dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pamanaman kebakaran = 11,10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.f.1	Sosial	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti ----- x 100 % Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis $= \frac{6.462}{6.462} \times 100\%$ = 100	Dinas Sosial	
1.f.2	Sosial	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran ----- x 100 % Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota $= \frac{2.338}{2.388} \times 100\%$ =100	Dinas Sosial	
2.a.1	Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD ----- x 100% Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di kabupaten/kota $= \frac{9}{9} \times 100\%$ = 100	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
2.a.2	Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi ----- x 100% Jumlah tenaga kerja keseluruhan $= \frac{15.878}{110.748} \times 100\%$ = 14,34	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
2.a.3	Tenaga Kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan) ----- x 100% Jumlah tenaga kerja $= \frac{2.047E + 14}{110.478} \times 100\%$	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	





No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
			= 185.285.758.250,51		
2.a.4	Tenaga Kerja	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	$\frac{\text{Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak}}{\text{Jumlah Perusahaan}} \times 100\%$ $= \frac{42}{471} \times 100\%$ $= 8,92$	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
2.a.5	Tenaga Kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah pencari kerja yang ditempatkan}}{\text{Jumlah pencari kerja yang terdaftar}} \times 100\%$ $= \frac{1.744}{3.528} \times 100\%$ $= 49,43$	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
2.g.1	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	$\frac{\text{Jumlah ARG pada belanja langsung APBD}}{\text{Jumlah seluruh belanja langsung APBD}} \times 100\%$ $= \frac{2.640.190.714.198}{10.787.858.585.049} \times 100\%$ $= 24,47$	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.g.2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	$\frac{\text{Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten/kota yang didampingi}}{\text{Jumlah Anak (Penduduk usia Kurang dari 18 tahun)}} \times 100\%$ $= \frac{94}{94} \times 100\%$ $= 100$	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.g.3	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	$\frac{\text{Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan}}{\text{Jumlah penduduk perempuan}} \times 100.000$ $= \frac{35}{386.220} \times 100.000$ $= 9,06$	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.h.1	Pangan	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	$\frac{\text{Jumlah cadangan pangan}}{\text{Jumlah kebutuhan pangan}} \times 100\%$ $= \frac{156,62}{125} \times 100\%$ $= 123,70$	Dinas Ketahanan Pangan	
2.i.1	Pertanahan	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	$\frac{\text{Luas tanah sesuai peruntukan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KPPR)}}{\text{seluruh luas tanah yang diberikan kegiatan pemanfaatan ruang (KPPR)}} \times 100\%$	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	





No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
			$= \frac{172.607.593,23}{172.607.593,23} \times 100\%$ $= 100$		
2.i.2	Pertanahan	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum ----- x 100% Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum $= \frac{40.252}{40.252} \times 100\%$ $= 100$	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	
2.i.3	Pertanahan	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas izin lokasi ----- x 100% Luas izin lokasi yang diterbitkan $= \frac{28.840.247,08}{172.607.593,23} \times 100\%$ $= 16,71$	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	
2.i.4	Pertanahan	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Jumlah penerima tanah obyek landreform dengan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0.5 ha; ----- x 100% Jumlah penerima tanah obyek landreform $= \frac{72}{72} \times 100\%$ $= 100$	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	
2.i.5	Pertanahan	Tersedianya tanah untuk masyarakat	Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan Izin Membuka Tanah ----- x 100% Luas Izin Membuka Tanah yang diterbitkan $= \frac{28.844.879}{28.844.879} \times 100\%$ $= 100$	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	
2.i.6	Pertanahan	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani ----- x 100% Jumlah pengaduan sengketa tanah garapan $= \frac{19}{19} \times 100\%$ $= 100$	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	
2.j.1	Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	73,59	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
2.j.2	Lingkungan Hidup	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	Jumlah Total Vol sampah yang dapat ditangani ----- x 100% Jumlah seluruh Total vol timbunan sampah tahun berjalan kabupaten/kota $= \frac{78.451,83}{136.061,02} \times 100\%$	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	





No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
			= 57,66		
2.j.3	Lingkungan Hidup	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Kab/Kota ----- x 100% usaha dan/atau kegiatan dilakukan pemeriksaan $= \frac{59}{108} \times 100\%$ = 54,63	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
2.k.1.1	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Perekaman KTP elektronik	Jumlah Penduduk wajib KTP-el yang telah melakukan perekaman ----- x 100% Jumlah penduduk wajib KTP-el $= \frac{556.386}{559.850} \times 100\%$ = 99,38	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
2.k.1.2	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA ----- x 100% Jumlah anak usia 0-17 tahun $= \frac{166.796}{247.114} \times 100\%$ = 67,50	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
2.k.1.3	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kepemilikan akta kelahiran	Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta lahir ----- x 100% Jumlah anak usia 0-18 tahun $= \frac{254.269}{256.421} \times 100\%$ = 99,16	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
2.k.1.4	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan PKS ----- x 100% Jumlah OPD $= \frac{37}{55} \times 100\%$ = 67,27	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
2.l.1	Pemberdayaan masyarakat dan desa	Persentase pengentasan desa tertinggal	Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun ----- x 100% Jumlah desa tertinggal (per-awal tahun n) $= \frac{1}{1} \times 100\%$ = 100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Sudah Tidak ada lagi Desa Tertinggal di Kab. Kutai Kartanegara





No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
2.l.2	Pemberdayaan masyarakat dan desa	Persentase peningkatan status desa mandiri	Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun ----- x 100% Jumlah desa berkembang (per-awal tahun n) = $\frac{25}{48} \times 100\%$ = 52,08	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	
2.m.1	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	TFR (Angka Kelahiran Total)	2,24	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.m.2	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah peserta KB Aktif Modern ----- x 100% Jumlah Pasangan Usia Subur = $\frac{82.600}{115.210} \times 100\%$ = 66,90	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.m.3	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani ----- x 100% Jumlah Pasangan Usia Subur = $\frac{9.131}{115.210} \times 100\%$ = 7,93	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.n.1	Perhubungan	Rasio konektivitas kabupaten/kota	0,61	Dinas Perhubungan	
2.n.2	Perhubungan	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	0,38	Dinas Perhubungan	
2.o.1	Komunikasi dan Informatika	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo ----- x 100% Jumlah OPD = $\frac{56}{56} \times 100\%$ = 100	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.o.2	Komunikasi dan Informatika	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi ----- x 100% Jumlah Layanan Publik = $\frac{8}{8} \times 100\%$ = 100	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.o.3	Komunikasi dan Informatika	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota ----- x 100% Jumlah penduduk = $\frac{514.320}{557.742} \times 100\%$	Dinas Komunikasi dan Informatika	





No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
			= 92,21		
2.p.1	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan aset $\frac{\text{-----}}{\text{Jumlah seluruh koperasi}} \times 100\%$ $= \frac{71}{137} \times 100\%$ $= 51,82$	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
2.p.2	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha $\frac{\text{-----}}{\text{Jumlah usaha mikro keseluruhan}} \times 100\%$ $= \frac{44.388}{59.304} \times 100\%$ $= 74,85$	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
2.q	Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten / Kota	(Jumlah investasi tahun n- jumlah investasi tahun n-1) di kabupaten/kota $\frac{\text{-----}}{\text{Jumlah investasi tahun n-1 di kabupaten/kota}} \times 100\%$ $= \frac{1.606.630.211.198}{14.809.258.004.235} \times 100\%$ $= 10,85$	Dinas Penanaman Modal dan Satu Pintu	
2.r.1	Kepemudaan dan Olah Raga	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di provinsi $\frac{\text{-----}}{\text{Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten/kota}} \times 100\%$ $= \frac{2.313}{204.088} \times 100\%$ $= 1,13$	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	
2.r.2	Kepemudaan dan Olah Raga	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yg menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kabupaten/kota $\frac{\text{-----}}{\text{jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten/kota}} \times 100\%$ $= \frac{1.812}{204.088} \times 100\%$ $= 0,89$	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	
2.r.3	Kepemudaan dan Olah Raga	Peningkatan prestasi olahraga	175,00	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	
2.s.1	Statistik	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah $\frac{\text{-----}}{\text{jumlah OPD}} \times 100\%$ $= \frac{56}{56} \times 100\%$	Dinas Komunikasi dan Informatika	





No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
			= 100		
2.s.2	Statistik	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah $\frac{\text{-----}}{\text{jumlah OPD}} \times 100\%$ $= \frac{56}{56} \times 100\%$ $= 100$	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.t	Persandian	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Jumlah nilai per area keamanan informasi $\frac{\text{-----}}{\text{Jumlah area penilaian}} \times 100\%$ $= \frac{401}{645} \times 100\%$ $= 62,17$	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.u	Kebudayaan	Terlestarikannya Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan $\frac{\text{-----}}{\text{Jumlah cagar budaya yang terdata}} \times 100\%$ $= \frac{15}{15} \times 100\%$ $= 100$	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2.v.1	Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	68,17	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
2.v.2	Perpustakaan	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	62,52	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
2.w.1	Kearsipan	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Ps40 dan 59 U 43/2009)	83,05	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
2.w.2	Kearsipan	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	100	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
3.a	Kelautan dan Perikanan	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota $\frac{\text{-----}}{\text{Target Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) yang ditetapkan}} \times 100\%$ $= \frac{323.178}{280.782} \times 100\%$ $= 115,10$	Dinas Kelautan dan Perikanan	





No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
3.b.1	Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	$\frac{\text{Jumlah wisatawan tahun } n - \text{Jumlah wisatawan tahun } n-1}{\text{Jumlah wisatawan tahun } n-1} \times 100\%$ $= \frac{2.273}{1.530} \times 100\%$ $= 148,56$	Dinas Pariwisata	
3.b.2	Pariwisata	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	$\frac{\text{Jumlah wisatawan tahun } n - \text{Jumlah wisatawan tahun } n-1}{\text{Jumlah wisatawan tahun } n-1} \times 100\%$ $= \frac{-314895}{1.530.444} \times 100\%$ $= -20,58$	Dinas Pariwisata	
3.b.3	Pariwisata	Tingkat hunian akomodasi	$\frac{\text{Jumlah kamar yang terjual}}{\text{Jumlah kamar yang tersedia}} \times 100\%$ $= \frac{62.689}{529.980} \times 100\%$ $= 11,83$	Dinas Pariwisata	
3.b.4	Pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	$\frac{\text{Total Nilai kontribusi sektor pariwisata pada PDRB}}{\text{Jumlah kamar yang tersedia}} \times 100\%$ $= \frac{766.900.000.000}{2.0470014E + 14} \times 100\%$ $= 0,37$	Dinas Pariwisata	
3.b.5	Pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	$\frac{\text{Total realisasi PAD dari sektor pariwisata}}{\text{Total realisasi PAD}} \times 100\%$ $= \frac{57.271.466.466}{787.600.170.609,48} \times 100\%$ $= 7,27$	Dinas Pariwisata	
3.c.1	Pertanian	Produktivitas pertanian per hektar per tahun Produktivitas pertanian per tahun	$\frac{\text{Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun}}{\text{luas panen}} \times 100\%$ $= \frac{127.786}{25.294} \times 100\%$ $= 505,20$	Dinas Pertanian dan Kesehatan Hewan	
3.c.2	Pertanian	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular Persentase kasus zoonosis kab/kota	$\frac{\text{Jumlah kejadian penyakit/kasus tahun berjalan (t) - jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1)}}{\text{Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1)}} \times 100\%$ $= \frac{-3}{43} \times 100\%$ $= -6,98$	Dinas Pertanian dan Kesehatan Hewan	
3.d	Kehutanan	n/a		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	





No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
3.e	Energi dan Sumber Daya Mineral	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin $\frac{\text{Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi}}{\text{Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi}} \times 100\%$ $= \frac{0}{1} \times 100\%$ $= 0$	Bagian Tata Pemerintahan	Potensi Masih Rendah, belum ada yang memanfaatkan
3.f.1	Perdagangan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan $\frac{\text{Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin}}{\text{Jumlah pelaku usaha di wilayah Kab/Kota}} \times 100\%$ $= \frac{125}{135} \times 100\%$ $= 92,59$	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
3.f.2	Perdagangan	Persentase kinerja realisasi pupuk	Realisasi $\frac{\text{Realisasi}}{\text{RDKK}} \times 100\%$ $= \frac{6.627,177}{10.572,556} \times 100\%$ $= 62,68$	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
3.f.3	Perdagangan	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	jumlah UTTP Bertanda Tera Sah yang berlaku pada tahun berjalan $\frac{\text{jumlah UTTP Bertanda Tera Sah yang berlaku}}{\text{jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kabupaten/kota}} \times 100\%$ $= \frac{3.028}{7.212} \times 100\%$ $= 41,99$	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
3.g.1	Perindustrian	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di provinsi	(Jumlah Industri kecil dan menengah tahun n– Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1) $\frac{\text{Jumlah industri kecil dan menengah tahun n} - \text{Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1}}{\text{Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1}} \times 100\%$ $= \frac{28}{2.795} \times 100\%$ $= 1$	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
3.g.2	Perindustrian	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP $= 0$	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
3.g.3	Perindustrian	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan $\frac{\text{Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis}}{\text{Jumlah izin yang dikeluarkan}} \times 100\%$	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	





No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		yang dikeluarkan oleh instansi terkait	$= \frac{118}{1.598} \times 100\%$ $= 7,38$		
3.g.4	Perindustrian	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan $\text{-----} \times 100\%$ Jumlah izin yang dikeluarkan $= \frac{0}{1} \times 100\%$ $= 0$	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Belum ada Permohonan yang masuk IUKI dan IPKI, sehingga belum pernah dilakukan pemantauan dan pengawasan
3.g.5	Perindustrian	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan $\text{-----} \times 100\%$ Jumlah izin yang dikeluarkan $= \frac{0}{1} \times 100\%$ $= 0$	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Belum ada Permohonan yang masuk IUKI dan IPKI, sehingga belum pernah dilakukan pemantauan dan pengawasan
3.g.6	Perindustrian	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	65,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
3.h	Transmigrasi	n/a		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	

Sumber: elppd.kemendagri.go.id

2.2.3. Indikator Kinerja Kunci Urusan Penunjang

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
4.a.1	Perencanaan dan Keuangan	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	Jumlah belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan $\text{-----} \times 100 \%$ Jumlah APBD $= \frac{755.723.283.282}{12.808.056.939.981} \times 100\%$ $= 5,90$	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
4.a.2	Perencanaan dan Keuangan	Rasio PAD	Jumlah PAD $\text{-----} \times 100\%$ Jumlah APBD non migas $= \frac{78.760.017.060,48}{12.702.063.635.451} \times 100\%$ $= 6,20$	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
4.a.3	Perencanaan dan Keuangan	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3	Inspektorat	
4.a.4	Perencanaan dan Keuangan	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 3	Inspektorat	
4.a.5	Perencanaan dan Keuangan	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	Jumlah belanja urusan pemerintahan – transfer expenditures $\text{-----} \times 100\%$ jumlah belanja APBD	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	





No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
			$= \frac{6.101.539.756.934,9}{12.808.056.939.981} \times 100\%$ $= 47,64$		
4.a.6	Perencanaan dan Keuangan	Opini Laporan Keuangan 10 Tahun Terakhir	9 Tahun Terakhir dg Opini WTP	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
4.b.1	Pengadaan	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. yang ditandatangani pada kuartal pertama	jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun n $\text{-----} \times 100\%$ jumlah kontrak keseluruhan tahun n $= \frac{0}{28.662} \times 100\% = 0$	Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Setda	
4.b.2	Pengadaan	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif $\text{-----} \times 100\%$ Jumlah pengadaan yang dilakukan tanpa metode kompetitif $= \frac{19.367}{28.662} \times 100\%$ $= 67,57$	Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Setda	
4.b.3	Pengadaan	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Jumlah nilai belanja langsung yang melalui pengadaan $\text{-----} \times 100\%$ total belanja langsung $= \frac{6.756.688.665.724,3}{9.448.467.074.165,9} \times 100\%$ $= 71,51$	Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Setda	
4.b.4	Pengadaan	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dalam Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n) - Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dalam Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n-1) $\text{-----} \times 100\%$ Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dalam Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n-1) $= \frac{3.606.436.372.530,8}{5.065.604.151.246,5} \times 100\%$ $= 71,19$	Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Setda	
4.c.1	Kepegawaian	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah Pegawai menurut Pendidikan PT ke atas $\text{-----} \times 100\%$ Jumlah pegawai dengan pendidikan SMA ke bawah $= \frac{3.139}{6.239} \times 100\%$ $= 50,31$	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	





No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
4.c.2	Kepegawaian	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai PNS fungsional (di luar guru dan tenaga kesehatan) ----- X 100% seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) $= \frac{628}{6.239} \times 100\%$ $= 10,07$	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	
4.c.3	Kepegawaian	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai Fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi ----- X 100% seluruh jumlah pegawai non Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) $= \frac{316}{628} \times 100\%$ $= 50,32$	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	
4.d.1	Manajemen Keuangan	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Nilai absolut dari Total belanja dalam realisasi ----- X 100% total belanja APBD dikurangi satu $= \frac{12.808.056.939.981}{14.531.000.000.000} \times 100\%$ $= 11,86$	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
4.d.2	Manajemen Keuangan	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	Nilai absolut dari Total PAD dalam realisasi ----- X 100% dibagi total PAD dalam APBD dikurangi satu $= \frac{787.600.170.609,48}{732.901.415.061} \times 100\%$ $= 7,46$	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
4.d.3	Manajemen Keuangan	Manajemen Aset	Apakah ada daftar aset tetap? (Ya/Tidak) Apakah ada manual untuk menyusun daftar aset tetap? (Ya/Tidak) Apakah ada proses inventarisasi aset tahunan? (Ya/Tidak) Apakah nilai aset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak) $= 4$	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
4.d.4	Manajemen Keuangan	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Nilai realisasi SiLPA ----- X 100% total belanja anggaran tahun sebelumnya $= \frac{165.935.483.219,76}{7.780.045.306.259} \times 100\%$ $= 2,13$	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
4.e.1	Transparansi dan Partisipasi Publik	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on	Realisasi belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda ----- X 100% Belanja anggaran untuk unit	Bagian Tata Pemerintahan	





No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		resources available to frontline service delivery units)	pelayanan dapat diakses di website Pemda $= \frac{1.017.300.754.383,4}{1.549.440.103.693} \times 100\%$ $= 65,66$		
4.e.2	Transparansi dan Partisipasi Publik	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website Pemda $\frac{\text{Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website Pemda}}{\text{total jumlah dokumen yang telah dirinci}} \times 100\%$ $= \frac{12}{12} \times 100\%$ $= 100$	Dinas Komunikasi dan Informatika	

Sumber: elppd.kemendagri.go.id

2.3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan bentuk akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja diwujudkan dalam pelaporan kinerja melalui pengukuran kinerja atas perencanaan kinerja sehingga dapat diketahui capaian kinerjanya, sumber daya yang mendukung keberhasilan atau ketidakberhasilan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja.

2.3.1. Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024, dan dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024, serta dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara dan Perubahannya Tahun 2024, telah disusun dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 yang ditandatangani Bupati Kutai Kartanegara. Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:





Tabel 27. Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET 2024
1	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1	Nilai SAKIP	Nilai	73,00
2	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	2	Indeks Persepsi Anti Korupsi	Nilai	6,75
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	3	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik	Nilai	8,95
4	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan, Ketahanan Sosial dan Pelestarian Kebudayaan	4	Indeks Pendidikan	Nilai	0,70
		5	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Nilai	51,00
5	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	6	Indeks Kesehatan	Nilai	0,817
6	Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan	7	Indeks Pembangunan Gender	Nilai	79,10
7	Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat dan kualitas hidup masyarakat	8	Indeks Gini	Nilai	0,28
		9	Indeks Desa Membangun	Nilai	0,745
8	Menurunnya pengangguran di masyarakat	10	Tingkat Pengangguran Terbuka	Nilai	4,40
		11	PDRB Per Kapita	Nilai	197,62
9	Meningkatnya pengelolaan pertanian berbasis potensi unggulan daerah	12	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Nilai	6,60
10	Meningkatnya Daya Saing Pariwisata Daerah	13	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata	Persen	3,42
11	Berkembangnya Ekosistem Ekonomi Kreatif	14	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	Persen	7,09
12	Meningkatnya daya saing investasi daerah	15	Tingkat Pertumbuhan Investasi	Persen	1,75
13	Meningkatnya kualitas permukiman masyarakat dan ketersediaan air bersih	16	Cakupan Layanan Air Bersih	Persen	92,16
		17	Persentase Rumah Layak Huni	Persen	90,89
14	Meningkatnya aksesibilitas dan konektivitas wilayah	18	Indeks Aksesibilitas Wilayah	Nilai	86,18
15	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	19	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	73,81
16	Meningkatnya ketahanan bencana daerah	20	Indeks Risiko Bencana	Nilai	104,28

Sumber: Perjanjian Kinerja Bupati Kutai Kartanegara dan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026





2.3.2. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja

Pelaporan kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024, disajikan melalui pengukuran kinerja atas perencanaan kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Sub bab ini akan disajikan target kinerja dalam perjanjian kinerja, pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja, capaian kinerja tahun sebelumnya, capaian kinerja dengan target pembangunan jangka menengah, analisis efisiensi penggunaan sumber daya dibanding dengan capaian kinerja dan analisis program dan kegiatan yang mendukung capaian target kinerja, serta di uraikan cara pengukuran kinerja, dan analisis pencapaian kinerja sasaran. Analisis pencapaian kinerja menjelaskan cara menghitung, capaian kinerja, membandingkan realisasi dengan target, capaian tahun lalu, serta capaian kinerja provinsi dan pemerintah pusat sepanjang datanya tersedia. Kemudian dijelaskan program yang mendukung per sasaran, realisasi anggaran per sasaran, faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian sasaran, serta prestasi yang terkait sasaran/ indikator kinerja.

a) Pengukuran Kinerja

Untuk mengukur persentase capaian kinerja dari masing-masing indikator maka ada dua jenis rumus yang digunakan yaitu:

1. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, atau sebaliknya jika realisasi semakin rendah pencapaian kinerja semakin rendah maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, atau sebaliknya jika realisasi makin rendah





pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase Capaian} = \left(1 + \left(\frac{\text{Target} - \text{Realisasi}}{\text{Target}}\right)\right) \times 100\%$$

Pengukuran terhadap pencapaian komponen kegiatan dan sasaran ini dituangkan dalam format Pengukuran Kinerja (PK), selanjutnya untuk menilai dan menyimpulkan sampai sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran tersebut digunakan alat bantu berupa **skala ordinal**. Adapun skala ordinal yang digunakan dalam laporan akuntabilitas ini adalah sebagai berikut:

Tabel 28. Skala Ordinal Pengukuran Kinerja Sasaran Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024

Skala Ordinal Pengukuran Sasaran		
No.	Nilai Kinerja	Predikat Kinerja
1	≥95	Sangat Berhasil
2	80 s/d <95	Berhasil
3	50 s/d <80	Cukup Berhasil
4	<50	Kurang Berhasil

Hasil dari pengukuran kinerja melalui skala ordinal tersebut digunakan untuk menilai sampai sejauh mana tingkat keberhasilan maupun ketidakberhasilan kinerja guna meningkatkan dan memperbaiki kinerja organisasi, serta mengidentifikasi faktor-faktor apa yang menjadi hambatan dan kendala pencapaian sasaran, untuk selanjutnya menjadi bahan perumusan langkah dan strategi kedepan yang perlu dilaksanakan.

Hasil pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara atas Perjanjian Kinerja (PK) Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 yang terdiri dari 16 sasaran, adalah sebagai berikut:





Tabel 29. Rekapitulasi Capaian Kinerja Sasaran Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET 2024	CAPAIAN 2024	% CAPAIAN
1	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1	Nilai SAKIP	Nilai	73,00	65,92	90,30
Rata-rata Capaian							90,30
2	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	2	Indeks Persepsi Anti Korupsi	Nilai	6,75	8,96	132,71
Rata-rata Capaian							132,71
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	3	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik	Nilai	8,95	8,74	97,65
Rata-rata Capaian							97,65
4	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan, Ketahanan Sosial dan Pelestarian Kebudayaan	4	Indeks Pendidikan	Nilai	0,70	0,71	101,43
		5	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Nilai	51,00	57,42	112,59
Rata-rata Capaian							107,01
5	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	6	Indeks Kesehatan	Nilai	0,817	0,81	99,14
Rata-rata Capaian							99,14
6	Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan	7	Indeks Pembangunan Gender	Nilai	79,10	79,600	100,63
Rata-rata Capaian							100,63
7	Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat dan kualitas hidup masyarakat	8	Indeks Gini	Nilai	0,28	0,307	90,36
		9	Indeks Desa Membangun	Nilai	0,745	0,7969	106,97
Rata-rata Capaian							98,66
8	Menurunnya pengangguran di masyarakat	10	Tingkat Pengangguran Terbuka	Nilai	4,40	4,11	106,59
		11	PDRB Per Kapita	Nilai	197,62	240,87	121,89
Rata-rata Capaian							114,24
9	Meningkatnya pengelolaan pertanian berbasis potensi unggulan daerah	12	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Nilai	6,60	2,94	44,55
Rata-rata Capaian							44,55





NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET 2024	CAPAIAN 2024	% CAPAIAN
10	Meningkatnya Daya Saing Pariwisata Daerah	13	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata	Persen	3,42	7,85	229,53
Rata-rata Capaian							229,53
11	Berkembangnya Ekosistem Ekonomi Kreatif	14	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	Persen	7,09	7,70	108,60
Rata-rata Capaian							108,60
12	Meningkatnya daya saing investasi daerah	15	Tingkat Pertumbuhan Investasi	Persen	1,75	10,85	620,00
Rata-rata Capaian							620,00
13	Meningkatnya kualitas permukiman masyarakat dan ketersediaan air bersih	16	Cakupan Layanan Air Bersih	Persen	92,16	80,20	87,02
		17	Persentase Rumah Layak Huni	Persen	90,89	98,64	108,53
Rata-rata Capaian							97,77
14	Meningkatnya aksesibilitas dan konektivitas wilayah	18	Indeks Aksesibilitas Wilayah	Nilai	86,18	76,045	88,24
Rata-rata Capaian							88,24
15	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	19	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	73,81	73,59	99,70
Rata-rata Capaian							99,70
16	Meningkatnya ketahanan bencana daerah	20	Indeks Risiko Bencana	Nilai	104,28	118,80	86,08
Rata-rata Capaian							86,08

Adapun pengkategorian hasil pengukuran kinerja seluruh sasaran disajikan dalam Tabel berikut:

Tabel 30. Pengkategorian Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	Jumlah Indikator	Rata-Rata Capaian (%)	≤50%	51%≤80%	80%≤95%	≥95%
1	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1	90,30			Berhasil	
2	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	1	132,71				Sangat Berhasil
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1	97,65				Sangat Berhasil





NO	SASARAN STRATEGIS	Jumlah Indikator	Rata-Rata Capaian (%)	≤50%	51%≤80%	80%≤95%	≥95%
4	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan, Ketahanan Sosial dan Pelestarian Kebudayaan	2	107,01				Sangat Berhasil
5	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	1	99,14				Sangat Berhasil
6	Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan	1	100,63				Sangat Berhasil
7	Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat dan kualitas hidup masyarakat	2	98,66				Sangat Berhasil
8	Menurunnya pengangguran di masyarakat	2	114,24				Sangat Berhasil
9	Meningkatnya pengelolaan pertanian berbasis potensi unggulan daerah	1	44,55	Kurang Berhasil			
10	Meningkatnya Daya Saing Pariwisata Daerah	1	229,53				Sangat Berhasil
11	Berkembangnya Ekosistem Ekonomi Kreatif	1	108,60				Sangat Berhasil
12	Meningkatnya daya saing investasi daerah	1	620,00				Sangat Berhasil
13	Meningkatnya kualitas permukiman masyarakat dan ketersediaan air bersih	2	97,77				Sangat Berhasil
14	Meningkatnya aksesibilitas dan konektivitas wilayah	1	88,24			Berhasil	
15	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1	99,70				Sangat Berhasil
16	Meningkatnya ketahanan bencana daerah	1	86,08			Berhasil	

Berdasarkan kedua tabel tersebut di atas, maka kinerja capaian Sasaran dapat dikategorikan sebagai berikut:

- Capaian kinerja ≥ 95 % kategori “sangat berhasil” sebanyak 12 sasaran, atau 75%;
- Capaian kinerja 80 s/d <95% kategori “berhasil” sebanyak 3 sasaran, atau 18,75%;





- c) Capaian kinerja 50 s/d <80% kategori “cukup berhasil” sebanyak 0 sasaran, atau 0%; dan
- d) Capaian kinerja 0 s/d< 50% kategori “kurang berhasil” sebanyak 1 sasaran, atau 6,25%.

Pencapaian kinerja 16 sasaran tersebut, dikelompokkan sesuai predikat kinerja sebagai berikut:

Tabel 31. Predikat Nilai Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024

No	Predikat Kinerja	Jumlah Sasaran	%
1	Sangat Berhasil	12	75%
2	Berhasil	3	18,75%
3	Cukup Berhasil	0	0%
4	Kurang Berhasil	1	6,25%
Jumlah		16	100,00%

Selanjutnya hasil capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 32. Rekapitulasi Capaian IKU Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET RPJMD 2024	CAPAIAN 2024	PERSENTASE CAPAIAN
1	Nilai SAKIP	Nilai	73,00	65,92	90,30
2	Indeks Persepsi Anti Korupsi	Nilai	6,75	8,96	132,71
3	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik	Nilai	8,95	8,74	97,65
4	Indeks Pendidikan	Nilai	0,70	0,71	101,43
5	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Nilai	51,00	57,42	112,59
6	Indeks Kesehatan	Nilai	0,817	0,81	99,14
7	Indeks Pembangunan Gender	Nilai	79,10	79,600	100,63
8	Indeks Gini	Nilai	0,28	0,307	90,36
9	Indeks Desa Membangun	Nilai	0,745	0,7969	106,97
10	Tingkat Pengangguran Terbuka	Nilai	4,40	4,11	106,59
11	PDRB Per Kapita	Nilai	197,62	240,87	121,89
12	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Nilai	6,60	2,94	44,55





NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET RPJMD 2024	CAPAIAN 2024	PERSENTASE CAPAIAN
13	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata	Persen	3,42	7,85	229,53
14	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	Persen	7,09	7,70	108,60
15	Tingkat Pertumbuhan Investasi	Persen	1,75	10,85	620,00
16	Cakupan Layanan Air Bersih	Persen	92,16	80,20	87,02
17	Persentase Rumah Layak Huni	Persen	90,89	98,64	108,53
18	Indeks Aksesibilitas Wilayah	Nilai	86,18	76,045	88,24
19	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	73,81	73,59	99,70
20	Indeks Risiko Bencana	Nilai	104,28	118,80	86,08

Hasil pengukuran kinerja dapat dianalisis sebagai berikut :

1. Analisis Kinerja Sasaran 1: “Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ”

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah” dengan indikator Nilai SAKIP mencapai 90,30 dan termasuk predikat “Berhasil” sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 33. Realisasi Indikator Sasaran 1 Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	% Capaian
1	Nilai SAKIP	Nilai	73,00	65,92	90,30

Sumber data: Kementerian PANRB Tahun 2024

Pencapaian kinerja sasaran ini diuraikan sebagai berikut:

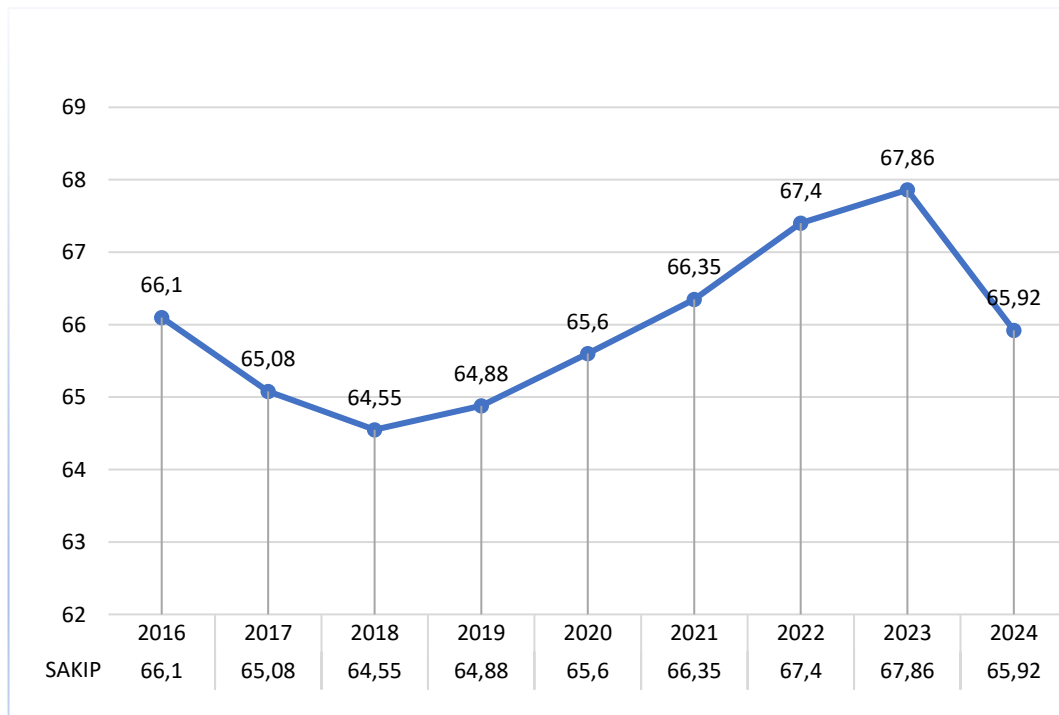
Evaluasi penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan metode desk evaluasi, dengan hasil capaian sebesar 65,92 Predikat B. Capaian ini menurun 1,94 dari capaian Tahun 2023, namun capaian ini lebih rendah 7,08 dari target kinerja RPJMD 2024





yaitu sebesar 73,00. Adapun Capaian Predikat Akuntabilitas Kinerja dalam 9 tahun terakhir ditunjukkan dalam grafik berikut:

Grafik 4. Predikat SAKIP



Sumber data: Kementerian PANRB Tahun 2016-2024

Hasil evaluasi penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan rincian hasil evaluasi sebagai berikut:

Tabel 34. Hasil evaluasi penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

No.	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai 2023	Nilai 2024
1.	Perencanaan Kinerja	30	21,67	21,30
2.	Pengukuran Kinerja	30	19,57	19,46
3.	Pelaporan Kinerja	15	11,11	10,34
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	15,51	14,83
Nilai Hasil Evaluasi		100	67,86	65,92
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			B	B

Sumber data: Kementerian PANRB Tahun 2024

Jika melihat hasil penilaian diatas Pemerintah kabupaten Kutai Kartanegara memperoleh nilai tertinggi ke tiga dari 10 (sepuluh) kabupaten/ kota di Provinsi Kalimantan Timur setelah Kota Bontang dan Kota Balikpapan.





Berikut Tabel Hasil evaluasi SAKIP kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024:

Tabel 35. Hasil Evaluasi SAKIP Kabupaten/Kota

No	Pemerintah Daerah	Nilai	Predikat
1	Provinsi Kalimantan Timur	78,74	BB
2	Kota Bontang	70,04	BB
3	Kota Balikpapan	69,06	B
4	Kabupaten Kutai Kartanegara	65,92	B
5	Kota Samarinda	65,33	B
6	Kabupaten Kutai Barat	63,21	B
7	Kabupaten Berau	62,74	B
8	Kabupaten Penajam Paser Utara	62,19	B
9	Kabupaten Paser	61,38	B
10	Kabupaten Kutai Timur	60,08	B
11	Kabupaten Mahakam Ulu	54,50	CC

Sumber data: Kementerian PANRB Tahun 2024

Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 36. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 1 terhadap target RPJMD

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Target 2025	Target 2026
1	Nilai SAKIP	Nilai	66,35	67,4	67,86	65,92	77	80,01

Sumber data: Kementerian PANRB

Sasaran tersebut dicapai melalui Program-program sebagai berikut:

Tabel 37. Program dan Anggaran Sasaran 1 Tahun 2024

No	Program	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4,342,557,549,942.00	4,460,180,579,512.00	3,926,853,141,954.81	88.04%
2	Program Pengelolaan Arsip	1,275,000,000.00	1,275,000,000.00	1,195,431,862.00	93.76%
3	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	925,000,000.00	925,000,000.00	817,313,946.00	88.36%
4	Program Perizinan	75,000,000.00	75,000,000.00	42,314,000.00	56.42%





No	Program	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran
	Penggunaan Arsip				
5	Program Perekonomian Dan Pembangunan	7,038,300,385.00	8,272,386,385.00	7,872,395,583.00	95.16%
6	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	72,738,141,916.00	70,626,202,232.00	60,499,809,296.00	85.66%
7	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	6,652,400,000.00	6,205,482,550.00	5,481,781,456.00	88.34%
8	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	8,829,999,820.00	6,569,655,033.00	4,540,589,988.00	69.11%
9	Program Kepegawaian Daerah	8,865,011,000.00	8,390,011,000.00	5,882,729,974.00	70.12%
10	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	9,992,168,000.00	9,992,168,000.00	8,273,846,996.00	82.80%
11	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	14,484,210,000.00	19,534,210,438.00	18,640,046,291.00	95.42%
12	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	599,188,352,550.00	702,976,781,458.00	689,727,337,501.79	98.12%
13	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	4,881,135,281.00	7,023,879,301.00	6,345,746,176.00	90.35%
14	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1,317,000,029.00	1,482,000,029.00	1,353,352,000.00	91.32%
15	Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	50,000,000.00	50,000,000.00	49,580,000.00	99.16%
Total		5,078,869,268,923.00	5,303,578,355,938.00	4,737,575,417,024.60	89.33%





Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah Rp.4.737.575.417.024,60 dari total anggaran sebesar Rp.5.078.869.268.923,00 atau sebesar 89,33%. Sementara itu, capaian kinerja terhadap sasaran yang ditetapkan mencapai 90,30%. Meskipun penggunaan dana lebih rendah dari capaian kinerja, terdapat indikasi ketidakefisienan dalam pemanfaatan sumber daya, karena target sasaran belum sepenuhnya tercapai (100%). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pengeluaran lebih rendah dari anggaran yang tersedia, efektivitas dalam pencapaian sasaran masih perlu ditingkatkan.

Adapun rekomendasi dari evaluasi SAKIP Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Melakukan perbaikan atas manajemen kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun sebelumnya sehingga dapat mencapai kondisi yang diinginkan sebagaimana dimaksudkan dalam rekomendasi;
2. Menyusun pohon kinerja tingkat Pemkab Kutai Kartanegara dan memperbaiki pohon kinerja tingkat perangkat daerah sedemikian rupa sehingga telah sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021;
3. Apabila terjadi perubahan target kinerja agar dilakukan secara formal dengan melakukan revisi terhadap dokumen kinerja dimaksud;
4. Melengkapi indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dengan manual IKU yang memuat sekurang-kurangnya deskripsi indikator, definisi operasional, formulasi perhitungan indikator dan sumber data;
5. Mempertimbangkan ketersediaan data realisasi dalam menetapkan suatu indikator kinerja sehingga terhindar terjadinya penggunaan data realisasi tahun sebelumnya pada saat melakukan pengukuran kinerja;
6. Memastikan semua perangkat daerah taat mengisi aplikasi pengukuran dan pengumpulan data kinerja secara elektronik yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sehingga dapat dimanfaatkan





dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja dan keuangan perangkat daerah setiap triwulan;

7. Menyajikan analisis penyebab tidak tercapainya target secara memadai, terutama capaian kinerja yang sangat rendah dalam Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
8. Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara agar menyajikan alternatif solusi ke depan untuk mengatasi realisasi yang tidak mencapai target;
9. Meningkatkan kualitas penyajian Laporan Kinerja dengan menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan kinerja pada level nasional/ internasional;
10. Melakukan evaluasi AKIP terhadap seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan menerbitkan Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024;
11. Menetapkan kebijakan pemberian *reward and punishment* kepada Perangkat Daerah dengan memanfaatkan hasil evaluasi SAKIP internal sehingga dapat mendorong terjadinya peningkatan kualitas implementasi SAKIP Perangkat Daerah secara signifikan.
12. Untuk rekomendasi yang lainnya, akan dilaksanakan secara bertahap dengan pihak-pihak terkait.

Beberapa rekomendasi dari Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024, sudah mulai ditindak lanjuti, diantaranya:

1. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, membentuk Tim SAKIP Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Inspektorat Daerah;
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, telah menyusun meta data terkait Indikator Kinerja Pemerintah Daerah sampai dengan Perangkat Daerah, untuk proses perencanaan dalam hal menyusun dokumen perencanaan RPJMD dan Renstra 2025-2029.





3. Mulai Tahun 2024, hasil dari pengukuran kinerja masing-masing Perangkat Daerah dijadikan dasar dalam pemberian *reward and punishment*, termasuk dalam pemberian tunjangan kinerja atau TPP;
4. Sekretariat Daerah melalui Bagian Organisasi memperbaiki manajemen pengelolaan Aplikasi Sakip Kukar.

2. Analisis Kinerja Sasaran 2: “Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah”

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah” dengan indikator Indeks Persepsi Anti Korupsi mencapai 132,71% dan termasuk predikat “Sangat Berhasil” sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 38. Realisasi Indikator Sasaran 2 Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	% Capaian
2	Indeks Persepsi Anti Korupsi	Nilai	6,75	8,96	132,71

Sumber data: Aplikasi Survei Kukar Tahun 2024

Pencapaian kinerja sasaran ini diuraikan sebagai berikut:

Penilaian terhadap Indeks Persepsi Anti Korupsi berdasarkan IPAK yang dikeluarkan oleh Kementerian PAN dan RB, yang tertuang dalam Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Namun dalam LHE RB Tahun 2023 tidak mencantumkan nilai IPAK lagi.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara mengeluarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas Tahun 2023, dimana ruang lingkup surat edaran tersebut salah satunya terkait menyelenggarakan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) yang hasilnya dalam bentuk Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).

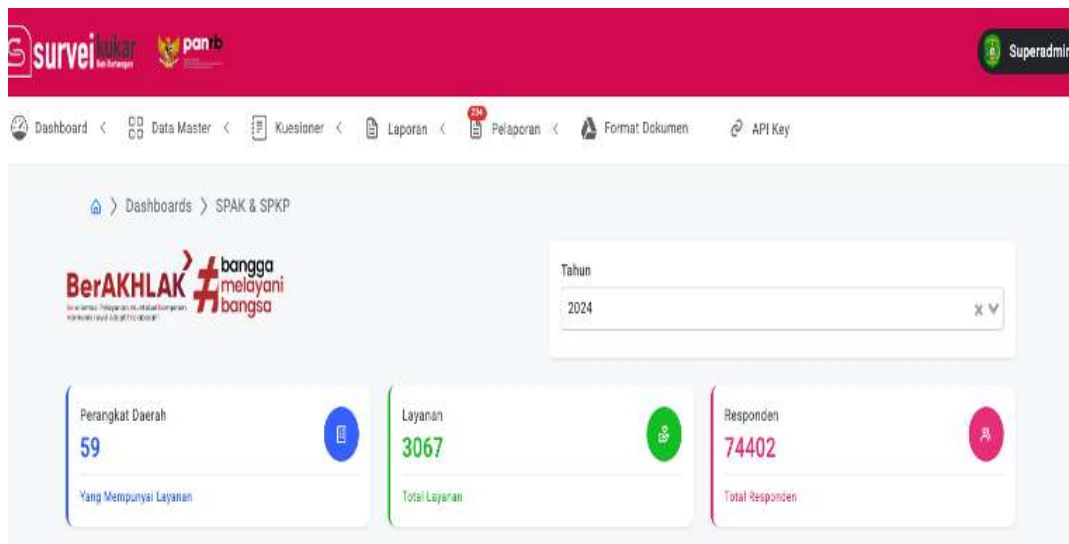
Berdasarkan surat edaran tersebut diatas, maka Kabupaten Kutai Kartanegara pada Tahun 2024 melaksanakan SPAK melalui Aplikasi Survei Kukar dengan link akses <https://survei.kukarkab.go.id>, pelaksanaan survei





di 56 (lima puluh enam) perangkat daerah dan 3 (tiga) Rumah Sakit Umum Daerah, terhadap 3.067 layanan, dengan jumlah responden 74.402 orang. Adapun hasil penarikan data IPAK melalui Aplikasi Survei Kukar adalah sebagai berikut:

Gambar 3. Perangkat Daerah, Jumlah Layanan dan Total Responden SPAK dan SPKP Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024



Sumber: Aplikasi Survei Kukar Tahun 2024

Gambar 4. Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024



Sumber: Aplikasi Survei Kukar Tahun 2024





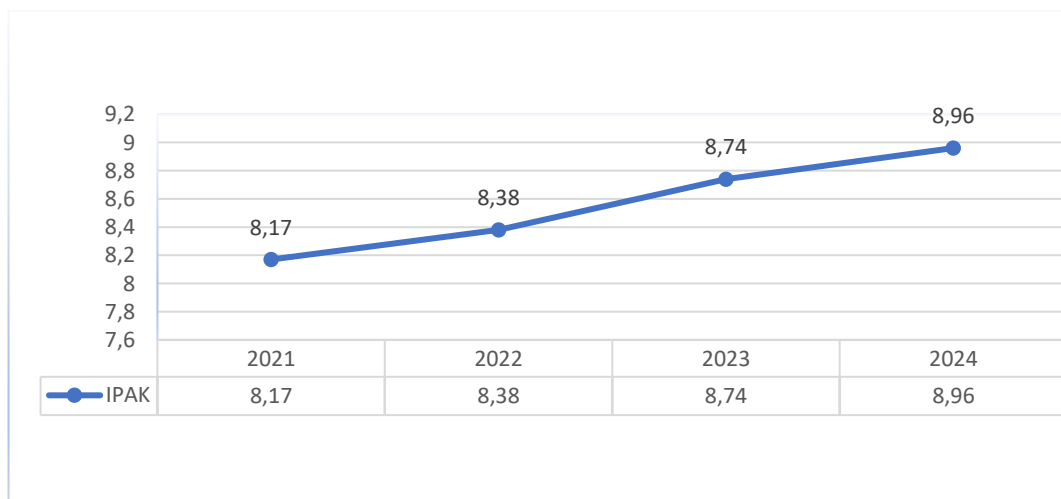
Gambar 5. Tabulasi Hasil SPAK dan SPKP Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024



Sumber: Aplikasi Survei Kukar Tahun 2024

Untuk Hasil Indeks Persepsi Anti Korupsi Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024, yang dilakukan melalui survei mandiri, mengalami peningkatan sebesar 0,22 dibandingkan dengan capai IPAK Tahun 2023 yang memperoleh nilai 8,74, setelah sebelumnya meningkat 0,28 di Tahun 2023 dibandingkan dengan IPAK Tahun 2022 yang memperoleh nilai sebesar 8,38. Perkembangan IPAK Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2024 adalah sebagai berikut:

Grafik 5. IPAK Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2024



Sumber: LHE RB Tahun 2021-2022 dan Aplikasi Survei Kukar Tahun 2023-2024

Karena SPAK dilaksanakan secara mandiri, sehingga tidak tersedia data IPAK Kabupaten/ Kota lainnya di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur. maka dalam laporan ini hanya menyajikan perbandingan IPAK Tahun 2021.

Sejak Tahun 2021 Komisi Pemberantasan Anti Korupsi (KPK) melaksanakan Survei Penilaian Integritas (SPI), hasil survei ini juga menjadi





salah satu komponen penilaian dalam LHE Reformasi Birokrasi yang dikeluarkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Survei Penilaian Integritas (SPI) merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk mengukur tingkat integritas dalam suatu lembaga atau instansi, khususnya di sektor publik. SPI menjadi gambaran sejauh mana upaya pencegahan korupsi telah diterapkan serta bagaimana persepsi dan pengalaman pemangku kepentingan terhadap potensi risiko korupsi dalam suatu institusi.

SPI memiliki beberapa tujuan utama, di antaranya:

1. Mengidentifikasi Risiko Korupsi. SPI membantu menemukan titik rawan yang berpotensi menjadi celah terjadinya korupsi dalam suatu instansi. Dengan memahami area yang berisiko, langkah-langkah mitigasi dapat segera diterapkan.
2. Mengukur Efektivitas Kebijakan Antikorupsi. Hasil survei memberikan gambaran tentang sejauh mana kebijakan pencegahan korupsi yang telah diterapkan oleh instansi berjalan dengan baik dan efektif.
3. Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi. Dengan adanya SPI, setiap instansi dapat lebih terbuka terhadap umpan balik dari berbagai pihak, termasuk pegawai, pengguna layanan, serta pemangku kepentingan lainnya.
4. Mendorong Budaya Integritas. SPI tidak hanya sebagai alat ukur, tetapi juga sebagai pendorong perubahan budaya kerja yang lebih transparan, jujur, dan berorientasi pada kepentingan publik.

SPI dilakukan dengan metode survei yang melibatkan berbagai kelompok responden untuk mendapatkan data yang objektif dan komprehensif. Responden yang biasanya dilibatkan antara lain:

- a. Pegawai internal di instansi yang bersangkutan.
- b. Pengguna layanan atau mitra kerja yang berinteraksi dengan instansi tersebut.





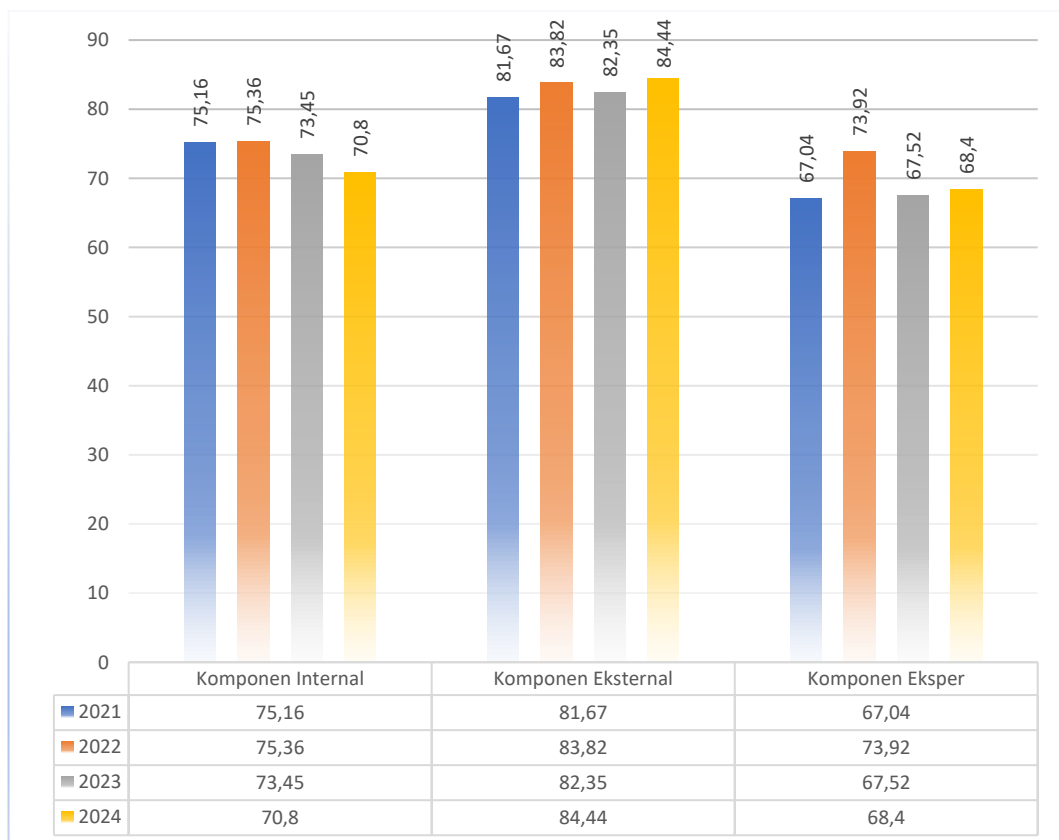
- c. Ekspert atau akademisi yang memiliki wawasan tentang tata kelola pemerintahan yang baik.

Penilaian dilakukan berdasarkan beberapa indikator, seperti transparansi dalam pelayanan publik, kepatuhan terhadap regulasi, serta efektivitas sistem pengendalian internal.

Berdasarkan hasil SPI yang dapat diakses pada laman <https://jaga.id/jendela-pencegahan/spi?vnk=40829689>, Nilai Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar 67,14, Skor turun sebanyak 0.55 poin dari tahun sebelumnya.

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara saat ini berada dalam kategori Rentan. Berikut Detail Hasil Survei Penilaian Integritas Per Komponen Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2024:

Grafik 6. Detail Hasil SPI Per Komponen Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2024

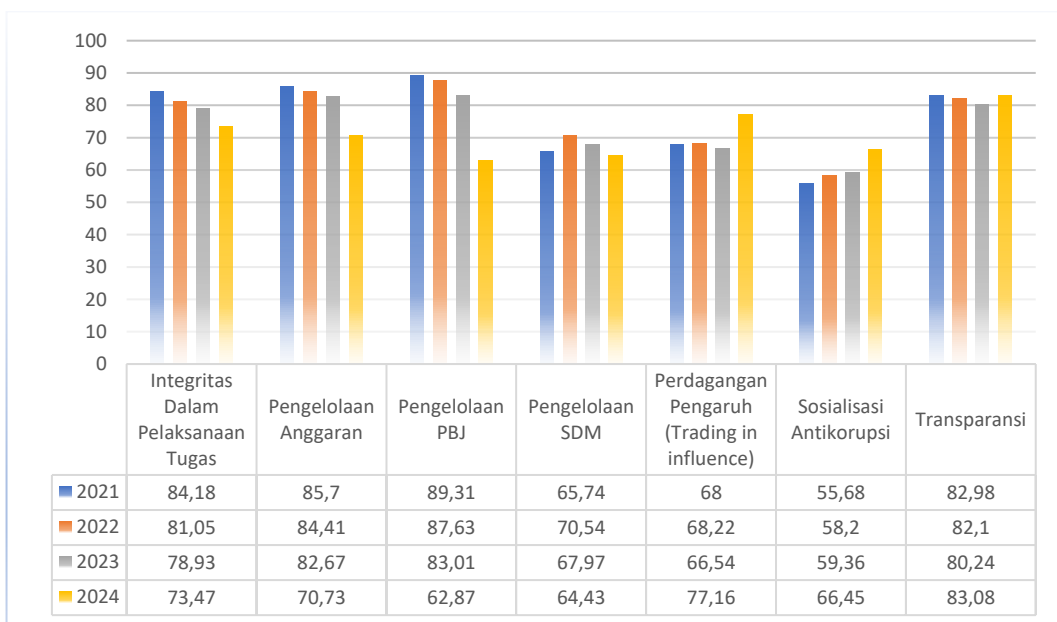


Sumber data: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)





Grafik 7. Skor Per Dimensi Komponen Internal SPI Kabupaten Kutai Kartanegara 2022-2024



Sumber data: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Tabel 39. Hasil Survei Penilaian Integritas Kabupaten/ Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2024

Rata-Rata SPI	2021	2022	2023	2024	Kategori	Perbandingan Capaian SPI Tahun 2024 dengan 2023	Keterangan
Bontang	62,56	74,02	74,99	77,69	Waspada	2,70	Meningkat
Balikpapan	70,12	73,51	73,83	75,08	Waspada	1,25	Meningkat
Samarinda	62,8	70,03	72,32	71,55	Rentan	-0,76	Menurun
Paser	67,55	70,17	71,51	74,00	Waspada	2,50	Meningkat
Kutai Timur	59,94	65	70,99	59,16	Rentan	-11,83	Menurun
Berau	68,99	71,63	69,68	72,52	Rentan	2,84	Meningkat
Mahakam Hulu	71,25	66,98	69,14	71,08	Rentan	1,95	Meningkat
Kutai Kartanegara	72,06	67,22	67,69	67,14	Rentan	-0,55	Menurun
Kutai Barat	71,73	73,03	64,65	67,23	Rentan	2,58	Meningkat
Penajam Paser Utara	66,18	68,85	64,11	61,28	Rentan	-2,82	Menurun
Provinsi Kalimantan Timur	66,35	73,04	72,71	69,95	Rentan	-0,19	Menurun
Nasional	72,4	71,94	70,97	71,52	Rentan	-0,42	Menurun

Sumber data: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Berdasarkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI), pada laman resmi <https://jaga.id/>, ada penurunan hasil SPI Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar 4,84 poin di Tahun 2022 jika dibandingkan dengan Tahun 2021, dan ditahun 2023 hasil SPI Kabupaten Kutai Kartanegara meningkat 0,47-point jika dibandingkan dengan hasil SPI Tahun 2022, namun menurun kembali 0,55 poin di Tahun 2024 dibandingkan SPI Tahun 2023.





Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 40. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 2 terhadap target RPJMD

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Target 2025	Target 2026
2	Indeks Persepsi Anti Korupsi	Nilai	8,17	8,38	8,74	8,96	6,8	7

Sumber: LHE RB Tahun 2021-2022 dan Aplikasi Survei Kukar Tahun 2023-2024)

Sasaran tersebut dicapai melalui Program-program sebagai berikut:

Tabel 41. Program dan Anggaran Sasaran 2 Tahun 2024

No	Program	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran
1	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	20,518,109,000.00	31,368,970,462.00	27,312,201,201.00	87.07%
2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	1,191,755,198,028.00	9,235,607,336.00	7,198,823,175.00	77.95%
3	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	6,446,619,000.00	7,066,776,000.00	6,248,208,259.00	88.42%
4	Program Penyelenggaraan Pengawasan	12,000,000,000.00	11,500,000,000.00	4,808,467,577.00	41.81%
5	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00	1,649,242,765.00	41.23%
Total		1,234,719,926,028.00	63,171,353,798.00	47,216,942,977.00	74.74%

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah Rp.47,216,942,977.00 dari anggaran sebesar Rp.63,171,353,798.00 atau 74,74%. Realisasi keuangan sebesar 74,74% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 132,71%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut, karena target sasaran berhasil 100% tercapai, dengan penggunaan sumber daya lebih rendah dari capaian kinerja.

Berdasarkan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024, catatan berisi Detail Hasil SPI Per Komponen Internal: 70.8; Eksternal: 84.44; Eksper: 68.4, dari data tersebut skor terendah terletak pada komponen internal, yang dimensinya meliputi





Integritas Dalam Pelaksanaan Tugas, Pengelolaan Anggaran, Pengelolaan PBJ, Pengelolaan SDM, Perdagangan Pengaruh (*Trading in influence*), Sosialisasi Antikorupsi, Transparansi, sehingga ada rekomendasi berdasarkan hasil Survei Penilaian Integritas, setelah mengetahui analisis terkait faktor koreksi pada subbab sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dapat melakukan analisis mendalam mengenai perumusan rekomendasi dan rencana aksi untuk menindaklanjuti hasil SPI 2024. Dalam SPI 2024, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara mendapat skor SPI sebesar 67.14. Indeks tersebut menempatkan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam kategori rentan yang berarti Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sangat rentan terpapar praktik korupsi. Hal ini akibat sistem pencegahan yang lemah/tidak berjalan dan/atau meningkatnya jumlah oknum pejabat/pegawai yang kurang berintegritas yang menempati posisi/jabatan/layanan strategis/kunci di lembaga, sehingga meningkatkan risiko korupsi lembaga secara keseluruhan. Hal ini juga mengindikasikan bahwa upaya dan program pencegahan korupsi dilakukan lembaga saat ini TIDAK EFEKTIF.

Langkah-langkah dan Upaya yang Dilakukan dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi:

Upaya pencegahan korupsi pada Pemerintah Daerah salah satunya dilakukan melalui program Pencegahan Korupsi Terintegrasi. Program ini merupakan pelaksanaan dari tugas KPK dalam koordinasi dan monitoring upaya-upaya pencegahan korupsi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Dalam melakukan upaya pencegahan korupsi di daerah, KPK berkolaborasi bersama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PAN dan RB, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Kementerian/Lembaga yang terkait lainnya.

Implementasi pencegahan korupsi pada Pemerintah Daerah dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Identifikasi titik rawan korupsi baik di tingkat pusat maupun daerah;

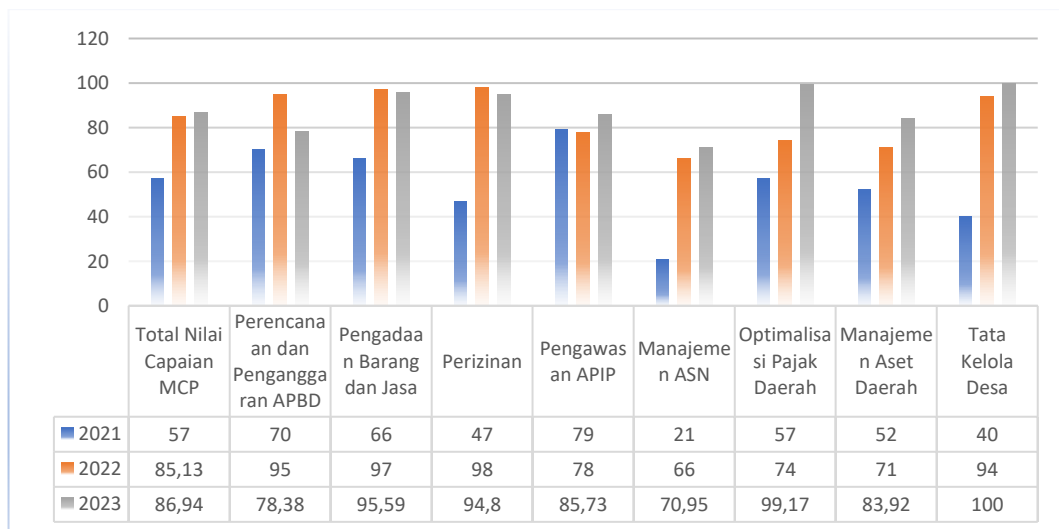




2. Pernyataan dan Penandatanganan Komitmen Pemberantasan Korupsi Terintegrasi oleh Kepala Daerah;
3. Penyusunan dan Penetapan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Daerah; dan
4. Monitoring dan Evaluasi Capaian Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi.

Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi difokuskan pada pembangunan sistem dan langkah-langkah perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan untuk mengurangi resiko dan potensi korupsi di daerah serta dapat mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, melalui 8 area intervensi yaitu (1) Perencanaan dan Penganggaran APBD; (2) Pengadaan Barang dan Jasa; (3) Perizinan; (4) APIP; (5) Manajemen ASN; (6) Optimalisasi Pajak Daerah; (7) Manajemen Aset Daerah; (8) Tata Kelola Dana Desa.

Grafik 8. Monitoring Center for Prevention KPK Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2021-2023



Sumber Data: Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2023

Hasil monitoring progres pelaksanaan aksi pencegahan korupsi Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara pada 8 area intervensi, secara keseluruhan Hasil MCP KPK Tahun 2023 Kabupaten Kutai Kartanegara meningkat dari Tahun 2022 sebesar 1,94%, namun dari 8 area intervensi, ada 3 area yang mengalami penurunan nilai, yaitu area Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, dan Perijinan.





Peningkatan signifikan pada area Tata Kelola Desa dari 94% di tahun 2022 menjadi 100% di Tahun 2023.

Untuk MCP KPK Tahun 2024 ada beberapa perubahan komponen penilaian, dan capaian MCP KPK Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 mengalami penurunan nilai 17,09 %, dari 86,94% di tahun 2023 turun menjadi 69,85% di tahun 2024, berikut disajikan data capaian sesuai komponen penilaian MCP KPK Kutai Kartanegara Tahun 2024:

Tabel 42. Capaian *Monitoring Center for Prevention KPK Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2024*

Uraian	Capaian	Uraian	Capaian
Perencanaan	63,60%	Penganggaran	64,42%
Perencanaan Pembangunan Daerah	63,6%	Pencegahan <i>Mark Up</i> Anggaran	30%
		Penetapan APBD	90,1%
		Transparansi APBD	100%
		Pengendalian dan Pengawasan	37,6%
Pengadaan Barang dan Jasa	66,46%	Pelayanan Publik	60,69%
Pelaksanaan Pengadaan	85,6%	Kebijakan Layanan	66%
Pengendalian PBJ Strategis	17,2%	Standar Layanan	63,25%
Independensi UKPBJ	96%	Kemudahan Layanan Publik	70,8%
		Pengendalian dan Pengawasan	42,5%
Pengawasan APIP	72,17%	Manajemen ASN	96,38%
Kapasitas APIP	76,22%	Tata Kelola ASN	94,8%
Penguatan Kelembagaan	67,35%	Penguatan Integritas dan Pengawasan	94,39%
Pengendalian dan Pengawasan	60,09%	Budaya Antikorupsi	100%
Koordinasi Pencegahan Korupsi	85%		
Pengelolaan BMD	48,25%	Optimalisasi Pajak	88,85%
Pengamanan BMD	50,5%	Regulasi, database dan Kemudahan	91,75%
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan	41,5%	Peningkatan Pajak daerah	90%
Penertiban BMD	15%	Pengendalian dan Pengawasan	84,7%
Pengendalian dan Pengawasan	86%		
CAPAIAN 69,85%			

Sumber data: JAGA - Platform Pencegahan Korupsi Tahun 2024

Salah satu penyebab penurunan nilai MCP KPK Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024 adalah keterlambatan keluarnya pedoman penilaian tahun 2024, sehingga waktu koordinasi dengan perangkat daerah teknis tidak bisa dilaksanakan secara optimal, serta





pemenuhan data dan dokumen terutama pada komponen Pengelolaan BMD menjadi salah satu faktor penyebab turunnya hasil penilaian di Tahun 2024, karena dari 8 (delapan) komponen penilaian MCP KPK, Pengelolaan BMD yang mendapat nilai paling rendah hanya di 48,25%.

3. Analisis Kinerja Sasaran 3: “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik”

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik” dengan indikator Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik mencapai 97,65% dan termasuk predikat “Sangat Berhasil” sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 43. Realisasi Indikator Sasaran 3 Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	% Capaian
3	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik	Nilai	8,95	8,74	97,65

Sumber data: Aplikasi Survei Kukar Tahun 2024

Pencapaian kinerja sasaran ini diuraikan sebagai berikut:

Rumus perhitungan atau Penilaian terhadap Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP) berdasarkan IPKP yang dikeluarkan oleh Kementerian PAN dan RB, yang tertuang dalam Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara mengeluarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas Tahun 2023, dimana ruang lingkup surat edaran tersebut salah satunya terkait menyelenggarakan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (SPKP) yang hasilnya dalam bentuk Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP).

Berdasarkan surat edaran tersebut diatas, maka Kabupaten Kutai Kartanegara mulai Tahun 2023 sampai dengan saat ini, melaksanakan SPKP melalui Aplikasi Survei Kukar dengan link akses <https://survei.kukarkab.go.id>, pelaksanaan survei di Tahun 2024 56 (lima



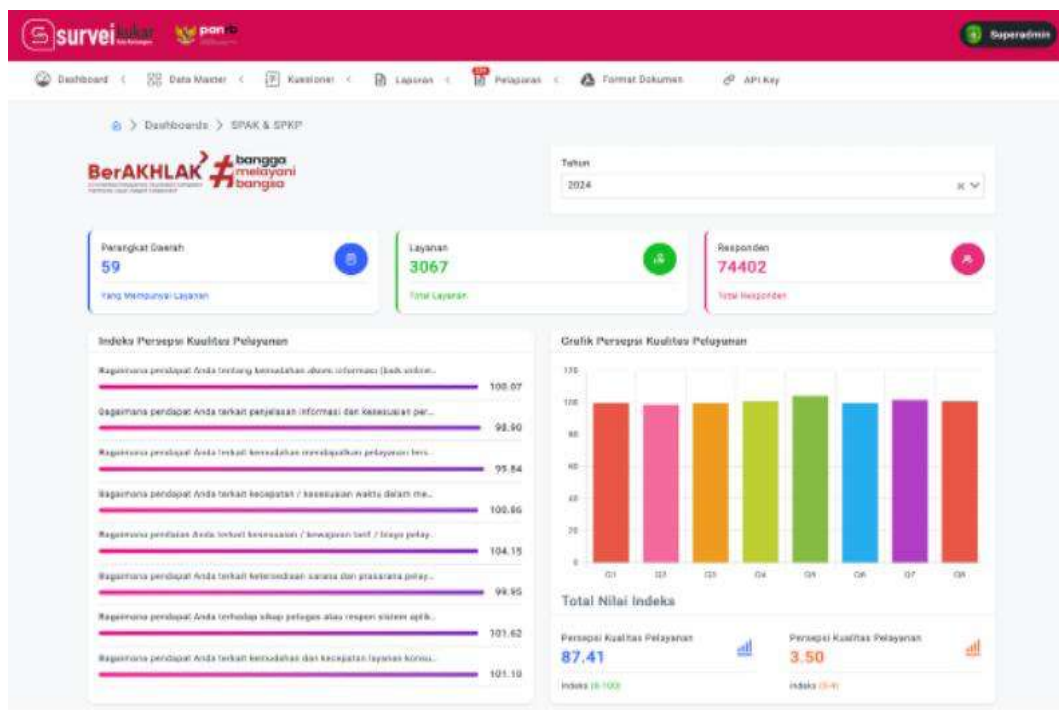


puluh enam) perangkat daerah dan 3 (tiga) Rumah Sakit Umum Daerah, terhadap 3.067 layanan, dengan jumlah responden 74.402 orang.

Capaian Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP) Kabupaten Kutai Kartanegara, Tahun 2024 sebesar 87,41 atau dikonversi dalam skala 1-10, maka capaian kinerja sebesar 8,74 capaian ini mengalami peningkatan dari Tahun 2023 sebesar 0,33 dimana sebelumnya di Tahun 2023 IPKP sebesar 8,41. Setelah sebelumnya mengalami penurunan jika dibandingkan dengan Tahun 2022, IPKP oleh KemenPANRB mencapai 9,81, atau menurun sebesar 1,4 poin, dan jika dibandingkan dengan target RPJMD yaitu 8,95 maka capaian IPKP Kabupaten Kutai Kartanegara di Tahun 2024 sebesar 97,65%.

Adapun hasil penarikan data IPKP melalui Aplikasi Survei Kukar adalah sebagai berikut:

Gambar 6. Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024



Sumber: Aplikasi Survei Kukar Tahun 2024

Dalam dokumen Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi mulai Tahun 2023 sampai saat ini, juga tersedia Capaian Indeks Pelayanan Publik dan Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik.





Di Tahun 2024 Kementerian PANRB telah melaksanakan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik di kementerian, lembaga dan pemerintah daerah, yang hasilnya tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 659 Tahun 2024 Tentang Hasil Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pada Lingkup Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024, terdapat sedikit perbedaan penetapan Unit Lokus Evaluasi (ULE) sebelumnya dilaksanakan di Dinas Sosial, RSUD dan Kecamatan, dan di Kabupaten Kutai Kartanegara yang menjadi ULE di Tahun 2023 dilakukan terhadap 3 (tiga) Perangkat Daerah yaitu Kecamatan Anggana, Dinas Sosial dan RSUD. Aji Batara Agung Dewa Sakti. Namun di Tahun 2024 yang menjadi ULE adalah Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan RSUD. Aji Batara Agung Dewa Sakti. Berikut hasil penilaian Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik Tahun 2024 kabupaten/ kota di Provinsi Kalimantan Timur:

Tabel 44. Hasil Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik kabupaten/ kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

No	Kab/Kota	Rata-Rata	Kategori	Disdukcapil	Dinas Sosial	RSUD
1.	Kutai Kartanegara	4,35	A-	4,47	4,30	4,39
2.	Samarinda	4,26	A-	4,54	3,71	4,52
3.	Balikpapan	4,19	A	4,43	4,23	3,19
4.	Bontang	4,28	A-	4,27	4,19	4,49
5.	Kutai Barat	4,11	A-	4,24	3,90	4,19
6.	Berau	3,71	B	3,03	4,47	3,64
7.	Penajam Paser Utara	3,75	B	3,66	3,68	3,90
8.	Kabupaten Kutai Timur	2,90	C	3,52	1,89	3,30
9.	Kabupaten Paser	4,03	A-	3,72	3,80	4,56
10.	Kabupaten Mahakam Ulu	-	-	-	-	-

Sumber data: Kementerian PANRB

Jika melihat hasil penilaian diatas Pemerintah kabupaten Kutai Kartanegara memperoleh nilai tertinggi jika dibandingkan dengan hasil penilaian Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik kabupaten/ kota di Provinsi Kalimantan





Timur. Capaian ini meningkat 0,11-point dari hasil evaluasi Tahun 2023 dengan nilai 4,24 dengan Kategori A-.

Tabel 45. Perbandingan Hasil Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik kabupaten/ kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 dengan 2023

No	Kab/Kota	Rata-Rata 2023	Kategori 2023	Rata-Rata 2024	Kategori 2024	Perbandingan Capaian 2024 dengan 2023	Keterangan
1.	Kutai Kartanegara	4,24	A-	4,35	A-	0,11	Meningkat
2.	Samarinda	4,02	A-	4,26	A-	0,24	Meningkat
3.	Balikpapan	4,51	A	4,19	A	-0,32	Menurun
4.	Bontang	4,11	A-	4,28	A-	0,17	Meningkat
5.	Kutai Barat	3,53	B	4,11	A-	0,58	Meningkat
6.	Berau	1,09	E	3,71	B	2,62	Meningkat
7.	Penajam Paser Utara	3,45	B-	3,75	B	0,3	Meningkat
8.	Kabupaten Kutai Timur	1,45	E	2,90	C	1,45	Meningkat
9.	Kabupaten Paser	3,91	B	4,03	A-	0,12	Meningkat
10.	Kabupaten Mahakam Ulu	1,82	D	-	-	-	-

Sumber data: Kementerian PANRB Tahun 2023 dan 2024

Di Tahun 2024 Ombudsman Republik Indonesia telah melaksanakan Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik Waktu penilaian dilakukan pada bulan Mei sampai bulan September 2024. Adapun lokus penilaian kepatuhan tahun 2024 di batasi pada:

1. 25 Kementerian, 14 Lembaga, 34 Pemerintah Provinsi, 98 Pemerintah Kota dan 416 Pemerintah Kabupaten yang menyelenggarakan produk administratif.
2. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) pada Pemerintah Kota dan Kabupaten yang menyelenggarakan produk jasa.
3. Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (FKTL) pada Pemerintah Provinsi yang menyelenggarakan produk jasa.
4. Penilaian instansi vertikal dilakukan pada unit pelayanan Kepolisian Resort (Polres) dan Kantor Pertanahan (Kantah).

Penilaian dilakukan tidak hanya atas pemenuhan standar pelayanan publik, namun termasuk juga penilaian persepsi mal administrasi kepada





masyarakat pengguna layanan, pengukuran kompetensi penyelenggara layanan, pemenuhan sarana dan prasarana layanan, serta pengelolaan pengaduan yang ada di instansi tersebut. Seluruh penilaian tersebut akan menjadi komponen dari Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang nantinya akan menghasilkan Opini Pengawasan Pelayanan Publik.

Untuk level pemerintah daerah, dimensi penilaian mencakup:

1. Dimensi Input terdiri dari variabel penilaian kompetensi pelaksana dan variabel pemenuhan sarana prasarana pelayanan:
 - a. Pada variabel kompetensi, diukur pengetahuan pejabat dan petugas layanan mengenai komponen standar pelayanan, tugas dan kewenangan jabatan, bentuk-bentuk mal administrasi dan pengetahuan tentang layanan yang ramah kelompok marginal/rentan;
 - b. Pada variabel sarana prasarana, diukur pemenuhan penjaminan mutu untuk pelayanan yang diberikan, frekuensi pengawasan internal, jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan, serta sarana prasarana dan fasilitas bagi pengguna layanan dan pengguna dengan perlakuan khusus.
2. Dimensi Proses terdiri dari variabel standar pelayanan publik, yang mana pada variabel standar pelayanan diukur pemenuhan informasi standar pelayanan seperti persyaratan, sistem mekanisme dan prosedur, jangka waktu penyelesaian, biaya/tarif, produk pelayanan, maklumat pelayanan, visi misi pelayanan, moto pelayanan, atribut dan pelayanan terpadu;
3. Dimensi *Output* terdiri dari variabel penilaian persepsi mal administrasi, yang mana pada variabel penilaian persepsi mal administrasi diukur persepsi masyarakat sebagai pengguna layanan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman pribadi mengenai transparansi standar pelayanan di instansi tersebut setelah selesai mengakses suatu layanan; dan





4. Dimensi Pengaduan terdiri dari variabel pengelolaan pengaduan, yang mana pada variabel pengelolaan pengaduan, diukur kewajiban pengelolaan pengaduan, pemenuhan sarana pengaduan, pembinaan terhadap pengelola pengaduan, mekanisme dan tata cara pengelolaan pengaduan dan informasi jangka waktu penyelesaian pengaduan.

Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024 di Kabupaten Kutai Kartanegara dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Sosial, Puskesmas Teluk Dalam, Puskesmas Loa Janan. Pada lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara, yang menjadi objek penilaian terdiri dari 4 (empat) Dinas dan 2 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), dengan rincian:

1. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (Substansi Perizinan dan Administrasi Kesehatan);
2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Substansi Administrasi Kependudukan);
3. Dinas Sosial (Substansi Sosial);
4. Puskesmas Teluk Dalam (Substansi Jasa Kesehatan); dan
5. Puskesmas Loa Janan (Substansi Jasa Kesehatan).

Hasil Penilaian merupakan penggabungan atas penilaian kompetensi penyelenggara, Standar Pelayanan dan Sarana Prasarana, Persepsi Mal administrasi, dan Pengelolaan Pengaduan. Penggabungan penilaian tersebut menghasilkan angka persentase akhir untuk masing-masing penyelenggara pelayanan dengan hasil kategorisasi penilaian akhir sebagai berikut:

Tabel 46. Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Interval Nilai	Kategori	Zonasi	Opini
88.00 – 100	A	Hijau	Kualitas Tertinggi
78.00 - 87.99	B	Hijau	Kualitas Tinggi
54.00 - 77.99	C	Kuning	Kualitas Sedang
32.00 - 53.99	D	Merah	Kualitas Rendah
0 - 31.99	E	Merah	Kualitas Terendah

Sumber data: Ombudsman Republik Indonesia





Adapun nilai akhir untuk Pemkab Kutai Kartanegara Tahun 2024 adalah sebesar 94,46 (Zona Hijau) dengan kategori A (Kualitas Tertinggi), hasil tersebut tidak ada perubahan dari hasil evaluasi di Tahun 2023, setelah sebelumnya meningkat 11,62 dari hasil Tahun 2022 dengan nilai 82,84 dengan kategori B (Kualitas Tinggi) dan mendapatkan Zona Hijau (detail rapor penilaian terlampir);

Tabel 47. Hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024

No	Unit Layanan	Dimensi Pelayanan				Nilai
		Input (21,85)	Proses (32,37)	Output (24,24)	Pengaduan (21,54)	
1.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	19,85	32,14	22,30	21,54	95,83
2.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	19,83	32,14	22,30	21,54	95,82
3.	Puskesmas Teluk Dalam	21,06	30,49	22,30	20,48	94,33
4.	Puskesmas Loa Janan	20,89	30,49	21,80	20,48	93,65
5.	Dinas Sosial	17,53	31,31	22,30	21,54	92,69
Nilai Akhir		94,46				
Zona		Hijau				
Kategori		A				
Opini		Kualitas Tertinggi				

Sumber: Ombudsman, 2024

Dari 5 (lima) Unit Layanan yang dievaluasi pada Tahun 2024, ada 3 (tiga) unit layanan yang merupakan unit layanan yang menjadi sampling pada evaluasi Tahun 2022 dan 2023, berikut perbandingan hasil evaluasi Tahun 2024 dengan Tahun 2022 dan 2023.

Tabel 48. Perbandingan Hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024 dengan Tahun 2022 dan 2023

No	Unit Layanan	Dinas Sosial			Disdukcapil			DMPTSP		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1.	Input	12,50	21,41	17,53	17,04	23,01	19,83	18,26	21,87	19,84
2.	Proses	11,70	31,03	31,31	30,28	31,03	32,14	31,11	32,37	32,14
3.	Output	20,14	21,33	22,30	20,74	20,92	22,30	21,41	20,97	22,30
4.	Pengaduan	13,49	21,01	21,54	19,34	21,54	21,54	21,07	21,54	21,54
	Nilai	57,83	94,78	92,69	87,40	96,50	95,82	91,86	96,75	95,83

Sumber data: Ombudsman Republik Indonesia

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Nomor 252 Tahun 2024 tentang Hasil Penilaian Kepatuhan





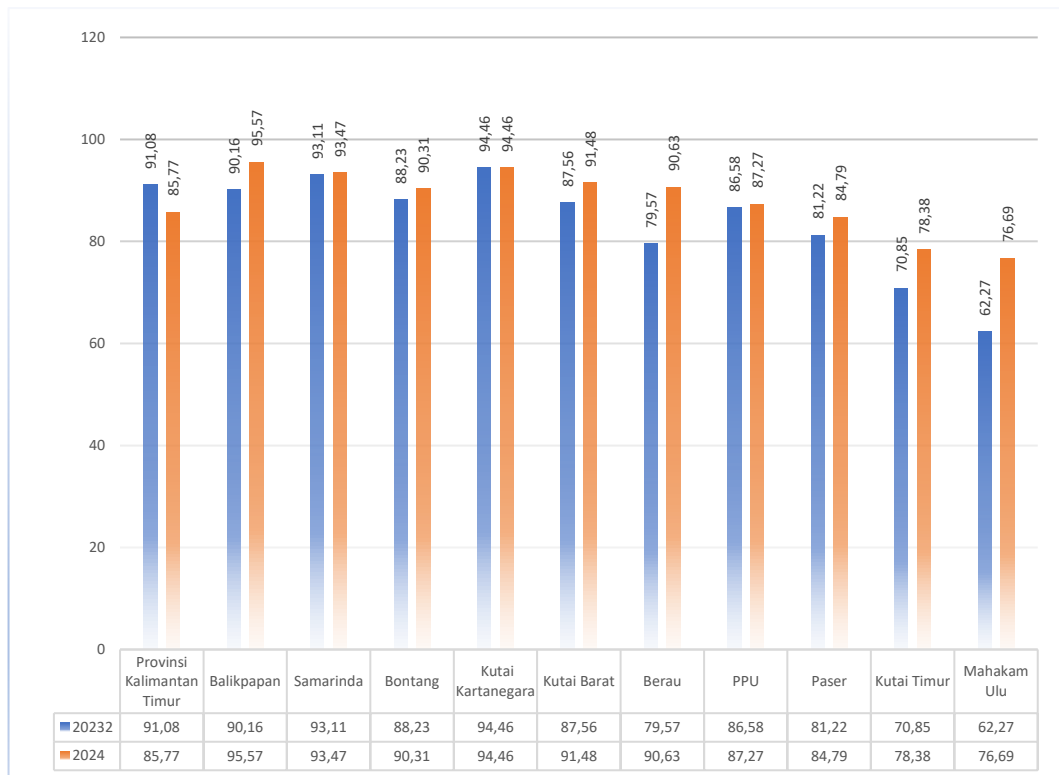
Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024, adapun hasil penetapan capaian adalah sebagai berikut:

Tabel 49. Hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kabupaten/ Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

No	Provinsi	Urutan Nasional	Nilai	Zona	Kategori	Opini
1	Kalimantan Timur	25	85,77	Hijau	B	Kualitas Tinggi
2	Balikpapan	21	95,57	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
3	Samarinda	41	93,47	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
4	Bontang	69	90,31	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
5	Kutai Kartanegara	83	94,46	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
6	Kutai Barat	154	91,48	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
7	Berau	168	90,63	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
8	Penajam Paser Utara	242	87,27	Hijau	B	Kualitas Tinggi
9	Paser	271	84,79	Hijau	B	Kualitas Tinggi
10	Kutai Timur	335	78,38	Hijau	B	Kualitas Tinggi
11	Mahakam Ulu	350	76,69	Kuning	C	Kualitas Sedang

Sumber data: Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2024

Grafik 9. Perbandingan Hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kab/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2024



Sumber data: Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2024

Untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan publik yang dilaksanakan di Kabupaten Kutai Kartanegara, mulai Tahun 2023, melalui





Aplikasi Survei Kukar, dan beberapa perangkat daerah masih melakukan Survei Kepuasan Masyarakat secara mandiri maupun menggunakan jasa pihak ke tiga. Berdasarkan Laporan Kompilasi Survei Kepuasan Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara, pengolahan data SKM dari 42 (empat puluh dua) perangkat daerah, dan 3 RSUD, dengan total jumlah responden sebanyak 57.579 orang, hasil Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 adalah 88,85 (Sangat Baik), capaian ini lebih tinggi dari capaian IKM Tahun 2023 sebesar 88,368 (Sangat Baik) atau meningkat 0,48 poin. Adapun nilai IKM per unsur terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 50. Hasil IKM Per Unsur Pelayanan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024

No	Unsur Pelayanan	Rata-Rata
U1	Kesesuaian Persyaratan	3,50
U2	Prosedur Pelayanan	3,48
U3	Kecepatan Pelayanan	3,40
U4	Kesesuaian/ Kewajaran Biaya	3,79
U5	Kesesuaian Pelayanan	3,45
U6	Kompetensi Petugas	3,47
U7	Perilaku Petugas Pelayanan	3,53
U8	Penanganan Pengaduan	3,74
U9	Kualitas Sarana dan Prasarana	3,50

Sumber: Aplikasi Survei Kukar Tahun 2024

Dari hasil survei diatas, diketahui 3 (tiga) unsur pelayanan terendah yang harus menjadi perhatian dan untuk segera dibenahi, yang pertama unsur kecepatan pelayanan dengan nilai rata-rata 3,40, dapat diartikan pelayanan yang diberikan petugas masih dinilai lambat oleh masyarakat, unsur terendah ke dua adalah unsur kesesuaian pelayanan dengan nilai 3,45 dan unsur terendah ke tiga adalah unsur Kompetensi Petugas dengan nilai rata-rata 3,47. Berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2024, hendaknya Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Menyusun Langkah-langkah strategi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.





Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 51. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 3 terhadap target RPJMD

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Target 2025	Target 2026
3	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik	Nilai	8,5	9,81	8,41	8,74	9	9,05

Sumber data: Kementerian PANRB Tahun 2021-2022 dan Survei Kukar 2023-2024

Sasaran tersebut dicapai melalui Program-program sebagai berikut:

Tabel 52. Program dan Anggaran Sasaran 3 Tahun 2024

No	Program	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran
1	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	16,719,858,396.00	17,871,593,836.00	16,758,632,913.00	93.77%
2	Program Pendaftaran Penduduk	1,000,000,000.00	1,280,000,000.00	1,052,601,428.00	82.23%
3	Program Pencatatan Sipil	971,619,610.00	828,579,610.00	761,254,509.00	91.87%
4	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	625,000,000.00	625,000,000.00	294,117,135.00	47.06%
5	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	160,000,000.00	160,000,000.00	91,605,760.00	57.25%
6	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	64,695,357,336.00	80,600,357,336.00	78,527,739,629.00	97.43%
7	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	76,194,352,470.00	108,824,352,470.00	104,602,759,325.00	96.12%
8	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	1,450,000,000.00	2,300,000,000.00	1,947,244,470.00	84.66%
9	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	850,000,000.00	1,050,000,000.00	1,009,529,849.00	96.15%
10	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	72,916,232,461.00	75,135,281,911.00	70,936,300,063.00	94.41%
11	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	700,000,000.00	700,000,000.00	599,540,000.00	85.65%
12	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	2,794,390,000.00	2,603,122,200.00	2,093,162,395.00	80.41%
13	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional	3,400,000,000.00	3,063,010,000.00	2,715,249,193.00	88.65%





No	Program	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran
	Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial				
Total		242,476,810,273.00	295,041,297,363.00	281,389,736,669.00	95.37%

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah Rp.281,389,736,669.00 dari anggaran sebesar Rp.295,041,297,363.00 atau 95,37%. Realisasi keuangan sebesar 95,37% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 97,65%, maka terjadi ketidak efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut, karena target sasaran tidak berhasil 100% tercapai, walaupun penggunaan sumber daya lebih rendah dari capaian kinerja.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian sasaran antara lain:

1. Adanya komitmen dan atensi dari kepala daerah untuk peningkatan kualitas pelayanan publik, dengan meluncurkan program prioritas yaitu Program Disapa (Program Digitalisasi Pelayanan).
2. Masih terbatasnya pengetahuan dari perangkat daerah tentang bagaimana bentuk, cara membuat dan menyusun serta menerapkan standar pelayanan.
3. Kebiasaan perangkat daerah yang sudah terbentuk lama terkadang tidak sesuai dengan standar pelayanan, sehingga mempengaruhi kualitas pelayanan.
4. Kompetensi petugas pelayanan belum merata dimiliki seluruh ASN yang memberikan pelayanan sehingga belum maksimal dalam memberikan pelayanan yang lebih baik dan cepat, serta kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik yang masih memiliki standar yang berbeda-beda antara perangkat daerah.

Bentuk komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam peningkatan kualitas pelayanan publik antara lain:





1. Sejak 2021 sampai saat ini, setiap kepala perangkat daerah diwajibkan membuat inovasi minimal 1 inovasi setiap tahunnya, dan diperjanjikan dalam perjanjian kinerja.
2. Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP), Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat, Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), inovasi serta capaian predikat inovasi menjadi komponen penilaian kinerja perangkat daerah yang akan berpengaruh pada besaran Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN.
3. Tahun 2024 telah dibuat pengembangan Aplikasi Disapa Idaman V.2, guna meningkatkan kualitas pelayanan publik secara *online* di Kutai Kartanegara. Aplikasi ini dibangun untuk mengatasi kondisi geografis, memberikan pelayanan jauh lebih mudah, cepat dan murah kepada masyarakat. Penekanan pelayanan yang murah lebih dititik beratkan pada murahnya *cost* yang harus dikeluarkan masyarakat dalam menerima pelayanan, karena tidak perlu mendatangi kantor/ unit pelayanan.
4. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi penerapan Aplikasi Disapa Idaman V.2 sampai saat ini telah menyelesaikan 5.050 permohonan pelayanan di tingkat kelurahan/ desa dan kecamatan. Telah dilaksanakan di 18 (delapan belas) kecamatan dan di 211 (dua ratus sebelas) kelurahan dan desa.
5. Peningkatan kompetensi petugas pelayanan melalui bimtek pelayanan publik bagi seluruh perangkat daerah.

4. Analisis Kinerja Sasaran 4 : “Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan, Ketahanan Sosial dan Pelestarian Kebudayaan”

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan, Ketahanan Sosial dan Pelestarian Kebudayaan” dengan indikator Indeks Pendidikan & Indeks Pembangunan Kebudayaan mencapai 107,01% dan termasuk predikat “Sangat Berhasil” sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:





Tabel 53. Realisasi Indikator Sasaran 4 Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	% Capaian
4	Indeks Pendidikan	Nilai	0,70	0,71	101,43
5	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Nilai	51,00	57,42	112,59
Rata-rata Capaian					107,01

Salah satu indeks komposit yang digunakan sebagai indikator kinerja pembangunan adalah Indeks Pembangunan Manusia. Indeks ini merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia/masyarakat di suatu wilayah. Menurut UNDP, pembangunan manusia hanya dapat direalisasikan bila penduduk dalam suatu wilayah tertentu setidaknya memiliki peluang berumur panjang dan sehat, pengetahuan keterampilan yang memadai dan peluang untuk merealisasikan pengetahuan yang dimiliki dalam kegiatan produktif sehingga memiliki daya beli. Dengan kata lain, tingkat pemenuhan ketiga unsur tersebut sudah dapat merefleksikan secara minimal tingkat keberhasilan pembangunan manusia suatu wilayah.

IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu dimensi umur panjang dan sehat, dimensi pengetahuan, dan dimensi standar hidup layak. Setiap dimensi memiliki indeks tersendiri. Pengukuran dimensi umur panjang dan sehat menggunakan indikator umur harapan hidup (*expectancy of life at birth*) yang menghasilkan indeks kesehatan. Dimensi pengetahuan diukur dengan indikator rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas dan indikator harapan lama sekolah dari penduduk usia 7 tahun ke atas yang menghasilkan indeks pengetahuan. Dimensi standar hidup layak diukur dengan pengeluaran per kapita yang telah disesuaikan yang menghasilkan indeks pendapatan.

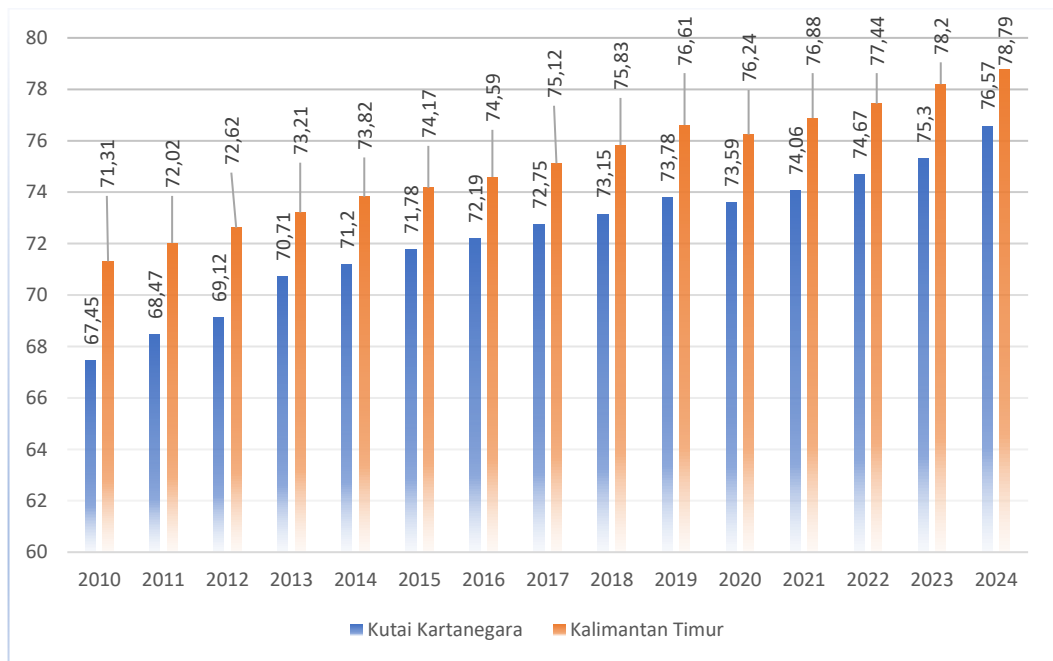
Perkembangan angka IPM di Kabupaten Kutai Kartanegara selama periode 2010-2024 terus mengalami peningkatan sebagaimana terlihat di Grafik 2.3.7. Dengan menggunakan metode baru, pada tahun 2010 IPM Kutai Kartanegara hanya mencapai 67,45, sementara IPM Provinsi Kalimantan Timur mencapai angka yang lebih tinggi 71,31. Pada tahun 2024 IPM Kutai Kartanegara meningkat 9,12 poin menjadi 76,57.





Selama periode 2010-2023 IPM Kutai Kartanegara selalu lebih rendah dari IPM Provinsi Kalimantan Timur. Kendati demikian, jika dilihat dari pertumbuhannya, IPM Kutai Kartanegara tumbuh sedikit lebih cepat dibandingkan IPM Kaltim. Selama periode 2010-2024, IPM Kutai Kartanegara tumbuh 13,52 persen sementara IPM Kaltim hanya tumbuh di kisaran 10,49 persen.

Grafik 10. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Kutai Kartanegara, 2010 - 2024



Sumber: BPS

Perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Kutai Kartanegara dari tahun 2010 hingga 2024, yang mengalami peningkatan signifikan selama periode tersebut. Pada tahun 2010, HLS tercatat sebesar 11,59 tahun, yang berarti rata-rata anak di Kutai Kartanegara diproyeksikan akan mengenyam pendidikan hingga jenjang kelas 6 SMP. Angka ini terus meningkat, dengan lonjakan signifikan terjadi antara 2012 hingga 2014, di mana HLS naik dari 12,11 tahun menjadi 13,24 tahun, menandakan peningkatan akses terhadap pendidikan menengah.

Sejak tahun 2015, pertumbuhan HLS mulai melambat, tetapi tetap menunjukkan tren positif, mencapai 13,56 tahun pada 2017 dan bertahan di angka tersebut hingga 2019. Setelah tahun 2020, angka HLS sedikit meningkat lagi menjadi 13,64 tahun pada 2023, dan mencapai 13,65 tahun



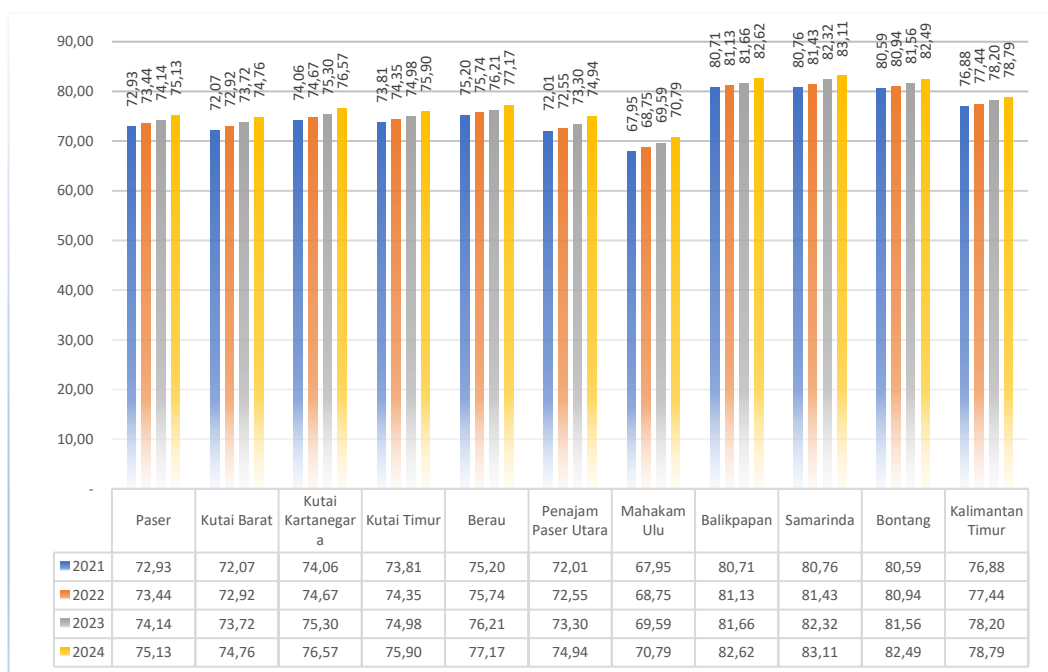


pada 2024, yang berarti rata-rata anak di Kutai Kartanegara kini diperkirakan akan bersekolah hingga jenjang kelas 1 perguruan tinggi atau diploma satu (D1).

Secara keseluruhan, peningkatan HLS ini menunjukkan adanya perbaikan dalam akses dan kesadaran pendidikan di Kutai Kartanegara, didukung oleh peningkatan fasilitas pendidikan, program beasiswa, serta kebijakan wajib belajar yang semakin efektif. Meskipun demikian, stagnasi dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan perlunya upaya lebih lanjut untuk meningkatkan akses pendidikan tinggi serta mengurangi angka putus sekolah, agar HLS dapat terus meningkat secara signifikan di masa mendatang.

Perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur dari tahun 2021 hingga 2024. Secara keseluruhan, HLS mengalami peningkatan di semua daerah, menunjukkan adanya perbaikan akses dan kesempatan pendidikan bagi masyarakat.

Grafik 11. Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, 2021 - 2024



Sumber: BPS, 2024

Di Kabupaten Kutai Kartanegara, HLS meningkat dari 13,60 tahun pada 2021 menjadi 13,65 tahun pada 2024, yang berarti anak-anak di daerah ini diproyeksikan akan bersekolah hingga jenjang diploma satu (D1). Secara





provinsi, Kalimantan Timur juga menunjukkan tren positif, dengan HLS meningkat dari 13,81 tahun pada 2021 menjadi 14,03 tahun pada 2024.

Jika dibandingkan dengan daerah lain, Samarinda dan Balikpapan mencatatkan HLS tertinggi di Kalimantan Timur, masing-masing 15,10 tahun dan 14,25 tahun pada 2024, yang menunjukkan akses pendidikan lebih luas di kota-kota besar. Sementara itu, Mahakam Ulu dan Penajam Paser Utara mencatat angka HLS lebih rendah, masing-masing 12,78 tahun dan 12,87 tahun pada 2024, menunjukkan masih adanya tantangan dalam pemerataan akses pendidikan di daerah-daerah tersebut.

Secara keseluruhan, peningkatan HLS di Kalimantan Timur, termasuk Kutai Kartanegara, menandakan kemajuan dalam sektor pendidikan, namun perbedaan antarwilayah menunjukkan masih perlunya peningkatan infrastruktur pendidikan, dukungan tenaga pengajar, serta program bantuan pendidikan agar kesempatan belajar semakin merata di seluruh daerah. Adapun penjelasan capaian indikator kinerja sasaran tersebut sebagai berikut:

1. Indeks Pendidikan

Indeks Pendidikan merupakan pencerminan hasil pembangunan di bidang pendidikan, yang dihitung berdasarkan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Perubahan terjadi dalam pengukuran indeks pengetahuan, di mana indikator angka melek huruf tidak lagi digunakan karena mayoritas wilayah telah mencapai tingkat yang tinggi dan tidak lagi sensitif untuk mengukur kualitas pendidikan. Pada tahun 2010, dalam komponen pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pengetahuan mencatat angka terendah yaitu 57,79. Pada tahun 2022, indeks ini mengalami peningkatan sebesar 10,87 poin menjadi 68,66. Pada tahun 2024, Indeks Pengetahuan nasional meningkat lagi menjadi sekitar 65-66, seiring dengan kenaikan Harapan Lama Sekolah (HLS) menjadi 13,21 tahun dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) mencapai 8,85 tahun, menunjukkan bahwa pendidikan formal rata-rata di Indonesia telah mencapai tingkat SMP kelas 2. Meskipun Indeks Pengetahuan tetap





menjadi komponen IPM dengan angka terendah, pertumbuhannya tetap yang tercepat dibandingkan indeks lain.

Di tingkat Provinsi Kalimantan Timur, Indeks Pendidikan juga mengalami peningkatan yang signifikan, sejalan dengan tren nasional. Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kalimantan Timur telah mencapai lebih dari 13 tahun, sementara Rata-rata Lama Sekolah (RLS) meningkat mendekati 9 tahun, menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk telah menempuh pendidikan setidaknya hingga tingkat SMP. Secara spesifik, di Kabupaten Kutai Kartanegara, peningkatan indeks ini didukung oleh program pendidikan daerah, seperti beasiswa untuk siswa kurang mampu, peningkatan fasilitas sekolah, serta dukungan bagi tenaga pendidik. Kebijakan pemerintah daerah yang terus memperluas akses pendidikan, baik melalui infrastruktur sekolah maupun program bantuan pendidikan, turut mempercepat kenaikan Indeks Pendidikan.

Namun, tantangan masih ada, terutama terkait ketimpangan akses pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedalaman, ketersediaan tenaga pengajar berkualitas di desa-desa terpencil, serta minimnya akses terhadap teknologi dan internet di beberapa daerah. Faktor-faktor ini berkontribusi terhadap perbedaan pencapaian pendidikan antarwilayah dalam Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kalimantan Timur secara umum. Dengan berbagai upaya peningkatan pendidikan yang terus dilakukan, diharapkan Indeks Pendidikan di Kutai Kartanegara dan Kalimantan Timur dapat terus meningkat, mengejar rata-rata nasional, serta mendukung target peningkatan kualitas sumber daya manusia di wilayah ini.

Indeks Pendidikan dihitung dengan menggunakan rumus:

$$I_{pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$$

Keterangan:

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{max} - HLS_{min}}$$

$I_{pendidikan}$ = Indeks Pendidikan

I_{HLS} = Indeks Harapan Lama Sekolah

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{max} - RLS_{min}}$$

I_{RLS} = Indeks Rata – rata Lama Sekolah

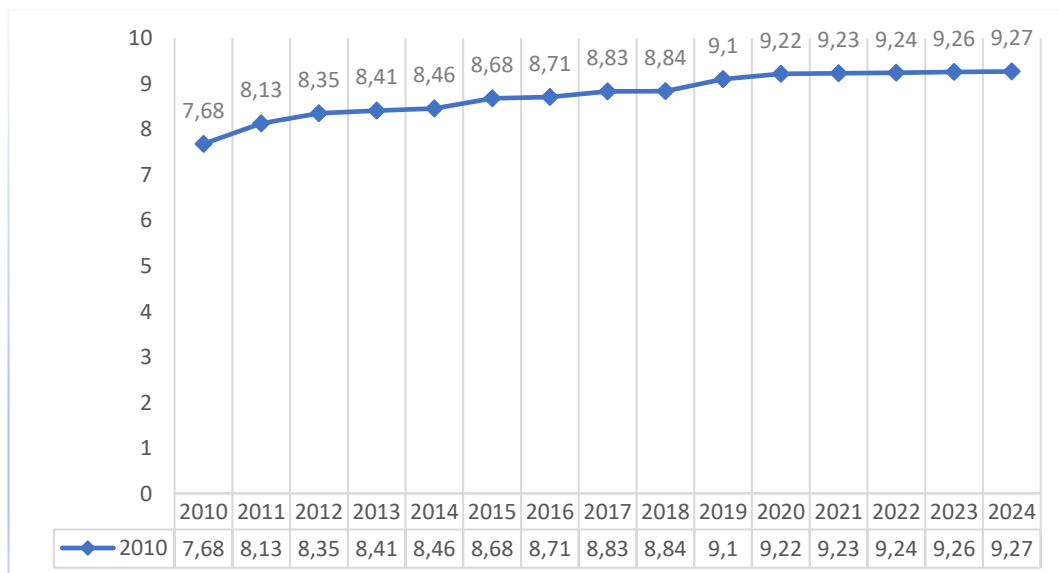




Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah

Komponen dimensi pengetahuan dalam pembangunan manusia dihitung dengan indikator rata-rata lama sekolah (RLS) dan harapan lama sekolah (HLS). Rata-rata lama sekolah merupakan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Sementara harapan lama sekolah adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah tiap jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Cakupan penghitungan angka HLS adalah penduduk umur 7 tahun ke atas. HLS digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang.

Grafik 12. Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2010-2024



Sumber: BPS 2024

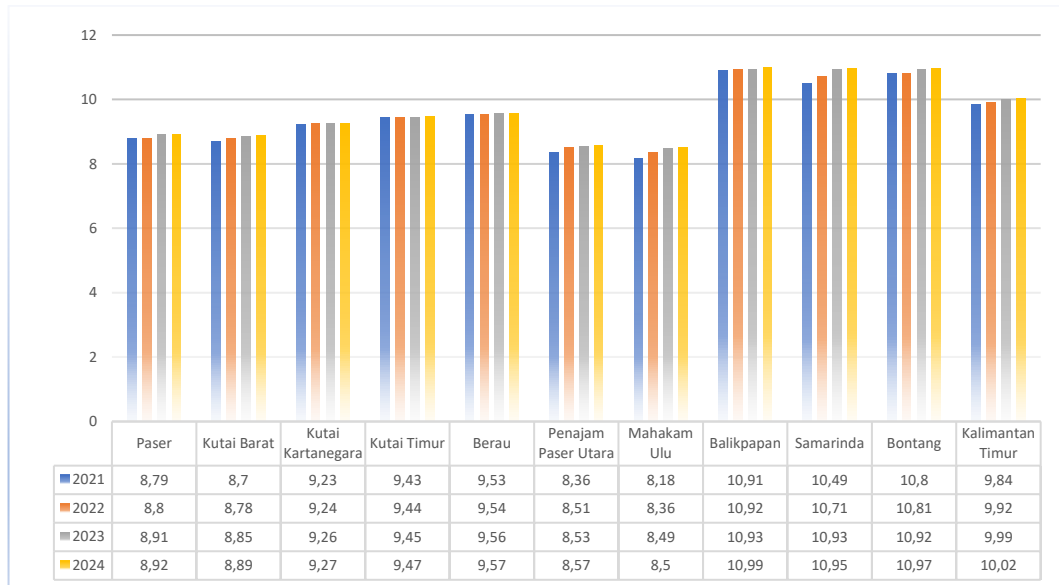
Grafik menunjukkan perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Kutai Kartanegara dari tahun 2021 hingga 2024, yang mengalami peningkatan dari 9,23 tahun pada 2021 menjadi 9,27 tahun pada 2024. Kenaikan ini mencerminkan peningkatan akses terhadap pendidikan formal, di mana rata-rata penduduk Kutai Kartanegara telah menempuh pendidikan hingga hampir menyelesaikan SMP kelas 3. Meskipun mengalami pertumbuhan, angka ini masih berada sedikit di





bawah rata-rata Provinsi Kalimantan Timur, yang pada tahun 2024 mencapai 10,02 tahun.

Grafik 13. Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/ Kota Provinsi Kalimantan Timur 2010-2024



Sumber: BPS 2024

Sebagai perbandingan, Balikpapan, Samarinda, dan Bontang memiliki RLS yang lebih tinggi, masing-masing 10,99 tahun, 10,95 tahun, dan 10,92 tahun pada 2024. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk di wilayah perkotaan lebih banyak yang telah menamatkan jenjang SMA atau setidaknya mencapai kelas 1 SMA dibandingkan dengan Kutai Kartanegara. Faktor seperti akses sekolah yang lebih mudah, ketersediaan tenaga pendidik yang lebih baik, serta infrastruktur pendidikan yang lebih lengkap di daerah perkotaan dapat menjadi penyebab utama tingginya angka RLS di kota-kota tersebut.

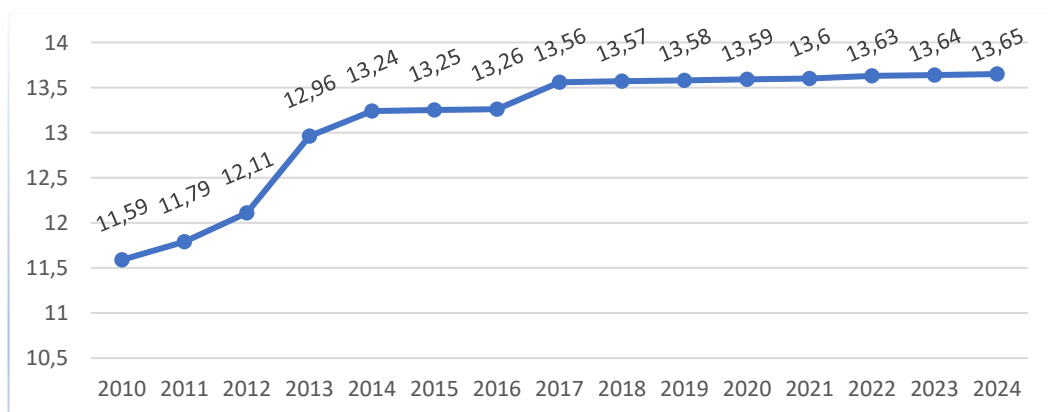
Di sisi lain, jika dibandingkan dengan beberapa daerah lain di Kalimantan Timur, Kutai Kartanegara memiliki angka RLS yang lebih tinggi dibandingkan Mahakam Ulu dan Penajam Paser Utara, yang pada tahun 2024 masing-masing hanya mencapai 8,55 tahun dan 8,57 tahun. Angka ini menunjukkan bahwa di beberapa daerah dengan tantangan geografis dan akses pendidikan yang masih terbatas, rata-rata pendidikan penduduknya masih lebih rendah, dengan banyak yang belum menyelesaikan jenjang SMP.





Meskipun RLS di Kutai Kartanegara mengalami peningkatan, kesenjangan dengan kota-kota besar seperti Balikpapan dan Samarinda masih cukup terasa. Faktor yang dapat mendorong peningkatan RLS lebih signifikan di Kutai Kartanegara antara lain perluasan akses pendidikan di daerah terpencil, peningkatan kualitas guru, serta program beasiswa dan bantuan pendidikan yang lebih merata. Dengan program-program ini, diharapkan rata-rata lama sekolah di Kutai Kartanegara dapat terus meningkat, mengejar angka provinsi, dan mendekati capaian daerah perkotaan di Tabulasi Hasil SPAK dan SPKP Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024.

Grafik 14. Perkembangan Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2010-2024



Sumber: BPS 2024

Grafik menunjukkan perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Kutai Kartanegara dari tahun 2010 hingga 2024, yang mengalami peningkatan signifikan selama periode tersebut. Pada tahun 2010, HLS tercatat sebesar 11,59 tahun, yang berarti rata-rata anak di Kutai Kartanegara diproyeksikan akan mengenyam pendidikan hingga jenjang kelas 6 SMP. Angka ini terus meningkat, dengan lonjakan signifikan terjadi antara 2012 hingga 2014, di mana HLS naik dari 12,11 tahun menjadi 13,24 tahun, menandakan peningkatan akses terhadap pendidikan menengah.

Sejak tahun 2015, pertumbuhan HLS mulai melambat, tetapi tetap menunjukkan tren positif, mencapai 13,56 tahun pada 2017 dan bertahan di angka tersebut hingga 2019. Setelah tahun 2020, angka HLS sedikit meningkat lagi menjadi 13,64 tahun pada 2023, dan mencapai 13,65 tahun pada 2024, yang berarti rata-rata anak di Kutai Kartanegara kini

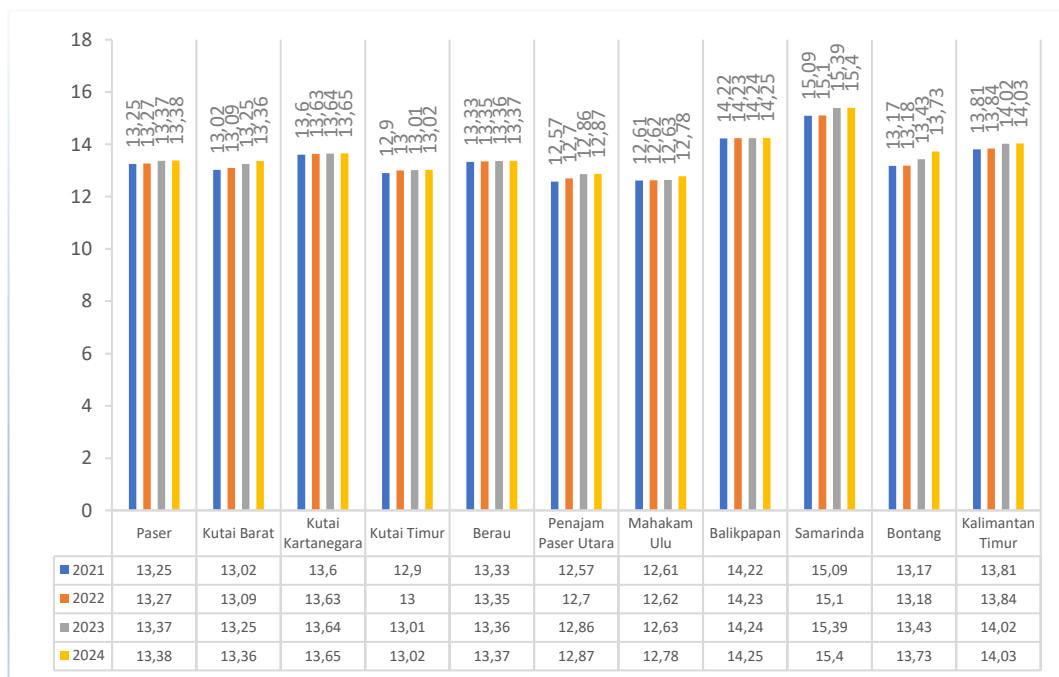




diperkirakan akan bersekolah hingga jenjang kelas 1 perguruan tinggi atau diploma satu (D1).

Secara keseluruhan, peningkatan HLS ini menunjukkan adanya perbaikan dalam akses dan kesadaran pendidikan di Kutai Kartanegara, didukung oleh peningkatan fasilitas pendidikan, program beasiswa, serta kebijakan wajib belajar yang semakin efektif. Meskipun demikian, stagnasi dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan perlunya upaya lebih lanjut untuk meningkatkan akses pendidikan tinggi serta mengurangi angka putus sekolah, agar HLS dapat terus meningkat secara signifikan di masa mendatang.

Grafik 15. Harapan Lama Sekolah Kabupaten/ Kota Provinsi Kalimantan Timur 2010-2024



Sumber: BPS 2024

perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur dari tahun 2021 hingga 2024. Secara keseluruhan, HLS mengalami peningkatan di semua daerah, menunjukkan adanya perbaikan akses dan kesempatan pendidikan bagi masyarakat.

Di Kabupaten Kutai Kartanegara, HLS meningkat dari 13,60 tahun pada 2021 menjadi 13,65 tahun pada 2024, yang berarti anak-anak di daerah ini diproyeksikan akan bersekolah hingga jenjang diploma satu (D1). Secara



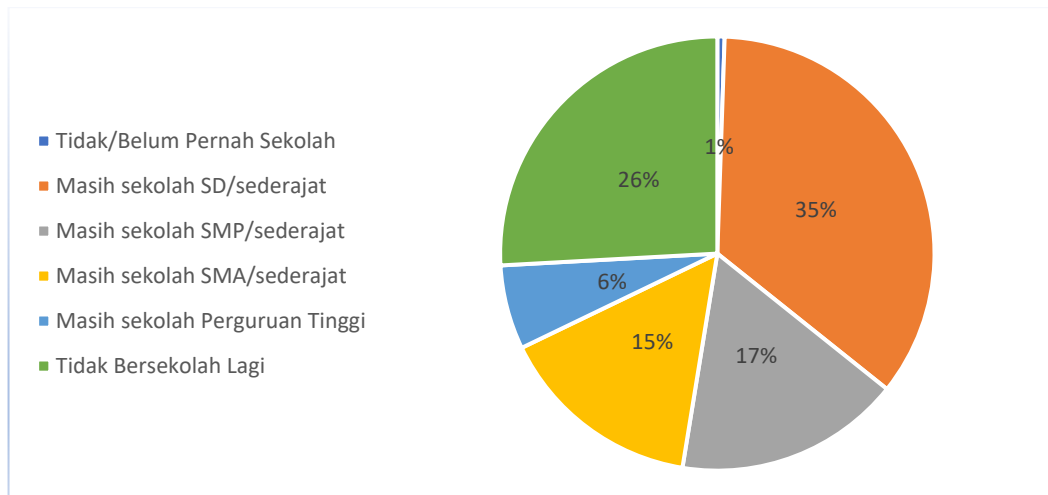


provinsi, Kalimantan Timur juga menunjukkan tren positif, dengan HLS meningkat dari 13,81 tahun pada 2021 menjadi 14,03 tahun pada 2024.

Jika dibandingkan dengan daerah lain, Samarinda dan Balikpapan mencatatkan HLS tertinggi di Kalimantan Timur, masing-masing 15,10 tahun dan 14,25 tahun pada 2024, yang menunjukkan akses pendidikan lebih luas di kota-kota besar. Sementara itu, Mahakam Ulu dan Penajam Paser Utara mencatat angka HLS lebih rendah, masing-masing 12,78 tahun dan 12,87 tahun pada 2024, menunjukkan masih adanya tantangan dalam pemerataan akses pendidikan di daerah-daerah tersebut.

Secara keseluruhan, peningkatan HLS di Kalimantan Timur, termasuk Kutai Kartanegara, menandakan kemajuan dalam sektor pendidikan, namun perbedaan antarwilayah menunjukkan masih perlunya peningkatan infrastruktur pendidikan, dukungan tenaga pengajar, serta program bantuan pendidikan agar kesempatan belajar semakin merata di seluruh daerah.

Grafik 16. Persentase Penduduk 7-23 tahun Menurut Karakteristik dan Status Pendidikan, 2024



Sumber: BPS 2024, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret

Persentase penduduk usia 7-23 tahun berdasarkan status pendidikan pada tahun 2024. Mayoritas penduduk dalam kelompok usia ini masih bersekolah, dengan 35,19% masih berada di jenjang SD/ sederajat, 16,84% di jenjang SMP/ sederajat, 15,28% di jenjang SMA/ sederajat, dan 6,28% di perguruan tinggi.





Namun, terdapat 25,87% penduduk yang sudah tidak bersekolah lagi, yang menjadi perhatian dalam upaya peningkatan angka partisipasi pendidikan di jenjang lebih tinggi. Sementara itu, 0,54% penduduk usia 7-23 tahun tidak atau belum pernah bersekolah, meskipun jumlahnya relatif kecil, tetap menunjukkan adanya tantangan dalam pemerataan akses pendidikan dasar.

Secara keseluruhan, data ini menggambarkan bahwa sebagian besar penduduk usia sekolah masih aktif menempuh pendidikan, tetapi angka partisipasi menurun di jenjang yang lebih tinggi, terutama di perguruan tinggi. Hal ini menunjukkan perlunya intervensi kebijakan untuk meningkatkan akses dan keberlanjutan pendidikan, khususnya untuk kelompok yang berhenti sekolah lebih awal.

Berdasarkan penjelasan diatas maka Indeks Pendidikan/ Indeks Pengetahuan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024, diperoleh dengan perhitungan:

$$I_{pendidikan} = 0,71$$

2. Indeks Pembangunan Kebudayaan

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) disusun sebagai salah satu instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan kebudayaan yang dapat digunakan sebagai basis formulasi kebijakan bidang kebudayaan, serta menjadi acuan dalam koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan.

Indeks Pembangunan Kebudayaan diharapkan dapat memberikan gambaran pembangunan kebudayaan secara lebih holistik dengan memuat 7 (tujuh) dimensi, yakni: (1) dimensi ekonomi budaya; (2) dimensi pendidikan; (3) dimensi ketahanan sosial budaya; (4) dimensi warisan budaya; (5) dimensi ekspresi budaya; (6) dimensi budaya literasi; dan (7) dimensi gender. Ketujuh dimensi tersebut menunjukkan bahwa





pembangunan kebudayaan memiliki ruang lingkup yang cukup luas dan bersifat lintas sektor.

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 mencapai 57,42, mengalami peningkatan dari capaian tahun sebelumnya sebesar 53,23. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam berbagai aspek pembangunan kebudayaan di Kabupaten Kutai Kartanegara, baik dari sisi pelestarian warisan budaya, peningkatan ekonomi budaya, hingga aspek kesetaraan gender. Setiap dimensi yang membentuk IPK memiliki peran yang signifikan dalam mencerminkan keberhasilan pembangunan kebudayaan di daerah ini.

Adapun capaian Dimensi penyusun Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. Dimensi Ekonomi Budaya

Dimensi Ekonomi Budaya mengalami peningkatan dari **34,00** pada tahun 2023 menjadi **39,00** pada tahun 2024.



- **Capaian indikator utama:** 39% penduduk usia 15 tahun ke atas memiliki sumber penghasilan dari keterlibatan dalam seni pertunjukan, naik dari 34% pada tahun sebelumnya.





- **Faktor pendukung:**

- Program fasilitasi seni pertunjukan oleh pemerintah daerah, termasuk pendanaan untuk para seniman dan komunitas seni.
- Pelaksanaan festival budaya secara rutin, seperti Pekan Budaya Bahari dan Festival Kampung yang memberikan peluang bagi pelaku seni untuk tampil dan memperoleh penghasilan.
- Peningkatan dukungan terhadap pelaku industri kreatif, termasuk UMKM berbasis budaya.

- **Tantangan:**

- Masih terbatasnya diversifikasi ekonomi budaya, yang saat ini lebih banyak berfokus pada seni pertunjukan.
- Kurangnya akses terhadap pasar yang lebih luas bagi pelaku seni dan budaya.

b. Dimensi Pendidikan

Dimensi Pendidikan mengalami peningkatan dari 72,23 pada tahun 2023 menjadi 73,66 pada tahun 2024. Pendidikan yang lebih inklusif terlihat dari semakin tingginya angka partisipasi sekolah bagi kelompok ekonomi 40% terbawah yang mencapai 92,59%. Rata-rata lama sekolah penduduk juga sedikit meningkat menjadi 9,26 tahun, sementara harapan lama sekolah mencapai 13,64 tahun. Pemerintah daerah terus memperkuat program pendidikan inklusif dan implementasi muatan lokal dalam kurikulum sekolah, termasuk pengajaran bahasa daerah dan seni budaya. Namun, tantangan masih ada, terutama rendahnya angka partisipasi pendidikan bagi penyandang disabilitas yang hanya 48,35%, serta kurangnya tenaga pendidik di bidang seni dan budaya.

c. Dimensi Ketahanan Sosial Budaya

Dimensi Ketahanan Sosial Budaya mengalami peningkatan dari 75,96 pada tahun 2023 menjadi 82,29 pada tahun 2024. Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan tingkat toleransi sosial yang tinggi, dengan 97,79% rumah tangga menyatakan setuju jika salah satu anggota keluarga mereka bersahabat dengan orang dari suku yang berbeda. Sebagian besar





masyarakat juga menerima keberadaan kelompok dari suku lain dan aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Program penguatan toleransi sosial dan kebijakan yang mendukung keberagaman budaya berperan dalam mempertahankan harmoni sosial ini. Namun, meningkatnya pola hidup individualis serta pengaruh media digital menjadi tantangan dalam mempertahankan partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan sosial.

d. Dimensi Warisan Budaya

Dimensi Warisan Budaya mengalami peningkatan dari 67,43 pada tahun 2023 menjadi 69,74 pada tahun 2024. Sejumlah langkah strategis telah dilakukan untuk pelestarian budaya, termasuk penetapan 12 dari 95 Objek Diduga Cagar Budaya sebagai Cagar Budaya Kabupaten serta pengakuan 22 Warisan Budaya Takbenda sebagai bagian dari budaya nasional. Program konservasi dan dokumentasi warisan budaya terus diperkuat melalui kegiatan berbasis budaya seperti festival seni dan budaya lokal. Namun, masih terdapat tantangan dalam meningkatkan penggunaan bahasa daerah yang masih rendah, dengan hanya 38,26% penduduk yang menggunakannya secara aktif dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, perhatian terhadap cagar budaya yang belum terdaftar juga masih perlu ditingkatkan.

e. Dimensi Ekspresi Budaya

Dimensi Ekspresi Budaya mengalami pertumbuhan signifikan dari 34,96 pada tahun 2023 menjadi 45,08 pada tahun 2024. Meningkatnya jumlah masyarakat yang terlibat dalam kegiatan budaya dan seni menunjukkan adanya ruang berekspresi yang lebih



terbuka. Pemerintah daerah telah menyediakan berbagai event budaya yang lebih inklusif, memungkinkan setiap kelompok masyarakat untuk berpartisipasi. Dukungan berupa ruang-ruang kreatif bagi seniman juga





semakin berkembang. Namun, masih diperlukan penguatan fasilitas bagi komunitas seni agar mereka dapat mengekspresikan budaya secara lebih optimal.

f. Dimensi Budaya Literasi

Dimensi Budaya Literasi mengalami sedikit penurunan dari 39,00 pada tahun 2023 menjadi 38,80 pada tahun 2024. Rendahnya budaya membaca masih menjadi tantangan, dengan hanya 12,98% penduduk yang membaca buku selain kitab suci dalam satu minggu terakhir. Pemerintah telah meningkatkan akses terhadap perpustakaan dan taman bacaan masyarakat, tetapi pengaruh media sosial yang lebih dominan dalam konsumsi informasi menjadi penyebab utama rendahnya budaya literasi di masyarakat. Upaya lebih lanjut diperlukan untuk mendorong minat baca melalui program literasi yang lebih menarik dan berbasis komunitas.

g. Dimensi Kesetaraan Gender

Dimensi Kesetaraan Gender mengalami peningkatan dari 49,00 pada tahun 2023 menjadi 51,19 pada tahun 2024. Keterlibatan perempuan dalam dunia kerja dan pendidikan semakin meningkat, berkat berbagai program pemberdayaan perempuan yang dijalankan oleh pemerintah daerah. Namun, tantangan masih ada, terutama dalam hal keterwakilan perempuan di sektor politik yang masih relatif rendah. Langkah-langkah strategis perlu dilakukan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam kepemimpinan dan pengambilan keputusan.

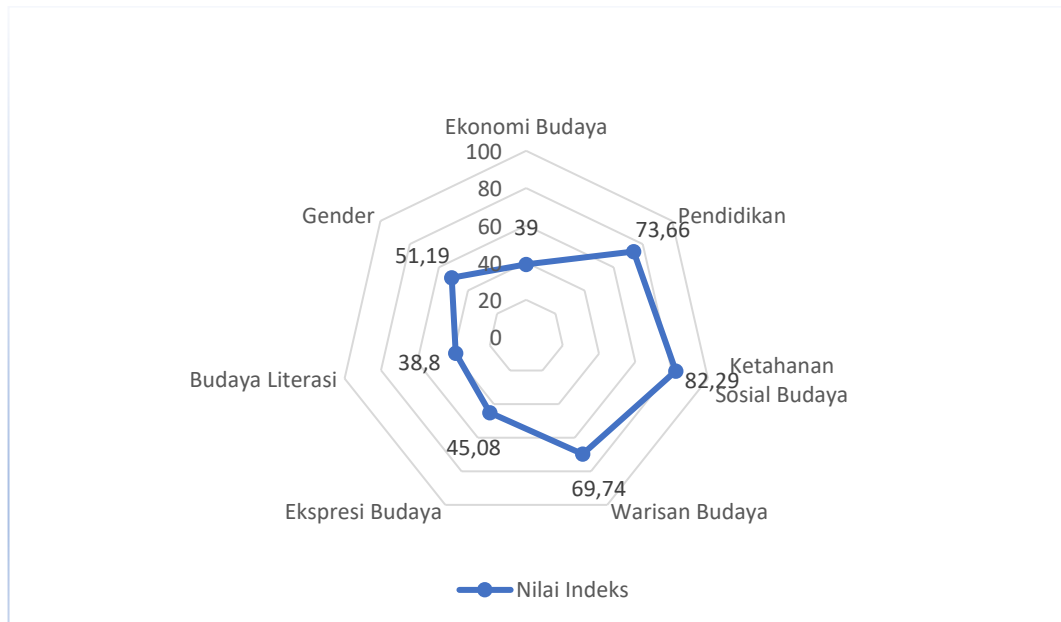
Berdasarkan ulasan per-indikator, terdapat 6 (enam) dimensi yang memiliki nilai indeks lebih tinggi dibanding tahun 2022, yaitu Ekonomi Budaya, Ketahanan Sosial

Budaya, Warisan Budaya, Ekspresi Budaya, Budaya Literasi, dan Gender. Sedangkan dimensi pendidikan berada di bawah angka tahun 2022. Nilai indeks Ekonomi Budaya dan Warisan Budaya mengalami peningkatan signifikan ketimbang tahun sebelumnya. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut ini.





Grafik 17. Indeks Dimensi IPK Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024



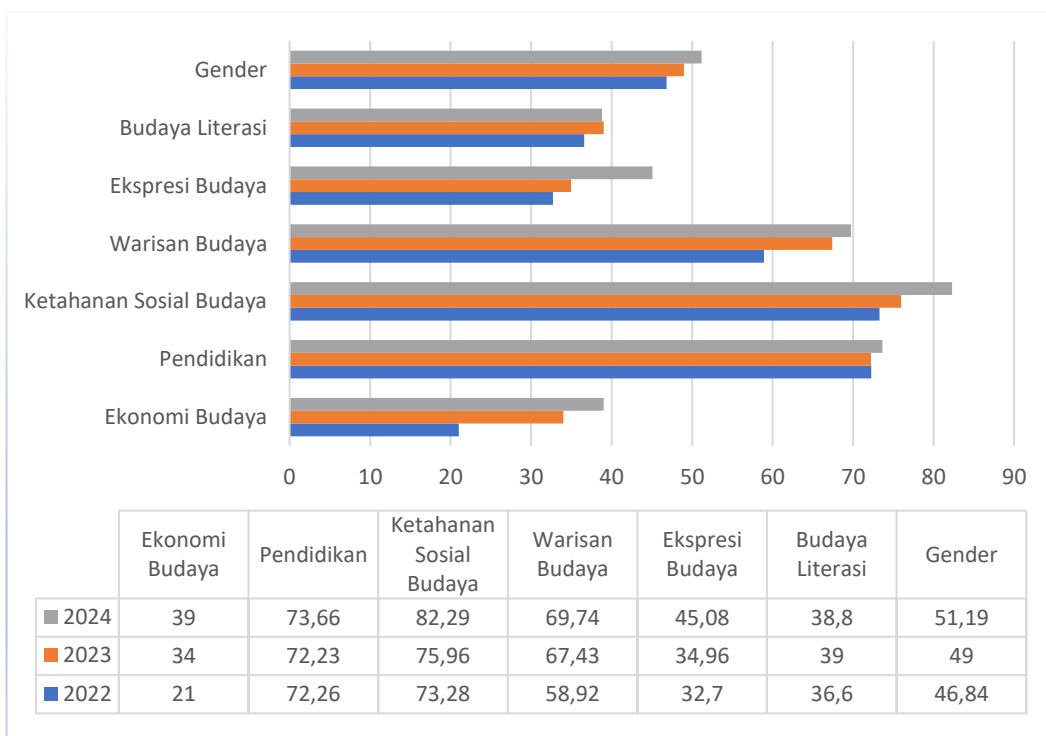
Sumber: Laporan IPK Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2024

Apabila menilik nilai dimensi pada gambar di atas, terdapat kesenjangan yang cukup besar antara dimensi yang satu dengan lainnya. Dimensi dengan hasil tertinggi adalah Ketahanan Sosial Budaya (82,29) dan Pendidikan (73,66). Tingginya nilai Ketahanan Sosial Budaya menggambarkan kemajemukan masyarakat di Kutai Kartanegara dapat dikelola dengan baik, sehingga kohesi sosial antar masyarakat yang berbeda agama, suku, dan ras cukup kuat. Sedangkan, tingginya nilai indeks dimensi pendidikan menunjukkan cukup mapannya sarana prasarana dan kualitas pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai aspek yang menunjang pembangunan dan transformasi kebudayaan. Sedangkan nilai dimensi Ekonomi Budaya mengalami kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya (39,00) yang menunjukkan bahwa semakin berkembangnya aktivitas ekonomi yang tercipta sebagai hasil dari pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK). Adapun per tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memberikan insentif dan beasiswa pelatihan bagi pelaku seni untuk mendorong kemandirian agar mampu berdaya saing dan meningkatkan taraf ekonomi.





Grafik 18. IPK Kabupaten Kutai Kartanegara 2022-2024



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutai Kartanegara

Grafik ini membandingkan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Kabupaten Kutai Kartanegara dari tahun 2022 hingga 2024 dalam tujuh kategori: Ekonomi Budaya, Pendidikan, Ketahanan Sosial Budaya, Warisan Budaya, Ekspresi Budaya, Budaya Literasi, dan Gender. Secara umum, semua kategori mengalami peningkatan dalam tiga tahun terakhir. Ketahanan Sosial Budaya memiliki nilai tertinggi pada tahun 2024 (82,29), diikuti oleh Pendidikan (73,66) dan Warisan Budaya (69,74). Ekonomi Budaya mengalami peningkatan signifikan dari 21 pada 2022 menjadi 39 pada 2024. Ekspresi Budaya juga menunjukkan pertumbuhan pesat, dari 32,7 pada 2022 menjadi 45,08 pada 2024. Gender dan Budaya Literasi juga meningkat secara konsisten, meskipun dengan pertumbuhan yang lebih lambat dibandingkan kategori lainnya. Secara keseluruhan, IPK Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan tren positif dari 2022 hingga 2024.

Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2022 disajikan dalam tabel berikut ini:





Tabel 54. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 4 terhadap target RPJMD

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Target 2025	Target 2026
4	Indeks Pendidikan	Nilai	0,685	0,687	0,679	0,71	0,704	0,706
5	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Nilai	N/A	47,42	53,23	57,42	51,5	53

Sumber data: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara

Sasaran tersebut dicapai melalui Program-program sebagai berikut:

Tabel 55. Program dan Anggaran Sasaran 4 Tahun 2024

No	Program	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran
1	Program Pengelolaan Pendidikan	1,291,342,086,377.00	1,432,054,507,561.00	863,766,260,489.00	60.32%
2	Program Pengembangan Kurikulum	650,000,000.00	650,000,000.00	-	0.00%
3	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	250,000,000.00	250,000,000.00	158,234,600.00	63.29%
4	Program Pemberdayaan Sosial	7,814,000,000.00	7,814,000,000.00	6,842,546,992.00	87.57%
5	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	100,000,000.00	50,000,000.00	36,448,230.00	72.90%
6	Program Rehabilitasi Sosial	5,859,089,590.00	5,299,105,590.00	4,931,376,972.00	93.06%
7	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	6,886,340,000.00	10,572,980,000.00	9,530,162,652.00	90.14%
8	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	1,450,000,000.00	1,862,000,000.00	1,683,186,782.00	90.40%
9	Program Pengendalian Penduduk	4,482,420,000.00	4,273,701,000.00	3,672,498,148.00	85.93%
10	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	2,000,000,000.00	4,278,263,900.00	4,105,562,114.00	95.96%
11	Program Pengembangan Kebudayaan	46,699,900,000.00	46,206,900,000.00	31,342,574,312.00	67.83%
12	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	5,550,000,000.00	5,650,000,000.00	2,194,362,924.00	38.84%
13	Program Pembinaan Sejarah	350,000,000.00	850,000,000.00	623,004,948.00	73.29%





No	Program	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran
14	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	7,450,000,000.00	2,349,428,000.00	1,152,995,764.00	49.08%
15	Program Pembinaan Perpustakaan	8,657,000,000.00	8,707,000,000.00	7,842,165,270.00	90.07%
16	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	530,000,000.00	530,000,000.00	524,340,700.00	98.93%
17	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	116,240,244,448.00	139,007,137,830.00	115,578,401,524.00	83.15%
18	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	8,150,000,000.00	8,778,680,000.00	7,093,473,122.00	80.80%
Total		1,514,461,080,415.00	1,679,183,703,881.00	1,061,077,595,543.00	63.19%

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah Rp.1,061,077,595,543.00 dari anggaran sebesar Rp.1,679,183,703,881.00 atau 63,19%. Realisasi keuangan sebesar 62,80% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 107,01%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut, karena target sasaran berhasil 100% tercapai, dan penggunaan sumber daya lebih rendah dari capaian kinerja.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian sasaran antara lain:

1. Sudah tersedianya lembaga pendidikan jenjang pada setiap desa
2. Adanya pembebasan biaya pendidikan sampai jenjang pendidikan menengah dan adanya beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa Kutai Kartanegara dalam upaya peningkatan kompetensi sumber daya manusia
3. Kondisi geografis sebagian wilayah Kutai Kartanegara yang sulit dijangkau, juga mempengaruhi masyarakat dalam mengakses pendidikan.





4. Masih rendahnya kesadaran penduduk di wilayah tertentu terutama pada wilayah perkebunan dan kampung nelayan untuk bersekolah/ kuliah, masyarakat lebih mementingkan bekerja dan mencari uang untuk memenuhi kebutuhan ekonominya.
5. Terkait pembangunan kebudayaan adanya prioritas dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam meningkatkan kualitas pembangunan kebudayaan. Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki banyak warisan budaya tak benda yang sudah ditetapkan secara nasional.
6. Situasi kerukunan umat beragama, suku, ras, dan golongan di wilayah ini juga sangat baik, bahkan belum pernah terjadi konflik yang eskalatif.
7. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dapat mendorong lahirnya pelaku seni yang menjadikan kesenian sebagai sumber penghasilan utama dengan memberi pelatihan, *sponsorship*, publikasi, hingga promosi.
8. Peningkatan minat baca dengan menyediakan beragam buku bacaan, pustakawan, dan sarana prasarana penunjang di tiap perpustakaan kecamatan, kelurahan, dan desa.

Komitmen dari Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam meningkatkan indeks Pendidikan salah satunya menjadikan Program Beasiswa Idaman dan Program 1000 guru sarjana, menjadi program dedikasi/ prioritas. Beasiswa 1000 Guru Sarjana dibagi dalam 3 kategori yaitu beasiswa guru non PNS/ Tenaga Pendidik, Beasiswa Calon Guru dan Beasiswa Pasca Sarjana (S2 dan S3), sedangkan Beasiswa Kukar Idaman dibagi dalam 7 kategori yaitu Beasiswa Berkebutuhan Khusus, Beasiswa Sekolah Menengah Atas/ Kejuruan/ Madrasah, Beasiswa Santri Pondok Pesantren, Beasiswa Stimulan (S1), Beasiswa Khusus (Yatim Piatu terdampak covid-19) Beasiswa Santri Lanjut Perguruan Tinggi dan Beasiswa Tematik.

Di Tahun 2024 melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Kutai Kartanegara telah merealisasikan beasiswa dengan rincian:





Tabel 56. Realisasi Program Beasiswa Tahun 2022-2024

NO.	KATEGORI BEASISWA	CAPAIAN			KETERANGAN
		2022	2023	2024	
1	Beasiswa santri lanjut perguruan tinggi	7	22	48	
2	Beasiswa stimulan Mahasiswa	644	1094	3926	
3	Beasiswa Non ASN skema tematik	21	75	139	
4	Beasiswa santri pondok pesantren	159	329	238	
5	Beasiswa tingkat SD/SMP/SMA SLB	15	0	0	Tidak ada di Renstra
6	Beasiswa tingkat SMA/SMK/MA	95	347	855	Tidak ada di Renstra
7	Beasiswa khusus (yatim piatu) korban covid 19	21	57	0	Tidak ada di Renstra
TOTAL		962	1924	5206	

Sumber: Bagian Kesejahteraan Rakyat Tahun 2024

5. Analisis Kinerja Sasaran 5: “Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat”

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat” dengan indikator Indeks Kesehatan mencapai 99,14% dan termasuk predikat “Sangat Berhasil” sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 57. Realisasi Indikator Sasaran 5 Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	% Capaian
6	Indeks Kesehatan	Nilai	0,82	0,81	99,14

Pengukuran dimensi umur panjang dan sehat menggunakan indikator umur harapan hidup (expectancy of life at birth) yang menghasilkan indeks kesehatan, merupakan salah satu dimensi dari Indeks Pembangunan Manusia.

Untuk mengukur capaian kinerja sasaran Meningkatkan Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menggunakan indikator Indeks Kesehatan. Indeks Kesehatan menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut:

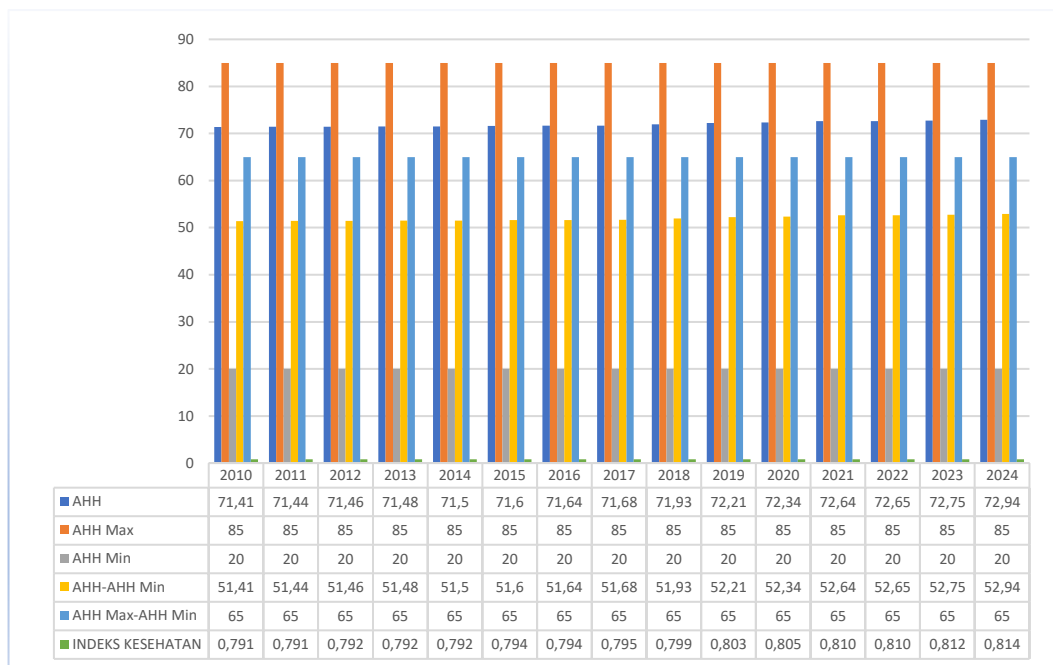
$$I_{Kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{max} - AHH_{min}}$$





Pada Tahun 2023 Indeks Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara mencapai 0,812, capaian ini meningkat 0,002 jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2024 angka indeks kesehatan bisa mencapai 0,814. Setiap tahunnya indeks Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara terus meningkat. Perkembangan Indeks Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara mulai Tahun 2010 sampai Tahun 2024, ditampilkan pada grafik dibawah ini:

Grafik 19. Indeks Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara 2010-2024



Sumber: Dinas Kesehatan Kutai Kartanegara

Angka Harapan Hidup



Kunjungan Dokter Spesialis ke Puskesmas

Komponen umur panjang dan hidup sehat diukur dengan indikator angka harapan hidup saat lahir (*expectation of life at birth*). Angka harapan hidup menggambarkan perkiraan lama hidup rata-rata penduduk (dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas). Semakin tinggi capaian indikator angka harapan hidup (AHH) maka semakin tinggi kemampuan manusia di suatu wilayah untuk hidup lebih lama.



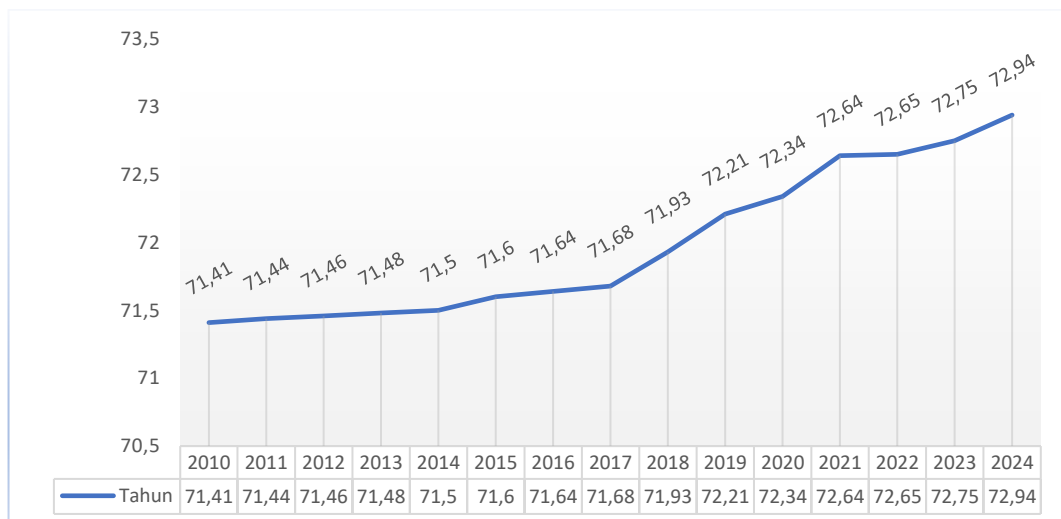


Pada tahun 2010 perkiraan rata-rata umur yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah 71,41 tahun. Angka ini terus meningkat hingga mencapai 72,75 tahun pada tahun 2023, dan Angka Harapan Hidup Kabupaten Kutai Kartanegara pada Tahun 2024 mencapai 72,94.



Kunjungan Dokter Spesialis Anak ke Puskesmas

Grafik 20. Perkembangan Angka Harapan Hidup di Kabupaten Kutai Kartanegara 2010-2024



Sumber: BPS, 2024

Tabel 58. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 5 terhadap target RPJMD

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Target 2025	Target 2026
6	Indeks Kesehatan	Nilai	0,81	0,81	0,812	0,814	0,821	0,824

Sumber data: Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara

Sasaran tersebut dicapai melalui Program-program sebagai berikut:

Tabel 59. Program dan Anggaran Sasaran 5 Tahun 2024

No	Program	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	809,789,389,794.00	967,478,549,872.00	865,411,423,482.42	89.45%
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	5,482,820,000.00	6,022,667,900.00	4,526,686,672.00	75.16%





No	Program	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran
3	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	628,114,000.00	628,114,000.00	481,809,000.00	76.71%
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	3,919,162,500.00	3,619,138,900.00	2,771,672,235.00	76.58%
5	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	6,292,495,000.00	10,473,414,000.00	8,880,592,960.00	84.79%
6	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	39,114,287,985.00	53,079,916,085.00	49,921,386,914.00	94.05%
Total		865,226,269,279.00	1,041,301,800,757.00	931,993,571,263.42	89.50%

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah Rp.931,993,571,263.42 dari anggaran sebesar Rp. 1,041,301,800,757.00 atau sebesar 89,50%. Sementara itu, realisasi keuangan sebesar 89,50% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran yang mencapai 99,14% menunjukkan bahwa penggunaan sumber daya relatif efisien. Meskipun target sasaran belum tercapai 100%, efektivitas pencapaian kinerja yang lebih tinggi dibandingkan dengan penggunaan anggaran mencerminkan bahwa sumber daya telah dimanfaatkan secara optimal dalam mencapai hasil yang hampir sesuai dengan target.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian sasaran antara lain:

1. Kondisi geografis Kabupaten Kutai Kartanegara, menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pelayanan kesehatan masyarakat susah untuk diakses secara merata di seluruh wilayah.
2. Belum tersedia secara merata dan lengkapnya sarana prasarana Kesehatan maupun SDM Kesehatan di seluruh unit-unit layanan Kesehatan masyarakat.

Beberapa upaya telah dilakukan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam memecahkan permasalahan ini antara lain:





1. Penyediaan fasilitas sarana prasarana Kesehatan sesuai standar yang dilakukan secara bertahap, dengan membangun dan memperbaiki kondisi Bangunan Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Penyediaan SDM Kesehatan secara bertahap, salah satunya melalui pengangkatan PPPK, yang akan bertugas di RSUD dan Puskesmas.
3. Terus meningkatkan penyediaan pelayanan Kesehatan sesuai terstandar kepada masyarakat.
4. Terhadap kesenjangan SDM Kesehatan, maka dijadwalkan secara rutin kunjungan Dokter Spesialis ke Puskesmas-puskesmas di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.
5. Dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan, mengoptimalkan pelaksanaan program upaya Kesehatan masyarakat dan perorangan, serta mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah, menjadi sasaran tambahan dalam perjanjian kinerja seluruh kepala perangkat daerah.

6. Analisis Kinerja Sasaran 6: “Meningkatnya Peran Serta Perempuan Dalam Pembangunan”

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Peran Serta Perempuan Dalam Pembangunan” dengan indikator Indeks Pembangunan Gender mencapai 100,63% dan termasuk predikat “Sangat Berhasil” sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 60. Realisasi Indikator Sasaran 6 Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	% Capaian
7	Indeks Pembangunan Gender	Nilai	79,10	79,60	100,63

)* Data Capaian Tahun 2024

Sumber data: Badan Pusat Statistik

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki. Penghitungan IPG mengacu pada metodologi yang digunakan oleh UNDP dalam menghitung Gender Development Index





(GDI) dan Human Development Indeks (HDI) pada tahun 2010. Perubahan metode ini merupakan penyesuaian dengan perubahan metodologi pada IPM. Selain sebagai penyempurnaan dari metode sebelumnya, IPG metode baru juga merupakan pengukuran langsung terhadap ketimpangan antar gender dalam pencapaian pembangunan manusia.

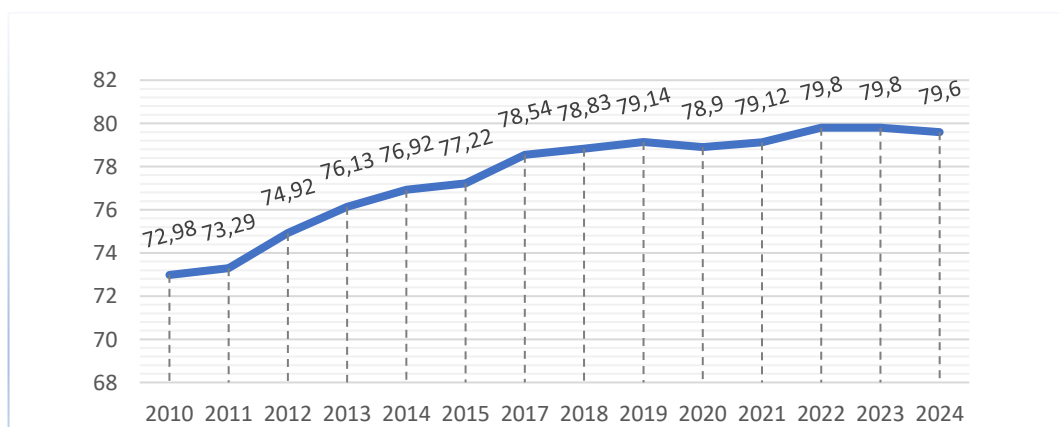
$$\text{Rumusan: } \text{IPG} = \text{IPM perempuan} / \text{IPM laki-laki}$$

Untuk melengkapi penghitungan IPM dengan memberikan informasi capaian pembangunan manusia menurut gender. IPG mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan perbandingan pencapaian antara laki-laki dan perempuan.

Untuk menghitung IPG perlu menghitung IPM laki-laki dan perempuan. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar: (i) Umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), (ii) Pengetahuan (*knowledge*), dan (iii) Standar hidup layak (*decent standard of living*).

Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara perempuan dengan laki-laki. Namun semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin besar perbedaan capaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Angka 100 adalah standar untuk menginterpretasikan angka IPG, karena 100 menggambarkan rasio perbandingan yang paling sempurna.

Grafik 21. Indeks Pembangunan Gender Kab Kutai Kartanegara Tahun 2010-2024



Sumber data: Badan Pusat Statistik





Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 61. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 6 terhadap target RPJMD

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Target 2025	Target 2026
7	Indeks Pembangunan Gender	Nilai	79,12	79,80	79,80	79,60	79,15	79,2

Sumber data: Badan Pusat Statistik

Sasaran tersebut dicapai melalui Program-program sebagai berikut:

Tabel 62. Program dan Anggaran Sasaran 6 Tahun 2024

No	Program	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran
1	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	11,203,961,884.00	9,060,321,884.00	8,446,174,632.00	93.22%
2	Program Perlindungan Perempuan	1,719,504,000.00	1,769,431,000.00	1,440,437,056.00	81.41%
3	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	250,000,000.00	250,000,000.00	230,582,968.00	92.23%
4	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	930,000,000.00	1,130,000,000.00	996,002,742.00	88.14%
5	Program Perlindungan Khusus Anak	1,315,700,000.00	1,315,700,000.00	1,059,752,324.00	80.55%
Total		15,419,165,884.00	13,525,452,884.00	12,172,949,722.00	90.00%

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah Rp.12,172,949,722.00 dari anggaran sebesar Rp.13,525,452,884.00 atau 90%. Realisasi keuangan sebesar 90% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 100,63%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut, karena target sasaran berhasil 100% tercapai, dan penggunaan sumber daya lebih rendah dari capaian kinerja.

Kondisi ketimpangan gender utamanya dapat dilihat dari perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam kemampuan ekonomi. Perempuan yang berdaya salah satunya dapat dilihat dari kondisi finansial. Tak dapat dipungkiri lagi, keterbatasan kontribusi perempuan dalam perekonomian terjadi karena adanya diskriminasi gender dalam pasar tenaga kerja. Jika





hal ini masih terus terjadi, kesetaraan gender dalam penciptaan pendapatan tampaknya tidak akan mudah dicapai.

Kabupaten Kutai Kartanegara telah memiliki landasan hukum yang lebih terbaru dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan daerah. Peraturan Daerah (Perda) Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender telah mengalami perubahan melalui Perda Nomor 1 Tahun 2021, yang mengatur lebih lanjut mengenai tanggung jawab Bupati, pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) PUG, serta mekanisme pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG. Selain itu, guna mendukung implementasi yang lebih konkret, diterbitkan Peraturan Bupati (Perbup) Kutai Kartanegara Nomor 30 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Pengarusutamaan Gender Tahun 2024-2026. Peraturan ini berfungsi sebagai pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang lebih responsif gender. Dengan adanya regulasi yang lebih mutakhir ini, diharapkan kesetaraan dan keadilan gender dapat semakin terwujud dalam berbagai aspek pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

7. Analisis Kinerja Sasaran 7: “Meningkatnya Pemerataan Pendapatan Masyarakat dan Kualitas Hidup Masyarakat”

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Pemerataan Pendapatan Masyarakat dan Kualitas Hidup Masyarakat” dengan indikator Indeks Gini dan Indeks Desa Membangun mencapai 98,67% dan termasuk predikat “Sangat Berhasil” sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 63. Realisasi Indikator Sasaran 7 Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	% Capaian
8	Indeks Gini	Nilai	0,28	0,307	90,36
9	Indeks Desa Membangun	Nilai	0,75	0,7969	106,97
Rata-rata Capaian					98,67

Sumber data: BPS Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kemendes Tahun 2024

Pencapaian kinerja sasaran ini diuraikan sebagai berikut:





Indeks Gini

Angka realisasi 2024 Indeks Gini atau Gini Ratio terealisasi sebesar 0,307, angka ini menurun sebesar 0,023 poin dari Tahun 2023 sebesar 0,284. Target tahun 2024 sebesar 0,28 sehingga capaiannya adalah sebesar 90,36 %. Angka tersebut lebih kecil apabila dibandingkan angka Indeks Gini nasional sebesar 0,379 (pada Maret 2024), dan juga lebih rendah dari Indeks Gini Provinsi Kalimantan Timur sebesar 0,310 (data BPS Kalimantan Timur per Maret 2024).

Indeks Gini merupakan tolak ukur untuk menghitung tingkat pemerataan pendapatan dengan kriteria $G < 0,30$ berarti ketimpangan rendah; $0,30 \leq G \leq 0,50$ berarti ketimpangan sedang dan $G > 0,50$ berarti ketimpangan tinggi. Nilai Indeks Gini berkisar 0 hingga 1. Jika mendekati 1 maka ketimpangan pendapatan penduduk makin lebar. Jika mendekati 0, maka distribusi pendapatan makin merata. Realisasi Indeks Gini tersebut menunjukkan tingkat pemerataan pendapatan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara berada pada kriteria ketimpangan rendah.

Perkembangan gini ratio di Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan kondisi yang berfluktuatif. Pada awal periode tahun 2005 gini ratio di Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar 0,290. Menurut Oshima (1976), angka ini termasuk dalam kategori ketimpangan rendah. Gini ratio terus menurun meskipun berfluktuatif hingga mencapai nilai terendah pada tahun 2011 sebesar 0,205. Pada tahun 2012 gini ratio meningkat tajam menjadi 0,299 dan terus meningkat hingga mencapai 0,312 pada tahun 2014. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan yang terjadi di antara penduduk semakin melebar dibanding kondisi periode 2005-2011.

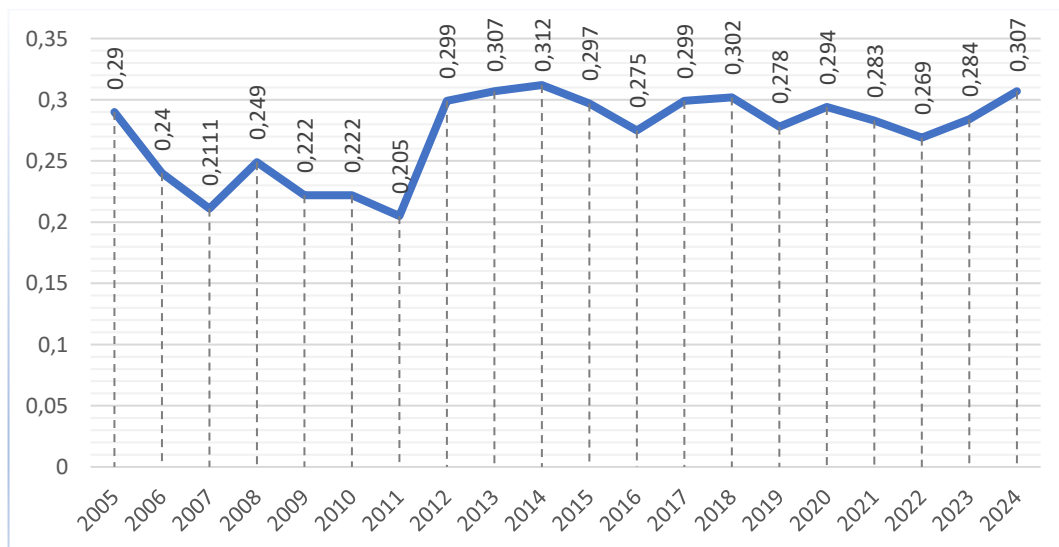
Pada periode berikutnya, 2015 hingga 2016, angka gini ratio sempat turun hingga mencapai 0,275 namun kembali meningkat di tahun 2017 dan 2018. Meskipun sempat turun di tahun 2019 namun karena pandemi Covid-19 angka gini ratio kembali meningkat di tahun 2020. Pada periode 2012 hingga 2021 dapat dikatakan gini ratio cenderung turun melambat meskipun berfluktuatif. Gini ratio tahun 2022 di Kabupaten Kutai Kartanegara mencapai angka 0,269 yang menunjukkan kondisi





pemerataan yang lebih baik dibanding awal periode tahun 2021, karena mengalami penurunan 0,014, namun meningkat Kembali di Tahun 2023 dengan angka 0,284 hingga pada Tahun 2024.

Grafik 22. Indeks Gini Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2024



Sumber data: BPS Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024

Indeks Gini Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020-2024, jika dibandingkan dengan Indeks Gini kabupaten/ kota di Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat dalam grafik berikut:

Grafik 23. Indeks Gini Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024



Sumber data: BPS Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024





Beberapa faktor yang mempengaruhi tingginya rasio gini, pertama yakni kesempatan yang tidak sama bagi masyarakat untuk mengakses pendidikan dan kesehatan. Hal itu telah menciptakan kemiskinan yang menurun. Kedua, pasar tenaga kerja yang tidak seimbang, yakni pekerja informal bergaji sangat minim, bahkan dibawah standar sedangkan pekerja formal memiliki gaji yang terlalu melampaui standar seharusnya. Ketiga, distribusi kekayaan yang tidak merata.



Beberapa usaha telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menekan tingkat kesenjangan, salah satunya pengentasan kemiskinan ekstrem, salah satunya melalui inovasi Rumah Besar Penanggulangan Kemiskinan (RBPK: <https://rbpk.kukarkab.go.id/>) Kutai Kartanegara, agar meningkatkan *Colaboratif Working* antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/ kota, pemerintah desa dan keterlibatan non pemerintah. Beberapa program antara lain Program Sanitasi Aman, Program Yok Baiki Rumah, Program Air Bersih, Program Pondok Pangan Etam. Program Nyaman



Be'jukut, Program Pendidikan Keaksaraan Dasar, Program Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM), Program Pendidikan Kecakapan Hidup, Program Pendidikan Kesetaraan Paket A s/d C, Program Bantuan Alat Bantu Aksesibilitas, Program Bantuan Pangan. Melalui program-program ini nantinya diharapkan bisa mencapai Kemiskinan 0% pada tahun 2024 di Kabupaten Kutai Kartanegara. Sehingga dibutuhkan kolaborasi semua *stakeholder* serta meningkatkan partisipasi pihak swasta dalam pengentasan kemiskinan.





Selain itu, program jaring pengaman sosial juga akan sangat mempengaruhi penurunan gini ratio. Melalui Program Rehabilitasi Sosial, Pemda Kutai Kartanegara telah melaksanakan pemenuhan kebutuhan dasar bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan dan pengemis yang terpenuhi di luar panti, sebanyak 1.388 orang atau tercapai 100% dari yang ditargetkan pada Tahun 2024. Bantuan ini mencakup 615 jiwa penerima bantuan permakanan kemiskinan ekstrem serta 773 jiwa penerima bantuan tunai bagi lansia, disabilitas, dan anak telantar. Selain itu, melalui Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar seperti pemberian pangan, sandang, dan layanan kesehatan (Penerima Bantuan Iuran/BPJS) bagi masyarakat miskin non-potensial telah diberikan kepada 15.486 orang atau 98,18% dari target 2024 sebesar 96% dari 15.786 orang yang dilaporkan dan terdata dalam aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS) Kementerian Sosial Republik Indonesia sampai dengan bulan Desember 2024. Di samping itu, jumlah penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Kutai Kartanegara mencapai 10.920 keluarga penerima manfaat (KPM), serta bantuan pangan dari Program Sembako yang menjangkau 15.486 KPM.

Program ini tidak hanya memastikan bantuan tepat sasaran, tetapi juga mendukung target *Universal Health Coverage* (UHC) di Kutai Kartanegara, yang kini telah mencapai 98,18% dari total penduduk, memastikan hampir seluruh warga memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang memadai. Selain itu, Pemkab Kutai Kartanegara juga terus memperbaiki akurasi data penerima manfaat dengan melakukan verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) secara berkala agar bantuan dapat diterima oleh mereka yang benar-benar membutuhkan. Di sisi lain, upaya pemberdayaan ekonomi juga dilakukan melalui bantuan usaha bagi wanita rawan sosial ekonomi (WRSE) dan program *graduasi* KPM PKH, yang bertujuan untuk mendorong kemandirian ekonomi penerima manfaat agar tidak lagi bergantung pada bantuan sosial. Dengan kombinasi bantuan sosial dan program pemberdayaan, diharapkan angka kemiskinan di Kutai Kartanegara terus mengalami penurunan secara signifikan.





Indeks Desa Membangun

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu:

- a) Indeks Ketahanan Sosial, meliputi Pendidikan, Kesehatan, Modal Sosial, Permukiman
- b) Indeks Ketahanan Ekonomi, meliputi Keragaman Produksi Masyarakat, Akses Pusat Perdagangan dan Pasar, Akses Logistik, Akses Perbankan dan Kredit, Keterbukaan Wilayah
- c) Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan, meliputi Kualitas Lingkungan, Bencana Alam, Tanggap Bencana

Perangkat indikator yang dikembangkan dalam Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju Desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan Desa untuk menyejahterakan kehidupan Desa. Kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, didasarkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan. Dalam konteks ini ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi bekerja sebagai dimensi yang memperkuat gerak proses dan pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Indeks Desa Membangun memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa. Indeks Desa Membangun mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari Pemerintah sesuai dengan partisipasi Masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah Desa yaitu tipologi dan modal sosial.

Adapun Indeks Desa Membangun Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024, dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:



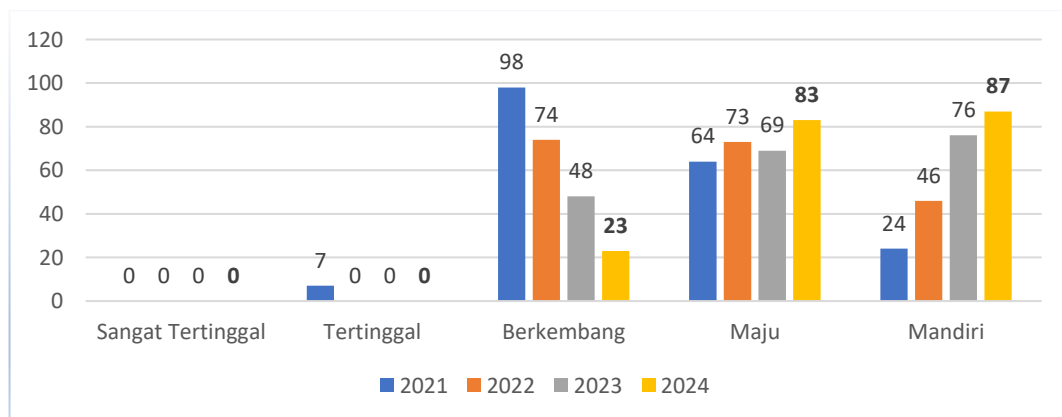


Tabel 64. Rekapitulasi Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa	Status					2024				
			Sangat Tertinggal	Tertinggal	Berkembang	Maju	Mandiri	Iks	Ike	Ikl	Idm	Status IDM
1	Muara Muntai	13	0	0	0	2	11	0,9143	0,9667	0,8667	0,9159	Mandiri
2	Loa Kulu	15	0	0	0	4	11	0,7943	0,7167	0,6667	0,7259	Maju
3	Loa Janan	8	0	0	0	2	6	0,8914	0,5667	0,8	0,7527	Maju
4	Anggana	8	0	0	2	3	3	0,7257	0,4833	0,9333	0,7141	Maju
5	Muara Badak	13	0	0	2	4	7	0,9029	0,7333	0,9333	0,8565	Mandiri
6	Tenggarong	2	0	0	0	1	1	0,88	0,5833	1	0,8211	Mandiri
7	Sebulu	14	0	0	0	5	9	0,8686	0,65	0,6667	0,7284	Maju
8	Kota Bangun	11	0	0	4	6	1	0,8514	0,65	0,8	0,7671	Maju
9	Kenohan	9	0	0	4	4	1	0,8171	0,7333	0,6	0,7168	Maju
10	Kembang Janggut	11	0	0	0	4	7	0,8743	0,75	0,8	0,8081	Maju
11	Muara Kaman	20	0	0	2	9	9	0,8857	0,8	0,8667	0,8508	Mandiri
12	Tabang	19	0	0	5	14	0	0,8229	0,6667	0,8	0,7632	Maju
13	Samboja	3	0	0	0	3	0	0,8629	0,6667	0,8667	0,7987	Maju
14	Tenggarong Seberang	18	0	0	0	3	15	0,9029	0,9667	0,8	0,8898	Mandiri
15	Marang Kayu	11	0	0	2	7	2	0,9143	0,8	0,8667	0,8603	Mandiri
16	Muara Wis	7	0	0	0	4	3	0,88	0,7333	0,9333	0,8489	Mandiri
17	Kota Bangun Darat	10	0	0	2	7	1	0,9029	0,8	0,4667	0,7232	Maju
18	Samboja Barat	1	0	0	0	1	0	0,7771	0,6	0,9333	0,7702	Maju

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

Grafik 24. Indeks Desa Membangun Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2024



Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

Grafik Indeks Desa Membangun menunjukkan perkembangan positif desa-desa dari tahun 2021 hingga 2024, dengan peningkatan jumlah desa dalam





kategori Maju dan Mandiri serta penurunan desa Berkembang dan Tertinggal. Pada 2021, masih terdapat 7 desa tertinggal, namun sejak 2022 hingga 2024, tidak ada lagi desa dalam kategori tersebut, menandakan peningkatan signifikan dalam pembangunan desa. Desa Berkembang mengalami penurunan dari 98 desa (2021) menjadi 23 desa (2024), yang menunjukkan banyak desa telah naik status. Sementara itu, desa Maju meningkat dari 64 desa (2021) menjadi 83 desa (2024), dan desa Mandiri tumbuh pesat dari 24 desa (2021) menjadi 87 desa (2024). Secara keseluruhan, data ini mencerminkan perbaikan signifikan dalam pembangunan desa, di mana semakin banyak desa yang mencapai kategori Maju dan Mandiri, menunjukkan keberhasilan program pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 65. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 7 terhadap target RPJMD

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Target 2025	Target 2026
8	Indeks Gini	Nilai	0,283	0,269	0,284	0,307	0,27	0,27
9	Indeks Desa Membangun	Nilai	0,713	0,747	0,776	0,7969	0,765	0,785

Sumber data: BPS dan Kemendes 2024

Sasaran tersebut dicapai melalui Program-program sebagai berikut:

Tabel 66. Program dan Anggaran Sasaran 7 Tahun 2024

No	Program	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran
1	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	1,380,000,000.00	1,327,816,000.00	1,162,455,849.00	87.55%
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	6,250,000,000.00	6,250,000,000.00	5,903,265,035.00	94.45%
3	Program Penanganan Kerawanan Pangan	2,000,000,000.00	4,000,000,000.00	3,524,499,993.00	88.11%
4	Program Pengawasan Keamanan Pangan	300,000,000.00	300,000,000.00	291,608,878.00	97.20%
5	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	1,050,000,000.00	808,510,650.00	740,960,084.00	91.65%
6	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	119,565,756,882.00	134,506,470,723.00	130,632,744,643.17	97.12%
Total		130,545,756,882.00	147,192,797,373.00	142,255,534,482.17	96.65%





Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran peningkatan status desa di Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2024 adalah Rp.142,255,534,482.17 dari total anggaran sebesar Rp.147,192,797,373.00, atau sekitar 96,65%. Dengan capaian kinerja sasaran sebesar 98,67%, maka terjadi tidak efisien dalam penggunaan sumber daya, karena sasaran belum berhasil 100% tercapai walaupun penggunaan anggaran yang lebih rendah dibandingkan capaian kinerja. Kondisi ini menunjukkan bahwa program pembangunan desa telah berjalan dengan optimal, mendukung peningkatan jumlah desa Maju dan Mandiri, serta menghapus kategori desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal sejak 2022.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian sasaran antara lain:

1. Tersedianya pendamping desa baik dari Kementerian Desa maupun Kabupaten yang membantu dalam pemberdayaan masyarakat desa, peningkatan kapasitas aparatur desa, serta optimalisasi aset lokal desa. Keberadaan pendamping ini berperan dalam meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pemerintah desa serta mendorong sinergi program pembangunan antar sektor.
2. Kesadaran pemerintah desa terkait peningkatan status desa semakin meningkat, didorong oleh adanya *reward* dari pemerintah pusat bagi desa yang berhasil mencapai status Desa Mandiri. Selain itu, ketersediaan anggaran pembangunan yang memadai juga menjadi faktor pendukung utama dalam pencapaian target pembangunan desa.
3. Program jaring pengaman sosial yang efektif, seperti bantuan sosial, Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), yang telah menjangkau puluhan ribu penerima manfaat, turut berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, mempercepat peningkatan status desa, serta mengurangi tingkat kemiskinan ekstrem di Kutai Kartanegara.
4. Masih terdapat tantangan di tingkat desa, seperti kekhawatiran sebagian kepala desa terhadap pengurangan alokasi anggaran jika status desa meningkat. Hal ini menyebabkan beberapa desa enggan





meningkatkan statusnya meskipun sebenarnya telah memenuhi kriteria untuk naik ke kategori Maju atau Mandiri.

5. Kondisi geografis Kabupaten Kutai Kartanegara yang luas tetap menjadi tantangan, terutama dalam pemerataan pembangunan. Beberapa desa masih mengalami keterbatasan akses terhadap internet, layanan kesehatan, dan infrastruktur dasar, yang dapat menghambat percepatan pembangunan desa secara merata.
6. Kurangnya pemahaman sebagian kepala desa dalam pengisian kuesioner penilaian Indeks Desa Membangun (IDM), terutama dalam aspek pencatatan kondisi sarana dan prasarana desa, sehingga beberapa desa yang seharusnya dapat naik status tidak dapat memperoleh skor maksimal dalam penilaian.

8. Analisis Kinerja Sasaran 8: “Menurunnya Pengangguran di Masyarakat”

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Menurunnya Pengangguran di Masyarakat” dengan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka dan PDRB per Kapita mencapai 119,08% dan termasuk predikat “Sangat Berhasil” sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 67. Realisasi Indikator Sasaran 8 Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	% Capaian
10	Tingkat Pengangguran Terbuka	Nilai	4,40	4,11	107
11	PDRB Per Kapita	Nilai	197,62	259,19	131,16
Rata-rata Capaian					119,08

Sumber: BPS

Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator penting yang menggambarkan kondisi ketenagakerjaan di suatu wilayah. TPT mengukur persentase angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan dibandingkan dengan total angkatan kerja. Semakin tinggi angka TPT, semakin besar tantangan yang dihadapi dalam menciptakan lapangan kerja yang memadai.





Permasalahan utama yang dihadapi Pemerintah di bidang ketenagakerjaan adalah meningkatnya pengangguran. Pengangguran terjadi ketika jumlah angkatan kerja yang ada, belum atau tidak terserap sepenuhnya oleh lapangan pekerjaan yang tersedia.

Seseorang dikatakan bekerja apabila melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan dan lamanya bekerja paling sedikit selama satu jam dalam seminggu yang lalu. Bekerja selama satu jam tersebut harus dilakukan berturut-turut dan tidak terputus. Sementara pengangguran mencakup empat kriteria, yaitu mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, putus asa/merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan sudah diterima bekerja tapi belum mulai bekerja.

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat besarnya tingkat pengangguran adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPT diperoleh dengan membagi antara jumlah pengangguran (penduduk yang tidak bekerja dan mencari pekerjaan) dengan jumlah angkatan kerja (penduduk usia kerja yang bekerja dan pengangguran). Ukuran ini dapat digunakan untuk melihat seberapa besar penawaran kerja yang tidak dapat terserap di dalam pasar kerja.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah rasio antara pengangguran terhadap angkatan kerja, sedangkan Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) adalah rasio antara penduduk yang bekerja terhadap angkatan kerja. Kedua hal tersebut akan selalu berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Jika TPT semakin besar maka kesempatan kerja akan berkurang, dan sebaliknya jika kesempatan kerja besar berarti TPT akan semakin kecil.

Tabel 68. Jumlah dan Perubahan Pengangguran di Kabupaten Kutai Kartanegara 2010-2024

Tahun	Pengangguran	
	Jumlah (orang)	Perubahan (orang)
2010	33980	
2011	23530	-10450
2012	23977	447
2013	22215	-1762





Tahun	Pengangguran	
	Jumlah (orang)	Perubahan (orang)
2014	24381	2166
2015	31397	7016
2017	19473	-11924
2018	21361	1888
2019	22607	1246
2020	20497	-2110
2021	21544	1047
2022	15412	-6132
2023	14731	-681
2024	16125	1394

Sumber: BPS, Kutai Kartanegara Dalam Angka Tahun 2025

Selama 1 dekade terakhir, jumlah pengangguran di Kabupaten Kutai Kartanegara berfluktuasi dengan kecenderungan menurun (lihat tabel 2.3.39). Jumlah pengangguran tercatat berkisar antara 20-35 ribu, dimana jumlah tertinggi tercatat pada tahun 2010 yang mencapai 33.980 orang, dan di Tahun 2023 merupakan capaian terendah tercatat pada sebanyak 14.731 orang. Namun jumlah pengangguran di Tahun 2024 kembali meningkat sebanyak 1.394 orang dibandingkan Tahun 2023, menjadi 16.125 orang.



Gambar 1. Diagram Ketenagakerjaan

Penduduk yang terkategori sebagai pengangguran adalah mereka yang tergolong dalam usia kerja yang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan, tidak bekerja dan sedang mempersiapkan usaha, tidak bekerja dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (*discouraged workers*), serta tidak bekerja dan tidak

mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja (*future starters*). Jumlah penganggur yang juga tercatat cukup tinggi terjadi pada tahun 2015 yang mencapai 31.397 orang.

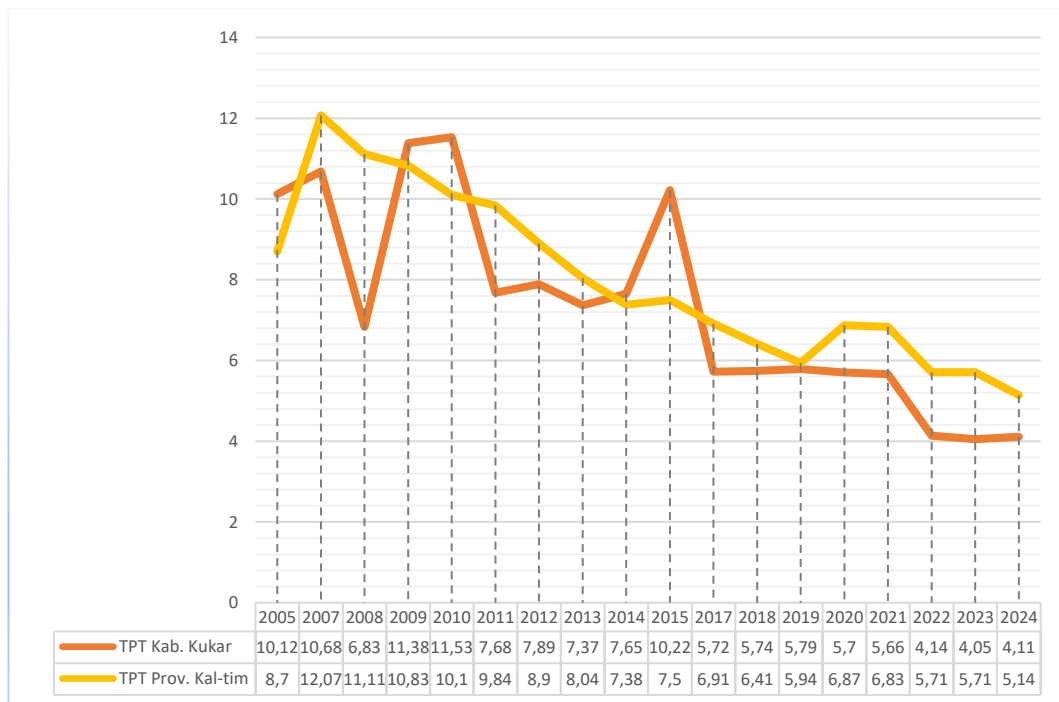
Pada tahun 2011, jumlah pengangguran tercatat berkurang sebanyak 10.450 orang dibandingkan dengan kondisi tahun 2010. Kemudian pada tahun 2013 berkurang sebanyak 1,762 orang, tahun 2017 berkurang





sebanyak 11.924 orang, dan tahun 2020 juga berkurang sebanyak 2.110 orang. Namun demikian, pada beberapa tahun juga terjadi penambahan jumlah pengangguran meskipun secara angka tidak terlalu besar. Penambahan jumlah pengangguran ini terjadi pada tahun 2012, 2014, 2015, 2018, 2019, dan 2021. Penambahan pengangguran ini banyak terjadi pada tahun dimana ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara dalam kondisi yang kurang baik. Dengan melihat data diatas, maka secara rata-rata, jumlah pengangguran di Kabupaten Kutai Kartanegara berkurang sebanyak 1.131 orang setiap tahunnya.

Grafik 25. TPT Kab Kutai Kartanegara dan Prov. Kal-tim Tahun 2005 s.d 2024



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur data per Agustus 2024



Pelaksanaan Job Fair/ Bursa Kerja Tahun

TPT Kabupaten Kutai Kartanegara tercatat sebesar 10,12 persen, lebih

Sejalan dengan jumlah pengangguran, perkembangan tingkat pengangguran di Kabupaten Kutai Kartanegara juga berfluktuasi dengan kecenderungan angka yang relatif rendah, terutama pada 5 tahun terakhir. Pada tahun 2005,

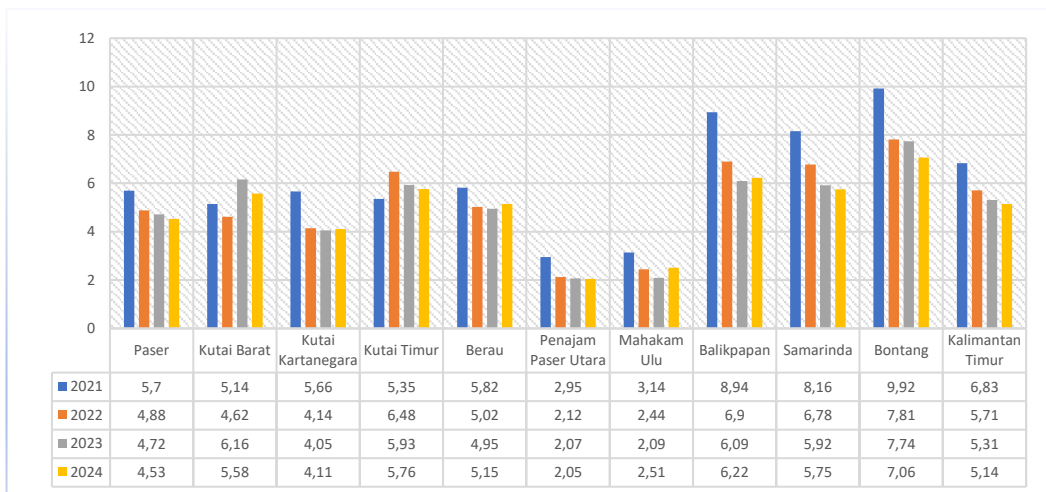




tinggi daripada TPT Provinsi Kalimantan Timur yang tercatat sebesar 8,70 persen. Satu tahun kemudian, TPT Kabupaten Kutai Kartanegara tercatat sebesar 10,68 persen, lebih rendah dari TPT Provinsi Kalimantan Timur yang melonjak menjadi 12,07 persen. Pada tahun 2008, TPT Kabupaten Kutai Kartanegara kembali turun cukup drastis mencapai angka 6,83 persen, jauh lebih rendah dari TPT Kalimantan Timur yang sebesar 11,11 persen. Namun pada tahun 2009-2010 dan kemudian tahun 2015, TPT Kutai Kartanegara meningkat cukup tajam, melebihi TPT Provinsi Kalimantan Timur.

Tingginya angka TPT ini tidak terlepas dari fakta bahwa Kabupaten Kutai Kartanegara dikenal sebagai magnet bagi para pekerja pendatang dari luar wilayah. Akibatnya jumlah pencari kerja di Kutai Kartanegara bertambah banyak dan tingkat pengangguran juga meningkat. Beruntungnya, pada periode 2017-2024, rata-rata TPT Kutai Kartanegara tercatat sebesar 5,1 persen hampir mendekati TPT provinsi Kalimantan Timur di 5,14 pada Tahun 2024.

Grafik 26. Perkembangan TPT Kabupaten/ Kota Provinsi Kaltim, 2021-2025



Sumber: BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)

Jika melihat grafik diatas TPT Kabupaten Kutai Kartanegara menempati urutan ke 3 (tiga) terendah di antara kabupaten/ kota di Provinsi Kalimantan Timur setelah Penajam Paser Utara dan Mahakam Ulu, dan TPT tertinggi berada di Kota Bontang sebesar 7,05, kemudian Kota Balikpapan di angka 6,22 dan Kabupaten Kutai Timur di 5,76.



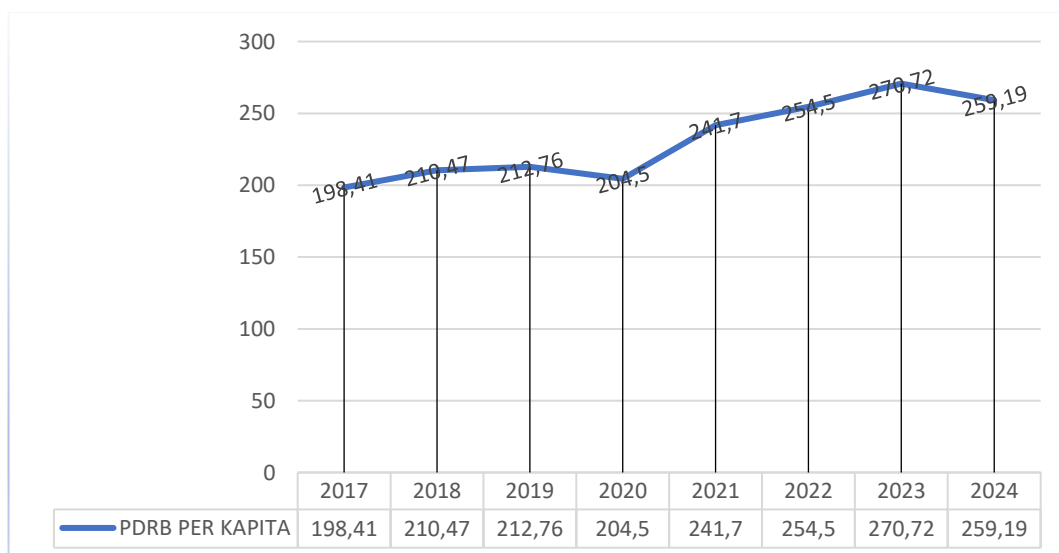


PDRB Per Kapita

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita adalah salah satu indikator utama yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat di suatu wilayah. PDRB per kapita dihitung dengan membagi total PDRB dengan jumlah penduduk di daerah tersebut. Semakin tinggi nilai PDRB per kapita, semakin besar pula rata-rata nilai tambah ekonomi yang dihasilkan oleh setiap individu di wilayah tersebut.

Berikut ini disajikan data capaian kinerja PDRB Per Kapita:

Grafik 27. PDRB per kapita Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017-2024



Sumber: BPS

PDRB per kapita Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan penurunan pada Tahun 2024 jika dibandingkan Tahun 2023 dari 270,72 juta rupiah di tahun 2023 menjadi 259,19 juta di tahun 2024 atau menurun 11,53 dari Tahun 2023, setelah sebelumnya di Tahun 2023 meningkat 16,22 dari Tahun 2022. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara rata-rata mampu menciptakan PDRB (atau nilai tambah) sebesar nilai per kapita di masing-masing tahun tersebut.

Pertumbuhan ekonomi yang cukup baik selama 20 tahun terakhir telah meningkatkan PDRB per kapita penduduk, dari Rp. 113,64 juta rupiah pada Tahun 2005 menjadi Rp. 241,70 juta rupiah pada Tahun 2021 dan meningkat menjadi 270,72 juta rupiah di Tahun 2023. Kendati demikian,





masih terdapat gap yang cukup besar antara PDRB per kapita dengan indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Hal ini disebabkan salah satunya karena peranan komponen konsumsi rumah tangga di PDRB yang tercatat relatif kecil dengan kontribusi rata-rata kurang dari 10 persen dalam 10 tahun terakhir.

Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 69. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 8 terhadap target RPJMD

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Target 2025	Target 2026
10	Tingkat Pengangguran Terbuka	Nilai	5,66	4,14	4,05	4,11	4,25	4,1
11	PDRB Per Kapita	Nilai	241,7	254,5	270,72	259,19	202,16	204,69

Sumber data: BPS

Sasaran tersebut dicapai melalui Program-program sebagai berikut:

Tabel 70. Program dan Anggaran Sasaran 8 Tahun 2024

No	Program	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran
1	Program Perencanaan Tenaga Kerja	100,000,000.00	100,000,000.00	94,394,740.00	94.39%
2	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	10,352,340,000.00	16,052,340,000.00	11,567,169,818.00	72.06%
3	Program Penempatan Tenaga Kerja	7,959,000,000.00	8,672,399,000.00	7,715,264,852.00	88.96%
4	Program Hubungan Industrial	10,986,704,000.00	11,271,341,700.00	9,912,045,830.00	87.94%
5	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	12,000,000,000.00	14,988,540,000.00	14,190,169,975.00	94.67%
Total		41,398,044,000.00	51,084,620,700.00	43,479,045,215.00	85.11%

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah Rp.43,479,045,215.00 dari anggaran sebesar Rp. 51,084,620,700.00 atau 85,11%. Realisasi keuangan sebesar 85,11% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 119,08%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut, karena target sasaran berhasil 100% tercapai, dan penggunaan sumber daya lebih rendah dari capaian kinerja.





Faktor pendukung tercapainya Target Tingkat Pengangguran Terbuka :

1. Peningkatan tingkat pendidikan dan pelatihan bersertifikat kompetensi meningkatkan keterampilan dan daya saing pekerja di pasar tenaga kerja.
2. Mendorong wirausaha dapat menciptakan lapangan kerja baru dan memberdayakan masyarakat untuk mandiri secara ekonomi.
3. Kebijakan yang mendukung fleksibilitas tenaga kerja, melindungi hak pekerja, dan mendorong penciptaan lapangan kerja dapat membantu mengurangi tingkat pengangguran.

Faktor Penghambat tercapainya Target :

1. Kesenjangan antara keterampilan yang dimiliki oleh pekerja dengan yang dibutuhkan oleh pasar tenaga kerja dapat menjadi penghambat. Peningkatan teknologi dan perubahan dalam kebutuhan industri dapat meninggalkan beberapa pekerja dengan keterampilan yang tidak sesuai.
2. Ketidaksetaraan akses terhadap pendidikan dan pelatihan dapat menciptakan ketidaksetaraan dalam persaingan di pasar tenaga kerja.
3. Pertumbuhan Jumlah Lulusan Baru (*Fresh Graduates*). Setiap tahun, Kukar mengalami peningkatan jumlah lulusan dari SMA dan perguruan tinggi yang memasuki angkatan kerja. Banyak dari lulusan baru ini belum sepenuhnya terserap oleh pasar kerja, sehingga menambah angka pengangguran. Fenomena ini terjadi karena proses pencarian pekerjaan oleh lulusan baru belum sepenuhnya diimbangi oleh ketersediaan lapangan kerja yang sesuai.
4. Pertumbuhan Angkatan Kerja yang Lebih Cepat dari Penyerapan Tenaga Kerja. Meskipun jumlah penduduk yang bekerja meningkat, pertumbuhan angkatan kerja dan penduduk usia kerja di Kukar meningkat lebih cepat. Hal ini menyebabkan lonjakan TPT karena pasar kerja belum mampu menampung seluruh angkatan kerja baru yang masuk setiap tahunnya.





Selain faktor-faktor tersebut, penelitian di wilayah Kalimantan menunjukkan bahwa variabel seperti rata-rata lama sekolah, tingkat partisipasi angkatan kerja, persentase penduduk miskin, laju pertumbuhan ekonomi, dan jumlah industri besar sedang memiliki pengaruh signifikan terhadap TPT. Meskipun penelitian ini mencakup wilayah Kalimantan secara umum, faktor-faktor tersebut kemungkinan juga mempengaruhi TPT di Kukar.

Dengan memahami faktor-faktor tersebut, diharapkan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dapat merumuskan kebijakan yang efektif untuk mengurangi tingkat pengangguran di Kutai Kartanegara.

9. Analisis Kinerja Sasaran 9: “Meningkatnya Pengelolaan Pertanian Berbasis Potensi Unggulan Daerah”

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Pengelolaan Pertanian Berbasis Potensi Unggulan Daerah” dengan indikator Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan mencapai 44,55% dan termasuk predikat “Kurang Berhasil” sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 71. Realisasi Indikator Sasaran 9 Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	% Capaian
12	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Nilai	6,60	2,94	44,55

Sumber data: BPS: Data Diolah Tahun 2024

Dalam upaya meningkatkan produktivitas, tata kelola, dan pertumbuhan sektor pertanian secara luas, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara berupaya mendorong pertumbuhan sektor pertanian dengan target RPJMD 2024 sebesar 6,60%. Namun, realisasi pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan pada tahun 2024 hanya mencapai 2,94%, atau 44,55% dari target yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2023, laju pertumbuhan sektor ini mencapai 2,91%, mengalami peningkatan sebesar 1% dibandingkan tahun 2022 yang hanya mencapai 1,91%. Jika dibandingkan dengan tahun 2024, pertumbuhan sektor ini hanya meningkat 0,03% dari tahun sebelumnya, yang menunjukkan

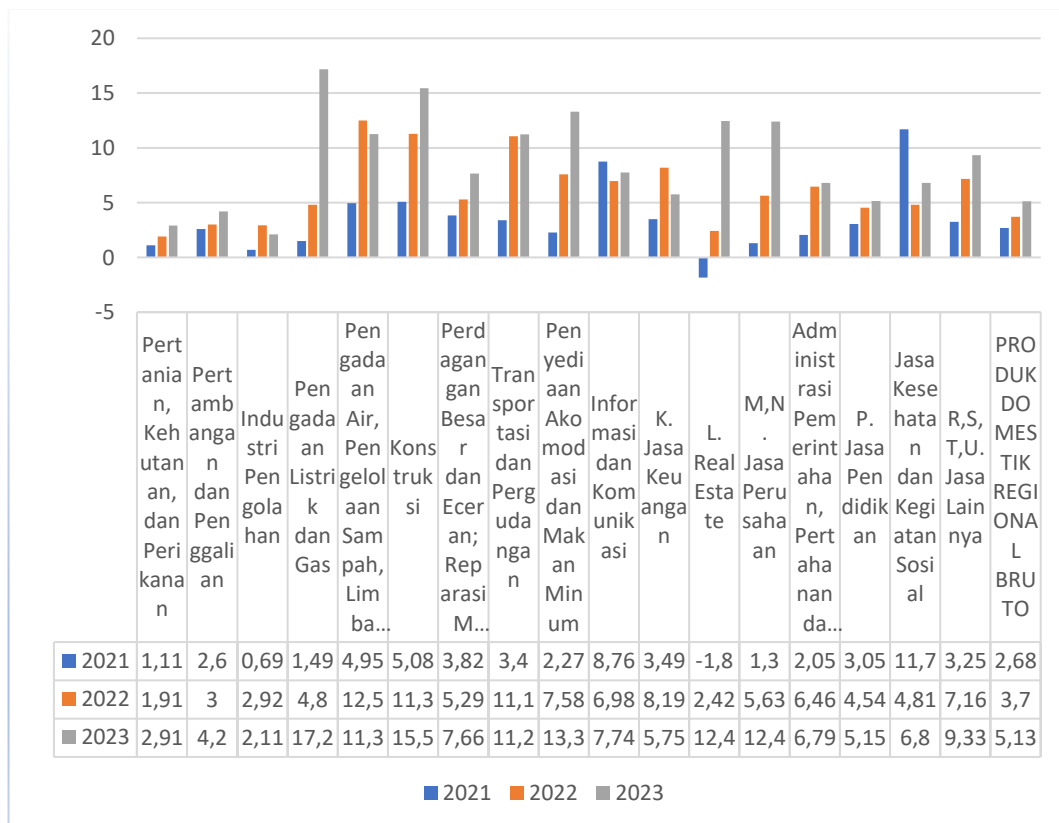




pertumbuhan yang stagnan dan belum mencapai target yang diharapkan. Dengan demikian, meskipun ada peningkatan dari tahun sebelumnya, pencapaian tahun 2024 masih jauh dari target RPJMD yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan signifikan dalam mendorong pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan agar sesuai dengan proyeksi yang direncanakan.

Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Pertanian Berbasis Potensi Unggulan Daerah, dengan indikator kinerja Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, capaian setiap tahunnya selalu dibawah target dengan predikat “Kurang Berhasil”, walaupun potensi pertanian di Kutai Kartanegara relatif besar, namun belum banyak menarik minat masyarakat, sektor migas dan batubara masih menjadi sektor unggulan.

Grafik 28. Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen) Tahun 2021-2023



Sumber data: BPS (Data yang disajikan adalah tahun 2023 karena Data 2024 baru akan diterbitkan pada April 2025)

Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut ini:





Tabel 72. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 9 terhadap target RPJMD

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Target 2025	Target 2026
12	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Persen	1,02	1,91	2,91	2,94	7,05	7,5

Sumber data: BPS

Sasaran tersebut dicapai melalui Program-program sebagai berikut:

Tabel 73. Program dan Anggaran Sasaran 9 Tahun 2024

No	Program	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran
1	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	575,000,000.00	575,000,000.00	365,389,825.00	63.55%
2	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	470,000,000.00	320,000,000.00	216,770,676.00	67.74%
3	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	643,484,000.00	779,002,800.00	516,198,000.00	66.26%
4	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	805,000,000.00	805,000,000.00	554,294,557.00	68.86%
5	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	143,370,000,000.00	166,478,317,750.00	150,754,899,262.00	90.56%
6	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	308,485,228,000.00	354,419,927,378.00	318,826,289,000.00	89.96%
7	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	20,600,000,000.00	20,577,163,050.00	19,573,376,805.00	95.12%
8	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	4,545,000,000.00	9,752,896,650.00	8,868,244,466.00	90.93%
9	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	71,566,776,000.00	80,483,750,052.00	71,622,278,154.00	88.99%
10	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	65,416,630,000.00	73,389,229,139.00	66,509,449,225.00	90.63%
11	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1,737,300,000.00	1,737,300,000.00	1,628,404,184.00	93.73%
12	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	1,900,000,000.00	2,168,219,454.00	1,817,746,165.00	83.84%
13	Program Perizinan Usaha Pertanian	700,000,000.00	700,000,000.00	405,199,437.00	57.89%
14	Program Penyuluhan Pertanian	13,875,575,000.00	20,794,278,650.00	18,523,844,957.00	89.08%
15	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	325,000,000.00	325,000,000.00	306,458,000.00	94.29%





No	Program	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran
16	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	15,260,000,000.00	15,678,581,999.00	14,525,954,261.00	92.65%
17	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	1,250,000,000.00	2,800,000,000.00	2,353,896,555.00	84.07%
18	Program Pengembangan Ekspor	2,230,000,000.00	2,130,000,000.00	1,809,541,722.00	84.96%
19	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	450,000,000.00	500,000,000.00	437,275,305.00	87.46%
20	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	50,770,000,000.00	44,498,729,000.00	41,738,354,023.00	93.80%
21	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	900,000,000.00	900,000,000.00	398,455,260.00	44.27%
22	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	1,100,000,000.00	1,100,000,000.00	664,909,600.00	60.45%
23	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	300,000,000.00	300,000,000.00	284,095,500.00	94.70%
Total		707,274,993,000.00	801,212,395,922.00	722,701,324,939.00	90.20%

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut mencapai Rp.722,701,324,939.00 dari total anggaran sebesar Rp.801,212,395,922.00 atau sekitar 90,20%. Namun, capaian kinerja sasaran hanya mencapai 44,55%, yang menunjukkan adanya ketidakefisienan dalam penggunaan sumber daya. Hal ini disebabkan oleh tidak tercapainya target sasaran secara penuh, sementara alokasi dana yang digunakan relatif tinggi dibandingkan dengan hasil yang diperoleh.

Beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian sasaran tersebut antara lain:

1. Produksi sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan

Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki produksi komoditas pertanian, perkebunan, dan perikanan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Kalimantan Timur. Namun, sektor pertanian belum mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara signifikan karena dominasi sektor pertambangan, yang masih menjadi daya tarik utama dibandingkan dengan sektor pertanian.





2. Alih fungsi lahan pertanian

Terjadinya konversi lahan pertanian, terutama di wilayah perkotaan, turut berdampak pada stagnasi pertumbuhan sektor pertanian. Selain itu, masih terdapat lahan pertanian yang sementara tidak diusahakan, sehingga potensi sektor ini belum dapat dimanfaatkan secara optimal.

3. Rendahnya regenerasi pelaku usaha pertanian

Pelaku usaha pertanian masih didominasi oleh generasi tua, sementara minat generasi muda untuk terjun ke sektor ini masih rendah. Kurangnya regenerasi ini menjadi tantangan dalam pengembangan dan keberlanjutan sektor pertanian di Kabupaten Kutai Kartanegara.

10. Analisis Kinerja Sasaran 10: “Meningkatnya Daya Saing Pariwisata Daerah”

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Daya Saing Pariwisata Daerah” dengan indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata mencapai 229,53% dan termasuk predikat “Sangat Berhasil” sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 74. Realisasi Indikator Sasaran 10 Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	% Capaian
13	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata	Persen	3,42	7,85	229,5322

)* menggunakan data capaian Tahun sebelumnya (2023)

Berdasarkan data terbaru, jumlah kunjungan wisatawan nusantara ke Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2022, tercatat 1.041.886 kunjungan, yang kemudian meningkat menjadi 1.500.126 kunjungan pada tahun 2023, menunjukkan kenaikan sebesar 458.240 wisatawan.

Pada tahun 2024, jumlah kunjungan wisatawan nusantara ke Kabupaten Kutai Kartanegara mencapai 1.215 kunjungan.

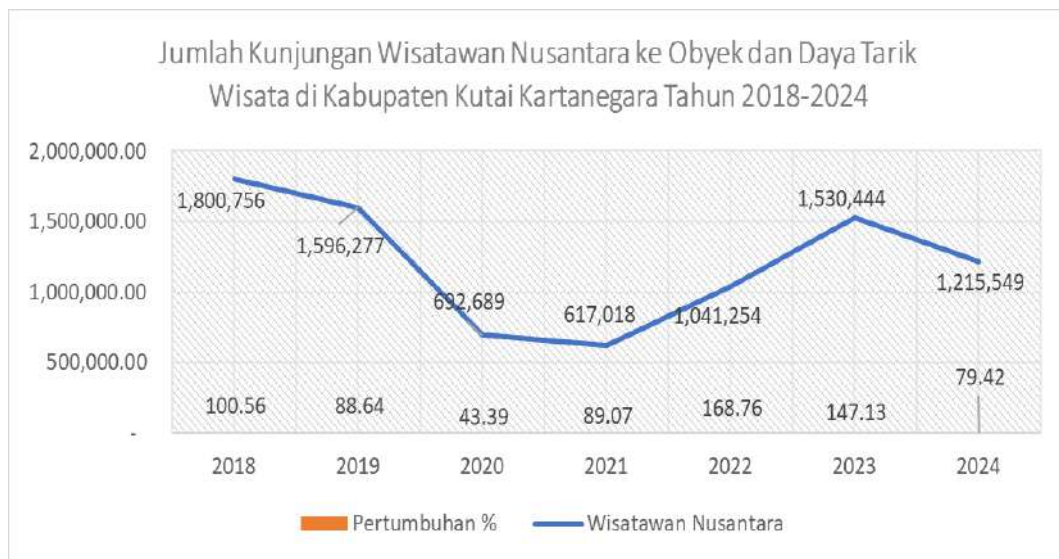
Peningkatan ini mencerminkan upaya Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam mendorong sektor pariwisata sebagai pemicu





transformasi struktur ekonomi dari dominasi sektor ekonomi tak terbarukan ke sektor ekonomi terbarukan. Dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan, diharapkan percepatan perekonomian daerah dapat tercapai.

Grafik 29. Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara ke Obyek dan Daya Tarik Wisata di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018-2024



Sumber data: BPS Kutai Kartanegara 2018-2024

Grafik tersebut menampilkan jumlah kunjungan wisatawan nusantara ke obyek dan daya tarik wisata di Kabupaten Kutai Kartanegara dari tahun 2018 hingga 2024. Pada tahun 2018, jumlah wisatawan nusantara mencapai 1.800.756 orang, namun mengalami penurunan menjadi 1.596.277 orang pada tahun 2019. Penurunan semakin tajam terjadi pada tahun 2020, di mana jumlah wisatawan anjlok hingga 692.689 orang, yang kemungkinan besar disebabkan oleh pandemi COVID-19. Pada tahun 2021, jumlah wisatawan masih rendah di angka 617.018 orang.

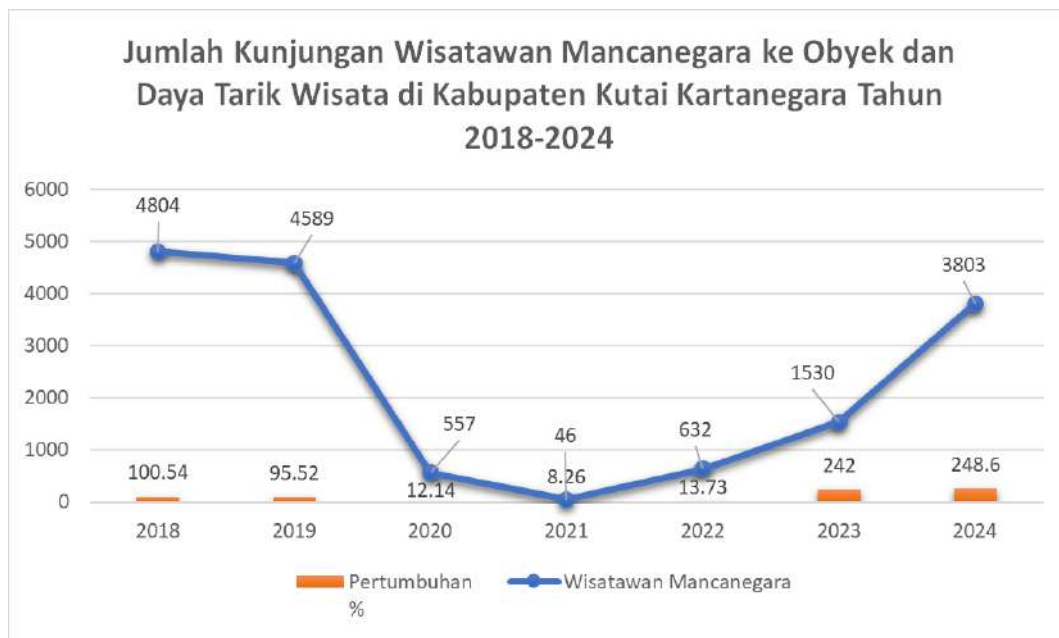
Namun, sektor pariwisata mulai menunjukkan pemulihan pada tahun 2022 dengan jumlah wisatawan meningkat menjadi 1.041.254 orang, lalu melonjak lebih tinggi lagi menjadi 1.530.444 orang pada tahun 2023. Meski demikian, pada tahun 2024 terjadi penurunan kembali menjadi 1.215.549 orang. Persentase pertumbuhan wisatawan juga mencerminkan tren ini, dengan angka tinggi pada 2018 (100,56%) dan 2019 (88,64%) yang turun drastis pada 2020 (43,39%). Namun, pemulihan signifikan terjadi pada 2022 (168,76%) dan 2023 (147,13%), sebelum kembali turun pada 2024 (79,42%).





Secara keseluruhan, grafik ini menunjukkan bahwa pariwisata domestik di Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami penurunan signifikan selama pandemi, tetapi mampu bangkit dengan peningkatan kunjungan yang cukup besar dalam beberapa tahun terakhir, meskipun masih mengalami fluktuasi pada 2024.

Grafik 30. Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Obyek dan Daya Tarik Wisata di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018-2024



Sumber: Dinas Pariwisata Tahun 2024

Grafik tersebut menunjukkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke obyek dan daya tarik wisata di Kabupaten Kutai Kartanegara dari tahun 2018 hingga 2024. Pada tahun 2018, jumlah wisatawan mencapai 4.804 orang, kemudian sedikit menurun menjadi 4.589 orang pada tahun 2019. Namun, terjadi penurunan drastis pada tahun 2020 dengan hanya 557 wisatawan, yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh pandemi COVID-19. Penurunan semakin tajam pada tahun 2021, di mana jumlah wisatawan hanya mencapai 46 orang.

Setelah itu, jumlah wisatawan mulai menunjukkan tanda pemulihan, naik menjadi 632 orang pada tahun 2022 dan meningkat lebih lanjut menjadi 1.530 orang pada tahun 2023. Peningkatan yang signifikan terjadi pada tahun 2024 dengan jumlah wisatawan mencapai 3.803 orang. Tren pertumbuhan tahunan juga mencerminkan fluktuasi ini, di mana angka



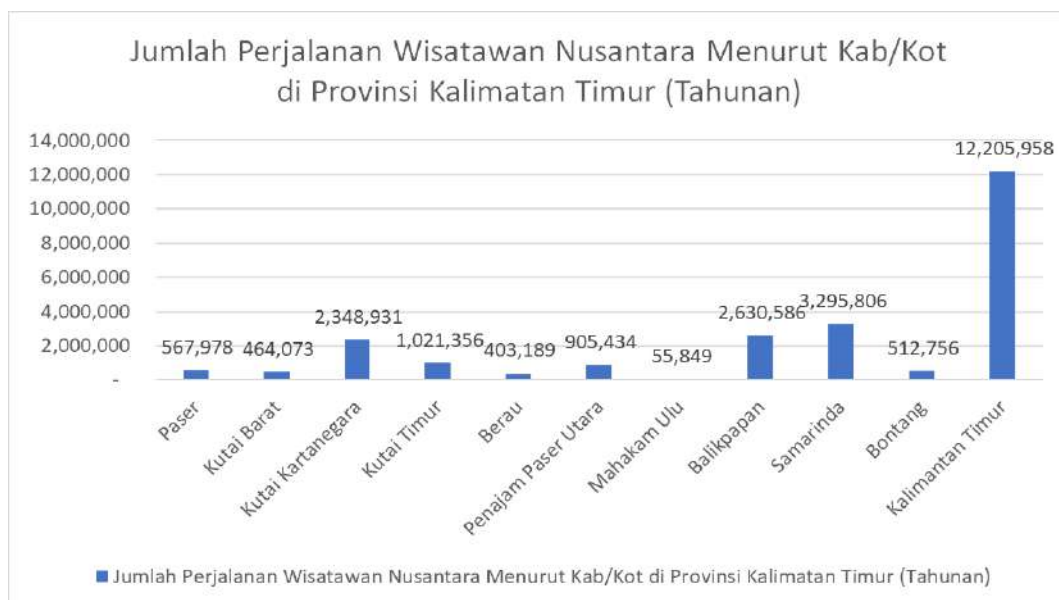


pertumbuhan yang tinggi pada tahun 2018 dan 2019 (100,54% dan 95,52%) mengalami penurunan drastis selama pandemi (12,14% pada 2020 dan 8,26% pada 2021). Namun, pertumbuhan kembali meningkat secara signifikan pada tahun 2023 (242%) dan 2024 (248,6%), mencerminkan pemulihan sektor pariwisata pasca-pandemi.

Secara keseluruhan, grafik ini menunjukkan bahwa sektor pariwisata di Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami dampak besar akibat pandemi, tetapi mulai pulih dengan peningkatan jumlah wisatawan dalam beberapa tahun terakhir.

Adapun sebagai Faktor Pembanding Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara Menurut Kabupaten/Kota Tujuan sebagai Berikut:

Grafik 31. Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Obyek dan Daya Tarik Wisata di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018-2024



Sumber: BPS Kalimantan Timur 2024

Berdasarkan data jumlah perjalanan wisatawan nusantara di Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan daya tarik wisata yang cukup kuat dengan mencatatkan 2.348.931 perjalanan wisatawan dalam setahun. Angka ini menjadikan Kutai Kartanegara sebagai salah satu daerah dengan jumlah wisatawan terbesar di provinsi tersebut, bersaing ketat dengan Kota Balikpapan yang mencatatkan 2.630.538 perjalanan dan Kota Samarinda dengan 3.295.806 perjalanan. Jumlah wisatawan di Kutai Kartanegara juga jauh melampaui beberapa





daerah lainnya seperti Kutai Timur (1.021.356), Berau (403.189), dan Bontang (512.756). Data ini menunjukkan bahwa Kutai Kartanegara memiliki potensi besar dalam sektor pariwisata dan mampu bersaing dengan kota-kota besar di Kalimantan Timur. Jika dikelola dengan baik, daerah ini berpotensi untuk terus meningkatkan daya tariknya sebagai destinasi wisata utama di provinsi ini.

Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 75. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 10 terhadap target RPJMD

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Target 2025	Target 2026
13	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata	Persen	2,72	3,74	6,6	7,85	4	4,23

Sumber data: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kutai Kartanegara Tahun 2024

Sasaran tersebut dicapai melalui Program-program sebagai berikut:

Tabel 76. Program dan Anggaran Sasaran 10 Tahun 2024

No	Program	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran
1	Program Pemasaran Pariwisata	38.710.000.000,00	37.211.500.798,00	36.083.821.519,00	96,97%
2	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	27.875.000.000,00	22.729.749.000,00	21.849.139.935,00	96,13%
3	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	49.640.000.000,00	51.419.780.000,00	27.267.201.549,00	53,03%
Total		116.225.000.000,00	111.361.029.798,00	85.200.163.003,00	76,51%

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebesar Rp.85.200.163.003,00 dari total anggaran Rp.111.361.029.798,00 atau setara dengan 76,51%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran yang mencapai 229,5322%, maka hal ini menunjukkan adanya efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Target sasaran berhasil dicapai 100%, sementara penggunaan sumber daya lebih rendah dibandingkan dengan capaian kinerja yang dihasilkan.





Beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian sasaran ini antara lain meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mengembangkan potensi lingkungannya menjadi objek wisata, yang berdampak pada meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi di sektor pariwisata. Selain itu, pertumbuhan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang terus meningkat menunjukkan bahwa masyarakat Kutai Kartanegara semakin siap dalam mengelola sektor pariwisata serta menerima kunjungan wisatawan.

11. Analisis Kinerja Sasaran 11: “Berkembangnya Ekosistem Kreatif”

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Berkembangnya Ekosistem Kreatif” dengan indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi Kreatif mencapai 117,55% dan termasuk predikat “Sangat Berhasil” sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 77. Realisasi Indikator Sasaran 11 Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	% Capaian
14	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	Persen	6,55	7,70	117,5573

Ekonomi kreatif adalah konsep ekonomi yang berbasis pada kreativitas, ide, dan inovasi sebagai faktor utama dalam menciptakan nilai tambah dan pertumbuhan ekonomi. Ekonomi ini mencakup berbagai sektor, seperti seni pertunjukan, desain, musik, film, kuliner, fashion, hingga pengembangan perangkat lunak dan digital. Dalam ekonomi kreatif, sumber daya utama yang dimanfaatkan bukan hanya bahan mentah atau modal finansial, tetapi juga daya cipta, bakat, dan keterampilan manusia dalam menghasilkan produk atau layanan yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Perkembangan teknologi dan digitalisasi turut berperan dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi kreatif, memungkinkan para pelaku usaha untuk menjangkau pasar yang lebih luas secara global. Dengan kontribusinya terhadap inovasi dan penciptaan lapangan kerja, ekonomi kreatif menjadi salah satu sektor yang berperan penting dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan di berbagai negara, termasuk di Indonesia.

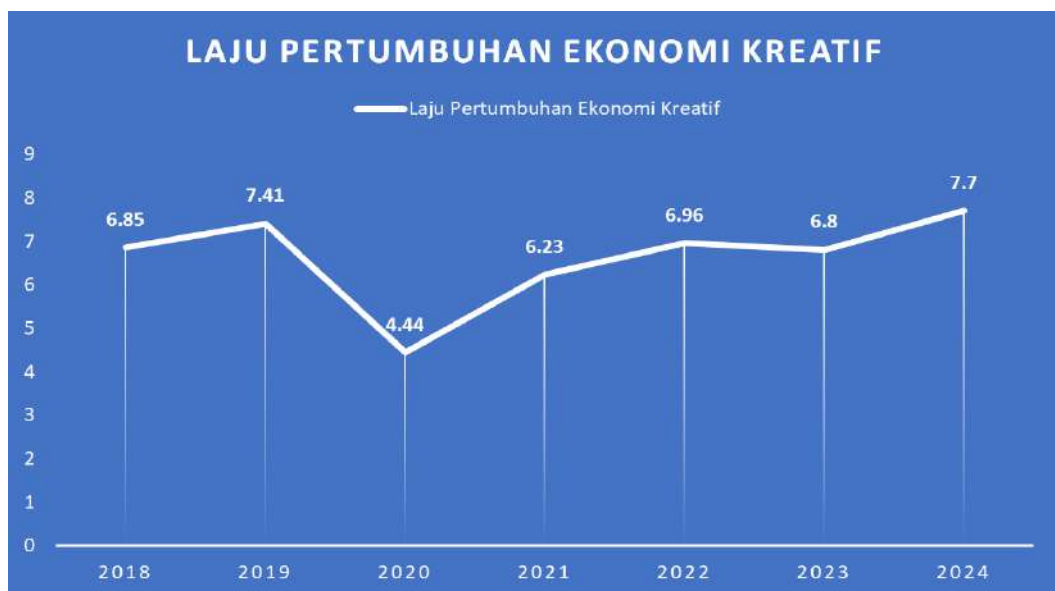




Laju pertumbuhan ekonomi kreatif adalah tingkat perubahan atau peningkatan nilai ekonomi yang dihasilkan oleh sektor ekonomi kreatif dalam suatu periode tertentu. Indikator ini digunakan untuk mengukur seberapa cepat sektor ekonomi kreatif berkembang dan berkontribusi terhadap perekonomian suatu daerah atau negara. Pertumbuhan ini dapat dihitung berdasarkan peningkatan nilai tambah bruto (NTB) dari industri kreatif, jumlah tenaga kerja yang terlibat, serta perkembangan sub sektor ekonomi kreatif seperti seni pertunjukan, desain, musik, film, kuliner, dan teknologi digital.

Laju pertumbuhan ekonomi kreatif dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti inovasi, teknologi, kebijakan pemerintah, permintaan pasar, serta keterampilan sumber daya manusia. Jika angka pertumbuhannya meningkat, berarti sektor ekonomi kreatif semakin berkembang dan memberikan dampak positif terhadap perekonomian, seperti peningkatan lapangan kerja, peningkatan daya saing produk kreatif, serta kontribusi yang lebih besar terhadap pendapatan daerah atau nasional. Sebaliknya, jika laju pertumbuhan mengalami penurunan, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap faktor-faktor yang menghambat perkembangan sektor kreatif agar dapat terus bertumbuh dan beradaptasi dengan perubahan zaman.

Grafik 32. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kreatif Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018-2024



Sumber data: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kutai Kartanegara Tahun 2024





Berdasarkan data laju pertumbuhan ekonomi kreatif di Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2018-2024, terlihat adanya fluktuasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Pada tahun 2018, sektor ekonomi kreatif tumbuh sebesar 6,85%, menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Pertumbuhan ini semakin meningkat pada tahun 2019 hingga mencapai 7,41%, yang didorong oleh peningkatan investasi, penguatan program ekonomi kreatif, serta berbagai kegiatan promosi dan festival daerah yang mendukung para pelaku usaha kreatif.

Namun, pada tahun 2020, terjadi penurunan signifikan hingga 4,44%, yang disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19. Pembatasan sosial, penutupan tempat usaha, serta berkurangnya mobilitas masyarakat menjadi faktor utama yang memperlambat aktivitas ekonomi kreatif selama periode tersebut. Berbagai sub sektor seperti seni pertunjukan, *event organizer*, dan industri pariwisata kreatif sangat terdampak akibat pembatasan kegiatan fisik.

Seiring dengan pemulihan ekonomi pasca-pandemi, pada tahun 2021 terjadi peningkatan kembali dengan laju pertumbuhan sebesar 6,23%. Hal ini didorong oleh adaptasi para pelaku usaha kreatif terhadap digitalisasi, seperti penjualan produk secara daring, pemanfaatan media sosial, serta berbagai program dukungan yang diberikan untuk mendorong pemulihan usaha kreatif. Tren pemulihan terus berlanjut pada tahun 2022 dengan laju pertumbuhan mencapai 6,96%, menunjukkan bahwa sektor ekonomi kreatif telah berhasil bangkit dari dampak pandemi.

Pada tahun 2023, pertumbuhan sedikit mengalami penurunan menjadi 6,8%, yang masih menunjukkan stabilitas dibandingkan tahun sebelumnya. Faktor yang memengaruhi sedikit penurunan ini adalah adanya tantangan baru seperti persaingan yang semakin ketat, inflasi, serta perubahan tren konsumsi masyarakat yang mempengaruhi permintaan terhadap produk kreatif. Meskipun demikian, secara keseluruhan, sektor ekonomi kreatif di Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan daya tahan yang cukup kuat dan terus mengalami perkembangan positif seiring dengan berbagai program dan inovasi yang terus dilakukan. Namun di Tahun 2024 Laju





Pertumbuhan Ekonomi Kreatif Kabupaten Kutai Kartanegara meningkat menjadi 7,7.

Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 78. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 11 terhadap target RPJMD

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Target 2025	Target 2026
14	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	Persen	6,23	6,96	6,8	7,7	7,48	7,56

Sumber data: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kutai Kartanegara Tahun 2024

Sasaran tersebut dicapai melalui Program-program sebagai berikut:

Tabel 79. Program dan Anggaran Sasaran 11 Tahun 2024

No	Program	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran
1	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	2.900.000.000,00	7.085.471.000,00	6.084.644.151,00	85,87%
Total		2.900.000.000,00	7.085.471.000,00	6.084.644.151,00	85,87%

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp.6.084.644.151,00 dari total anggaran Rp.7.085.471.000,00 atau sebesar 85,87%. Dengan realisasi keuangan sebesar 85,87% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran yang mencapai 117,56%, terdapat efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Hal ini menunjukkan bahwa target sasaran berhasil dicapai 100%, sementara penggunaan sumber daya lebih rendah dibandingkan capaian kinerja.

Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap pencapaian sasaran ini antara lain peran aktif generasi muda, ketersediaan tenaga kerja yang mendukung, serta terbukanya peluang bagi mereka untuk berkreasi. Kemajuan teknologi, kemudahan akses komunikasi, serta perkembangan media sosial juga menjadi faktor penting yang mendorong pertumbuhan Ekosistem Kreatif. Faktor-faktor ini berkontribusi terhadap peningkatan Laju





Pertumbuhan Ekonomi Kreatif sebagai indikator utama perkembangan sektor tersebut.

12. Analisis Kinerja Sasaran 12: “Meningkatnya Daya Saing Investasi Daerah”

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Daya Saing Investasi Daerah” dengan indikator Tingkat Pertumbuhan Investasi mencapai 620% dan termasuk predikat “Sangat Berhasil” sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 80. Realisasi Indikator Sasaran 12 Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	% Capaian
15	Tingkat Pertumbuhan Investasi	Persen	1,75	10,85	620

Pencapaian kinerja sasaran ini diuraikan sebagai berikut:

Di Tahun 2024 target Tingkat Pertumbuhan Nilai Investasi RPJMD sebesar 1,75%, Kabupaten Kutai Kartanegara di Tahun 2024 berhasil mencapai Tingkat Pertumbuhan Nilai Investasi sebesar 10,85%, capaian ini lebih kecil dari capaian kinerja Tahun 2023 sebesar 51,38%.

Perhitungan Tingkat Pertumbuhan Nilai Investasi adalah:

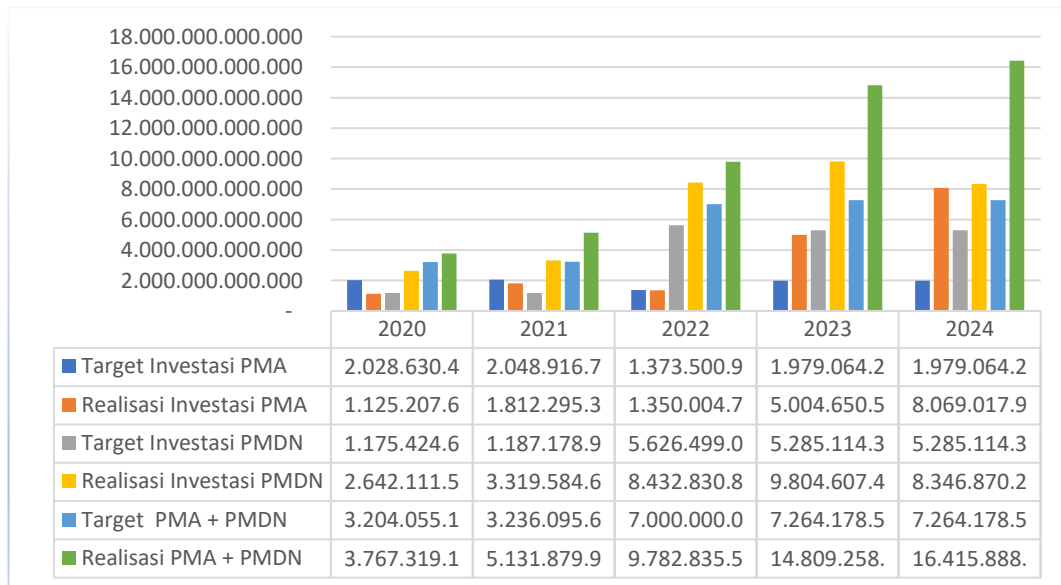
$$\begin{aligned} \text{Tingkat Pertumbuhan} &= \frac{(\text{Jumlah Investasi Tahun } n - \text{Jumlah Investasi } n-1) \text{ di Kabupaten/ Kota}}{\text{Jumlah Investasi } n-1 \text{ di Kabupaten/ Kota}} \times 100\% \\ \text{Tingkat Pertumbuhan} &= \frac{16.415.888.215.433 - 14.809.258.004.235}{14.809.258.004.235} \times 100\% \\ \text{Tingkat Pertumbuhan} &= 10,85\% \end{aligned}$$

Berikut disajikan Perhitungan Target, Realisasi dan Tingkat Pertumbuhan Investasi Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019-2024 :





Grafik 33. Target dan Realisasi Investasi PMA dan PMDN Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020-2024



Sumber data: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024

Nilai Investasi Kabupaten Kutai Kartanegara pada Tahun 2024 sebesar Rp.16.415.888.215.433, lebih tinggi Rp. 1,606.630.211.198, dibandingkan realisasi investasi Tahun 2023 yang mencapai nilai Rp.14.809.258.004.235, sehingga Capaian tingkat pertumbuhan nilai investasi sebesar 10,85%.

Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 81. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 12 terhadap target RPJMD

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Target 2025	Target 2026
15	Tingkat Pertumbuhan Investasi	Persen	36,22	90,63	51,38	10,85	1,77	1,79

Sumber data: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024

Sasaran tersebut dicapai melalui Program-program sebagai berikut:

Tabel 82. Program dan Anggaran Sasaran 12 Tahun 2024

No	Program	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran
1	Program Pelayanan Penanaman Modal	850,000,000.00	894,053,636.00	828,794,837.00	92.70%
2	Program Pengelolaan Data Dan Sistem	500,000,000.00	2,542,853,000.00	799,508,254.00	31.44%





No	Program	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran
	Informasi Penanaman Modal				
3	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	1,050,000,000.00	1,150,000,000.00	1,148,040,385.00	99.83%
4	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	1,310,423,000.00	1,229,923,000.00	876,932,873.00	71.30%
5	Program Promosi Penanaman Modal	1,200,000,000.00	1,081,660,000.00	1,077,936,018.00	99.66%
Total		4,910,423,000.00	6,898,489,636.00	4,731,212,367.00	68.58%

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah Rp.4,731,212,367.00 dari anggaran sebesar Rp.6,898,489,636.00 atau 68,58%. Realisasi keuangan sebesar 68,58% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 620%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut, karena target sasaran berhasil 100% tercapai, dan penggunaan sumber daya lebih rendah dari capaian kinerja.

Pencapaian Tingkat Pertumbuhan Investasi di Kabupaten Kutai Kartanegara dari tahun ke tahun mengalami fluktuatif hal ini disebabkan karena :

1. Fluktuatif Harga Komoditas dimana Kabupaten Kutai Kartanegara masih Ketergantungan pada sektor pertambangan dan energi menyebabkan volatilitas investasi ketika harga batu bara dan minyak turun.
2. Krisis Ekonomi Global dimana ekonomi dunia mengalami perlambatan yang mempengaruhi arus modal masuk ke Indonesia termasuk ke Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Regulasi Lingkungan yang Ketat menyebabkan beberapa industri besar yang bergerak pada sektor tambang dan industri mengalami kendala terkait perizinan lingkungan.
4. Ketimpangan Infrastruktur di Wilayah Tertentu dimana beberapa kawasan di Kabupaten Kutai Kartanegara masih mengalami keterbatasan akses terhadap infrastruktur penting. Serta telah berjalannya proyek-proyek investasi pada tahun-tahun sebelumnya





5. Persaingan dengan Daerah Lain yang telah mempunyai kawasan industri atau sentra-sentra industri yang lebih berkembang daripada Kabupaten Kutai Kartanegara

Di samping Kendala yang dihadapi Kabupaten Kutai Kartanegara juga terdapat faktor-faktor pendorong Realisasi investasi di Kabupaten Kutai Kartanegara, yaitu:

1. Peningkatan Infrastruktur seperti Pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas industri yang terus dikembangkan mendorong investasi baru.
2. Diversifikasi Sektor Investasi dimana Sektor non-ekstraktif seperti pariwisata, industri manufaktur, dan jasa mulai berkembang sebagai alternatif dari ketergantungan pada sektor pertambangan.
3. Kondisi Ekonomi Makro yang Stabil membuat Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang positif menarik investor untuk menanamkan modalnya di daerah-daerah yang potensial.
4. Komitmen Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, dimana Pemerintah daerah aktif dalam menarik investor dengan berbagai program investasi strategis.

13. Analisis Kinerja Sasaran 13: “Meningkatnya Kualitas Permukiman Masyarakat dan Ketersediaan Air Bersih”

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Kualitas Permukiman Masyarakat dan Ketersediaan Air Bersih” dengan indikator Cakupan Layanan Air Bersih dan Presentase Rumah Layak Huni mencapai 97,77% dan termasuk predikat “Sangat Berhasil” sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 83. Realisasi Indikator Sasaran 13 Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	% Capaian
16	Cakupan Layanan Air Bersih	Persen	92,16	80,20	87,02
17	Presentase Rumah Layak Huni	Persen	90,89	98,64	108,53
Rata-rata Capaian					97,77

Sumber data: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai kartanegara Tahun 2024





1. Cakupan Layanan Air Bersih

Kebutuhan akan air bersih merupakan hal penting yang harus diperhatikan ketersediaannya, mengingat sumber air baku di Kabupaten Kutai Kartanegara bersumber dari sungai Mahakam yang didalamnya juga mengalir air limbah baik dari perusahaan maupun dari limbah rumah tangga. Besarnya persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih memberikan gambaran tentang kondisi kesehatan suatu daerah. Sumber air bersih diantaranya adalah air leding, pompa mata air terlindung dan sumur terlindung.

Indikator Kinerja Utama Cakupan Layanan Air Bersih adalah Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih / Jumlah rumah tangga dikali 100. Sumber data berasal dari Bidang Penyehatan Lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2024, Jumlah rumah tangga (sasaran) merupakan hasil konversi dari jumlah penduduk (jiwa) dengan asumsi satu rumah tangga = 4 jiwa, Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih diperoleh dari perhitungan jumlah Layanan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan (tandon).

Berikut disajikan tabel data Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses air minum/ SPAM berdasarkan kecamatan di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024:

Tabel 84. Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024

No.	Kecamatan	Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum/Spam									Ket
		Jaringan Perpipaan				Bukan Jaringan Perpipaan					
		Unit Air Baku	Unit Produksi	Unit Distribusi	Unit Pelayanan	Sumur Dangkal	Sumur Pompa	Bak Penampungan Air Hujan	Terminal Air	Jumlah	
1	Anggana				5.881	614		157		6.652	
2	Kembang Janggut				5.426	116		100		5.642	
3	Kenohan				2.173	422				2.595	
4	Kota Bnagun				5.062			547		5.609	
5	Loa Janan				15.582	456	150	529		16.717	
6	Loa Kulu				8.989	1.108		211		10.308	





No.	Kecamatan	Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum/Spam									Ket
		Jaringan Perpipaan				Bukan Jaringan Perpipaan					
		Unit Air Baku	Unit Produksi	Unit Distribusi	Unit Pelayanan	Sumur Dangkal	Sumur Pompa	Bak Penampungan Air Hujan	Terminal Air	Jumlah	
7	Marangkayu				3.585	848				4.433	
8	Mauara Badak				6.394	3.715		390		10.499	
9	Muara Jawa				7.868	581				8.449	
10	Muara Kaman				6.657	560	1.271	1.264		9.752	
11	Muara Muntai				3.948			1.370		5.318	
12	Muara Wis				2.072			333		2.405	
13	Samboja				5.947	420		100		6.467	
14	Sanga-sanga				3.485	118				3.603	
15	Sebulu				5.221	411		100		5.732	
16	Tabang				1.677	131				1.808	
17	Tenggarong				28.152			163		28.315	
18	Tenggarong Seberang				14.677	149		422		15.248	
19	Kota Bangun Darat				1.923	164		1.282		3.369	
20	Samboja Barat				3.776	227				4.003	
Jumlah					138.495	10.040	1.421	6.968	-	156.924	

Sumber data: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai kartanegara Tahun 2024

Cakupan Layanan Air Bersih

$$= \frac{\text{Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih}}{\text{Jumlah rumah tangga}} \times 100\%$$

$$= \frac{156.924}{195.660} \times 100\%$$

$$= \underline{\underline{80,20\%}}$$

Capaian kinerja Indikator Cakupan Layanan Air Bersih Tahun 2024, mengalami penurunan, yaitu Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih menurun sebesar 4.987, jika dibandingkan Tahun 2023, dari total rumah tangga yang mendapat akses air bersih Tahun 2023 sebesar 161.911 menjadi 156.924 di Tahun 2024.





*Pembangunan Boster Loa Ipuh Darat dan Jembatan Pipa JDU menuju Boster
Kecamatan Tenggarong*

Nilai capaian Indikator Cakupan Layanan Air Bersih pada tahun 2024 menurun dibandingkan dengan tahun lalu. Pada Tahun 2023, realisasi sebesar 82,18% dari target sebesar 90,74% dengan Capaian Kinerja sebesar 90,57%.

Sedangkan pada Tahun 2024, realisasi kinerja sebesar 80,20% dari target yang ditetapkan berdasarkan Renstra periode 2021-2026 sebesar 92,16% dengan Capaian Kinerja sebesar 87,02 %. Dari data yang tersebut diatas terlihat adanya penurunan Capaian Kinerja dari tahun 2023 ke 2024 sebesar 3,55%.



Faktor Penghambat Pelaksanaan Program.

1. Salah satu masalah pokok yang dihadapi adalah kurang tersedianya sumber air bersih, belum meratanya pelayanan penyediaan air bersih terutama di perdesaan dan sumber air bersih yang ada belum dimanfaatkan secara maksimal. Selain itu jumlah rumah tangga pengguna air bersih meningkat seiring dengan peningkatan jumlah total rumah tangga.
2. Data penduduk mengikuti tahun berjalan dan jumlah jiwa sebagai pembagi rata-rata nya menjadi 4 orang dalam 1 Kepala Keluarga dan capaian untuk Bukan Jaringan Perpipaan di dasarkan pada data BNBA.

Faktor Pendukung Pelaksanaan Program





1. Untuk melaksanakan program/kegiatan tersebut menggunakan sumber dana dari APBD murni maupun perubahan.
2. Pada tahun 2024, dalam rangka melaksanakan Misi ke 4 dari RPJMD yaitu Meningkatkan layanan infrastruktur dasar dan konektivitas antar wilayah, serta mendukung program dedikasi KUKAR IDAMAN yang salah satunya adalah Program Air Bersih Desa, program dan kegiatan penyediaan sarana dan prasarana air bersih yang menunjang keberhasilan Indikator yaitu Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum melalui Kegiatan yang dilaksanakan seperti yang terdapat di dalam matriks berikut:

Tabel 85. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Anggaran terkait penyediaan air bersih Tahun 2024

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (RP.)
1.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	20.430.000.000
			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	550.000.000
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum	3.291.615.000
			Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum SPAM Jaringan Perpipaan	40.050.000.000
			Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	28.319.079.842
			Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	149.350.980.000

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024





WTP 50 Ltr/Dtk SPM Sei Merdeka beserta prasarananya

2. Persentase Rumah Layak Huni

Indikator Kinerja Utama **Persentase Rumah Layak Huni** adalah Jumlah Rumah Layak Huni / Jumlah Seluruh Rumah di wilayah pemda x 100%

Cakupan Rumah Layak Huni

$$= \frac{\text{Jumlah rumah layak huni}}{\text{Jumlah seluruh rumah di wilayah pemda}} \times 100\%$$

$$= \frac{182.908}{185.433} \times 100\% = \underline{\underline{98,64 \%}}$$

Keterangan:

1. Jumlah seluruh rumah di wilayah pemda sumber data diperoleh dari Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) tahun 2019.
2. Jumlah rumah layak huni diperoleh dari perhitungan jumlah seluruh rumah dikurangi jumlah rumah tidak layak huni. Di tahun 2024, jumlah Rumah Tidak Layak Huni berdasarkan data RBPK sebesar 2525 unit. Sebelumnya di tahun 2023 perhitungan RTLH berdasarkan data DTKS yaitu sebanyak 12.063 unit
3. Sasaran *Yok Baiki* Rumah pada data RBPK sebanyak 5.371 unit. Setelah di verifikasi tidak semua masuk dalam kriteria RTLH. Yang masuk (layak dibantu) hanya sebesar 1228 dan yang belum di verifikasi





sementara oleh bidang terkait dimasukkan ke dalam kriteria RTLH, maka diperoleh sejumlah 2525 tersebut.

- ❖ Jumlah rumah layak huni diperoleh dari perhitungan jumlah seluruh rumah dikurangi jumlah rumah tidak layak huni.

$$\begin{aligned} 185.433 - 2525 &= 182.908 \text{ Unit Rumah Layak Huni.} \\ &= \frac{182.908}{185.433} \times 100 \\ &= 98,64 \% \end{aligned}$$

Berdasarkan data tersebut, maka nilai capaian Indikator Cakupan Rumah Layak Huni Tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 5,15% dari 93,49% di tahun 2023 menjadi 98,64% di Tahun 2024 atau persentase capaian sebesar 108,53% dari yang di targetkan sebesar 90,89%.

Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cermin harkat dan martabat penghuninya serta aset bagi pemiliknya (Sumber : UU NOMOR 01 TAHUN 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP)).

Rumah yang layak huni dan sehat menjadi kebutuhan setiap masyarakat. Untuk memiliki rumah yang layak huni, setidaknya harus memenuhi lima syarat penting, yaitu :

Ketahanan dan keselamatan bangunan;

1. Kecukupan luas ruang penghuni;
2. Adanya luas luasan pencahayaan dan penghawaan;
3. Akses sanitasi layak;
4. Akses air minum layak.

Faktor Penghambat Pelaksanaan Program.

Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni yang merupakan Program adopsi dari BSPS. Pengadaan rumah secara swadaya ini telah banyak





merumahkan masyarakat Indonesia, terutama Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Namun, permasalahan yang muncul dari pembangunan rumah secara swadaya oleh masyarakat yang memiliki sumber daya terbatas adalah minimnya perencanaan dan pengetahuan teknis mengenai rumah layak huni (RLH). Hal ini menyebabkan kondisi rumah yang dibangun dalam jangka panjang menjadi tidak layak huni atau lebih dikenal dengan RTLH. Karena itulah, pemerintah melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman memberikan fasilitasi kepada masyarakat untuk mewujudkan rumah layak huni secara swadaya dengan program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.

Faktor Pendukung Pelaksanaan Program.

Bertambahnya jumlah penghunian rumah yang layak huni melalui skema R-RTLH, meningkatnya sistem pelaksanaan program Rumah Swadaya, serta terlaksananya dukungan teknis untuk pengembangan program Rumah Swadaya.

Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (R-RTLH) adalah bantuan Pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU). Di tahun 2024 ini Pemerintah Daerah melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara serta dalam rangka melaksanakan Misi ke 4 dari RPJMD yaitu Meningkatkan layanan infrastruktur dasar dan konektivitas antar wilayah, serta mendukung program dedikasi KUKAR IDAMAN yang salah satunya adalah melalui peningkatan kualitas permukiman masyarakat, menetapkan 3 Zona yang terdiri dari Zona Tengah, Zona Hulu dan Zona Pesisir untuk memperoleh bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (R-RTLH) melalui alokasi dana APBD. Dari 1000 Unit rumah yang rencananya akan direhabilitasi sampai dengan akhir pelaksanaan kegiatan terealisasi sebanyak 853 Unit di Tahun 2023 dan 1146 unit di Tahun 2024.

Data realisasi tersebut didapatkan dari akumulasi hasil Rekapitulasi Perhitungan Pelaksanaan Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni,





Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan RTLH Provinsi dll dengan rincian sbb :

Tabel 86. Rekapitulasi Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2023 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2023 (unit)	Tahun 2024 (unit)
1.	Perbaikan rumah tidak layak huni	574	617
2.	BSPS (Pusat)	265	500
3.	CSR (BSSR)	3	0
4	Rehabilitasi RTLH dilokasi Kumuh	11	29
Total Jumlah Rumah (R-RTLH)		853	1.146

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024

Adapun program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan Indikator ini dilaksanakan dengan Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh dengan kegiatan yang dilaksanakan berupa Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Pada Daerah Kabupaten / Kota pada sub kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha.

Tabel 87. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Anggaran terkait rumah layak huni Tahun 2023-2024

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran 2023 (Rp)	Anggaran 2024 (Rp)
1	Program Kawasan Permukiman	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	263.615.440,00	584.000.000,00
2	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Pada Daerah Kabupaten / Kota	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	59.952.066.000,00	35.700.000.000,00

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023-2024

Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni yang merupakan Program adopsi dari BSPS. Pengadaan rumah secara swadaya ini telah banyak merumahkan masyarakat Indonesia, terutama Masyarakat Berpenghasilan

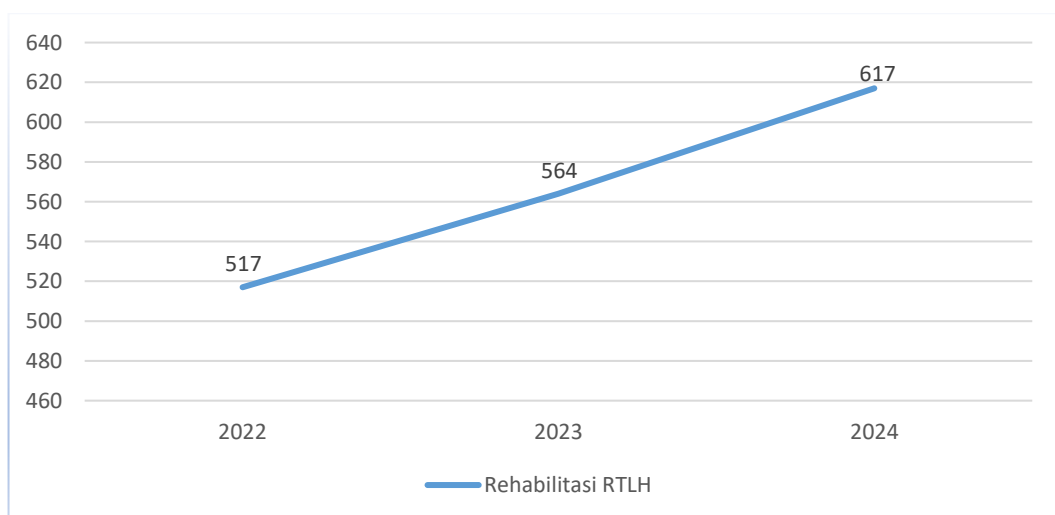




Rendah (MBR). Namun, permasalahan yang muncul dari pembangunan rumah secara swadaya oleh masyarakat yang memiliki sumber daya terbatas adalah minimnya perencanaan dan pengetahuan teknis mengenai rumah layak huni (RLH). Hal ini menyebabkan kondisi rumah yang dibangun dalam jangka panjang menjadi tidak layak huni atau lebih dikenal dengan RTLH. Karena itulah, pemerintah melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman memberikan fasilitasi kepada masyarakat untuk mewujudkan rumah layak huni secara swadaya dengan program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.

Bertambahnya jumlah penghunian rumah yang layak huni melalui skema R RTLH , meningkatnya sistem pelaksanaan program Rumah Swadaya, serta terlaksananya dukungan teknis untuk pengembangan program Rumah Swadaya.

Grafik 34. Rehabilitasi RTLH Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023-2024

Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (R-RTLH) Adalah bantuan Pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU). Di tahun 2024 ini Pemerintah Daerah melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara serta dalam rangka melaksanakan Misi ke 4 dari RPJMD yaitu Meningkatkan layanan infrastruktur dasar dan konektivitas antar wilayah, serta mendukung program dedikasi KUKAR IDAMAN yang salah





satunya adalah melalui peningkatan kualitas permukiman masyarakat, di Tahun 2024 sebanyak 617 unit rumah yang mendapat bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni, yang tersebar di 18 Kecamatan. Jumlah yang mendapat bantuan rehabilitasi di Tahun 2024 lebih banyak dibandingkan Tahun 2023 dengan total sebanyak 562 Unit rumah yang direhabilitasi, atau meningkat 55-unit rumah.



Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Desa Loa Raya
Kec. Tenggarong Seberang



Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Desa Wonotirto
Kecamatan Samboja

Tabel 88. Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Tahun 2024

No	Zona	Jumlah Unit Rumah Per Zona	Kecamatan	Jumlah Unit Rumah Per Kecamatan	Keterangan
1.	Tengah	229	Tenggarong	79	7 Kelurahan
			Tenggarong Seberang	52	10 Desa
			Loa Janan	60	4 Desa
			Loa Kulu	33	7 Desa
			Muara Kaman	5	1 Desa
2.	Pesisir	208	Samboja Barat	39	4 Kelurahan
			Samboja	24	3 Kelurahan
			Anggana	13	2 Desa
			Muara Jawa	40	3 Kelurahan
			Muara Badak	57	4 Desa
			Marangkayu	35	1 Desa
3.	Hulu	180	Kota Bangun	19	4 Desa
			Kota Bangun Darat	71	6 Desa
			Kembang Janggut	13	2 Desa
			Kenohan	22	2 Desa
			Muara Muntai	38	7 Desa
			Muara Wis	13	1 Desa
			Tabang	4	1 Desa
TOTAL		617			

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024





Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 89. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 13 terhadap target RPJMD

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Target 2025	Target 2026
16	Cakupan Layanan Air Bersih	Persen	70,85	76,67	82,54	80,20	93,58	95
17	Persentase Rumah Layak Huni	Persen	92,76	93,39	93,49	98,64	91,16	91,44

Sumber data: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024

Sasaran tersebut dicapai melalui Program-program sebagai berikut:

Tabel 90. Program dan Anggaran Sasaran 13 Tahun 2024

No	Program	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	324,022,064,168.00	325,980,259,879.00	261,518,997,749.00	80.23%
2	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	717,504,617,235.00	760,212,920,235.00	655,188,128,672.00	86.18%
3	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	172,399,059,842.00	241,991,674,842.00	214,559,318,510.00	88.66%
4	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	50,574,170,000.00	52,929,406,000.00	49,757,025,631.00	94.01%
5	Program Pengembangan Perumahan	9,671,384,560.00	9,766,497,560.00	6,636,506,838.00	67.95%
6	Program Kawasan Permukiman	15,810,000,000.00	15,685,660,000.00	12,496,800,620.00	79.67%
7	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	35,700,000,000.00	35,700,000,000.00	27,976,954,410.00	78.37%
8	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	180,913,973,000.00	223,285,524,651.00	198,794,523,731.00	89.03%
Total		1,506,595,268,805.00	1,665,551,943,167.00	1,426,928,256,161.00	85.67%

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah Rp.1,426,928,256,161.00 dari anggaran sebesar Rp.1,665,551,943,167.00 atau 85,67%. Realisasi keuangan sebesar 87,39% dibandingkan dengan





capaian kinerja sasaran sebesar 97,77%, maka terjadi ketidak efisienan penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut, karena target sasaran tidak berhasil 100% tercapai, walau penggunaan sumber daya lebih rendah dari capaian kinerja.

14. Analisis Kinerja Sasaran 14: “Meningkatnya Aksesibilitas dan Konektivitas Wilayah”

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Aksesibilitas dan Konektivitas Wilayah” dengan indikator Indeks Aksesibilitas Wilayah mencapai 88,24% dan termasuk predikat “Berhasil” sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 91. Realisasi Indikator Sasaran 14 Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	% Capaian
18	Indeks Aksesibilitas Wilayah	Nilai	86,18	76,045	88,24

Sumber data: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai kartanegara Tahun 2024

Indeks Aksesibilitas Wilayah diukur dengan rumus:

$$\text{Indeks Aksesibilitas Wilayah} = \frac{\text{Jalan Mantap} + \text{Aksesibilitas}}{2}$$

$$\text{Indeks Aksesibilitas Wilayah} = \frac{63,2 + 88,89}{2} = 76,045$$

Keterangan:

$$\text{Aksesibilitas} = \frac{\text{jumlah Kecamatan terhubung}}{\text{total Kecamatan}} \times 100 \%$$

Kondisi geografis Kabupaten Kutai Kartanegara yang sangat luas dari 20 kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara, masih ada 2 kecamatan yang belum terhubung jalur darat dengan ibu kota kabupaten, yaitu Kecamatan Muara Muntai dan Kecamatan Muara Wis, dan ada beberapa desanya terletak di pulau dan kawasan lindung daerah gambut sehingga tidak dapat terkoneksi melalui jalur darat.





Dari 237 jumlah desa dan kelurahan di Kabupaten Kutai Kartanegara, ada 11 desa yang belum terhubung jalur darat, dari 11 desa tersebut ada 7 desa yang tidak bisa terhubung jalur darat karena kondisi wilayah. Data sebaran desa tersebut dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 92. Data Desa Terhubung Dan Tidak Terhubung Jalur Darat

No	Kecamatan	Jumlah Desa / Kelurahan	Desa yang Belum Terhubung Jalur Darat	Desa yang Tidak Bisa Terhubung Jalur Darat
1	Muara Muntai	13	1 Desa (Desa Jantur)	1 Desa (Desa Jantur)
2	Loa Kulu	15		
3	Loa Janan	8		
4	Anggana	8	3 Desa (Desa Sepatin, Desa Muara Pantuan, Desa Tani Baru)	3 Desa (Desa Sepatin, Desa Muara Pantuan, Desa Tani Baru)
5	Muara Badak	13		
6	Tenggarong	14		
7	Sebulu	14		
8	Kota Bangun	11		
9	Kenohan	9		
10	Kembang Janggut	11		
11	Muara Kaman	20	5 Desa (Desa Kupang Baru, Desa Liang Buaya, Desa Muara Siran, Desa Bukit Jering, Desa Tunjungan)	3 Desa (Desa Liang Buaya, Desa Muara Siran, Desa Bukit Jering)
12	Tabang	19		
13	Samboja	13		
14	Muara Jawa	8		
15	Sanga-Sanga	5		
16	Tenggarong Seberang	18		
17	Marangkayu	11		
18	Muara Wis	7	2 Desa (Desa Enggelam, Desa Muara Enggelam)	
19	Kota Bangun Darat	10		
20	Samboja Barat	10		
TOTAL		237	11 Desa	7 Desa

Sumber Data: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021

Di Kecamatan Anggana terdapat 3 (tiga) desa yang terletak di pulau yaitu Desa Muara Pantuan, Desa Sepatin, dan Desa Tani Baru. Ketiga desa tersebut sulit dihubungkan melalui jalur darat karena lokasinya yang berada pulau dan Muara Selat Makassar. Selain itu, 3 (tiga) desa di Kecamatan Muara Kaman yaitu Desa Liang Buaya, Desa Bukit Jering, dan Desa Muara Siran juga sulit terhubung melalui jalur darat. Desa Liang Buaya tidak dapat terkoneksi karena desa tersebut masuk dalam kawasan lindung daerah

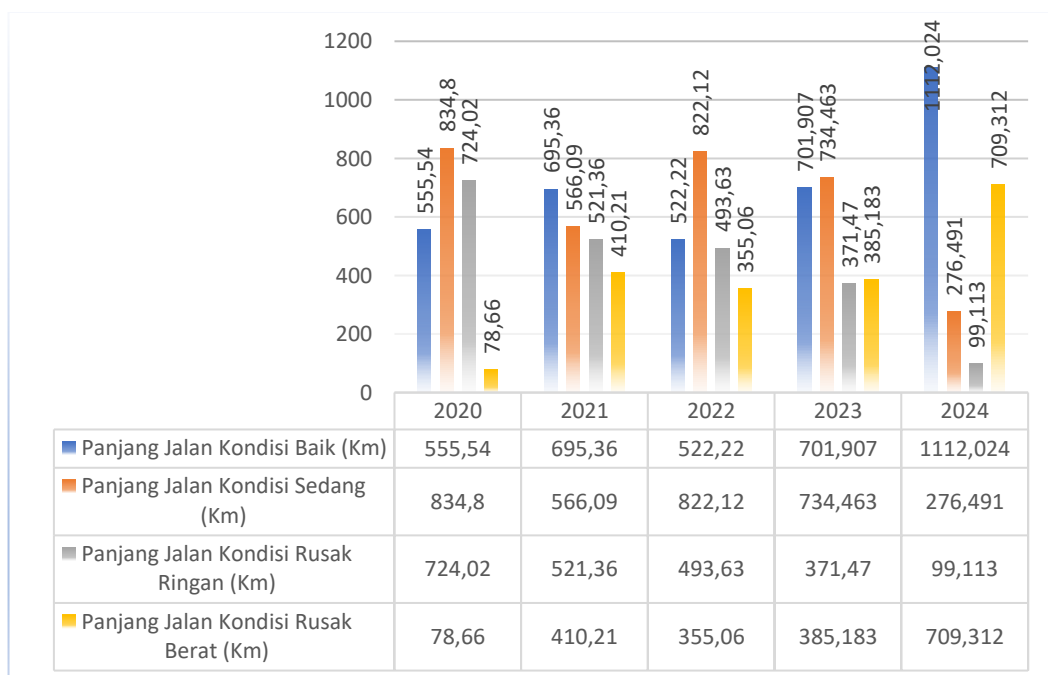




gambar berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara 590/526/001/A.Ptn/2013 tentang Penunjukan Konservasi Sebaran lahan Gambut Di Kabupaten Kutai Kartanegara. Sedangkan Desa Bukit Jering dan Desa Muara Siran berada di lokasi yang terpisah dari Kecamatan Muara Kaman oleh Sungai Mahakam dan Sungai Kedang Kepala dan di Kecamatan Muara Muntai ada Desa Jantur.

Sasaran Meningkatnya Aksesibilitas dan Konektivitas Wilayah dengan indikator Indeks Aksesibilitas Wilayah Tahun 2024 sebesar 76,045%, capaian ini lebih rendah 1,145% dari capaian kinerja di Tahun 2023 yaitu sebesar 77,19%, penurunan capaian kinerja ini disebabkan adanya perubahan panjang ruas jalan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kutai Kartanegara, yang sebelumnya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 321 Tahun 2016 tentang Penetapan Status Jalan, panjang ruas jalan 2.193,02 KM, namun berdasarkan Surat Keputusan terbaru Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Penetapan Ruas Jalan, panjang ruas jalan menjadi 2.196,94 KM, atau bertambah 3,92 KM. Berikut disajikan grafik perbandingan kondisi jalan dan perbandingan kondisi jalan di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020-2024:

Grafik 35. Perbandingan Kondisi Jalan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020-2024



Sumber data: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai kartanegara Tahun 2024



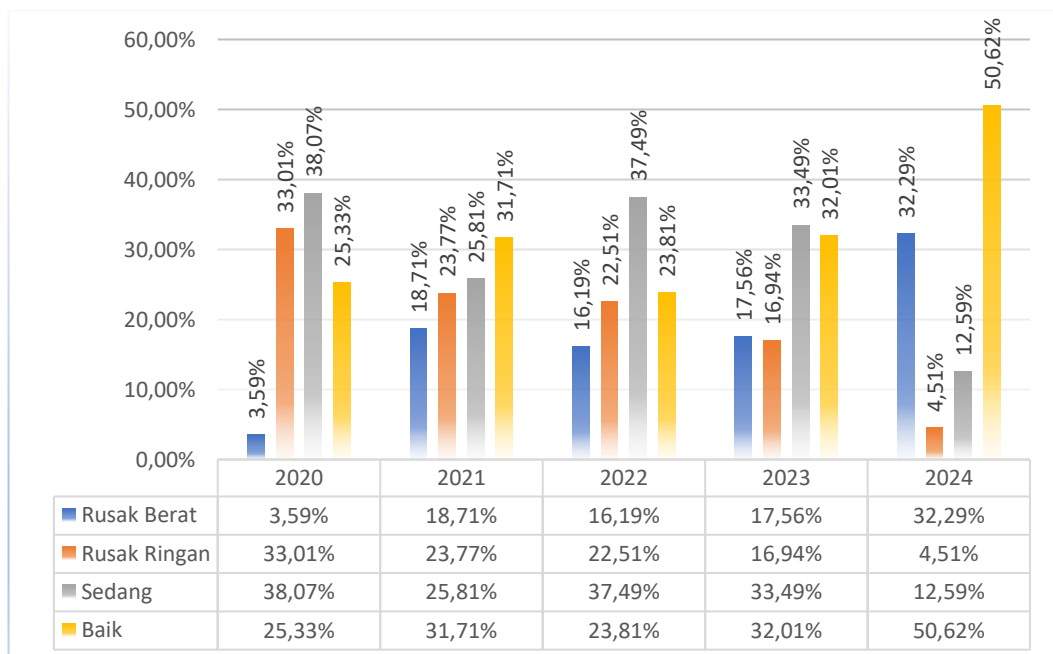


Peningkatan Ruas Jalan Loleng-Sukabumi dan Ruas Jalan Sukabumi-Kesang Ipil Kecamatan Kota Bangun Darat Sepanjang 2.261 Meter

Jika melihat grafik Perbandingan Kondisi Jalan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020-2024, peningkatan signifikan terdapat pada panjang jalan kondisi baik di Tahun 2024, yaitu sepanjang 1.112,024 KM atau 50,62% dari keseluruhan panjang ruas jalan. Peningkatan juga terjadi pada panjang jalan kondisi rusak berat, dimana di tahun 2023 sepanjang 385,183 KM menjadi 709,312 KM, meningkat

sepanjang 324,129 KM, atau sebesar 32,29% dari keseluruhan panjang ruas jalan di Kabupaten Kutai kartanegara Tahun 2024.

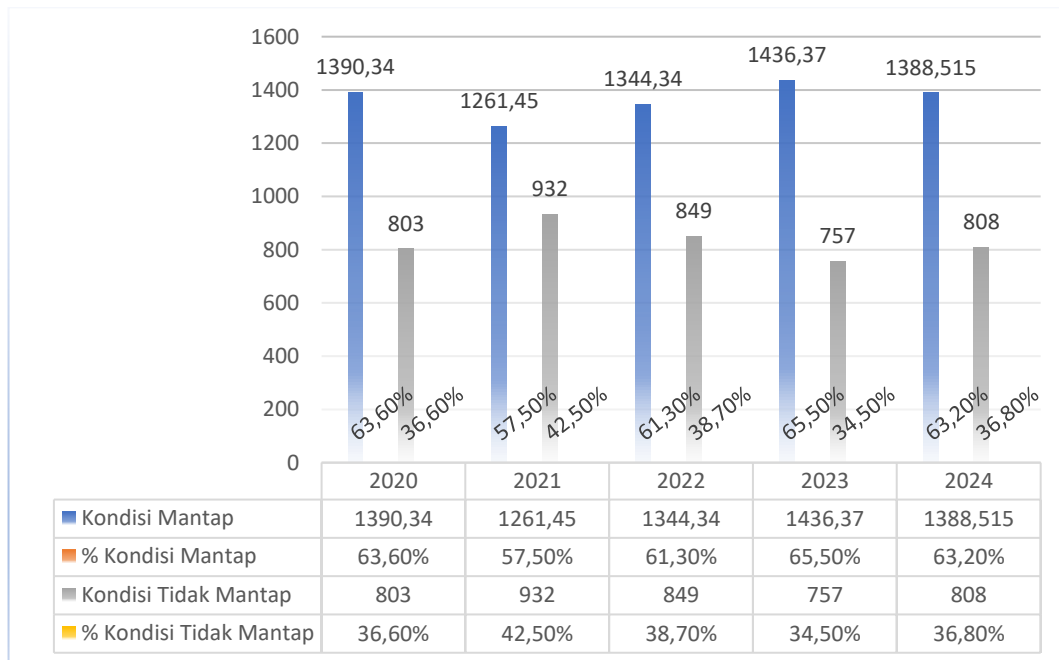
Grafik 36. Persentase Kondisi Jalan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020-2024



Sumber data: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai kartanegara Tahun 2024



Grafik 37. Persentase Kondisi Jalan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020-2024



Sumber data: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai kartanegara Tahun 2024

Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 93. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 14 terhadap target RPJMD

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Target 2025	Target 2026
18	Indeks Aksesibilitas Wilayah	Nilai	n.a	75,65	77,19	76,045	87,18	88,18

Sumber data: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024

Sasaran tersebut dicapai melalui Program-program sebagai berikut:

Tabel 94. Program dan Anggaran Sasaran 14 Tahun 2024

No	Program	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran
1	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	81,169,268,282.00	100,360,572,514.00	87,359,170,864.00	87.05%
2	Program Penataan Bangunan Gedung	59,322,554,282.00	53,737,850,782.00	44,818,967,081.00	83.40%
3	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	1,600,000,000.00	1,600,000,000.00	1,108,968,725.00	69.31%
4	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	500,000,000.00	500,000,000.00	457,048,950.00	91.41%
5	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan	4,850,000,000.00	25,328,365,000.00	20,608,195,852.00	81.36%





No	Program	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran
	Santunan Tanah Untuk Pembangunan				
6	Program Redistribusi Tanah, Dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	1,200,000,000.00	950,000,000.00	514,242,774.00	54.13%
7	Program Penetapan Tanah Ulayat	250,000,000.00	125,000,000.00	30,786,000.00	24.63%
8	Program Pengelolaan Tanah Kosong	824,799,664.00	824,799,664.00	726,799,154.00	88.12%
9	Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	391,989,000.00	491,989,000.00	382,476,272.00	77.74%
10	Program Penatagunaan Tanah	1,250,000,000.00	1,150,000,000.00	1,075,967,600.00	93.56%
Total		151,358,611,228.00	185,068,576,960.00	157,082,623,272.00	84.88%

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah Rp.157,082,623,272.00 dari anggaran sebesar Rp.185,068,576,960.00 atau 84,88%. Realisasi keuangan sebesar 84,88%, dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 88,24%, maka terjadi ketidak efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut, karena target sasaran tidak berhasil 100% tercapai, walaupun penggunaan sumber daya lebih rendah dari capaian kinerja.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian sasaran antara lain:

1. Wilayah Kutai Kartanegara yang sangat luas, menyulitkan untuk pemerataan pembangunan, terutama di peningkatan kualitas infrastruktur jalan.
2. Kondisi geografis juga mempengaruhi perubahan topografi.
3. Beban kendaraan yang melintasi jalan tersebut (ODOL = *over dimension over loading*) seperti kendaraan truk yang bermuatan lebih dari kapasitas.
4. Umur konstruksi yang merupakan jangka waktu di mana jalan dapat berfungsi secara optimal sebelum mengalami penurunan kualitas yang signifikan atau memerlukan rehabilitasi besar. Umur ini biasanya





dihitung sejak jalan dibangun hingga kondisinya tidak lagi memenuhi standar layanan yang ditetapkan.

15. Analisis Kinerja Sasaran 15: “Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup”

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup” dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup mencapai 99,70% dan termasuk predikat “Sangat Berhasil” sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 95. Realisasi Indikator Sasaran 15 Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	% Capaian
19	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	73,81	73,59	99,70

Sumber data: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai kartanegara Tahun 2024

Pencapaian kinerja sasaran ini diuraikan sebagai berikut:

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator penting yang digunakan untuk mengukur kondisi dan keberlanjutan lingkungan suatu wilayah. IKLH mencerminkan tingkat kualitas lingkungan berdasarkan tiga komponen utama, yaitu kualitas udara, kualitas air, dan tutupan lahan. Semakin tinggi nilai IKLH, semakin baik kondisi lingkungan, yang menunjukkan bahwa ekosistem di wilayah tersebut berada dalam keadaan sehat dan mampu mendukung kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya. **Komponen Utama IKLH:**

1. Kualitas Udara

Kualitas udara diukur berdasarkan konsentrasi polutan seperti PM2.5, SO2, NO2, dan CO yang berpengaruh terhadap kesehatan manusia serta ekosistem. Sumber utama pencemaran udara meliputi aktivitas industri, transportasi, dan kebakaran hutan. Berdasarkan hasil pengukuran di 8 Titik Pantau di Wilayah





Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024. Indeks Kualitas Udara menunjukkan nilai 92,73 (Sangat Baik), hal ini menunjukkan peningkatan 1,2 dari keadaan IKU Tahun 2023 senilai 91,53 (Sangat Baik).

Di tingkat nasional IKU Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 menempati urutan ke 185 dari 514 kabupaten/kota, atau peringkat 5 dari 10 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur.

2. Kualitas Air

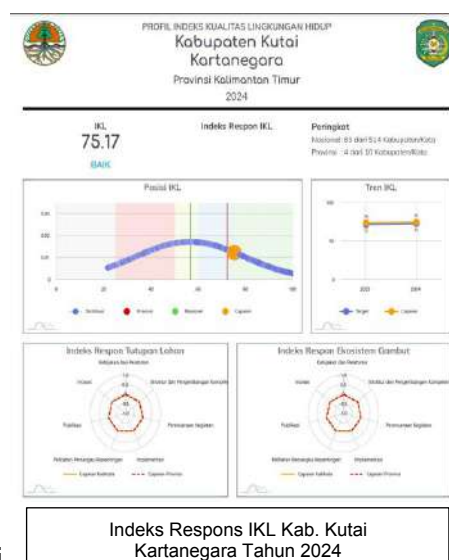
Parameter kualitas air mencakup tingkat pencemaran sungai, danau, serta air tanah yang digunakan untuk kebutuhan domestik, industri, dan pertanian. Pencemaran air sering disebabkan oleh limbah domestik, industri, serta aktivitas pertanian yang tidak ramah lingkungan. Pengukuran Indeks Kualitas Air di Kabupaten Kutai Kartanegara di Tahun 2024 dilaksanakan di 33 Titik Pantau



dengan 78 bahan uji sampel, diperoleh hasil 52,05 (Sedang), capaian ini meningkat 1,52 dari keadaan Tahun 2023, senilai 50,53. Kabupaten Kutai Kartanegara menempati peringkat 170 dari 514 kabupaten/kota, atau peringkat 7 dari 10 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur.

3. Tutupan Lahan

Tutupan lahan mencerminkan luas area hutan, vegetasi hijau, dan lahan yang masih alami. Degradasi tutupan lahan akibat deforestasi, urbanisasi, dan konversi lahan untuk pertanian atau industri dapat berdampak pada penurunan kualitas lingkungan secara keseluruhan. Kabupaten Kutai Kartanegara menempati peringkat 83 dari





514 kabupaten/kota, atau peringkat 4 dari 10 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur.

Berdasarkan hasil pengukuran 3 komponen utama IKLH diatas maka diperoleh Indeks Kualitas lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 sebagai berikut:

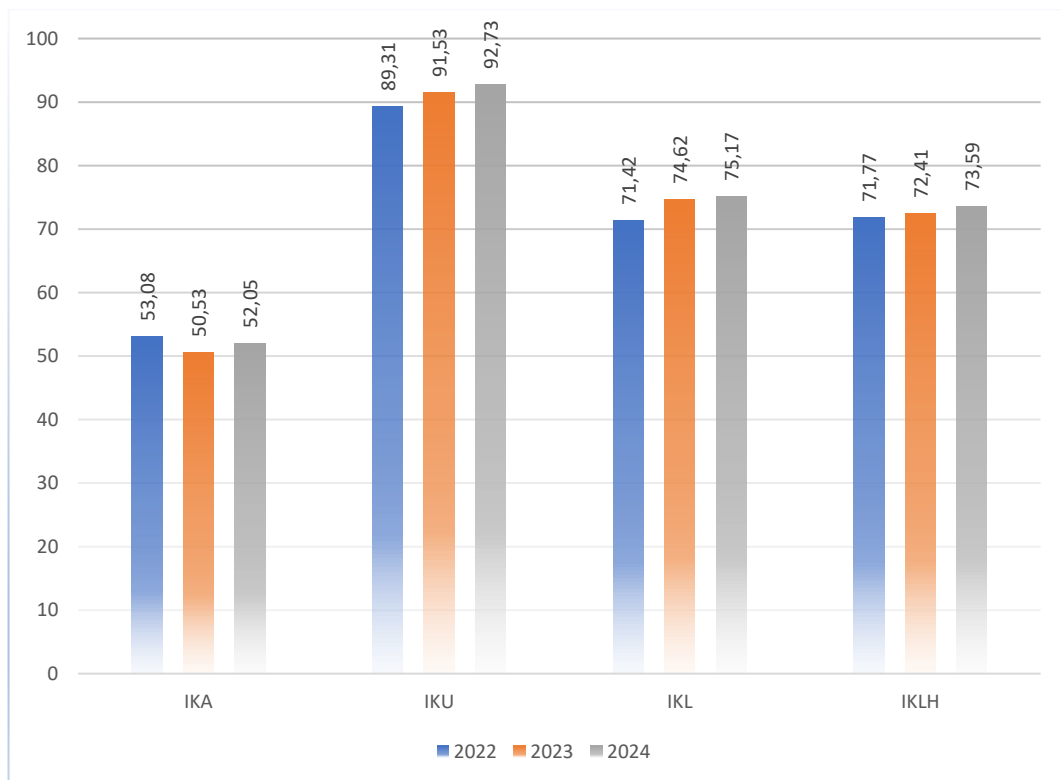
$$IKLH \frac{Kab}{Kota} = (0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKL)$$

$$IKLH \frac{Kab}{Kota} = (0,376 \times 52,05) + (0,405 \times 92,73) + (0,219 \times 75,17)$$

$$IKLH \text{ Kab. Kutai Kartanegara} = 73,59 = \text{Kategori IKLH "BAIK"}$$

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Kartanegara dalam 3 tahun terakhir, menunjukkan peningkatan dari IKLH, berikut grafik IKA, IKU, IKL dan IKLH Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022-2024:

Grafik 38. Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara Indeks Kualitas Tutupan Lahan Tahun 2022 – 2024



Sumber data: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024





Sebagai indikator pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, IKLH merupakan perpaduan konsep *Environmental Quality Index* (EQI) dan konsep *Environmental Performance Index* (EPI). IKLH dapat digunakan untuk menilai kinerja program perbaikan kualitas lingkungan hidup dan sebagai bahan informasi dalam mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

IKLH digunakan oleh pemerintah sebagai dasar dalam merancang kebijakan lingkungan dan strategi pembangunan berkelanjutan. Dengan memahami tren dan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas lingkungan, pemerintah dapat mengambil langkah-langkah strategis seperti:

- Pengurangan emisi gas rumah kaca melalui penerapan teknologi ramah lingkungan.
- Pengelolaan limbah dan pencemaran air yang lebih efektif.
- Penghijauan kembali lahan yang mengalami degradasi.
- Penguatan regulasi lingkungan untuk mencegah eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan.



Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut ini:



Tabel 96. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 15 terhadap target RPJMD

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Target 2025	Target 2026
19	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	71,76	71,77	72,41	73,59	74,15	74,51

Sumber data: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024

Sasaran tersebut dicapai melalui Program-program sebagai berikut:

Tabel 97. Program dan Anggaran Sasaran 15 Tahun 2024

No	Program	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran
1	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	960,000,000.00	909,609,060.00	805,346,753.00	88.54%
2	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	3,354,920,000.00	3,767,991,447.00	3,263,366,778.00	86.61%
3	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	2,375,000,000.00	2,387,501,719.00	1,630,927,842.00	68.31%
4	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	375,000,000.00	375,000,000.00	340,730,367.00	90.86%
5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	702,000,000.00	491,770,940.00	442,788,873.00	90.04%
6	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan PPLH	75,000,000.00	75,000,000.00	20,532,000.00	27.38%
7	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	240,000,000.00	342,000,000.00	308,120,097.00	90.09%
8	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	650,000,000.00	650,000,000.00	439,399,380.00	67.60%
9	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	288,000,000.00	288,000,000.00	202,141,600.00	70.19%
10	Program Pengelolaan Persampahan	85,435,981,808.00	87,391,180,586.00	81,963,366,542.00	93.79%
11	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	150,000,000.00	347,000,000.00	50,156,203.00	14.45%
Total		94,605,901,808.00	97,025,053,752.00	89,466,876,435.00	92.21%





Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah Rp.89,466,876,435.00 dari anggaran sebesar Rp. 97,025,053,752.00 atau 92,21%. Realisasi keuangan sebesar 92,21% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 99,70%, maka terjadi ketidak efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut, karena target sasaran tidak berhasil 100% tercapai, walaupun penggunaan sumber daya lebih rendah dari capaian kinerja.

Jika dilihat dari realisasi IKLH tahun 2024 sebesar 73,59, capaian ini lebih tinggi 1,18 dari capaian IKLH di Tahun 2023 yaitu 72,41. Nilai capaian hanya sekitar 99,70 % dari target IKLH 73,81 Namun tetap masuk dalam Kategori Indeks Kualitas Lingkungan Hidup “BAIK”. Adapun beberapa hal yang menyebabkan realisasi IKLH tidak dapat tercapai sesuai dengan yang ditarget dikarenakan beberapa hal:

1. Tidak terpenuhinya target pada Indeks Kualitas Air, IKA : Target = 57,42 Realisasi = 52,05. Pelaksanaan Pemantauan air permukaan pada 78 titik yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan Kutai Kartanegara sebanyak 36 titik, Pusat sebanyak 24 titik, dan Provinsi sebanyak 18 titik (penentuan titik pantau berdasarkan Surat Keputusan Kepala dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : P-0207/DLHK/Bid 3.1/663.1/02/2024 Tentang Penetapan Titik Pantau Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Kartanegara untuk Perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Udara (IKU) Tahun 2024.
2. Metode perhitungan air permukaan menggunakan perhitungan Indeks Pencemaran lebih diperketat lagi berdasarkan surat dari KLHK No. S.318/PPKL/SET/REN.0/12/2020 dengan jumlah 8 parameter uji (pH,TSS,DO,BOD,COD,NO3-N,*Fecal Coli*,*Total Phospat*) tetapi pada tahun 2022 menggunakan Metode perhitungan PerMen LHK nomor 27 Tahun 2021 dengan Aplikasi IKLH.
3. Dari 78 titik pantau perhitungan indeks pencemaran air, sebanyak 58 tercemar ringan dan 6 titik tercemar sedang.





Adapun beberapa hal yang mempengaruhi status mutu air di Kabupaten Kutai Kartanegara antara lain :

1. Pola Hidup Masyarakat di bantaran sungai yang menyebabkan Parameter *Fecal Coliform* masih diatas baku mutu hal ini disebabkan karena kondisi sungai kita yang masih banyak aktivitas manusia yang menghasilkan limbah domestik.
2. Belum maksimalnya pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik baik individu maupun Terpadu di Wilayah Perkotaan dan perdesaan;
3. Belum adanya pengolahan air limbah dari usaha kecil;
4. Belum maksimalnya pelaksanaan restorasi sungai.

Berikut beberapa sungai yang nilai parameter *Fecal Coli* di atas baku mutu:

Tabel 98. Sungai yang nilai parameter *Fecal Coli* di atas Baku Mutu

Sungai	Baku Mutu Sungai Kelas 2	Hasil Sample (fecal coliform mg/l)
Sungai Loa Haur Loa Duri	1000	35000
Sungai Perian	1000	1300
Sungai Jembayan Desa Jonggon	1000	7900
Desa Muara Aloh	1000	3400
Sungai Anggana Pelabuhan Kutai Lama	1000	7000
Sungai Saka Kanan Tenggarong	1000	22000
Kedang Rantau Pelabuhan Situs Kerajaan Mulawarman	1000	14000
Sungai Sentekan Desa Long Beleh Haloq	1000	1700

Sumber data: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai kartanegara Tahun 2024

Faktor Pendukung:

Adanya peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup

1. Meningkatnya atensi global tentang isu lingkungan dan dampak perubahan iklim
2. Adanya peluang pendanaan pengelolaan lingkungan hidup yang bersumber dari luar APBD
3. Adopsi program nasional yang inovatif yang telah dihasilkan seperti PROPER, Adiwiyata, Kalpataru, Adipura, proklamasi dan Keanekaragaman Hayati





4. Adanya kerja sama antar pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup

Faktor Penghambat:

1. Pengelolaan Sumber Daya Alam masih belum berkelanjutan dan mengabaikan kelestarian fungsi lingkungan hidup, sehingga daya dukung lingkungan menurun dan ketersediaan Sumber Daya Alam menipis.
2. Pencemaran air, udara dan tanah belum tertangani secara tepat, karena pembangunan yang kurang memperhatikan aspek kelestarian fungsi lingkungan.
3. Perubahan penggunaan lahan yang cepat diakibatkan oleh pertumbuhan penduduk yang pesat dan diikuti oleh peningkatan aktivitas yang dapat menurunkan daya dukung lahan dan mengganggu keseimbangan ekosistem.
4. Adanya Eksploitasi Sumber Daya Alam secara besar-besaran dapat mengakibatkan penurunan dan kerusakan lingkungan.

16. Analisis Kinerja Sasaran 16: “Meningkatnya Ketahanan Bencana Daerah”

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Ketahanan Bencana Daerah” dengan indikator Indeks Risiko Bencana mencapai 86,08% dan termasuk predikat “Berhasil” sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 99. Realisasi Indikator Sasaran 16 Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	% Capaian
20	Indeks Risiko Bencana	Nilai	104,28	118,80	86,08

Sumber data: Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2024

Pencapaian kinerja sasaran ini diuraikan sebagai berikut:

Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) ini dihitung berdasar-kan rumus berikut:

$$\text{Risk} = \text{Hazard} \times \text{Vulnerability Capacity}$$





Di mana hazard (bahaya) dihitung berdasarkan

probabilitas spasial, frekuensi dan kekuatan (magnitude) dari suatu fenomena alam seperti gempa bumi, banjir, letusan gunung api,



dan lainnya. Vulnerability (kerentanan) dihitung berdasarkan para-meter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan. Capacity (kapasitas) dinilai dengan menggunakan pendekatan tingkat ketahanan daerah berdasarkan tujuh prioritas yaitu: (1) Perkuatan kebijakan dan kelembagaan; (2) Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu; (3) Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik; (4) Penanganan tematik kawasan rawan bencana; (5) Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana; (6) Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan (7) Pengembangan sistem pemulihan bencana.

Sampai saat ini nilai Indeks Risiko Bencana hasil perhitungan dari IRBI oleh Direktorat Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana BNPB.

Berdasarkan Surat Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor B-06.23/BNPB/D-I/SS.01.03/01/2025 Tanggal 08 Januari 2025,

Nilai Indeks Risiko Bencana Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 adalah 136,11 dan IRBI Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 adalah 118,80 masuk ke tingkat RESIKO SEDANG, capaian ini menurun 4,5



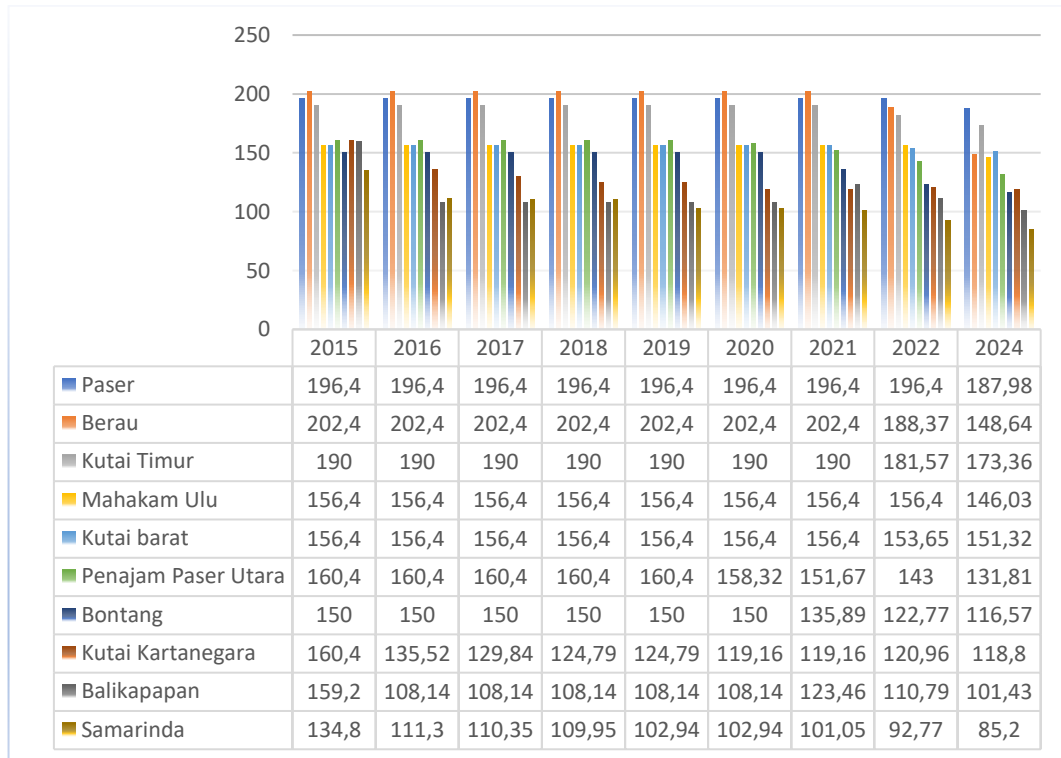
poin, jika dibandingkan capaian di Tahun 2023 dengan nilai 114,30. Berikut





disajikan data grafik perbandingan IRB kabupaten/ kota di wilayah Provinsi Kalimantan Timur dari Tahun 2015-2024.

Grafik 39. Indeks Resiko Bencana Kabupaten/ Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2024



Sumber data: Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2024

Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 100. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 16 terhadap target RPJMD

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Target 2025	Target 2026
20	Indeks Risiko Bencana	Nilai	119,16	120,96	114,3	118,80	102,14	100

Sumber data: Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2024

Sasaran tersebut dicapai melalui Program-program sebagai berikut:

Tabel 101. Program dan Anggaran Sasaran 16 Tahun 2024

No	Program	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran
1	Program Penanggulangan Bencana	11,853,000,000.00	7,661,936,560.00	5,582,152,472.00	72.86%





No	Program	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran
2	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	25,500,288,971.00	23,838,144,771.00	22,757,238,414.00	95.47%
3	Program Penanganan Bencana	1,050,000,000.00	1,360,000,000.00	1,139,523,722.00	83.79%
Total		38,403,288,971.00	32,860,081,331.00	29,478,914,608.00	89.71%

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah Rp.29,478,914,608.00 dari anggaran sebesar Rp.32,860,081,331.00 atau 89,71%. Realisasi keuangan sebesar 89,71% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 86,08%, maka terjadi ketidak efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut, karena target sasaran tidak berhasil 100% tercapai, dan penggunaan sumber daya lebih tinggi dari capaian kinerja.

Faktor-faktor yang pendukung mempengaruhi pencapaian sasaran antara lain:

1. Meningkatkan kapasitas SDM dan kelembagaan penanggulangan bencana, melalui pelatihan dan pengembangan program.
2. Memperkuat sistem peringatan dini dan infrastruktur mitigasi, dengan membangun infrastruktur yang memadai dan meningkatkan akses informasi.
3. Mendorong partisipasi masyarakat dalam program mitigasi bencana, melalui edukasi, kampanye, dan pembentukan kelompok relawan.
4. Meningkatkan koordinasi lintas sektor, melalui forum komunikasi dan kolaborasi antar *stakeholder*.
5. Memaksimalkan alokasi anggaran dan sumber daya, dengan memprioritaskan program mitigasi yang efektif dan efisien.

Sedangkan faktor-faktor yang penghambat mempengaruhi pencapaian sasaran antara lain:





1. Sistem peringatan dini di beberapa wilayah masih belum optimal, sehingga informasi tentang potensi bencana tidak sampai ke masyarakat secara tepat waktu.
2. Infrastruktur mitigasi seperti shelter dan jalur evakuasi di beberapa daerah masih terbatas dan belum memadai untuk menampung jumlah penduduk yang terdampak bencana.
3. Kurangnya koordinasi antara instansi yang mempengaruhi efektivitas upaya penanggulangan bencana.
4. Kurangnya kapasitas sumber daya manusia yang mempengaruhi kemampuan daerah untuk melakukan upaya penanggulangan bencana serta Kurangnya tenaga terlatih di bidang penanggulangan bencana (Relawan), khususnya di tingkat desa dan kelurahan, menyebabkan kesulitan dalam implementasi program mitigasi.
5. Kurangnya keterlibatan sektor swasta dan masyarakat dalam program mitigasi, menyebabkan kurangnya sinergi dalam upaya penanggulangan bencana.

Berikut Rekapitulasi Pengukuran capaian kinerja Tahun 2024 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 102. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024 dibandingkan Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		KETERANGAN
					2023	2024	
1	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1	NILAI SAKIP	Nilai	67,86	65,92	Menurun 1,94
2	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	2	Indeks Persepsi Anti Korupsi	Nilai	8,66	8,96	Meningkat 0,298
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	3	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik	Nilai	8,41	8,74	Meningkat 0,33
4	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan, Ketahanan Sosial dan Pelestarian Kebudayaan	4	Indeks Pendidikan	Nilai	0,679	0,71	Meningkat 0,031
		5	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Nilai	53,23	57,42	Meningkat 4,19





NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		KETERANGAN
					2023	2024	
5	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	6	Indeks Kesehatan	Nilai	0,812	0,81	Menurun 0,002
6	Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan	7	Indeks Pembangunan Gender	Nilai	81,08	79,600	Menurun 1,48
7	Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat dan kualitas hidup masyarakat	8	Indeks Gini	Nilai	0,284	0,307	Menurun 0,023
		9	Indeks Desa Membangun	Nilai	0,776	0,7969	Meningkat 0,0209
8	Menurunnya pengangguran di masyarakat	10	Tingkat Pengangguran Terbuka	Nilai	4,05	4,11	Menurun 0,06
		11	PDRB Per Kapita	Nilai	270,72	240,87	Menurun 29,85
9	Meningkatnya pengelolaan pertanian berbasis potensi unggulan daerah	12	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Nilai	2,91	2,94	Menurun 0,03
10	Meningkatnya Daya Saing Pariwisata Daerah	13	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata	Persen	6,60	7,85	Meningkat 1,25
11	Berkembangnya Ekosistem Ekonomi Kreatif	14	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	Persen	6,80	7,7	Meningkat 0,9
12	Meningkatnya daya saing investasi daerah	15	Tingkat Pertumbuhan Investasi	Persen	51,38	10,85	Menurun 40,53
13	Meningkatnya kualitas permukiman masyarakat dan ketersediaan air bersih	16	Cakupan Layanan Air Bersih	Persen	82,18	80,20	Menurun 1,98
		17	Presentase Rumah Layak Huni	Persen	93,49	98,64	Meningkat 5,15
14	Meningkatnya aksesibilitas dan konektivitas wilayah	18	Indeks Aksesibilitas Wilayah	Nilai	77,19	76,045	Menurun 1,145
15	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	19	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	72,41	73,59	Meningkat 1,18
16	Meningkatnya ketahanan bencana daerah	20	Indeks Risiko Bencana	Nilai	114,3	118,80	Menurun 4,5

Dari data pada tabel diatas secara garis besar capaian kinerja 2024 menunjukkan angka penurunan capaian kinerja jika dibandingkan dengan tahun 2023, terdapat 11 (sebelas) indikator sasaran yang menunjukkan





angka penurunan, dan ada 9 (sembilan) indikator yang capaian kinerjanya meningkat.

2.3.3. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) Yang Telah Dicapai

Analisis efisiensi penggunaan anggaran dapat disampaikan informasi sebagai berikut:

a) Perbandingan persentase rata-rata capaian kinerja sasaran dengan persentase realisasi atau penyerapan anggaran

Analisis efisiensi penggunaan anggaran melalui perbandingan antara persentase rata - rata capaian kinerja sasaran dengan persentase penyerapan anggaran, yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja sasaran mencapai 100% atau lebih dan persentase penyerapan anggaran kurang dari persentase rata-rata capaian kinerja sasaran.
2. Tidak efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja sasaran kurang dari 100%, dan persentase penyerapan anggaran lebih besar dari persentase rata-rata capaian kinerja sasaran.

Hasil analisis persentase rata-rata capaian kinerja sasaran dan persentase penyerapan anggaran, disajikan sebagai berikut:

Tabel 103. Analisis Efisiensi Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Rata-Rata Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran	Keterangan
1	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	90,30	5.303.578.355.938,00	4.737.575.417.024,60	89,33%	Tidak Efisien
2	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	132,71	63.171.353.798,00	47.216.942.977,00	74,74%	Efisien
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	97,65	295.041.297.363,00	281.389.736.669,00	95,37%	Tidak Efisien
4	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan, Ketahanan Sosial	107,01	1.679.183.703.881,00	1.061.077.595.543,00	63,19%	Efisien





No	Sasaran Strategis	Rata-Rata Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran	Keterangan
	dan Pelestarian Kebudayaan					
5	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	99,14	1.041.301.800.757,00	931.993.571.263,42	89,50%	Tidak Efisien
6	Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan	100,63	13.525.452.884,00	12.172.949.722,00	90,00%	Efisien
7	Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat dan kualitas hidup masyarakat	98,66	147.192.797.373,00	142.255.534.482,17	96,65%	Tidak Efisien
8	Menurunnya pengangguran di masyarakat	114,24	51.084.620.700,00	43.479.045.215,00	85,11%	Efisien
9	Meningkatnya pengelolaan pertanian berbasis potensi unggulan daerah	44,55	801.212.395.922,00	722.701.324.939,00	90,20%	Tidak Efisien
10	Meningkatnya Daya Saing Pariwisata Daerah	229,53	111.361.029.798,00	85.200.163.003,00	76,51%	Efisien
11	Berkembangnya Ekosistem Ekonomi Kreatif	108,60	7.085.471.000,00	6.084.644.151,00	85,87%	Efisien
12	Meningkatnya daya saing investasi daerah	620,00	6.898.489.636,00	4.731.212.367,00	68,58%	Efisien
13	Meningkatnya kualitas permukiman masyarakat dan ketersediaan air bersih	97,77	1.665.551.943.167,00	1.426.928.256.161,00	85,67%	Tidak Efisien
14	Meningkatnya aksesibilitas dan konektivitas wilayah	88,24	185.068.576.960,00	157.082.623.272,00	84,88%	Tidak Efisien
15	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	99,70	97.025.053.752,00	89.466.876.435,00	92,21%	Tidak Efisien
16	Meningkatnya ketahanan bencana daerah	86,08	32.860.081.331,00	29.478.914.608,00	89,71%	Tidak Efisien

Berdasarkan analisis tingkat capaian sasaran dibandingkan penyerapan anggaran, dari 16 sasaran menunjukkan 7 (tujuh) efisien karena sasaran dapat dicapai sebesar 100% atau lebih dan persentase penyerapan anggaran kurang dari persentase rata-rata capaian kinerja sasaran, terdapat 9 (sembilan) sasaran tidak efisien, karena kinerja tidak mencapai 100%. Dari 9 (sembilan) sasaran yang tidak efisien, ada sebanyak 7 (tujuh)





sasaran yang tidak mencapai target namun penyerapan anggaran lebih rendah dari capaian kinerja, dan terdapat 2 (dua) sasaran yang penyerapan anggaran lebih besar dari capaian kinerja.

b) Perbandingan anggaran dan realisasi pengadaan barang dan jasa

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang melalui Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 sebanyak 29.489 paket dengan Total Pagu Anggaran Rp.8.764.035.792.978 dengan rincian 1.801 paket dengan pagu Rp.4.299.305.188.015, dengan metode pengadaan melalui Tender/ Seleksi sebanyak 16.741 paket melalui metode pengadaan Penunjukan Langsung dengan pagu anggaran Rp.1.086.299.279.468, sedangkan pengadaan melalui Kontes sebanyak 1 paket dengan pagu anggaran Rp. 1.344.700.714, dan sebanyak 1.136 paket termasuk dalam paket pekerjaan yang dikecualikan, dengan pagu anggaran Rp.147.553.630.776, dan pengadaan melalui *e-Purchasing* sebanyak 9.810 paket pekerjaan dengan anggaran sebesar Rp. 3.229.532.994.005. Dari total pagu anggaran dalam proses pengadaan sebesar Rp.8.764.035.792.978, dan total setelah ditetapkan HPS turun menjadi sebesar Rp.7.875.210.062.540,00 sehingga terdapat efisiensi anggaran dalam pengadaan barang/jasa sebesar Rp.362.917.321.461 atau sebesar 4,41% dari total HPS. Sedangkan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) mencapai Rp. 3.927.979.48.630, dengan rincian Rp.3.116.795.773.376 dari Paket Tender dan Rp. 811.183.375.254 dari paket pengadaan NonTender.

Tabel 104. Anggaran dan Realisasi Anggaran Pengadaan Barang/Jasa

No.	Kriteria	Pagu	HPS	Realisasi	Selisih	Efisiensi	PDN/ TKDN
1.	Tender	4.225.628.098.539	4.163.889.703.700	3.116.795.773.376	61.738.394.839	1%	3.116.795.773.376
2.	Nontender	958.405.155.285	931.589.279.128	811.183.375.254	26.815.876.157	3%	811.183.375.254
3.	Dikecualikan	8.485.541.100	2.844.142.546	2.844.142.546	5.641.398.554	66%	
4.	E-Purchasing	3.045.608.589.078	2.776.886.937.166	2.776.886.937.166	268.721.651.912	9%	

Sumber Data: Bagian Pengadaan Barang Jasa Sekretariat Daerah Tahun 2024

Dari keseluruhan penjabaran diatas dapat disimpulkan hasil pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara atas Perjanjian Kinerja





(PK) Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 yang terdiri dari 16 sasaran, adalah sebagai berikut:

Tabel 105. Rekapitulasi Capaian Kinerja Sasaran Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET 2024	CAPAIAN 2024	% CAPAIAN
1	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1	Nilai SAKIP	Nilai	73,00	65,92	90,30
Rata-rata Capaian							90,30
2	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	2	Indeks Persepsi Anti Korupsi	Nilai	6,75	8,96	132,71
Rata-rata Capaian							132,71
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	3	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik	Nilai	8,95	8,74	97,65
Rata-rata Capaian							97,65
4	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan, Ketahanan Sosial dan Pelestarian Kebudayaan	4	Indeks Pendidikan	Nilai	0,70	0,71	101,43
		5	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Nilai	51,00	57,42	112,59
Rata-rata Capaian							107,01
5	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	6	Indeks Kesehatan	Nilai	0,817	0,81	99,14
Rata-rata Capaian							99,14
6	Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan	7	Indeks Pembangunan Gender	Nilai	79,10	79,600	100,63
Rata-rata Capaian							100,63
7	Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat dan kualitas hidup masyarakat	8	Indeks Gini	Nilai	0,28	0,307	90,36
		9	Indeks Desa Membangun	Nilai	0,745	0,7969	106,97
Rata-rata Capaian							98,66
8	Menurunnya pengangguran di masyarakat	10	Tingkat Pengangguran Terbuka	Nilai	4,40	4,11	106,59
		11	PDRB Per Kapita	Nilai	197,62	240,87	121,89
Rata-rata Capaian							114,24
9	Meningkatnya pengelolaan pertanian berbasis potensi unggulan daerah	12	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Nilai	6,60	2,94	44,55
Rata-rata Capaian							44,55
10	Meningkatnya Daya Saing Pariwisata Daerah	13	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata	Persen	3,42	7,85	229,53
Rata-rata Capaian							229,53



NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET 2024	CAPAIAN 2024	% CAPAIAN
11	Berkembangnya Ekosistem Ekonomi Kreatif	14	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	Persen	7,09	7,7	108,60
Rata-rata Capaian							108,60
12	Meningkatnya daya saing investasi daerah	15	Tingkat Pertumbuhan Investasi	Persen	1,75	10,85	620,00
Rata-rata Capaian							620,00
13	Meningkatnya kualitas permukiman masyarakat dan ketersediaan air bersih	16	Cakupan Layanan Air Bersih	Persen	92,16	80,20	87,02
		17	Presentase Rumah Layak Huni	Persen	90,89	98,64	108,53
Rata-rata Capaian							97,77
14	Meningkatnya aksesibilitas dan konektivitas wilayah	18	Indeks Aksesibilitas Wilayah	Nilai	86,18	76,045	88,24
Rata-rata Capaian							88,24
15	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	19	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	73,81	73,59	99,70
Rata-rata Capaian							99,70
16	Meningkatnya ketahanan bencana daerah	20	Indeks Risiko Bencana	Nilai	104,28	118,80	86,08
Rata-rata Capaian							86,08

Berdasarkan tabel tersebut di atas, maka kinerja capaian Sasaran dapat dikategorikan sebagai berikut:

- Capaian kinerja ≥ 95 % kategori “sangat berhasil” sebanyak 12 sasaran, atau 75%;
- Capaian kinerja 80 s/d <95% kategori “berhasil” sebanyak 3 sasaran, atau 18,75%;
- Capaian kinerja 50 s/d <80 kategori “cukup berhasil” sebanyak 0 sasaran, atau 0%.
- Capaian kinerja 0 s/d < 50% kategori “kurang berhasil” sebanyak 1 sasaran, atau 6,25%.

Jika membandingkan antara capaian Tahun 2024 dengan Target Akhir RPJMD 2021-2026, dapat dilihat pada tabel diatas, dan Tahun 2024 adalah tahun ke-4 dari RPJMD Pemkab. Kutai Kartanegara 2021-2026, sehingga dapat dilakukan pengukuran terhadap capaian Tujuan Pemerintah Daerah, adapun hasil capaian tujuan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.





Tabel 106. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 dibanding dengan Target Akhir RPJMD 2021-2026

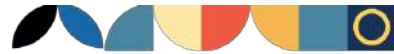
NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	CAPAIAN 2021	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023	CAPAIAN 2024	TARGET 2025	TARGET 2026	% CAPAIAN 2024 DIBANDING TARGET AKHIR	SELISIH CAPAIAN	SELISIH %	KETERANGAN
1	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1	NILAI SAKIP	Nilai	66,35	67,4	67,86	65,92	77	80,01	82,39	-14,09	-19,99	
2	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	2	Indeks Persepsi Anti Korupsi	Nilai	8,166	8,38	8,66	8,96	6,8	7	127,97	1,96	23,71	Capaian 2024 telah melebihi target akhir RPJMD
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	3	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik	Nilai	8,5	9,81	8,41	8,74	9	9,05	96,57	-0,31	-3,43	
4	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan, Ketahanan Sosial dan Pelestarian Kebudayaan	4	Indeks Pendidikan	Nilai	0,685	0,687	0,679	0,71	0,7	0,71	100,00	0,00	0,00	Capaian 2024 telah melebihi target akhir RPJMD
		5	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Nilai	n.a	47,42	53,23	57,42	51,5	53	108,34	4,42	8,34	Capaian 2024 telah melebihi target akhir RPJMD
5	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	6	Indeks Kesehatan	Nilai	0,81	0,81	0,812	0,81	0,82	0,82	98,78	-0,01	-1,22	
6	Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan	7	Indeks Pembangunan Gender	Nilai	79,12	79,8	79,8	79,600	79,15	79,2	100,51	0,40	0,51	Capaian 2024 telah melebihi target akhir RPJMD





NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	CAPAIAN 2021	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023	CAPAIAN 2024	TARGET 2025	TARGET 2026	% CAPAIAN 2024 DIBANDING TARGET AKHIR	SELISIH CAPAIAN	SELISIH %	KETERANGAN
7	Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat dan kualitas hidup masyarakat	8	Indeks Gini	Nilai	0,283	0,269	0,284	0,307	0,27	0,27	86,30	-0,04	-13,70	
		9	Indeks Desa Membangun	Nilai	0,713	0,747	0,776	0,7969	0,77	0,79	100,87	0,01	0,87	Capaian 2024 telah melebihi target akhir RPJMD
8	Menurunnya pengangguran di masyarakat	10	Tingkat Pengangguran Terbuka	Nilai	5,66	4,14	4,05	4,11	4,25	4,1	101,23	-0,01	1,23	Capaian 2024 telah melebihi target akhir RPJMD
		11	PDRB Per Kapita	Nilai	241,7	254,5	270,72	240,87	202,16	204,69	117,68	36,18	17,68	Capaian 2024 telah melebihi target akhir RPJMD
9	Meningkatnya pengelolaan pertanian berbasis potensi unggulan daerah	12	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Nilai	1,02	1,91	2,91	2,94	7,05	7,5	39,20	-4,56	-60,80	
10	Meningkatnya Daya Saing Pariwisata Daerah	13	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata	Persen	2,72	3,74	3,74	7,85	4	4,23	185,58	3,62	85,58	Capaian 2024 telah melebihi target akhir RPJMD
11	Berkembangnya Ekosistem Ekonomi Kreatif	14	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	Persen	6,23	6,96	6,96	7,70	7,48	7,56	101,85	0,14	1,85	Capaian 2024 telah melebihi target akhir RPJMD
12	Meningkatnya daya saing investasi daerah	15	Tingkat Pertumbuhan Investasi	Persen	36,22	90,63	51,38	10,85	30,75	30,9	35,11	-20,05	-64,89	Capaian 2024 telah melebihi target akhir RPJMD





NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	CAPAIAN 2021	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023	CAPAIAN 2024	TARGET 2025	TARGET 2026	% CAPAIAN 2024 DIBANDING TARGET AKHIR	SELISIH CAPAIAN	SELISIH %	KETERANGAN
13	Meningkatnya kualitas permukiman masyarakat dan ketersediaan air bersih	16	Cakupan Layanan Air Bersih	Persen	70,85	76,67	82,18	80,20	93,58	95	84,42	-14,80	-15,58	
		17	Presentase Rumah Layak Huni	Persen	92,76	93,39	93,49	98,64	91,16	91,44	107,87	7,20	7,87	Capaian 2024 telah melebihi target akhir RPJMD
14	Meningkatnya aksesibilitas dan konektivitas wilayah	18	Indeks Aksesibilitas Wilayah	Nilai	n.a	75,65	77,19	76,045	87,18	88,18	86,24	-12,14	-13,76	
15	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	19	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	71,76	71,77	72,41	73,59	74,15	74,51	98,77	-0,92	-1,23	
16	Meningkatnya ketahanan bencana daerah	20	Indeks Risiko Bencana	Nilai	119,16	120,96	114,3	118,80	102,14	100	81,20	-18,80	-18,80	





Tabel 107. Capaian Tujuan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 RPJMD 2021-2026

NO	MISI / TUJUAN		INDIKATOR KINERJA	Satuan	Capaian			Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian 2024
					2021	2022	2023			
Misi 1: Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani										
1	Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	1	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	60,95	62,74	60,12	B (64,00)	71,33	111,45
Misi 2 : Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul dan Berbudaya										
2	Meningkatkan kualitas pembangunan manusia yang berdaya saing	2	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	74,06	74,67	75,3	76,53	76,57	100,05
3	Meningkatkan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat	3	Tingkat Kebahagiaan	Nilai	NA	78,83	73,02	73,50	79,60	108,30
		4	Tingkat Kemiskinan	Persen	7,35	7,96	7,61	7,53	7,28	103,32
Misi 3: Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif										
4	Meningkatkan Perekonomian Daerah Berbasis Pada Sektor Terbarukan	5	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Non Migas dan Batu Bara	Persen	2,94	5,35	7,69	5,81	7,88	135,63
Misi 4: Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas antar Wilayah										
5	Meningkatkan Pemerataan Infrastruktur dan Penataan Wilayah	6	Indeks Kesulitan Geografis	Nilai	37,8	35,8	16,183	33,80	16,183	152,12
		7	Persentase penurunan kawasan kumuh / Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh	Persen	48.00 (50.44 ha)	51,73 (86,97 ha)	45,87 (7,11 Ha) Data Revisi : 0,0046	0,0056	0,0046	82,14
Misi 5: Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan										
6	Meningkatkan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	8	Persentase penurunan Emisi GRK	Persen	5,79	9,16	6,01	5,00	6,16	123,20





BAB III

CAPAIAN KINERJA

PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

3.1. Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan disebutkan bahwa Tugas Pembantuan merupakan penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi. Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Pada Tahun 2024 Kabupaten Kutai Kartanegara **tidak mendapatkan pelaksanaan tugas pembantuan** baik itu dari Pemerintah Pusat maupun dari Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur.





BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1. Urusan Pendidikan

4.1.1. Jenis Pelayanan Dasar

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, bahwa SPM Bidang Pendidikan meliputi:

e. Pendidikan Anak Usia Dini

Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada Pendidikan Usia Dini merupakan peserta didik yang berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD.

f. Pendidikan Dasar

Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada Pendidikan Dasar merupakan peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD/MI/SMP/MTs).

g. Pendidikan Kesetaraan

Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada Pendidikan Kesetaraan merupakan peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan/atau menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan.

4.1.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, secara rinci penetapan target Pencapaian SPM pada Penerima Layanan





dan Mutu Layanan dengan Anggaran Penunjang Capaian SPM pada tabel berikut.

Tabel 108. Target Pencapaian SPM Urusan Pendidikan

No	Jenis Pelayanan	Mutu Layanan	Target	Anggaran
1	Pendidikan PAUD		100%	97.172.671.919
	Jumlah peserta didik yang berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD		20.231	
		Angka partisipasi sekolah	62,79	
		Angka partisipasi murni	69,04	
		Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	48,36	
		Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma empat (D-IV)	72,79	
		Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	0,3	
		Kecukupan formasi guru ASN	46,09	
		Indeks distribusi guru	0,27	
		Proporsi PTK bersertifikat	n/a	
		Proporsi PTK penggerak	0,33	
2	Pendidikan Dasar		100%	1.203.543.181.012
	Jumlah peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD/MI/SMP/MTs)		129.681	
		1. (SD) Angka partisipasi kasar	104,44	
		2. (SD) Angka partisipasi sekolah	99,95	
		3. (SD) Kemampuan literasi	53,45	
		4. (SD) Kemampuan numerasi	50,32	
		5. (SD) Perbedaan skor literasi	5,34	
		6. (SD) Perbedaan skor numerasi	8,53	
		7. (SD) Indeks iklim keamanan	0,47	
		8. (SD) Indeks iklim kebinekaan	70,79	
		9. (SD) Indeks iklim inklusivitas	53,59	





No	Jenis Pelayanan	Mutu Layanan	Target	Anggaran
		10. (SD) Kecukupan formasi guru ASN	46,09	
		11. (SD) Indeks distribusi guru	0,42	
		12. (SD) Proporsi PTK bersertifikat	36,04	
		13. (SD) Proporsi PTK penggerak	0,06	
		14. (SMP) Angka partisipasi kasar	101,66	
		15. (SMP) Angka partisipasi sekolah	99,98	
		16. (SMP) Kemampuan literasi	70,07	
		17. (SMP) Kemampuan numerasi	72,79	
		18. (SMP) Perbedaan skor literasi	3,12	
		19. (SMP) Perbedaan skor numerasi	0,69	
		20. (SMP) Indeks iklim keamanan	67,17	
		21. (SMP) Indeks iklim kebhinekaan	66,56	
		22. (SMP) Indeks iklim inklusivitas	55,38	
		23. (SMP) Kecukupan formasi guru ASN	33	
		24. (SMP) Indeks distribusi guru	0,32	
		25. (SMP) Proporsi PTK bersertifikat	n/a	
		26. (SMP) Proporsi PTK penggerak	n/a	
3	Pendidikan Kesetaraan		100%	119.600.388.280
	Jumlah peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan/atau menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan		8.303	
		1. Angka partisipasi kasar	91,29	
		2. Angka partisipasi sekolah	37.753,00	
		3. Kemampuan literasi	18.806,00	
		4. Kemampuan numerasi	168,06	
		5. Perbedaan Skor Literasi	3.771,00	
		6. Perbedaan Skor Numerasi	70,79	





No	Jenis Pelayanan	Mutu Layanan	Target	Anggaran
		7. Indeks iklim keamanan	69,03	
		8. Indeks iklim kebinekaan	25,23	
		9. Indeks iklim inklusivitas	n/a	
		10. Kecukupan formasi guru ASN	n/a	
		11. Indeks distribusi guru	n/a	
		12. Proporsi PTK bersertifikat	n/a	
		13. Proporsi PTK penggerak	n/a	

4.1.3. Realisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Perhitungan Pencapaian SPM dilakukan dengan menggunakan Indeks Pencapaian SPM. Indeks Pencapaian SPM meliputi Capaian Penerima Pelayanan Dasar dengan bobot 80% dan Capaian Mutu Pelayanan Dasar dengan bobot 20%.

Indeks pencapaian SPM (IP SPM) adalah nilai capaian SPM yang diperoleh melalui penghitungan rata-rata persentase indeks pencapaian mutu minimal layanan dasar dikalikan bobot mutu dengan persentase indeks penerima layanan dasar dikalikan dengan bobot penerima.

Tabel 109. Indeks Pencapaian SPM Urusan Pendidikan

No	Jenis Pelayanan	Capaian Penerima Pelayanan Dasar	Capaian Mutu Pelayanan Dasar	IP SPM
1	Pendidikan Anak Usia Dini	100%	99,37%	99,87%
2	Pendidikan Dasar	100%	100%	100%
3	Pendidikan Kesetaraan	100%	100%	100%
Indeks Pencapaian SPM Urusan Pendidikan				99,96% Tuntas Utama

Berdasarkan 3 jenis pelayanan SPM pada urusan pendidikan Tahun 2024 yang telah dilaksanakan, Indeks Pencapaian SPM Urusan Pendidikan yaitu 99,96% dengan kategori Tuntas Utama. Adapun penjabaran Indeks Pencapaian SPM Urusan Pendidikan Tahun 2024 dijelaskan sebagai berikut:





a. Pendidikan Anak Usia Dini

Capaian Pelayanan Dasar pada Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2024 sebesar 100% dari target 100%, dengan Jumlah sasaran yang harus dilayani sebanyak 20.231 jiwa dan 20.649 peserta didik yang berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD.

Tabel 110. Capaian Penerima Layanan SPM Pendidikan Anak Usia Dini

No	Jenis Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Persentase	IP SPM (80%)
1	Pendidikan Anak Usia Dini	20.231	20.649	100%	80%

Capaian Mutu Pelayanan Dasar pada Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2024 sebesar 99,37% dari target 100%. Terdapat 4 Mutu Pelayanan Dasar telah melampaui target dari 100% dan masih 2 jenis Mutu Pelayanan Dasar yang belum mencapai 100%.

Tabel 111. Capaian Mutu Layanan SPM Pendidikan Anak Usia Dini

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Persentase	IP SPM (20%)
1	Angka partisipasi sekolah	62,79	60,51	96,37%	
2	Angka partisipasi murni	59,04	86,38	100,00%	
3	Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	48,36	47,46	98,14%	
4	Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma empat (D-IV)	72,79	73,06	100,00%	
5	Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	0,30	0,37	100,00%	
6	Kecukupan formasi guru ASN	46,09	46,09	100,00%	
7	Indeks distribusi guru	0,27	0,27	100,00%	
8	Proporsi PTK bersertifikat	Tutup Mutu	Tutup Mutu	100,00%	
9	Proporsi PTK penggerak	0,33	0,68	100,00%	
Rata-Rata				99,37%	19,87%





b. Pendidikan Dasar

Capaian Pelayanan Dasar pada Pendidikan Dasar Tahun 2024 sebesar 100% dari target 100%, dengan Jumlah sasaran yang harus dilayani sebanyak 129.681 jiwa dan 129.681 peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD/MI/SMP/MTs).

Tabel 112. Capaian Penerima Layanan SPM Pendidikan Dasar

No	Jenis Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Persentase	IP SPM (80%)
1	Pendidikan Dasar	129.681	129.681	100%	80%

Capaian Mutu Pelayanan Dasar pada Pendidikan Dasar Tahun 2024 sebesar 100% dari target 100%. 26 Mutu Pelayanan Dasar telah mencapai target dari 100%.

Tabel 113. Capaian Mutu Layanan SPM Pendidikan Dasar

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Persentase	IP SPM (20%)
1	(SD) Angka partisipasi kasar	104,44	105,06	100,00%	
2	(SD) Angka partisipasi sekolah	99,95	99,78	99,83%	
3	(SD) Kemampuan literasi	53,45	57,29	100,00%	
4	(SD) Kemampuan numerasi	50,32	58,85	100,00%	
5	(SD) Perbedaan skor literasi	5,34	5,34	100,00%	
6	(SD) Perbedaan skor numerasi	8,53	8,53	100,00%	
7	(SD) Indeks iklim keamanan	0,47	0,47	100,00%	
8	(SD) Indeks iklim kebhinekaan	70,79	70,79	100,00%	
9	(SD) Indeks iklim inklusivitas	53,59	53,59	100,00%	
10	(SD) Kecukupan formasi guru ASN	46,09	46,09	100,00%	
11	(SD) Indeks distribusi guru	0,42	0,42	100,00%	
12	(SD) Proporsi PTK bersertifikat	36,04	36,04	100,00%	
13	(SD) Proporsi PTK penggerak	0,06	0,06	100,00%	





No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Persentase	IP SPM (20%)
14	(SMP) Angka partisipasi kasar	101,66	104,74	100,00%	
15	(SMP) Angka partisipasi sekolah	99,98	99,98	100,00%	
16	(SMP) Kemampuan literasi	70,07	70,07	100,00%	
17	(SMP) Kemampuan numerasi	72,79	72,79	100,00%	
18	(SMP) Perbedaan skor literasi	3,12	3,12	100,00%	
19	(SMP) Perbedaan skor numerasi	0,69	0,88	100,00%	
20	(SMP) Indeks iklim keamanan	67,17	67,71	100,00%	
21	(SMP) Indeks iklim kebhinekaan	66,56	73,12	100,00%	
22	(SMP) Indeks iklim inklusivitas	55,38	56,46	100,00%	
23	(SMP) Kecukupan formasi guru ASN	33	48,77	100,00%	
24	(SMP) Indeks distribusi guru	0,32	0,32	100,00%	
25	(SMP) Proporsi PTK bersertifikat	Tutup Mutu	Tutup Mutu	100,00%	
26	(SMP) Proporsi PTK penggerak	Tutup Mutu	Tutup Mutu	100,00%	
Rata-Rata				100%	20%

c. Pendidikan Kesetaraan

Capaian Pelayanan Dasar pada Pendidikan Kesetaraan Tahun 2024 sebesar 100% dari target 100%, dengan Jumlah sasaran yang harus dilayani sebanyak 8.303 jiwa dan 8.625 peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan/atau menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan.

Tabel 114. Capaian Penerima Layanan SPM Pendidikan Kesetaraan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Persentase	IP SPM (80%)
1	Pendidikan Kesetaraan	8.303	8.625	100%	80%

Ket: Capaian melebihi 100% dihitung maks 100%





Capaian Mutu Pelayanan Dasar pada Pendidikan Kesetaraan Tahun 2024 sebesar 100% dari target 100%. 13 Mutu Pelayanan Dasar telah mencapai target 100%.

Tabel 115. Capaian Mutu Layanan SPM Pendidikan Kesetaraan

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Persentase	IP SPM (20%)
1	Angka partisipasi kasar	91,29	91,29	100,00%	
2	Angka partisipasi sekolah	37.753,00	37.753,00	100,00%	
3	Kemampuan literasi	18.806,00	16.806,00	100,00%	
4	Kemampuan numerasi	168,06	168,06	100,00%	
5	Perbedaan Skor Literasi	3.771,00	3.771,00	100,00%	
6	Perbedaan Skor Numerasi	70,79	70,79	100,00%	
7	Indeks iklim keamanan	69,03	69,03	100,00%	
8	Indeks iklim kebinekaan	25,23	25,23	100,00%	
9	Indeks iklim inklusivitas	Tutut Mutu	Tutut Mutu	100,00%	
10	Kecukupan formasi guru ASN	Tutut Mutu	Tutut Mutu	100,00%	
11	Indeks distribusi guru	Tutut Mutu	Tutut Mutu	100,00%	
12	Proporsi PTK bersertifikat	Tutut Mutu	Tutut Mutu	100,00%	
13	Proporsi PTK penggerak	Tutut Mutu	Tutut Mutu	100,00%	
Rata-Rata				98,82%	100%

Ket: Capaian melebihi 100% dihitung maks 100%

4.1.4. Alokasi Anggaran

Dalam upaya penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Pendidikan, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah mengalokasikan sebesar Rp. 1.420.316.241.211,00 melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara pada APBD Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 116. Alokasi Anggaran Pencapaian SPM Urusan Pendidikan

Jenis Layanan	Kegiatan/Sub Kegiatan	APBD	APBD-P	Realisasi	%
Pendidikan Anak Usia Dini		110.227.324.848	97.172.671.919	49.751.748.401	51%
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	110.227.324.848	97.172.671.919	49.751.748.401	51%
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	9.390.549.427	8.034.512.427	5.929.432.000	74%
	Rehabilitasi sedang/Berat	2.704.777.050	2.704.777.050	2.524.561.800	93%





Jenis Layanan	Kegiatan/Sub Kegiatan	APBD	APBD-P	Realisasi	%
	Gedung/ruang Kelas/Ruang Guru PAUD				
	Pengadaan Mebel PAUD	15.916.189.286	8.080.675.222	7.525.416.000	93%
	Pengadaan alat praktik dan Peraga Siswa PAUD	1.335.400.000	3.510.400.000	1.094.450.800	31%
	Pemeliharaan Mebel Sekolah	156.821.100	0		
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1.605.000.000	1.605.000.000	1.424.155.200	89%
	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	5.117.567.673	4.599.889.673	3.832.396.800	83%
	Pembangunan Ruang Kelas Baru	16.066.870.312	11.407.642.547	7.809.330.400	68%
	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	550.000.000	0		
	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	3.950.000.000	4.280.000.000	2.968.499.937	69%
Pendidikan Dasar					
	Pengelolaan Pendidikan SD	735.625.745.663	820.368.690.999	496.608.087.986	61%
	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	7.116.612.620	5.886.818.620	5.413.245.500	92%
	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	5.040.000.000	5.040.000.000	4.668.155.500	93%
	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	6.736.605.370	6.520.055.370	5.699.199.400	87%
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	16.230.589.000	16.230.589.000	14.058.572.200	87%
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	2.173.634.407	2.173.634.407	1.857.545.200	85%
	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	660.554.012	660.554.012	532.628.600	81%
	Pengadaan Mebel Sekolah	150.021.770.945	158.041.406.263	115.734.303.400	73%
	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	30.150.000.000	77.528.737.795	33.035.283.300	43%
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1.200.000.000	1.650.000.000	1.535.628.564	98%





Jenis Layanan	Kegiatan/Sub Kegiatan	APBD	APBD-P	Realisasi	%
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	240.000.000	432.000.000	424.797.000	98%
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	10.069.000.000	9.877.000.000	9.474.477.000	96%
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	1.550.000.000	650.000.000	583.291.320	90%
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	173.206.913.004	165.872.399.170	37.184.100.000	22%
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	850.000.000	4.814.701.750	4.726.534.600	98%
	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	5.791.613.420	5.291.613.420	4.943.157.250	93%
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	527.500.000	980.815.000	922.313.200	94%
	Pembangunan Ruang Kelas Baru	46.424.125.279	37.611.443.138	25.402.757.802	68%
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.101.003.159	1.101.003.159	990.257.700	90%
	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	4.034.500.000	9.739.500.000	5.984.370.350	61%
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	183.521.513.478	159.845.577.926	96.287.217.100	60%
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	950.000.000	950.000.000	542.700.000	57%
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	88.029.810.969	149.470.841.969	126.607.553.000	85%
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	329.214.753.186	383.174.490.013	275.929.433.426	72%
	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	16.959.483.200	16.959.483.200	8.872.409.950	52%
	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	7.711.576.761	4.419.157.610	3.431.062.000	78%
	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	4.839.613.400	2.672.366.400	1.685.132.700	63%





Jenis Layanan	Kegiatan/Sub Kegiatan	APBD	APBD-P	Realisasi	%
	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	4.577.663.000	3.632.702.000	2.562.514.500	71%
	Pembangunan Laboratorium	18.650.662.100	10.649.150.100	6.999.577.050	66%
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	11.288.280.800	5.901.305.800	2.849.724.200	48%
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	9.650.102.200	7.694.429.200	4.835.725.100	63%
	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	776.421.800	0		
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	595.516.600	0		
	Pengadaan Mebel Sekolah	10.448.970.000	10.448.970.000	10.306.880.953	99%
	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	32.191.664.125	71.236.664.125	70.192.934.240	99%
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	960.000.000	960.000.000	957.815.300	100%
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	50.000.000.000	93.964.470.000	89.170.120.000	95%
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	3.000.000.000	0		
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	14.849.934.700	14.849.934.700	13.003.786.000	88%
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	650.000.000	650.000.000	583.291.320	90%
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	94.914.466.000	92.122.466.000	36.112.138.557	39%
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	1.800.000.000	0		
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	511.091.900	0		
	Pemeliharaan Mebel Sekolah	2.773.460.000	0		
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi	950.000.000	950.000.000	512.440.117	54%





Jenis Layanan	Kegiatan/Sub Kegiatan	APBD	APBD-P	Realisasi	%
	dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				
	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	7.275.000.000	20.207.860.278	11.005.491.889	54%
	Pembangunan Ruang Kelas Baru	32.993.395.800	25.008.079.800	12.103.281.800	48%
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	847.450.800	847.450.800	745.107.750	88%
Pendidikan Kesetaraan		116.274.262.680	119.600.288.280	73.859.732.592	62%
	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	116.274.262.680	119.600.288.280	73.859.732.592	62%
	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	9.701.334.511	9.065.694.511	7.406.060.600	82%
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	1.350.000.000	1.350.000.000	441.635.000	33%
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	13.186.537.000	19.243.107.000	18.437.191.800	96%
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal / Kesetaraan	300.000.000	300.000.000	49.807.377	17%
	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	11.080.960.000	11.339.340.000	2.192.180.000	19%
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	200.000.000	375.000.000	347.449.600	93%
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	750.000.000	750.000.000	501.982.665	67%
	Penataan Ruang/Sudut Baca	2.306.436.024	2.306.436.024	1.855.090.800	80%
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	2.616.591.280	0		
	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	0	2.616.591.280	2.097.415.000	80%
	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	48.350.431.000	48.350.431.000	25.006.173.150	52%
	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	18.250.000.000	15.721.815.600	8.534.635.600	54%





Jenis Layanan	Kegiatan/Sub Kegiatan	APBD	APBD-P	Realisasi	%
	Pembangunan Ruang Laboratorium	1.814.504.465	1.814.504.465	1.731.619.000	95%
	Pengadaan Mebel Sekolah	5.617.468.400	5.617.468.400	4.557.842.000	81%
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	750.000.000	750.000.000	700.650.000	93%
Alokasi Anggaran SPM Bidang Pendidikan		1.291.342.086.377	1.420.316.241.211,00	896.149.002.405	63%

4.1.5. Dukungan Personil

Dalam upaya pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan Pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara didukung dengan sumber daya manusia dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 117. Jumlah Personil Pendukung Pencapaian SPM Urusan Pendidikan

No	Jenis / Kualifikasi	Jumlah
1	Eselon	
	a. II.b / Kepala Dinas	1
	b. III.a / Sekretaris	1
	c. III.b / Administrator	5
	d. IV.a / Pengawas / Fungsional	10
2	Jabatan Fungsional	
	a. Guru PNS (TK, SD dan SMP)	5.139
	b. Guru PPPK (TK, SD dan SMP)	604
	c. Pengawas (TK, SD dan SMP)	60
	d. Kepala Sekolah	1.076
	e. Penilik	9
	f. Pamong Belajar	0
	g. Fungsional Umum (staf)	
	- Dinas Kabupaten	
	- Sekolah (TU/Penjaga)	1.270
	- SKB	11
3	Pangkat/Golongan Satuan Pendidikan	
	a. IV	1.684
	b. III	3.051
	c. II	454
	d. I	20
	e. IX	-





No	Jenis / Kualifikasi	Jumlah
4	Jenjang Pendudukan	
	a. S3	-
	b. S2	252
	c. S1/DIV	9.157
	d. D/III	88
	e. SMA sederajat	1.6363
	f. SMP Sederajat	55
	g. SD Sederajat	49

4.1.6. Permasalahan dan Solusi

Pengumpulan Data

- Pengumpulan data terhadap jumlah siswa yang akan bersekolah sulit didapatkan data *by name by address*

Perhitungan Kebutuhan

- Penghitungan kebutuhan terhadap jumlah siswa yang akan sekolah, tidak bisa dihitung secara maksimal, karena keterbatasan anggaran

Perencanaan dan Penganggaran

- Masih minimnya anggaran, karena sebagian besar anggaran yang didapatkan digunakan untuk SDM

Pelaksanaan

- Pelaksanaan yang digunakan tahun ini, masih menggunakan hasil capaian dari tahun lalu.

Permasalahan Lain-Lain

Sulitnya mendapatkan data yang akurat terhadap jumlah siswa yang belum sekolah

4.2. Urusan Kesehatan

4.2.1. Jenis Pelayanan Dasar

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu





Pelayanan Dasar Pada SPM Urusan Kesehatan, bahwa SPM Urusan Kesehatan meliputi:

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
4. Pelayanan Kesehatan Balita
5. Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar
6. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
7. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
8. Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi
9. Pelayanan Kesehatan pada Penderita Diabetes Melitus
10. Pelayanan Kesehatan pada Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat
11. Pelayanan Kesehatan pada Orang Terduga Tuberkulosis
12. Pelayanan Kesehatan pada Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemah Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV)

4.2.2. Target Pencapaian SPM

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, secara rinci penetapan target Pencapaian SPM pada Penerima Layanan dan Mutu Layanan dengan Anggaran Penunjang Capaian SPM pada tabel berikut.

Berdasarkan B-05/Dinkes/SDK-D.I.K/000.8.3.2/1/2024 tentang Sasaran Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan di Puskesmas se-Kabupaten Kutai Kartanegara, telah menetapkan target sasaran SPM Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 118. Target Pencapaian SPM Urusan Kesehatan

No	Jenis Pelayanan	Mutu Layanan	Target	Anggaran
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		100%	2.500.000.000
	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan		13.528	
		1. Vaksin Tetanus Difteri (Td)	10.822	





No	Jenis Pelayanan	Mutu Layanan	Target	Anggaran
		2. Tablet tambah darah (180 tablet x jumlah ibu hamil)	2.435.040	
		3. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	13.528	
		4. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	27.056	
		5. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	13.528	
		6. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin (proyeksi pengadaan 15% dari jumlah ibu hamil)	2.029	
		7. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Skrining triple eliminasi dengan tes cepat Hepatitis B dan Sifilis dan HIV	13.528	
		8. Kartu ibu/rekam medis ibu	13.528	
		9. Buku kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	13.528	
		10. Media KIE	132	
		11. Gel USG (untuk Puskesmas yang memiliki alat USG) (proyeksi pengadaan 1/15 dari jumlah ibu hamil).	902	
		12. Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi; (angka ideal : dengan rasio 1:2500 penduduk untuk dokter umum dan rasio 1:16000 untuk dokter spesialis kebidanan)"	367	
		13. Tenaga kesehatan : Perawat	896	
		14. Tenaga kesehatan : Bidan (angka ideal : dengan rasio 1:1000 penduduk)	793	
		15. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	286	
		16. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	111	
		17. Kunjungan 6 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K6) (Satu kali pada trimester pertama, Dua kali pada trimester kedua, Tiga kali pada trimester ketiga)	81.168	
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		100%	1.094.403.000
	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan Pelayanan kesehatan		12.913	
		1. Formulir partograf	12.913	
		2. Kartu ibu (rekam medis)	12.913	
		3. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) (Terintegrasi dengan	12.913	





No	Jenis Pelayanan	Mutu Layanan	Target	Anggaran
		ibu hamil, sesuai kebutuhan bila belum dapat pada masa kehamilan)		
		4. Media KIE	132	
		5. Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi (angka ideal : dengan rasio 1:2500 penduduk untuk dokter umum dan rasio 1:16000 untuk dokter spesialis kebidanan)	367	
		6. Tenaga kesehatan : Bidan (angka ideal : dengan rasio 1:1000 penduduk)	793	
		7. Tenaga kesehatan : Perawat (angka ideal : dengan rasio 1:885 penduduk)	896	
		8. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	286	
		9. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	111	
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		12.298	552.800.300
		1. Vaksin hepatitis B dosis tunggal (prefilled syringe)	12.298	
		2. Vitamin K1 Injeksi	12.298	
		3. Salep/Tetes Mata Antibiotik	12.298	
		4. Formulir Bayi Baru Lahir	12.298	
		5. Formulir Manajemen Terpadu Balita Muda (MTBM)	12.298	
		6. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	12.298	
		7. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	132	
		8. Tenaga medis : Dokter/Dokter Spesialis Anak	317	
		9. Tenaga kesehatan : Bidan	793	
		10. Tenaga kesehatan : Perawat	896	
		11. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	286	
		12. Tenaga kesehatan : Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	36	
		13. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	111	
		14. Kader Kesehatan	4.085	
4	Pelayanan Kesehatan Balita		61.719	471.256.000
		1. Kuisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau Instrumen Standart lain yang berlaku	61.719	





No	Jenis Pelayanan	Mutu Layanan	Target	Anggaran
		2. Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	61.719	
		3. Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)	61.719	
		4. Vitamin A Biru (sesuai standar 6-11 bulan)	9.076	
		5. Vitamin A Merah (sesuai standar 12-59 bulan)	53.399	
		6. Vaksin imunisasi dasar: BCG	4.277	
		7. Vaksin imunisasi dasar: Polio Tetes	8.525	
		8. Vaksin imunisasi dasar: IPV	6.378	
		9. Vaksin imunisasi dasar: DPT -HB -Hib	10.813	
		10. Vaksin imunisasi dasar: Campak Rubela	6.450	
		11. Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB -Hib	3.208	
		12. Vaksin imunisasi lanjutan : Campak Rubela	1.602	
		13. Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	267.127	
		14. Peralatan Anafilaktik	32	
		15. Formula Terapi Gizi Buruk	32	
		16. Tenaga medis : Dokter	317	
		17. Tenaga kesehatan : Bidan	793	
		18. Tenaga kesehatan : Perawat	896	
		19. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	111	
		20. Guru PAUD	-1	
		21. Kader Kesehatan	4.085	
5	Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar		140.724	410.000.000
		1. Form pencatatan/Buku raport kesehatanku (Sesuai jumlah peserta didik di sekolah/madrasah/pesantren)	140.724	
		2. Form pencatatan/Buku pemantauan kesehatan (Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar di luar satuan pendidikan dasar seperti di panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja)	140.724	
		3. Kuesioner Skrining Kesehatan (Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar)	140.724	
		4. Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Dalam Sekolah (Sesuai kebutuhan	140.724	





No	Jenis Pelayanan	Mutu Layanan	Target	Anggaran
		dengan mempertimbangkan jumlah anak usia pendidikan dasar per sekolah/madrasah/pesantren)		
		5. Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Luar Sekolah (Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja per Puskesmas)	140.724	
		6. Tablet Tambah Darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah (Jumlah remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah dikalikan 52 tablet dan mempertimbangkan ketersediaan stok opname yang ada di gudang farmasi kabupaten/kota)	7.317.648	
		7. Alat Pemeriksaan Hb (Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/ sederajat)	64	
		8. Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7 (Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/ sederajat)	15.599	
		9. Media promosi kesehatan (Media khusus remaja sehat)	132	
		10. Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) (sesuai standar kebutuhan bagi seluruh sasaran kelas 1 SD, kelas 2 SD dan kelas 5 SD dan anak dengan usia setara)	7.876	
		11. Tenaga medis : Dokter/Dokter gigi	317	
		12. Tenaga kesehatan : Bidan	793	
		13. Tenaga kesehatan : Perawat	896	
		14. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	111	
		15. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	286	
		16. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	36	
		17. Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu : Guru	-1	
		18. Tenaga non kesehatan terlatih atau Mempunyai	4.085	





No	Jenis Pelayanan	Mutu Layanan	Target	Anggaran
		Kualifikasi tertentu : Kader Kesehatan/dokter kecil/ peer conselor		
6	Pelayanan Kesehatan pada usia produktif		517.780	600.000.000
		1. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	132	
		2. Alat : Alat Ukur Lingkar Lengan Atas (LILA)	244	
		3. Alat : Tensimeter	244	
		4. Alat : Glukometer	244	
		5. Alat: Alat Pemeriksa Hb	32	
		6. Alat : Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol	55.000	
		7. Alat : KIT IVA Tes	120.389	
		8. Strip dan Reagen pemeriksaan Hb	32	
		9. Kit Ophthalmologi Komunitas	32	
		10. Kuesioner PUMA (Deteksi dini Penyakit Paru Obstrutif Kronis/PPOK)	1	
		11. Alat Pelayanan KB	128	
		a. Set Pemasangan dan Pencabutan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR)	64	
		b. Set Pemasangan dan Pencabutan Impla	64	
		c. Vasectomi Set	-1	
		12. Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	1	
		13. Vaksin Tetanus Differi (td)	4.501	
		14. Tenaga medis : Dokter	317	
		15. Tenaga kesehatan : Bidan	793	
		16. Tenaga kesehatan : Perawat	896	
		17. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	111	
		18. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	36	
		19. Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	4.085	
7	Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut		54.085	410.000.000
		1. Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas, dan tensimeter	32	





No	Jenis Pelayanan	Mutu Layanan	Target	Anggaran
		2. Glukometer (alat pemeriksaan gula darah)	64	
		3. Alat pemeriksaan kolesterol	64	
		4. Bahan medis Habis Pakai: strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alkohol	64	
		5. Instrumen skrining lansia sederhana (SKILAS), instrumen aktivitas kehidupan sehari-hari (AKS/Activity daily living (ADL Barthel)	54.085	
		6. Buku kesehatan lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya	54.085	
		7. Media KIE	132	
		8. Tenaga medis : Dokter	317	
		9. Tenaga kesehatan : Bidan	793	
		10. Tenaga kesehatan : Perawat	896	
		11. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	111	
		12. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	36	
		13. Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	4.085	
		1. Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas, dan tensimeter	32	
		2. Glukometer (alat pemeriksaan gula darah)	64	
		3. Alat pemeriksaan kolesterol	64	
		4. Bahan medis Habis Pakai: strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alkohol	64	
8	Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi		57.987	525.000.000
		1. Pedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	57.987	
		2. Obat Hipertensi		
		3. Tensimeter	132	
		4. Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK)	57.987	
		5. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) (peningkatan pengetahuan masyarakat)	192	





No	Jenis Pelayanan	Mutu Layanan	Target	Anggaran
		6. Tenaga medis : Dokter	1	
		7. Tenaga kesehatan : Bidan	132	
		8. Tenaga kesehatan : Perawat	317	
		9. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	793	
		10. Tenaga kesehatan : Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku	896	
		11. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	111	
		12. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	36	
9	Pelayanan Kesehatan penderita diabetes melitus		16.641	1.060.539.140
		1. Obat Diabetes Melitus	194.106	
		2. Fotometer atau Glukometer	64	
		3. BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) gula darah dalam pemantauan kadar gula dalam darah : reagen glukosa atau strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet	136.097	
		4. Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM (Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular), ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku), Simpus (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas)	3	
		5. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) (minimal 3 di setiap fasyankes terdiri dari: 1 (satu) Panduan Praktik Klinis (PPK) bagi dokter di FKTP; 1 (satu) media KIE tentang diabetes melitus; dan 1 (satu) media KIE tentang penyakit tidak menular)	132	
		6. Tenaga medis : Dokter	317	
		7. Tenaga kesehatan : Bidan	793	
		8. Tenaga kesehatan : Perawat	896	
		9. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	286	
		10. enaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	36	
		11. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	111	
		12. Tenaga kesehatan : Teknis Medis (ATLM)	281	
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		867	993.962.500
		1. Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ III)	32	





No	Jenis Pelayanan	Mutu Layanan	Target	Anggaran
		atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)		
		2. Penyediaan Psikofarmaka	32	
		3. Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/ atau penyediaan melalui aplikasi	1	
		4. Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan	1	
		5. Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	132	
		6. Tenaga kesehatan : Dokter	317	
		7. Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa (contoh: Psikolog klinis, perawat jiwa, perawat terlatih)	896	
		8. Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa.	32	
		9. Tenaga profesional lainnya	32	
11	Pelayanan Kesehatan Orang terduga tuberkulosis		23.722	1.751.565.800
		1. Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)	250	
		2. Reagen Zn TB	32	
		3. Masker bedah dan Masker N95	166.054	
		4. Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	142.332	
		5. Katrid tes cepat molekuler	23.722	
		6. Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	23.722	
		7. Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	32	
		8. Tuberkulin	2.372	
		9. Tenaga medis : Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis paru	317	
		10. Tenaga kesehatan : Perawat	896	
		11. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	286	
		12. Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat	36	





No	Jenis Pelayanan	Mutu Layanan	Target	Anggaran
		13. Tenaga kesehatan : Analisis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	281	
		14. Tenaga kesehatan : Radiografer	142	
		15. Kader Kesehatan	4.085	
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemah daya tahan tubuh manusia (HIV)		17.467	916.370.000
		1. Media KIE Berupa Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner	132	
		2. Tes Cepat HIV (RDT) Pertama	19.602	
		3. Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum S spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	104.802	
		4. Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK	17.467	
		5. Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	317	
		6. Tenaga kesehatan : Bidan	793	
		7. Tenaga kesehatan : Perawat	896	
		8. Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	281	
		9. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	36	
		10. Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu: pendamping dan penjangkauan	4.085	

4.2.3. Realisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Perhitungan Pencapaian SPM dilakukan dengan menggunakan Indeks Pencapaian SPM. Indeks Pencapaian SPM meliputi Capaian Penerima Pelayanan Dasar dengan bobot 80% dan Capaian Mutu Pelayanan Dasar dengan bobot 20%.





Indeks pencapaian SPM (IP SPM) adalah nilai capaian SPM yang diperoleh melalui penghitungan rata-rata persentase indeks pencapaian mutu minimal layanan dasar dikalikan bobot mutu dengan persentase indeks penerima layanan dasar dikalikan dengan bobot penerima.

Tabel 119. Indeks Pencapaian SPM Urusan Kesehatan

No	Jenis Pelayanan	Capaian Penerima Pelayanan Dasar	Capaian Mutu Pelayanan Dasar	IP SPM
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	88,64%	80,76%	87,06%
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	89.38%	70.21%	85.54%
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	90.82%	79.49%	88.55%
4	Pelayanan Kesehatan Balita	86.35%	83.72%	85.82%
5	Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar	98.62%	86.50%	96.20%
6	Pelayanan Kesehatan pada usia produktif	94.58%	90.56%	93.77%
7	Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	94.71%	86.63%	93.10%
8	Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi	100.00%	80.66%	96.13%
9	Pelayanan Kesehatan penderita diabetes melitus	100.00%	74.26%	94.85%
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	100.00%	88.92%	97.78%
11	Pelayanan Kesehatan Orang terduga tuberkulosis	100.00%	78.19%	95.64%
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemah daya tahan tubuh manusia (HIV)	100.00%	80.95%	96.19%
Indeks Pencapaian SPM Urusan Kesehatan				92,55% Tuntas Utama

Berdasarkan 12 jenis pelayanan SPM pada urusan kesehatan Tahun 2024 yang telah dilaksanakan, Indeks Pencapaian SPM Urusan Kesehatan yaitu 92,55% dengan kategori Tuntas Utama. Adapun penjabaran Indeks Pencapaian SPM Urusan Kesehatan Tahun 2024 dijelaskan sebagai berikut:





a. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Capaian Pelayanan Dasar pada Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Tahun 2024 sebesar 88,64% dari target 100%, dengan Jumlah sasaran yang harus dilayani sebanyak 13.528 Ibu Hamil dan 11.991 Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan.

Tabel 120. Capaian Penerima Layanan SPM Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

No	Jenis Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Persentase	IP SPM (80%)
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	13.528	11.991	88,64%	70,91%

Capaian Mutu Pelayanan Dasar pada Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Tahun 2024 sebesar 80,76% dari target 100%. 4 Mutu Pelayanan Dasar telah mencapai target dari 100% dan masih 13 jenis Mutu Pelayanan Dasar yang belum mencapai 100%.

Tabel 121. Capaian Mutu Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Persentase	IP SPM (20%)
1	Vaksin Tetanus Difteri (Td)	10.822	9.593	88,64%	
2	Tablet tambah darah (180 tablet x jumlah ibu hamil)	2.435.040	2.435.040	100,00%	
3	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	13.528	11.991	88,64%	
4	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	27.056	23.982	88,64%	
5	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	13.528	11.991	88,64%	
6	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin (proyeksi pengadaan 15% dari jumlah ibu hamil)	2.029	1.799	88,66%	
7	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Skrining triple eliminasi dengan tes cepat Hepatitis B dan Sifilis dan HIV	13.528	11.991	88,64%	
8	Kartu ibu/rekam medis ibu	13.528	11.991	88,64%	
9	Buku kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	13.528	11.991	88,64%	





No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Persentase	IP SPM (20%)
10	Media KIE	132	132	100,00%	
11	Gel USG (untuk Puskesmas yang memiliki alat USG) (proyeksi pengadaan 1/15 dari jumlah ibu hamil)	902	902	100,00%	
12	Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi; (angka ideal : dengan rasio 1:2500 penduduk untuk dokter umum dan rasio 1:16000 untuk dokter spesialis kebidanan)"	367	97	26,43%	
13	Tenaga kesehatan : Perawat	896	624	69,64%	
14	Tenaga kesehatan : Bidan (angka ideal : dengan rasio 1:1000 penduduk)	793	683	86,13%	
15	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	286	89	31,12%	
16	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	111	56	50,45%	
17	Kunjungan 6 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K6) (Satu kali pada trimester pertama, Dua kali pada trimester kedua, Tiga kali pada trimester ketiga)	81.168	81.168	100,00%	
Rata-Rata				93,52%	18,70%

b. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Capaian Pelayanan Dasar pada Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Tahun 2024 sebesar 85,54% dari target 100%, dengan Jumlah sasaran yang harus dilayani sebanyak 12.913 Ibu Bersalin dan 11.541 ibu bersalin yang mendapatkan Pelayanan kesehatan.

Tabel 122. Capaian Penerima Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

No	Jenis Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Persentase	IP SPM (80%)
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	12.913	11.541	89,38%	71,50%





Capaian Mutu Pelayanan Dasar pada Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Tahun 2024 sebesar 70,21% dari target 100%.

Tabel 123. Capaian Mutu Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Persentase	IP SPM (20%)
1	Formulir partograf	12.913	11.541	89,38%	
2	Kartu ibu (rekam medis)	12.913	11.541	89,38%	
3	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) (Terintegrasi dengan ibu hamil, sesuai kebutuhan bila belum dapat pada masa kehamilan)	12.913	11.541	89,38%	
4	Media KIE	132	132	100,00%	
5	Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi (angka ideal : dengan rasio 1:2500 penduduk untuk dokter umum dan rasio 1:16000 untuk dokter spesialis kebidanan)	367	97	26,43%	
6	Tenaga kesehatan : Bidan (angka ideal : dengan rasio 1:1000 penduduk)	793	683	86,13%	
7	Tenaga kesehatan : Perawat (angka ideal : dengan rasio 1:885 penduduk)	896	624	69,64%	
8	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	286	89	31,12%	
9	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	111	56	50,45%	
Rata-Rata				97,73%	19,55%

c. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Capaian Pelayanan Dasar pada Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Tahun 2024 sebesar 88,55% dari target 100%, dengan Jumlah sasaran yang harus dilayani sebanyak 12.298 Bayi Baru Lahir dan 11.169 bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan.





Tabel 124. Capaian Penerima Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

No	Jenis Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Persentase	IP SPM (80%)
1	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	12.674	11.803	93,13%	75,50%

Capaian Mutu Pelayanan Dasar pada Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Tahun 2023 sebesar 79,49% dari target 100%. 3 Mutu Pelayanan Dasar mencapai 100% sedangkan 11 Mutu Layanan belum mencapai 100%.

Tabel 125. Capaian Mutu Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Persentase	IP SPM (20%)
1	Vaksin hepatitis B dosis tunggal (prefilled syringe)	12.298	11.169	90,82%	
2	Vitamin K1 Injeksi	12.298	11.169	90,82%	
3	Salap/Tetes Mata Antibiotik	12.298	11.169	90,82%	
4	Formulir Bayi Baru Lahir	12.298	11.169	90,82%	
5	Formulir Manajemen Terpadu Balita Muda (MTBM)	12.298	11.169	90,82%	
6	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	12.298	11.169	90,82%	
7	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	132	132	100,00%	
8	Tenaga medis : Dokter/Dokter Spesialis Anak	317	97	30,60%	
9	Tenaga kesehatan : Bidan	793	683	86,13%	
10	Tenaga kesehatan : Perawat	896	624	69,64%	
11	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	286	89	31,12%	
12	Tenaga kesehatan : Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	36	74	100,00%	
13	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	111	56	50,45%	
14	Kader Kesehatan	4.085	4.085	100,00%	
Rata-Rata				79,49%	15,90%





d. Pelayanan Kesehatan Balita

Capaian Pelayanan Dasar pada Pelayanan Kesehatan Balita Tahun 2024 sebesar 85,82% dari target 100%, dengan Jumlah sasaran yang harus dilayani sebanyak 61.719 Balita dan 53.295 Balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan.

Tabel 126. Capaian Penerima Pelayanan Kesehatan Balita

No	Jenis Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Persentase	IP SPM (80%)
1	Pelayanan Kesehatan Balita	61.719	53.295	86,35%	69,08%

Capaian Mutu Pelayanan Dasar pada Pelayanan Kesehatan Balita Tahun 2024 sebesar 83,72% dari target 100%. 4 Mutu Pelayanan Dasar telah mencapai target 100%, sedangkan 17 Mutu Pelayanan Dasar belum mencapai 100%.

Tabel 127. Capaian Mutu Pelayanan Kesehatan Balita

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Persentase	IP SPM (20%)
1	Kuesioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau Instrumen Standar lain yang berlaku	61.719	53.295	86,35%	
2	Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	61.719	53.295	86,35%	
3	Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)	61.719	53.295	86,35%	
4	Vitamin A Biru (sesuai standar 6-11 bulan)	9.076	7.837	86,35%	
5	Vitamin A Merah (sesuai standar 12-59 bulan)	53.399	46.111	86,35%	
6	Vaksin imunisasi dasar: BCG	4.277	3.639	85,08%	
7	Vaksin imunisasi dasar: Polio Tetes	8.525	7.361	86,35%	
8	Vaksin imunisasi dasar: IPV	6.378	5.507	86,34%	
9	Vaksin imunisasi dasar: DPT -HB -Hib	10.813	9.337	86,35%	
10	Vaksin imunisasi dasar: Campak Rubela	6.450	5.570	86,36%	
11	Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB -Hib	3.208	2.770	86,35%	





No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Persentase	IP SPM (20%)
12	Vaksin imunisasi lanjutan : Campak Rubela	1.602	1.383	86,33%	
13	Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	267.127	230.667	86,35%	
14	Peralatan Anafilaktik	32	32	100,00%	
15	Formula Terapi Gizi Buruk	32	32	100,00%	
16	Tenaga medis : Dokter	317	97	30,60%	
17	Tenaga kesehatan : Bidan	793	683	86,13%	
18	Tenaga kesehatan : Perawat	896	624	69,64%	
19	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	111	56	50,45%	
20	Guru PAUD	Tutup Mutu	Tutup Mutu	100,00%	
21	Kader Kesehatan	4.085	4.085	100,00%	
Rata-Rata				83,72%	16,74%

e. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar

Capaian Pelayanan Dasar pada Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar Tahun 2024 sebesar 98,62% dari target 100%, dengan Jumlah sasaran yang harus dilayani sebanyak 140.724 Jiwa dan 138.785 Anak pada Usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan.

Tabel 128. Capaian Penerima Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar

No	Jenis Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Persentase	IP SPM (80%)
1	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	140.724	138.785	98,62%	78,90%

Capaian Mutu Pelayanan Dasar pada Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Tahun 2024 sebesar 86,50% dari target 100%. 5 Mutu Pelayanan Dasar telah mencapai target 100%, sedangkan 23 Mutu Pelayanan Dasar belum mencapai 100%.





Tabel 129. Capaian Mutu Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Persentase	IP SPM (20%)
1	Form pencatatan/Buku raport kesehatanku (Sesuai jumlah peserta didik di sekolah/madrasah/pesantren)	140.724	138.785	98,62%	
2	Form pencatatan/Buku pemantauan kesehatan (Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar di luar satuan pendidikan dasar seperti di panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja)	140.724	138.785	98,62%	
3	Kuesioner Skrining Kesehatan (Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar)	140.724	138.785	98,62%	
4	Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Dalam Sekolah (Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah anak usia pendidikan dasar per sekolah/madrasah/pesantren)	140.724	138.785	98,62%	
5	Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Luar Sekolah (Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja per Puskesmas)	140.724	138.785	98,62%	
6	Tablet Tambah Darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah (Jumlah remaja putri kelas7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah dikalikan52 tablet dan mempertimbangkan ketersediaan stok opnameyang ada di gudangfarmasi kabupaten/kota)	7.317.648	7.216.820	98,62%	
7	Alat Pemeriksaan Hb (Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/ sederajat)	64	64	100,00%	
8	Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7 (Hematologi analyzer	15.599	15.384	98,62%	





No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Persentase	IP SPM (20%)
	di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/ sederajat)				
9	Media promosi kesehatan (Media khusus remaja sehat)	132	132	100,00%	
10	Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) (sesuai standar kebutuhan bagi seluruh sasaran kelas 1 SD, kelas 2 SD dan kelas 5 SD dan anak dengan usia setara)	7.876	7.767	98,62%	
11	Tenaga medis : Dokter/Dokter gigi	317	98	30,91%	
12	Tenaga kesehatan : Bidan	793	683	86,13%	
13	Tenaga kesehatan : Perawat	896	624	69,64%	
14	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	111	56	50,45%	
15	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	286	89	31,12%	
16	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	36	74	100,00%	
17	Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu : Guru	Tutup Mutu	Tutup Mutu	100,00%	
18	Tenaga non kesehatan terlatih atau Mempunyai Kualifikasi tertentu : Kader Kesehatan/dokter kecil/ peer conselor	4.085	4.085	100,00%	
Rata-Rata				99,67%	19,93%

f. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif

Capaian Pelayanan Dasar pada Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Tahun 2024 sebesar 94,58% dari target 100%, dengan Jumlah sasaran yang harus dilayani sebanyak 517.780 Jiwa dan 489.710 Jumlah Warga Negara Usia Produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan.





Tabel 130. Capaian Penerima Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif

No	Jenis Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Persentase	IP SPM (80%)
1	Pelayanan Kesehatan pada usia Produktif	517.780	489.710	94,58%	75,66%

Capaian Mutu Pelayanan Dasar pada Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Tahun 2024 sebesar 90,56% dari target 100%. 12 Mutu Pelayanan Dasar telah mencapai target 100%, hanya 7 Mutu Pelayanan Dasar belum mencapai 100%.

Tabel 131. Capaian Mutu Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Persentase	IP SPM (20%)
1	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	132	132	100,00%	
2	Alat : Alat Ukur Lingkar Lengan Atas (LILA)	244	244	100,00%	
3	Alat : Tensimeter	244	244	100,00%	
4	Alat : Glukometer	244	244	100,00%	
5	Alat: Alat Pemeriksa Hb	32	32	100,00%	
6	Alat : Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol	55.000	52.018	94,58%	
7	Alat : KIT IVA Tes	120.389	113.862	94,58%	
8	Strip dan Reagen pemeriksaan Hb	32	32	100,00%	
9	Kit Ophthalmologi Komunitas	32	32	100,00%	
10	Kuesioner PUMA (Deteksi dini Penyakit Paru Obstrutif Kronis/PPOK)	1	1	100,00%	
11	Alat Pelayanan KB	128	128	100,00%	
12	Set Pemasangan dan Pencabutan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR)	64	64	100,00%	
13	Set Pemasangan dan Pencabutan Impla	64	64	100,00%	
14	Vasectomi Set	-1	-1	100,00%	
15	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	1	1	100,00%	
16	Vaksin Tetanus Difteri (td)	4.501	4.257	94,58%	
17	Tenaga medis : Dokter	317	97	30,60%	





No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Persentase	IP SPM (20%)
18	Tenaga kesehatan : Bidan	793	683	86,13%	
19	Tenaga kesehatan : Perawat	896	624	69,64%	
Rata-Rata				90,56%	18,11%

g. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut

Capaian Pelayanan Dasar pada Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Tahun 2024 sebesar 94,71% dari target 100%, dengan Jumlah sasaran yang harus dilayani sebanyak 54.085 Jiwa dan 51.225 Warga Negara Usia Lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan.

Tabel 132. Capaian Penerima Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut

No	Jenis Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Persentase	IP SPM (80%)
1	Pelayanan Kesehatan pada usia Lanjut	54.085	51.225	94,71%	75,77%

Capaian Mutu Pelayanan Dasar pada Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Tahun 2024 sebesar 86,63% dari target 100%. 7 Mutu Pelayanan Dasar telah mencapai target 100%, hanya 6 Mutu Pelayanan Dasar belum mencapai 100%.

Tabel 133. Capaian Mutu Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Persentase	IP SPM (20%)
1	Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas, dan tensimeter	32	32	100,00%	
2	Glukometer (alat pemeriksaan gula darah)	64	64	100,00%	
3	Alat pemeriksaan kolesterol	64	64	100,00%	
4	Bahan medis Habis Pakai: strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alkohol	64	64	100,00%	
5	Instrumen skrining lansia sederhana (SKILAS), instrumen aktivitas	54.085	51.225	94,71%	





No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Persentase	IP SPM (20%)
	kehidupan sehari-hari (AKS/Activity daily living (ADL Barthel)				
6	Buku kesehatan lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya	54.085	51.225	94,71%	
7	Media KIE	132	132	100,00%	
8	Tenaga medis : Dokter	317	97	30,60%	
9	Tenaga kesehatan : Bidan	793	683	86,13%	
10	Tenaga kesehatan : Perawat	896	624	69,64%	
11	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	111	56	50,45%	
12	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	36	74	100,00%	
13	Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	4.085	4.085	100,00%	
Rata-Rata				86,63%	17,33%

h. Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi

Capaian Pelayanan Dasar pada Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi Tahun 2024 sebesar 100% dari target 100%, dengan Jumlah sasaran yang harus dilayani sebanyak 57.987 Jiwa dan 57.987 Warga Negara Penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan.

Tabel 134. Capaian Penerima Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi

No	Jenis Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Persentase	IP SPM (80%)
1	Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi	57.987	57.987	100,00%	80%

Capaian Mutu Pelayanan Dasar pada Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi Tahun 2024 sebesar 80,66% dari target 100%.

Tabel 135. Capaian Mutu Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Persentase	IP SPM (20%)
1	Pedoman pengendalian Hipertensi dan media	132	132	100,00%	





No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Persentase	IP SPM (20%)
	Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)				
2	Obat Hipertensi	57.987	57.987	100,00%	
3	Tensimeter	192	192	100,00%	
4	Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK)	1	1	100,00%	
5	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) (peningkatan pengetahuan masyarakat)	132	132	100,00%	
6	Tenaga medis : Dokter	317	97	30,60%	
7	Tenaga kesehatan : Bidan	793	683	86,13%	
8	Tenaga kesehatan : Perawat	896	624	69,64%	
9	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	111	56	50,45%	
10	Tenaga kesehatan : Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku	36	36	100,00%	
11	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	286	89	31,12%	
12	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	36	36	100,00%	
Rata-Rata				80,66%	16,13%

i. Pelayanan Kesehatan pada Penderita Diabetes Melitus

Capaian Pelayanan Dasar pada Pelayanan Kesehatan pada Penderita Diabetes Melitus Tahun 2024 sebesar 100% dari target 100%, dengan Jumlah sasaran yang harus dilayani sebanyak 16.641 Jiwa dan 16. 641 Warga Negara Penderita Diabetes yang mendapatkan pelayanan kesehatan.

Tabel 136. Capaian Penerima Pelayanan Kesehatan pada Diabetes Melitus

No	Jenis Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Persentase	IP SPM (80%)
1	Pelayanan Kesehatan pada Diabetes Melitus	6.641	16.641	100,00%	80%





Capaian Mutu Pelayanan Dasar pada Pelayanan Kesehatan pada Penderita Diabetes Melitus Tahun 2024 sebesar 74,26% dari target 100%.

Tabel 137. Capaian Mutu Pelayanan Kesehatan pada Diabetes Melitus

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Persentase	IP SPM (20%)
1	Obat Diabetes Melitus	194.106	194.106	100,00%	
2	Fotometer atau Glukometer	64	64	100,00%	
3	BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) gula darah dalam pemantauan kadar gula dalam darah : reagen glukosa atau strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet	136.097	136.097	100,00%	
4	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM (Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular), ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku), Simpus (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas)	3	3	100,00%	
5	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) (minimal 3 di setiap fasyankes terdiri dari: 1 (satu) Panduan Praktik Klinis (PPK) bagi dokter di FKTP; 1 (satu) media KIE tentang diabetes melitus; dan 1 (satu) media KIE tentang penyakit tidak menular)	132	132	100,00%	
6	Tenaga medis : Dokter	317	97	30,60%	
7	Tenaga kesehatan : Bidan	793	683	86,13%	
8	Tenaga kesehatan : Perawat	896	624	69,64%	
9	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	286	89	31,12%	
10	enaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	36	74	100,00%	
11	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	111	56	50,45%	
12	Tenaga kesehatan : Teknis Medis (ATLM)	281	65	23,13%	
Rata-Rata				74,26%	14,85%





j. Pelayanan Kesehatan pada Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat

Capaian Pelayanan Dasar pada Pelayanan Kesehatan pada Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat Tahun 2024 sebesar 100% dari target 100%, dengan Jumlah sasaran yang harus dilayani sebanyak 867 Jiwa dan 867 Warga Negara dengan Gangguan Jiwa Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan.

Tabel 138. Capaian Penerima Pelayanan Kesehatan pada Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Persentase	IP SPM (80%)
1	Pelayanan Kesehatan pada Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	867	867	100,00%	80%

Capaian Mutu Pelayanan Dasar pada Pelayanan Kesehatan pada Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat Tahun 2024 sebesar 89,92% dari target 100%.

Tabel 139. Capaian Mutu Pelayanan Kesehatan pada Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Persentase	IP SPM (20%)
1	Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)	32	32	100,00%	
2	Penyediaan Psikofarmaka	32	32	100,00%	
3	Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/ atau penyediaan melalui aplikasi	1	1	100,00%	
4	Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan	1	1	100,00%	
5	Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	132	132	100,00%	
6	Tenaga kesehatan : Dokter	317	97	30,60%	
7	Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan yang	896	624	69,64%	





No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Persentase	IP SPM (20%)
	memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa (contoh: Psikolog klinis, perawat jiwa, perawat terlatih)				
8	Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa.	32	32	100,00%	
9	Tenaga profesional lainnya	32	32	100,00%	
Rata-Rata				88,92%	17,78%

k. Pelayanan Kesehatan pada Orang Terduga Tuberkulosis

Capaian Pelayanan Dasar pada Pelayanan Kesehatan pada Orang Terduga Tuberkulosis Tahun 2024 sebesar 100% dari target 100%, dengan Jumlah sasaran yang harus dilayani sebanyak 23.722 Jiwa dan 23.722 Warga Negara yang terduga Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan.

Tabel 140. Capaian Penerima Pelayanan Kesehatan pada Orang Terduga Tuberkulosis

No	Jenis Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Persentase	IP SPM (80%)
1	Pelayanan Kesehatan pada Orang Terduga Tuberkulosis	23.722	23.722	100,00%	80%

Capaian Mutu Pelayanan Dasar pada Pelayanan Kesehatan pada Orang Terduga Tuberkulosis Tahun 2024 sebesar 78,19% dari target 100%.

Tabel 141. Capaian Mutu Pelayanan Kesehatan pada Orang Terduga Tuberkulosis

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Persentase	IP SPM (20%)
1	Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)	250	250	100,00%	
2	Reagen Zn TB	32	32	100,00%	
3	Masker bedah dan Masker N95	166.054	166.054	100,00%	
4	Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	142.332	142.332	100,00%	





No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Persentase	IP SPM (20%)
5	Katrid tes cepat molekuler	23.722	23.722	100,00%	
6	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	23.722	23.722	100,00%	
7	Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	32	32	100,00%	
8	Tuberkulin	2.372	2.372	100,00%	
9	Tenaga medis : Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis paru	317	97	30,60%	
10	Tenaga kesehatan : Perawat	896	624	69,64%	
11	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	286	89	31,12%	
12	Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat	36	74	100,00%	
13	Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	281	65	23,13%	
14	Tenaga kesehatan : Radiografer	142	26	18,31%	
15	Kader Kesehatan	4.085	4.085	100,00%	
Rata-Rata				78,19%	15,64%

I. Pelayanan Kesehatan pada Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemah Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV)

Capaian Pelayanan Dasar pada Pelayanan Kesehatan pada Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemah Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV) Tahun 2024 sebesar 100% dari target 100%, dengan Jumlah sasaran yang harus dilayani sebanyak 17.467 Jiwa dan 17.467 Warga Negara dengan Risiko terinfeksi virus yang melemah daya tahan tubuh manusia (HIV) yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan.





Tabel 142. Capaian Penerima Pelayanan Kesehatan pada Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemah Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV)

No	Jenis Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Persentase	IP SPM (80%)
1	Pelayanan Kesehatan pada Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemah Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV)	17.467	17.467	100,00%	80%

Capaian Mutu Pelayanan Dasar pada Pelayanan Kesehatan pada Orang Terduga Tuberkulosis Tahun 2024 sebesar 80,95% dari target 100%.

Tabel 143. Capaian Mutu Pelayanan Kesehatan pada Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemah Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV)

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Persentase	IP SPM (20%)
1	Media KIE Berupa Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner	132	132	100,00%	
2	Tes Cepat HIV (RDT) Pertama	19.602	19.602	100,00%	
3	Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum S spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	104.802	104.802	100,00%	
4	Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK	17.467	17.467	100,00%	
5	Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	317	97	30,60%	
6	Tenaga kesehatan : Bidan	793	683	86,13%	
7	Tenaga kesehatan : Perawat	896	624	69,64%	
8	Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	281	65	23,13%	
9	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	36	116	100,00%	
10	Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu: pendamping dan penjangkauan	4.085	4.085	100,00%	
Rata-Rata				80,95%	16,19%





4.2.4. Alokasi Anggaran

Dalam upaya pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Kesehatan, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah mengalokasikan melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara pada Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 144. Alokasi Anggaran Pencapaian SPM Urusan Kesehatan

Jenis Layanan	Kegiatan/Sub Kegiatan	APBD	APBD-P	Realisasi	%
Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	2.500.000.000	2.500.000.000	1.619.726.545	65%
Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	1.094.403.000	1.094.403.000	746.628.749	68%
Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	461.535.600	552.800.300	393.376.000	71%
Pelayanan Kesehatan Balita	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	205.000.000	471.256.000	227.764.000	48%
Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	410.000.000	410.000.000	339.034.552	83%
Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	600.000.000	600.000.000	580.572.600	97%
Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	410.000.000	410.000.000	388.598.617	95%
Pelayanan Kesehatan penderita Hipertensi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	525.000.000	525.000.000	491.186.865	94%
Pelayanan Kesehatan Penderita diabetes Melitus	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	868.107.500	1.060.539.140	1.018.641.300	96%
Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	650.000.000	993.962.500	616.414.338	62%





Jenis Layanan	Kegiatan/Sub Kegiatan	APBD	APBD-P	Realisasi	%
Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1.747.940.000	1.751.565.800	1.663.679.490	95%
Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	909.740.000	916.370.000	764.908.107	83%
Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			15.000.000.000	12.742.108.165	85%
Pengadaan obat bahan habis pakai, bahan medis habis pakai, vaksin, makanan dan minuman di fasilitas kesehatan			14.860.642.230	13.329.412.965	90%
Alokasi Anggaran SPM Bidang Kesehatan		10.381.726.100	41.146.538.970	34.922.052.293	85%

4.2.5. Dukungan Personil

Dalam pelaksanaan SPM bidang kesehatan tahun 2024, Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara didukung oleh berbagai profesi kesehatan maupun non kesehatan, baik tenaga medis maupun tenaga kesehatan yang terbagi ke dalam 12 SPM yang ada, yaitu

Tabel 145. Jumlah Personil Pendukung Pencapaian SPM Urusan Kesehatan

No	Jenis Pelayanan	Jumlah Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan											
		Dokter	Perawat	Bidan	Tenaga Kefarmasian	Kesmas	Penata Rontgen	ATLM	Ahli Gizi	Kader Kesehatan	Guru PAUD	Nakes Lainnya	Nonkes Terlatih
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	73	32	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	73	32	32	97	0	0	0	55	0	0	0	0
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	73	32	32	97	32	0	0	55	0	0	0	0
4	Pelayanan Kesehatan Balita	73	32	32	0	0	0	0	55	4.063	32	0	0
5	Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar	73	32	32	0	32	0	0	55	4.063	0	0	0
6	Pelayanan Kesehatan pada usia produktif	73	32	32	0	32	0	0	55	0	0	0	0
7	Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	73	32	32	0	32	0	0	55	4.063	0	0	0
8	Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi	73	32	32	97	32	0	0	55	0	0	0	0





No	Jenis Pelayanan	Jumlah Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan											
		Dokter	Perawat	Bidan	Tenaga Kefarmasian	Kesmas	Penata Rontgen	ATLM	Ahli Gizi	Kader Kesehatan	Guru PAUD	Nakes Lainnya	Nonkes Terlatih
9	Pelayanan Kesehatan penderita diabetes melitus	73	32	32	97	32	0	70	55	0	0	0	0
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	73	32	0	0	0	0	0	0	0	0	32	0
11	Pelayanan Kesehatan Orang terduga tuberkulosis	73	32	0	97	32	3	70	0	0	0	0	32
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemah daya tahan tubuh manusia (HIV)	73	32	32	0	32	0	70	0	0	0	0	32

4.2.6. Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan pencapaian SPM bidang kesehatan, terdapat beberapa kendala dan solusi yang akan dijabarkan sebagai berikut:

Pengumpulan Data

- Belum adanya bank data, data tersebar di 32 Puskesmas

Perhitungan Kebutuhan

- Masih belum tersedianya data kependudukan Disdukcapil terupdate pada saat penentuan jumlah sasaran yang dilakukan masih didasarkan pada jumlah sasaran dan proyeksi, sehingga kebutuhan anggaran sangat besar

Perencanaan dan Penganggaran

- Integrasi data yang ada belum menggambarkan hasil riil di lapangan, sehingga anggaran yang ada masih kecil
- kurangnya kemampuan dalam menganalisis dan merencanakan Penganggaran

Pelaksanaan

- masih kurangnya Kesadaran masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
- Masih kurangnya Jumlah tenaga kesehatan





- Masih Kurangnya kemampuan/kapasitas tenaga kesehatan

Permasalahan Lain-Lain

- masih kurangnya kapasitas / kemampuan dalam menyampaikan data laporan SPM

4.3. Urusan Pekerjaan Umum

4.3.1. Jenis Pelayanan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, bahwa SPM Bidang Pekerjaan Umum meliputi:

1. Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari
2. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik

4.3.2. Target Pencapaian

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, secara rinci penetapan target Pencapaian SPM pada Penerima Layanan dan Mutu Layanan dengan Anggaran Penunjang Capaian SPM pada tabel berikut.

Tabel 146. Target Pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum

No	Jenis Pelayanan	Mutu Layanan	Target	Anggaran
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari		100%	52.929.406.000,00
	Jumlah Rumah Tangga yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari		8.024	
		1. *JARINGAN PERPIPAAN Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari)	1.002	





No	Jenis Pelayanan	Mutu Layanan	Target	Anggaran
		sama dengan 4 galon melalui SPAM		
		2. *JARINGAN PERPIPAAN. Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau	1.002	
		3. *BUKAN JARINGAN PERPIPAAN Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM.	1.004	
		4. *BUKAN JARINGAN PERPIPAAN Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau	1.004	
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik		100%	31.124.479.000
	Jumlah Rumah Tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik		3.844	
		1. Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik	961	
		2. Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses aman terhadap fasilitas buang air besar individual bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk minimal 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan	n/a	





No	Jenis Pelayanan	Mutu Layanan	Target	Anggaran
		bangunan bawah dilengkapi tangki septik sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala, minimal tiga tahun sekali, serta dibuang dan diolah ke IPLT; dan sambungan rumah yang terkoneksi ke SPALD-T		
		3. Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses layak merupakan fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk kurang dari 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septik sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar	961	

4.3.3. Realisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Perhitungan Pencapaian SPM dilakukan dengan menggunakan Indeks Pencapaian SPM. Indeks Pencapaian SPM meliputi Capaian Penerima Pelayanan Dasar dengan bobot 80% dan Capaian Mutu Pelayanan Dasar dengan bobot 20%.

Indeks pencapaian SPM (IP SPM) adalah nilai capaian SPM yang diperoleh melalui penghitungan rata-rata persentase indeks pencapaian mutu minimal layanan dasar dikalikan bobot mutu dengan persentase indeks penerima layanan dasar dikalikan dengan bobot penerima.

Tabel 147. Realisasi Indeks Pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum

No	Jenis Pelayanan	Capaian Penerima Pelayanan Dasar	Capaian Mutu Pelayanan Dasar	IP SPM
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	100%	100%	100%
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	100%	100%	100%
Indeks Pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum				100% Tuntas Paripurna

Berdasarkan 2 jenis pelayanan SPM pada urusan pekerjaan umum Tahun 2024 yang telah dilaksanakan, Indeks Pencapaian SPM Urusan Pekerjaan





Umum yaitu 100% dengan kategori Tuntas Paripurna. Adapun penjabaran Indeks Pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2024 dijelaskan sebagai berikut:

a. Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari

Capaian Pelayanan Dasar pada Pelayanan Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari Tahun 2024 sebesar 100% dari target 100%, dengan Jumlah sasaran yang harus dilayani sebanyak 8.024 Rumah Tangga dan 8.024 Rumah Tangga yang telah memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari.

Tabel 148. Capaian Penerima Pelayanan Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari

No	Jenis Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Persentase	IP SPM (80%)
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	8.024	8.024	100%	80%

Capaian Mutu Pelayanan Dasar pada Pelayanan Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari Tahun 2024 sebesar 100% dari target 100%.

Tabel 149. Capaian Mutu Layanan Pelayanan Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Persentase	IP SPM (20%)
1	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	1.002	1.002	100,00%	
2	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau)	1.002	1.002	100,00%	
3	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan	1.004	1.004	100,00%	





No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Persentase	IP SPM (20%)
	terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)				
4	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau)	1.004	1.004	100,00%	
Rata-Rata				100%	20%

b. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik

Capaian Pelayanan Dasar pada Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Tahun 2024 sebesar 100% dari target 100%, dengan Jumlah sasaran yang harus dilayani sebanyak 3.844 Rumah Tangga dan 3.844 Rumah Tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik.

Tabel 150. Capaian Penerima Pelayanan Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik

No	Jenis Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Persentase	IP SPM (80%)
1	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	3.844	3.844	100%	80%

Capaian Mutu Pelayanan Dasar pada Pelayanan Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari Tahun 2024 sebesar 100% dari target 100%.

Tabel 151. Capaian Mutu Layanan Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Persentase	IP SPM (20%)
1	Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik	961	961	69,93%	





No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Persentase	IP SPM (20%)
2	Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses aman terhadap fasilitas buang air besar individual bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk minimal 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septik sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala, minimal tiga tahun sekali, serta dibuang dan diolah ke IPLT; dan sambungan rumah yang terkoneksi ke SPALD-T	Tutup Mutu	Tutup Mutu	0,67%	
3	Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses layak merupakan fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk kurang dari 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septic sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar	961	961	0,30%	
Rata-Rata				100%	20%

4.3.4. Alokasi Anggaran`

Dalam upaya pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Pekerjaan Umum, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah menganggarkan melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kutai Kartanegara pada Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:





Tabel 152. Alokasi Anggaran Penunjang Pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum

Jenis Layanan	Kegiatan/Sub Kegiatan	APBD	APBD-P	Realisasi	%
Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari		172.399.059.842	241.991.674.842	214.559.318.510	89%
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	172.399.059.842	241.991.674.842	214.559.318.510	89%
	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	4.880.000.000	20.430.000.000	20.043.884.255	98%
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	225.000.000	550.000.000	272.344.375	50%
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	850.000.000	3.291.615.000	3.047.839.189	93%
	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	35.450.000.000	40.050.000.000	37.916.527.792	95%
	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	21.769.079.842	28.319.079.842	23.224.329.541	82%
	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	109.224.980.000	149.350.980.000	130.054.393.358	87%
Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik		50.574.170.000	52.929.406.000	49.757.025.631	94%
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	50.574.170.000	52.929.406.000	49.757.025.631	94%
	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	218.750.000	0	0	0
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	110.651.250	110.651.250	67.298.000	61%
	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)		1.153.600.000	999.240.000	87%





Jenis Layanan	Kegiatan/Sub Kegiatan	APBD	APBD-P	Realisasi	%
	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	47.050.830.000	47.927.746.000	45.891.880.693	96%
	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	200.000.000	268.750.000	252.754.350	94%
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	2.993.938.750	3.468.658.750	2.545.852.588	73%
Alokasi Anggaran Urusan Pekerjaan Umum		222.973.229.842	294.921.080.842	264.316.344.141	90%

4.3.5. Dukungan Personil

Dalam pelaksanaan SPM Urusan Pekerjaan Umum tahun 2024, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara didukung personil secara rinci dalam tabel berikut:

Tabel 153. Dukungan Personil Pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum

No	Personil	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil	
	- Kepala Dinas	1
	- Sekretaris	-
	- Kepala Bidang	4
	- Kepala Sub Bagian	2
	- Fungsional Umum	148
2	Tenaga Harian Lepas	128
	Jumlah	283

4.3.6. Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan pencapaian SPM bidang pekerjaan umum, terdapat beberapa kendala dan solusi yang akan dijabarkan sebagai berikut:

Pengumpulan Data

- Data penerima manfaat perlu diverifikasi ulang

Perhitungan Kebutuhan

- Menyesuaikan anggaran dan pelaksanaan





Perencanaan dan Penganggaran

- Perlunya penyesuaian sumber daya manusia di Desa atau wilayah kegiatan dan teknologi

Pelaksanaan

- Sebaran Pelaksanaan yang berjauhan.

4.4. Urusan Perumahan Rakyat

4.4.1. Jenis Pelayanan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, bahwa SPM Bidang Pekerjaan Umum meliputi:

1. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang layak huni bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota
2. Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

4.4.2. Target Pencapaian

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, secara rinci penetapan target Pencapaian SPM pada Penerima Layanan dan Mutu Layanan dengan Anggaran Penunjang Capaian SPM pada tabel berikut:

Tabel 154. Target Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat

No	Jenis Pelayanan	Mutu Layanan	Target	Anggaran
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang layak huni bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota		100%	5.918.278.947,00
	Jumlah Rumah Tangga Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak huni		-	





No	Jenis Pelayanan	Mutu Layanan	Target	Anggaran
		Bantuan Akses Rumah Sewa Layak Huni Bagi Korban Bencana	-	
		Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	-	
		Pembangunan Kembali Rumah Bagi Korban Bencana	-	
		Pembangunan Baru Di Lokasi Baru / Relokasi Bagi Korban Bencana.	-	
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		100%	
	Jumlah Rumah Tangga yang terkena relokasi akibat Program Pemerintah Daerah Kab/Kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni		24	
		Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	24	
		a. Penilaian oleh tim penaksir (appraisal)	n/a	
		b. Proses sosialisasi kepada masyarakat; dan	24	
		c. Proses penggantian untung sesuai tahapan yang diatur dalam Rencana Aksi	n/a	
		Bantuan akses Rumah Sewa Layak Huni	n/a	

4.4.3. Realisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Perhitungan Pencapaian SPM dilakukan dengan menggunakan Indeks Pencapaian SPM. Indeks Pencapaian SPM meliputi Capaian Penerima Pelayanan Dasar dengan bobot 80% dan Capaian Mutu Pelayanan Dasar dengan bobot 20%.

Indeks pencapaian SPM (IP SPM) adalah nilai capaian SPM yang diperoleh melalui penghitungan rata-rata persentase indeks pencapaian mutu minimal layanan dasar dikalikan bobot mutu dengan persentase indeks penerima layanan dasar dikalikan dengan bobot penerima.





Tabel 155. Realisasi Indeks Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat

No	Jenis Pelayanan	Capaian Penerima Pelayanan Dasar	Capaian Mutu Pelayanan Dasar	IP SPM
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang layak huni bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	100%	100%	100%
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	100%
Indeks Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat				100% Tuntas Paripurna

Berdasarkan 2 jenis pelayanan SPM pada urusan perumahan rakyat Tahun 2024 yang telah dilaksanakan, Indeks Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat yaitu 99,29% dengan kategori Tuntas Utama. Adapun penjabaran Indeks Pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2023 dijelaskan sebagai berikut:

a. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang layak huni bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota

Capaian Pelayanan Dasar pada Pelayanan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang layak huni bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota Tahun 2024 sebesar 100% dari target 100%, dikarenakan pada Tahun 2023 tidak terjadi bencana daerah yang harus ditetapkan status bencana oleh Kepala Daerah. Namun sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan SPM, Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara telah menyediakan anggaran dalam pencapaian SPM pada layanan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang layak huni bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota.

Tabel 156. Capaian Penerima Layanan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana

No	Jenis Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Persentase	IP SPM (80%)
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang layak huni bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	-	-	100%	80%





Capaian Mutu Pelayanan Dasar pada Pelayanan Fasilitas Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang layak huni bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota Tahun 2024 sebesar 100% dari target 100%. Dikarenakan pada Tahun 2023 tidak terjadi bencana daerah yang harus ditetapkan status bencana oleh Kepala Daerah, sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan SPM, Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara telah melakukan tahapan SPM yang meliputi Pendataan, Perhitungan Kebutuhan, dan Perencanaan Pemenuhan Kebutuhan.

Tabel 157. Capaian Mutu Layanan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Persentase	IP SPM (20%)
1	Melakukan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, dan perencanaan kebutuhan sesuai dengan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan	1	1	100%	
Pendataan					
Form 4.a.4	Identifikasi Perumahan Di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana			100%	
Form 4.a.5	Identifikasi Lahan Potensial Sebagai Relokasi Perumahan Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana			100%	
Form 4.a.6	Pengumpulan Data Rumah Yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana			100%	
Form 4.a.10	Identifikasi Perumahan Di Lokasi Yang Menimbulkan Bahaya Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah			100%	
Form 4.A.11	Identifikasi Perumahan Di Atas Lahan Bukan Fungsi Permukiman Di Kabupaten/Kota			100%	
Form 4.A.12	Identifikasi Perumahan Di Kawasan Kumuh Kabupaten/Kota (<10 Ha)			100%	
Form 4.A.12	Pengumpulan Data Rumah Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota			100%	
Perhitungan Kebutuhan					
Form 4.B.3	Penghitungan Kebutuhan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana			100%	
Form 4.B.4	Penghitungan Kebutuhan Biaya Layanan Pemenuhan Rumah Layak Huni Bagi Terkena Bencana Kabupaten/Kota			100%	
Form 4.B.7	Penghitungan Kebutuhan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota			100%	





No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Persentase	IP SPM (20%)
	Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				
Form 4.B.8	Penghitungan Kebutuhan Biaya Layanan Pemenuhan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota			100%	
Perencanaan Pemenuhan					
Form 4.C.2	Rencana Pemenuhan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota			100%	
Form 4.C.4	Rencana Pemenuhan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota			100%	
Rata-Rata				100%	20%

b. Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Capaian Pelayanan Dasar pada Pelayanan Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024 sebesar 100% dari target 100%.

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 540/SK-BUP/HK2020 tentang Penerima Bantuan Pembangunan Rumah Khusus di Desa Muara Pendohon Kecamatan Tabang Tahun Anggaran 2021, Telah ditetapkan 94 Rumah Tangga yang menerima bantuan rumah khusus.

Kecamatan Tabang hampir di 18 Desa terendam banjir tiap tahunnya, salah satunya Desa Muara Pendohon Kecamatan Tabang yang sering mengalami banjir dan abrasi daerah aliran sungai Belayan yang berakibat langsung terganggunya pemukiman penduduk, sosial, budaya dan ekonomi setempat. Dengan mempertimbangkan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan relokasi ke wilayah yang lebih layak.

Tabel 158. Capaian Penerima Layanan Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah

No	Jenis Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Persentase	IP SPM (80%)
1	Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	24	24	100%	80%





Capaian Mutu Pelayanan Dasar pada Pelayanan Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024 sebesar 100% dari target 100%. Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara menyediakan Rumah Layak Huni bagi 24 Rumah Tangga, sehingga total 94 rumah yang akan direlokasi telah selesai sebanyak 94 rumah.

Tabel 159. Capaian Mutu Layanan Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Persentase	IP SPM (20%)
1	Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	24	24	100%	
	a. Penilaian oleh tim penaksir (appraisal)	Tutup Mutu	Tutup Mutu	100%	
	b. Proses sosialisasi kepada masyarakat; dan	24	24	100%	
	c. Proses penggantian untung sesuai tahapan yang diatur dalam Rencana Aksi	Tutup Mutu	Tutup Mutu	100%	
2	Bantuan akses Rumah Sewa Layak Huni	Tutup Mutu	Tutup Mutu	100%	
Rata-Rata				100%	20%

4.4.4. Alokasi Anggaran

Dalam upaya pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Perumahan Rakyat, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah mengalokasikan melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kutai Kartanegara pada Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 160. Alokasi Penunjang Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat

Jenis Layanan	Kegiatan/Sub Kegiatan	APBD	APBD-P	Realisasi	%
Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang layak huni bagi Korban Bencana	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	900.000.000	1.170.113.000	1.021.967.118	87%





Jenis Layanan	Kegiatan/Sub Kegiatan	APBD	APBD-P	Realisasi	%
Kabupaten/Kota Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	400.000.000	500.000.000	477.523.018	96%
	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	100.000.000	98.578.000	58.863.300	60%
	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat Rumah Susun dan Rumah Khusus	100.000.000	99.190.000	85.324.800	86%
	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	200.000.000	375.000.000	355.456.000	95%
	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	100.000.000	97.345.000	44.800.000	46%
	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100.000.000	175.000.000	99.231.160	57%
	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas Tim Pendamping dan Fasilitator	100.000.000	100.000.000	84.761.160	85%
	Koordinasi Untuk menyepakati Penerima dan Jenis Layanan		75.000.000	14.470.000	19%
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	8.371.384.560	7.171.384.560	4.797.080.669	67%
	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	1.200.000.000	0		
	Pembangunan rumah bagi korban bencana	200.000.000	25.000.000	22.159.350	89%
	Operasional dan Pemeliharaan	136.384.560	136.384.560	82.656.000	61%





Jenis Layanan	Kegiatan/Sub Kegiatan	APBD	APBD-P	Realisasi	%
	Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota				
	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	6.835.000.000	7.010.000.000	4.692.265.319	67%
Alokasi Anggaran Urusan Pekerjaan Umum		9.371.384.560	8.516.497.560	5.918.278.947	69%

4.4.5. Dukungan Personil

Dalam pelaksanaan SPM Urusan Perumahan Rakyat tahun 2023, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara didukung personil secara rinci dalam tabel berikut

Tabel 161. Dukungan Personil Penunjang Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat

No	Personil	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil	
	- Kepala Dinas	1
	- Sekretaris	-
	- Kepala Bidang	4
	- Kepala Sub Bagian	2
	- Fungsional Umum	148
2	Tenaga Harian Lepas	131
	Jumlah	327

4.4.6. Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan pencapaian SPM bidang perumahan rakyat, terdapat beberapa kendala dan solusi yang akan dijabarkan sebagai berikut:

Pengumpulan Data

- Sulitnya melakukan pendataan terhadap peta rawan bencana di Kutai Kartanegara, karena anggaran yang tersedia minim

Perhitungan Kebutuhan

- Sulit menentukan lokus tempat kejadian yang akan terjadi, karena kejadiannya susah dideteksi





Perencanaan dan Penganggaran

- Internalisasi program dan kegiatan serta sub kegiatan terhadap bencana sulit dilakukan, karena anggarannya serba tidak pasti.
- Anggaran yang ada lebih banyak digunakan untuk pendataan.

Pelaksanaan

- Pelaksanaan terhadap bidang urusan perumahan sedikit sulit dilaksanakan, karena tidak tahu kejadian sesungguhnya dimana akan terjadi

4.5. Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

4.5.1. Jenis Pelayanan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dibagi 3 Sub Urusan yaitu: Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Urusan Bencana Daerah, Urusan Kebakaran Daerah.

Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kab. / Kota, bahwa SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum meliputi Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Sub Urusan Bencana Daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten / Kota, bahwa SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub Bencana Daerah meliputi:

1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana;
2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana; dan





3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Sub Urusan Kebakaran Daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten / Kota, bahwa SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub Kebakaran meliputi Pelayanan dan Evakuasi Korban Kebakaran.

4.5.2. Target Pencapaian

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, secara rinci penetapan target Pencapaian SPM pada Penerima Layanan dan Mutu Layanan dengan Anggaran Penunjang Capaian SPM pada tabel berikut:

Tabel 162. Target Pencapaian SPM Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No	Jenis Pelayanan	Mutu Layanan	Target	Anggaran
Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			100%	47,911,705,167
1	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		100%	17,871,623,836
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada Kabupaten/Kota		44	
		1. Standar sarana prasarana Satpol PP dalam rangka mendukung penegakan perda dan perkada	554	
		2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda dan perkada	7	
		3. Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda dan perkada/PNS yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM***	1002	





No	Jenis Pelayanan	Mutu Layanan	Target	Anggaran
		4. Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda dan Perkada terhadap pelayanan kerugian material (berKoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi kependudukan, aset, pekerjaan umum, perumahan permukiman) dan pelayanan pengobatan (berKoordinasi dengan kesehatan) dalam bentuk dokumen yang sah dan legal *WAJIB UPLOAD DATA DUKUNG BERUPA STANDAR PELAYANAN YANG TERKENA DAMPAK	1	
		5. Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materiil	n/a	
		6. Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan	n/a	
Sub Urusan Bencana Daerah				7,661,936,560
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana		100%	
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana		150	
		1. Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana	1	
		2. Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	150	
		3. Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana	150	
		4. Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	143	
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		100%	
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		900	





No	Jenis Pelayanan	Mutu Layanan	Target	Anggaran
		1. Sarana prasarana penanggulangan bencana	209	
		2. Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM)	25	
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		100%	
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		1.449	
		1. Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	1	
		2. Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	1.449	
		3. Melakukan respons cepat darurat bencana	1	
		4. Respons Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas	n/a	
		5. Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	69	
Sub Urusan Kebakaran				
1	Pelayanan dan Evakuasi Korban Kebakaran		100%	22,378,144,771
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		948	
		1. Tingkat waktu tanggap (respons time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi	100	
		2. Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi *WAJIB UPLOD DATA DUKUNG BERUPA SOP	4	
		3. Sarana prasarana pemadam kebakaran	62	
		4. Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia	115	
		5. Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran	934	
		6. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga	14	





No	Jenis Pelayanan	Mutu Layanan	Target	Anggaran
		negara yang terdampak kebakaran		

4.5.3. Realisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Perhitungan Pencapaian SPM dilakukan dengan menggunakan Indeks Pencapaian SPM. Indeks Pencapaian SPM meliputi Capaian Penerima Pelayanan Dasar dengan bobot 80% dan Capaian Mutu Pelayanan Dasar dengan bobot 20%.

Indeks pencapaian SPM (IP SPM) adalah nilai capaian SPM yang diperoleh melalui penghitungan rata-rata persentase indeks pencapaian mutu minimal layanan dasar dikalikan bobot mutu dengan persentase indeks penerima layanan dasar dikalikan dengan bobot penerima.

Tabel 163. Realisasi Indeks Pencapaian SPM Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

No	Jenis Pelayanan	Capaian Penerima Pelayanan Dasar	Capaian Mutu Pelayanan Dasar	IP SPM
Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				100%
1	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	100%
Sub Urusan Bencana Daerah				75,81%
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	100%	100%	100%
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100%	100%	100%
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	100%	100%
Sub Urusan Kebakaran Daerah				95,16%
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100%	100%	100%
Indeks Pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum				100% Tuntas Paripurna

Berdasarkan 3 Sub Urusan dan 5 jenis pelayanan SPM pada urusan ketenteraman dan ketertiban umum Tahun 2024 yang telah dilaksanakan, Indeks Pencapaian SPM Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum yaitu 100% dengan kategori Tuntas Paripurna. Adapun penjabaran Indeks





Pencapaian SPM Urusan ketenteraman dan ketertiban umum Tahun 2024 dijelaskan sebagai berikut:

a. Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Capaian Pelayanan Dasar pada Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tahun 2024 sebesar 100% dari target 100%, dikarenakan pada Tahun 2023 dan Tahun 2024 tidak ada warga negara yang terdampak dari penegakan Perda dan Perkada. Namun sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan SPM, Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara telah menyediakan anggaran dalam pencapaian SPM pada Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Tabel 164. Capaian Penerima Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

No	Jenis Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Persentase	IP SPM (80%)
1	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	44	Tidak Ada Warga terdampak	100%	80%

Capaian Mutu Pelayanan Dasar pada Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tahun 2024 sebesar 100% dari target 100%. Tahun 2023 dan Tahun 2024 tidak ada warga negara yang terdampak dari penegakan Perda dan Perkada. Namun sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan SPM, Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara telah menyediakan anggaran dalam pencapaian SPM pada Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Tabel 165. Capaian Mutu Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Persentase	IP SPM (20%)
1	Standar sarana prasarana Satpol PP dalam rangka mendukung penegakan perda dan perkada	554	554	100,00%	
2	Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda dan perkada *WAJIB	7	7	100,00%	





No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Persentase	IP SPM (20%)
	UPLOAD DATA DUKUNG BERUPA SOP				
3	Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda dan perkada/PNS yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM***	1002	1002	100,00%	
4	Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda dan Perkada terhadap pelayanan kerugian material (berKoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi kependudukan, aset, pekerjaan umum, perumahan permukiman) dan pelayanan pengobatan (berKoordinasi dengan kesehatan) dalam bentuk dokumen yang sah dan legal *WAJIB UPLOAD DATA DUKUNG BERUPA STANDAR PELAYANAN YANG TERKENA DAMPAK	1	1	100,00%	
5	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil	44	Tidak Ada Warga terdampak	100,00%	
6	Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan	44	Tidak Ada Warga terdampak	100,00%	
Rata-Rata				100%	20%

b. Pelayanan Informasi Rawan Bencana

Capaian Pelayanan Dasar pada Pelayanan Informasi Rawan Bencana Tahun 2024 sebesar 100% dari target 100%, dengan Jumlah sasaran yang harus dilayani sebanyak 150 warga negara dan 150 Warga Negara yang telah memperoleh informasi rawan bencana.





Tabel 166. Capaian Penerima Pelayanan Informasi Rawan Bencana

No	Jenis Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Persentase	IP SPM (80%)
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	150	150	100%	80%

Capaian Mutu Pelayanan Dasar pada Pelayanan Informasi Rawan Bencana Tahun 2024 sebesar 100% dari target 100%.

Tabel 167. Capaian Mutu Layanan Pelayanan Informasi Rawan Bencana

.No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Persentase	IP SPM (20%)
1	Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana	1	1	100,00%	
2	Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	150	150	100,00%	
3	Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana	150	150	100,00%	
4	Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	143	143	100,00%	
Rata-Rata				100%	20%

c. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Capaian Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Tahun 2024 sebesar 100% dari target 100%, dengan Jumlah sasaran yang harus dilayani sebanyak 900 warga negara dan 900 Warga Negara yang telah memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana.

Tabel 168. Capaian Penerima Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

No	Jenis Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Persentase	IP SPM (80%)
1	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	900	900	100%	80%





Capaian Mutu Pelayanan Dasar pada Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Tahun 2024 sebesar 100% dari target 100%.

Tabel 169. Capaian Mutu Penerima Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

No.	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Persentase	IP SPM (20%)
1	Sarana prasarana penanggulangan bencana	209	209	100,00%	
2	Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM)	25	25	100,00%	
Rata-Rata				100%	20%

d. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Capaian Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Tahun 2024 sebesar 100% dari target 100%, dengan Jumlah sasaran yang harus dilayani sebanyak 1.449 warga negara dan 1.449 Warga Negara yang terdampak dari bencana yang terjadi di Tahun 2024 di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tabel 170. Capaian Penerima Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

No	Jenis Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Persentase	IP SPM (80%)
1	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	3.802	3.802	100%	80%

Capaian Mutu Pelayanan Dasar pada Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Tahun 2024 sebesar 100% dari target 100%.

Tabel 171. Capaian Mutu Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Persentase	IP SPM (20%)
1	Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan	100	100	100,00%	





No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Persentase	IP SPM (20%)
	penyelamatan dan evakuasi				
2	Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi *WAJIB UPLD DATA DUKUNG BERUPA SOP	4	4	100,00%	
3	Sarana prasarana pemadam kebakaran	62	62	100,00%	
4	Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia	115	115	100,00%	
5	Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran	934	934	100,00%	
6	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran	14	14	100,00%	
Rata-Rata				90,61%	20%

e. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran

Capaian Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran Tahun 2024 sebesar 100% dari target 100%, dengan Jumlah sasaran yang harus dilayani sebanyak 948 warga negara dan 948 Warga Negara yang dilayani dalam waktu *respons time* tidak melebihi 15 menit.

Tabel 172. Capaian Penerima Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran

No	Jenis Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Persentase	IP SPM (80%)
1	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	948	948	100%	80%

Capaian Mutu Pelayanan Dasar pada Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran Tahun 2024 sebesar 100% dari target 100%.





Tabel 173. Capaian Mutu Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Persentase	IP SPM (20%)
1	Tingkat waktu tanggap (respons time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi	100	100	100,00%	
2	Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi *WAJIB UPLD DATA DUKUNG BERUPA SOP	4	4	100,00%	
3	Sarana prasarana pemadam kebakaran	62	62	100,00%	
4	Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia	115	115	100,00%	
5	Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran	934	934	100,00%	
6	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran	14	14	100,00%	
Rata-Rata				90,61%	20%

4.5.4. Alokasi Anggaran

Dalam upaya pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah menganggarkan melalui Satuan Polisi Pamong Praja selaku pengampu SPM sub urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Badan Penanggulangan Bencana Daerah selaku pengampu SPM sub urusan Bencana Daerah dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan selaku OPD pengampu SPM sub urusan kebakaran daerah pada Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:





Tabel 174. Alokasi Anggaran Penunjang Pencapaian SPM Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Jenis Layanan	Kegiatan/Sub Kegiatan	APBD	APBD-P	Realisasi	%
Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Terhadap Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.293.703.500	11.983.713.700	10.031.819.553	83,7%
	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	50.101.000	64.652.000	64.228.000	99,3%
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	14.819.896.396	15.726.456.396	14.980.170.742	95,3%
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	415.000.000	647.558.440	421.888.520	65,2%
	Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum		28.515.000	28.270.000	99,1%
	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	10.000.000	160.000.000	117.377.800	73,4%
	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	423.550.000	399.419.000	399.244.000	100,0%
	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah	10.000.000	0		





Jenis Layanan	Kegiatan/Sub Kegiatan	APBD	APBD-P	Realisasi	%
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	752.979.000	725.232.000	633.833.206	87,4%
	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	240.100.000	233.379.000	187.110.000	80,2%
	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	319.879.000	304.389.000	278.639.206	91,5%
	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	193.000.000	187.464.000	168.084.000	89,7%
	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	125.221.000	119.791.000	116.330.645	97,1%
	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	125.221.000	119.791.000	116.330.645	97,1%
Total Sub Urusan Trantibum		16.606.747.396	17.871.623.836	16.761.342.913	93,8%
Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	150.000.000	255.248.000	107.213.320	42,0%
	Sosialisasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	150.000.000	255.248.000	107.213.320	42,0%
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	2.125.000.000	2.382.860.000	1.484.873.732	62,3%
	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	650.000.000	650.000.000	371.570.500	57,2%
	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	150.000.000	150.000.000	123.409.000	82,3%
	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	175.000.000	179.230.000	122.200.000	68,2%
	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk	150.000.000	153.630.000	126.460.650	82,3%





Jenis Layanan	Kegiatan/Sub Kegiatan	APBD	APBD-P	Realisasi	%
	Pencegahan dan Kesiapsiagaan				
	Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana Kabupaten/Kota	100.000.000	100.000.000	63.540.450	63,5%
	Penyusunan rencana kontijensi	750.000.000	750.000.000	350.264.632	46,7%
	Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	150.000.000	400.000.000	327.428.500	81,9%
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	8.878.000.000	4.148.828.560	3.102.942.257	74,8%
	Respons Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	150.000.000	150.000.000	51.265.600	34,2%
	Respons Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	150.000.000	150.000.000	73.952.077	49,3%
	Pencarian Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten / Kota	450.000.000	950.000.000	665.257.001	70,0%
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	7.878.000.000	2.648.828.560	2.215.542.579	83,6%
	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	100.000.000	100.000.000	96.925.000	96,9%
	Respons Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	150.000.000	150.000.000	0	0,0%
	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	700.000.000	875.000.000	463.859.833	53,0%
	Penyusunan regulasi penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	100.000.000	100.000.000	86.659.500	86,7%
	Penguatan kelembagaan bencana Kabupaten/Kota	100.000.000	150.000.000	70.899.250	47,3%
	Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	100.000.000	150.000.000	61.084.000	40,7%





Jenis Layanan	Kegiatan/Sub Kegiatan	APBD	APBD-P	Realisasi	%
	Pengelolaan dan pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	150.000.000	150.000.000	57.736.900	38,5%
	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana	100.000.000	100.000.000	58.852.783	58,9%
	Koordinasi penanganan Pasca bencana Kabupaten/Kota	150.000.000	225.000.000	128.627.400	57,2%
Total Sub Urusan Bencana		11.853.000.000	7.661.936.560	5.158.889.142	67,3%
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	23.950.288.971	22.378.144.771	21.661.900.426	96,8%
	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota	825.000.000	692.479.000	654.441.112	94,5%
	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	200.000.000	291.500.000	291.416.000	100,0%
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	18.725.288.971	17.194.165.771	16.931.776.122	98,5%
	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	125.000.000	125.000.000	97.325.944	77,9%
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	3.525.000.000	3.525.000.000	3.207.452.248	91,0%
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	475.000.000	475.000.000	388.125.500	81,7%
	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	856.000.000	856.000.000	749.385.750	87,5%





Jenis Layanan	Kegiatan/Sub Kegiatan	APBD	APBD-P	Realisasi	%
	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	2.194.000.000	2.194.000.000	2.069.940.998	94,3%
	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	550.000.000	550.000.000	479.489.000	87,2%
	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang menimpa, membahayakan dan/atau mengancam keselamatan manusia	200.000.000	200.000.000	139.899.000	69,9%
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia /Penyelamatan dan Evakuasi	350.000.000	350.000.000	339.590.000	97,0%
Total Sub Urusan Kebakaran		23.950.288.971	22.378.144.771	21.661.900.426	96,8%
Alokasi Anggaran SPM Bidang Trantibum		52.410.036.367	47.911.705.167	43.582.132.481	90,96%

4.5.5. Dukungan Personil

Dalam upaya pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Kutai Kartanegara diampu 3 OPD yaitu Satuan Polisi Pamong Praja pengampu SPM Sub Urusan Trantibum, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pengampu SPM Sub Urusan Bencana Daerah dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan pengampu SPM Sub Urusan Kebakaran Daerah.

Tabel 175. Personil Pendukung Pencapaian SPM Sub Urusan Trantibum

No	Uraian	Jumlah Personil
1	ASN	133
2	BANPOL PP	270
Jumlah		400





Sumber daya manusia yang terkait dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara pada unsur pelaksana terdiri dari Pejabat Struktural (Eselon IIB, IIIA, IIIB dan IVA) dan Pejabat Non Struktural (Fungsional Umum dan Teknis), seperti yang ditunjukkan tabel di bawah ini.

Tabel 176. Personil Pendukung Pencapaian SPM Sub Urusan Bencana Daerah

No	Pangkat	Gol	Jumlah	Keterangan
1	Pembina Utama Muda	IV/c	1	
2	Pembina Tingkat 1	IV/b	1	
3	Pembina	IV/a	6	
4	Penata Tingkat 1	III/d	11	
5	Penata	III/c	1	
6	Penata Muda Tingkat 1	III/b	6	
7	Penata Muda	III/a	12	
8	Pengatur Tingkat 1	II/d	14	
9	Pengatur	II/c	2	
Jumlah			54	

Tabel 177. Jumlah Petugas Operasional telah Mengikuti Diklat Kebencanaan

No	Nama Diklat	Jumlah	Keterangan
1	Pelatihan Dasar Manajemen Bencana (DMB)	23	
2	Pelatihan Fasilitator Rencana Kontingensi Bencana	3	
3	Bimtek Tim Reaksi Cepat Logistik Dan Peralatan	1	
4	Drone Mapping	5	
5	Bimbingan Teknis Pertolongan Di Ketinggian	10	

Sumber Daya Manusia pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagai penunjang pencapaian SPM Urusan Kebakaran Daerah Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 178. Dukungan Personil Penunjang SPM Sub Urusan Kebakaran

No	Jenis/Kualifikasi	Jumlah
1	Eselon	
	a. II.b	1
	b. III.a	1
	c. III.b	3





No	Jenis/Kualifikasi	Jumlah
	d. IV.a	10
2	Jabatan Fungsional	
	a. Analis Kebakaran Ahli Madya	1
	b. Analais Kebakaran Ahli Pertama	1
	c. Pemadam Kebakaran Terampil	7
	d. Fungsional Pelaksana	18
3	Tenaga Harian Lepas (Honoror)	31
4	Diklat Keterampilan Pemadam I	292

4.5.6. Permalahan dan Solusi

a. Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Secara umum, pelaksanaan penegakan Perda dan Perkada oleh Satuan Polisi Pamong Praja telah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan, sehingga tidak ada masyarakat yang merasa dirugikan akibat penegakan tersebut. Akan tetapi bukan berarti selama melakukan penegakan Perda dan Perkada tidak terdapat kendala. Beberapa permasalahan diantaranya adalah

- 1) Jumlah penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati pada Tahun 2023 ini capaian satpol PP ada 1.484 pelanggaran Perda dan Perkada yang dipantau dan diselesaikan, artinya Satpol PP berhasil menyelesaikan semua laporan Perda dan Perkada yang diterima, akan tetapi pencapaian tersebut belum menggambarkan tingkat pencapaian secara keseluruhan Kabupaten Kutai Kartanegara, etapi hanya berdasarkan data dari Seksi Penyelidikan dan Penindakan, dan Seksi Operasi dan Pengendalian Ketertiban Umum SATPOL Kabupaten, hal ini dikarenakan kualitas sumber daya manusia (petugas) terutama di tingkat kecamatan kurang memadai, seperti ada beberapa kecamatan yang kepala seksi Ketenteraman dan Ketertibannya tidak memiliki staf, atau hanya memiliki tidak lebih dari 4 staf. Juga diketahui hanya beberapa kecamatan yang memiliki staf PNS, sedangkan sisanya hanya tenaga honorer, serta tingkat pendidikan dari anggota Seksi Ketenteraman dan Ketertiban yang hanya setingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) atau lebih rendah





dari itu. Hal-hal tersebut menyebabkan penegakan peraturan daerah tidak dapat terlaksana dengan baik, sehingga untuk kedepannya, perlu dilakukan beberapa hal seperti mengadakan bimbingan teknis tentang penegakan perda di tingkat kecamatan, sosialisasi tentang Standar Pelayanan Minimal ke kecamatan, sehingga baik Camat maupun Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban lebih memahami tentang pentingnya pencapaian SPM

- 2) Jumlah patroli siaga Ketenteraman dan ketertiban, pada tahun 2023, SATPOL PP telah melakukan 1440 kali patroli, akan tetapi, ada catatan penting yang harus diperhatikan, yaitu, dari data yang diperoleh, jumlah kelompok patroli tidak tersebar merata di setiap kecamatan, melainkan hanya terpusat di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten, sedangkan kecamatan tidak memiliki kelompok patroli, hal ini dikarenakan kecamatan sangat kekurangan sumber daya manusia (SDM) dan sarana prasarana terutama kendaraan patroli baik kendaraan roda dua maupun roda empat, sehingga tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan patroli setiap harinya, oleh karena itu, solusi yang harus diambil adalah penambahan personil Seksi Ketenteraman dan Ketertiban sehingga jumlah yang ada cukup untuk melakukan patroli minimal 2 kali dalam satu hari, dan juga perlunya penambahan sarana dan prasarana penunjang patroli.
- 3) Program/kegiatan terkait pemenuhan terhadap pelayanan Ketenteraman dan ketertiban. Sebagai pengemban amanat SPM, maka SATPOL PP telah menterjemahkan amanat tersebut ke dalam Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2021 - 2026. Permasalahan yang ada adalah minimnya ketersediaan anggaran, sehingga kegiatan-kegiatan prioritas yang terkait dengan pemenuhan SPM yang dapat dilaksanakan secara maksimal.

b. Sub Urusan Bencana Daerah

Beberapa isu dan permasalahan / hambatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam pencapaian target





Standar Pelayanan Minimal Tahun 2024, dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

Tabel 179. Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Urusan Trantibum Sub Urusan Bencana Daerah

No	Jenis Pelayanan	Permasalahan	Solusi
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	1. Pemetaan terhadap lokasi atau daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana belum lengkap. 2. Belum adanya data dan indentifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana. 3. Terbatasnya sumber daya petugas sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana. 4. Terbatas sumber daya petugas pengadaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik per jenis bencana. 5. Belum terdatanya indentifikasi warga yang ber[otensi menjadi korban bencana	1. Meningkatkan mutu dan standar dokumen kajian risiko bencana 2. Melakukan pendataan Indentifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di Kawasan Rawan Bencana 3. Diklat, Bimtek bagi Petugas sosialisasi, komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana. 4. Menyusun standarisasi penyebaran informasi rawan bencana
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	1. Terbatasnya sarana dan prasarana penanggulangan bencana bagi warga negara di Kawasan Rawan Bencana 2. Terbatasnya Kapasitas Personil/Sumber Daya Manusia (SDM) petugas dan Warga Negara di Kawasan Rawan Bencana	1. Meningkatkan Kuantitas Pelatihan dan sertifikasi penggunaan peralatan PB. 2. Menyelenggarakan Latihan (Gladi) Kesiapsiagaan 3. Menyediakan Saprass PUSDALOPS Penanggulangan Bencana yang memadai 4. Melaksanakan kajian kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan 5. Menyediakan sarana dan prasarana sistem peringatan dini (EWS) Bencana 6. Meningkatkan jumlah Desa/Kel Tangguh Bencana 7. Membentuk dan Mengoptimalkan peran Forum Pengurangan Risiko Bencana 8. Menyusun Dokumen Rencana Kontijensi sesuai Kajian Risiko Bencana
3	Pelayanan Penyelematan dan Evakuasi Korban Bencana	1. Belum optimalnya pelaksanaan dan penentuan status tanggap darurat 2. Belum optimalkanya penerapan sistem komando operasi darurat	1. Mengoptimalkan Pelaksanaan dalam tahapan penentuan status tanggap darurat 2. Mengoptimalkan penerapan sistem komando operasi darurat





No	Jenis Pelayanan	Permasalahan	Solusi
		3. Masih rendahnya kapasitas petugas Tim Kaji Cepat ke lokasi Bencana secara cepat dan tepat 4. Belum adanya Rencana Kontijensi yang dapat dijadikan Rencana operasi penanggulangan bencana 5. Sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang belum mencukupi mengingat luas wilayah 6. Terhambatnya peningkatan kapasitas personil/sumber daya manusia yang disebabkan oleh sebagian besar personil pencarian, pertolongan dan evakuasi berstatus sebagai tenaga THL sehingga kesulitan untuk mengikuti pendidikan dan latihan 7. Keterbatasan Anggaran untuk peningkatan kapasitas personil/sumber daya manusia 8. Luas wilayah dan masih ada wilayah yang mengalami Blank spot sehingga informasi ketika terjadinya bencana tidak diterima dengan cepat 9. Masih kurangnya partisipasi serta kesadaran baik dari Tingkat RT, Desa/Kelurahan bahkan Kecamatan memberikan Laporan Kejadian Bencana	3. Meningkatkan kapasitas Tim Kaji Cepat ke lokasi bencana secara cepat dan tepat 4. Meningkatkan ketersediaan peralatan dan logistik kebencanaan 5. Menerapkan sistem penyimpanan yang terpadu pada pergudangan logistik PB

c. Sub Urusan Kebakaran

Kendala dan Permasalahan adalah hal-hal yang menjadi hambatan dan tantangan bagi pemerintah dalam pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM Sub Urusan Kebakaran, baik internal maupun eksternal, Sedangkan solusi adalah penyelesaian dan pemecahan terhadap masalah.

Tabel 180. Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Urusan Trantibum Sub Urusan Kebakaran Daerah

No	Jenis Pelayanan	Permasalahan	Solusi
1	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	1. Sub Urusan Kebakaran belum mendapat prioritas dari APBD dalam pembiayaan SPM 2. Ketersediaan Pos Sektor Pemadam Kebakaran yang belum sesuai dengan	1. Mendorong dan mengawal prioritas APBD untuk pemenuhan pembiayaan APBD 2. Pemenuhan Pos Sektor Pemadam Kebakaran dilengkapi dengan sarana dan prasarana pemadam





No	Jenis Pelayanan	Permasalahan	Solusi
		amanat pada Permendagri 122 Tahun 2018 3. Keterbatasan jumlah dan kualitas sarana & prasarana pemadam kebakaran dan sarana & Prasarana Penyelamatan 4. Sumber daya aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan baik secara Kualitas maupun kuantitas masih terbatas 5. Belum setiap kelurahan/desa memiliki relawan pemadam kebakaran dalam meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan serta meningkatkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi bahaya kebakaran 6. Kondisi geografis yang menyulitkan penjangkauan layanan ke daerah terpencil 7. Pengumpulan data korban kebakaran secara <i>by name by address</i> sulit dilakukan karena dokumen kependudukan ada ikut terbakar	kebakaran dan sarana dan prasarana penyelamatan di setiap kecamatan 3. Pendataan dan pemetaan kebutuhan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan sarana dan prasarana penyelamatan 4. Meningkatkan jumlah dan standar kualifikasi sumber daya aparatur pemadam kebakaran di Kabupaten Kutai Kartanegara 5. Membentuk dan membina relawan pemadam kebakaran di setiap kelurahan/desa dengan jumlah minimal 2 orang dan dilengkapi dengan sarana dan prasarana pemadam kebakaran 6. Membuka akses konektivitas daerah terpencil sehingga layanan pemadam kebakaran dapat menjangkau daerah tersebut 7. Mengidentifikasi penerima layanan SPM Sub Urusan Kebakaran terkait dokumen kependudukan secara <i>by name by address</i> dengan melibatkan peran kecamatan, kelurahan/desa secara berjenjang dan terpadu, sehingga data kependudukan yang diperlukan dalam pengumpulan data korban kebakaran bisa didapatkan

4.6. Urusan Sosial

4.6.1. Jenis Pelayanan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota, bahwa SPM Bidang Sosial meliputi:

1. Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti Sosial;





2. Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di luar Panti Sosial;
3. Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di luar Panti Sosial;
4. Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial; dan
5. Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana alam dan sosial Daerah Kabupaten / Kota.

4.6.2. Target Pencapaian

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, secara rinci penetapan target Pencapaian SPM pada Penerima Layanan dan Mutu Layanan dengan Anggaran Penunjang Capaian SPM pada tabel berikut:

Tabel 181. Target Pencapaian SPM Urusan Sosial

No	Jenis Pelayanan	Mutu Layanan	Target	Anggaran
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial		100%	4,553,406,590
		Jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas Terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	2.521	
		1. Layanan data dan pengaduan (layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada Dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial)	30	
		2. Penyediaan permakanan (merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh Dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada anak terlantar)	382	





No	Jenis Pelayanan	Mutu Layanan	Target	Anggaran
		3. Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat (layanan yang dilakukan oleh Dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh Dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permukiman/orang/hari)	18	
		4. Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	29	
		5. Penyediaan alat bantu (kursi roda, kaca mata, pemeriksaan dan pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)	51	
		6. Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	29	
		7. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	37	
		8. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar serta masyarakat dilakukan oleh Dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh Dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	37	
		9. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	2521	
		10. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	2521	





No	Jenis Pelayanan	Mutu Layanan	Target	Anggaran
		11. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga penyandang disabilitas terlantar untuk tujuan reunifikasi)	2521	
		12. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali penyandang disabilitas terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi) *BISA DIISI -1 jika elemen data belum terpenuhi	n/a	
		13. Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya) *BISA DIISI -1 jika elemen data belum terpenuhi	n/a	
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di luar Panti Sosial		100%	
	Jumlah Warga Negara Anak Terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti		445	
		1. Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada Dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	10	
		2. Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat (merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh Dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada anak terlantar)	10	
		3. Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh Dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh Dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	90	
		4. Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	28	
		5. Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	28	





No	Jenis Pelayanan	Mutu Layanan	Target	Anggaran
		6. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	13	
		7. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar serta masyarakat dilakukan oleh Dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh Dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	13	
		8. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	445	
		9. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	335	
		10. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga anak terlantar untuk tujuan reunifikasi)	445	
		11. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali anak terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi) *BISA DIISI -1 jika elemen data belum terpenuhi	n/a	
		12. Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada anak terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya) *BISA DIISI -1 jika elemen data belum terpenuhi	n/a	
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di luar Panti Sosial		100%	
	Jumlah Warga Negara Lanjut Usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti		3.476	
		1. Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan,	10	





No	Jenis Pelayanan	Mutu Layanan	Target	Anggaran
		dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada Dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial		
		2. Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat (merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh Dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada lanjut usia terlanter)	6	
		3. Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh Dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh Dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	435	
		4. Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	43	
		5. Penyediaan alat bantu (kursi roda, kaca mata, pemeriksaan dan pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)	37	
		6. Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	1	
		7. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	44	
		8. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlanter (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlanter serta masyarakat dilakukan oleh Dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh Dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	44	



No	Jenis Pelayanan	Mutu Layanan	Target	Anggaran
		9. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	3476	
		10. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	1250	
		11. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga lanjut usia terlantar untuk tujuan reunifikasi)	1	
		12. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali lanjut usia terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi) *BISA DIISI -1 jika elemen data belum terpenuhi	1	
		13. Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada lanjut usia terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya) *BISA DIISI -1 jika elemen data belum terpenuhi	n/a	
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial		100%	
	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti		20	
		1. Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada Dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	2	
		2. Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh Dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada gelandangan dan pengemis	20	
		3. Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh Dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh Dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	20	
		4. Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami	20	



No	Jenis Pelayanan	Mutu Layanan	Target	Anggaran
		bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)		
		5. Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	20	
		6. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	20	
		7. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis serta masyarakat dilakukan oleh Dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh Dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	20	
		8. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	20	
		9. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	4	
		10. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga gelandangan dan pengemis untuk tujuan reunifikasi)	20	
		11. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali gelandangan dan pengemis dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi) *BISA DIISI -1 jika elemen data belum terpenuhi	20	
		12. Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada gelandangan dan pengemis yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya) *BISA DIISI -1 jika elemen data belum terpenuhi	n/a	





No	Jenis Pelayanan	Mutu Layanan	Target	Anggaran
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana alam dan sosial Daerah Kabupaten / Kota		100%	820,000,000
	Jumlah Warga Negara korban bencana Kab/Kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Kab/Kota		1.500	
		1. Penyediaan permakanan (penyediaan permakanan secara keseluruhan untuk korban bencana alam, bencana sosial dan bencana non-alam dalam bentuk bahan makanan dan makanan siap saji dan/atau makanan lainnya sesuai kebutuhan)	1500	
		2. Penyediaan sandang (pakaian laki-laki dewasa, pakaian dan kebutuhan khusus perempuan dewasa, pakaian anak laki-laki dan perempuan, pakaian seragam sekolah anak laki-laki, pakaian seragam sekolah anak perempuan, pakaian lainnya sesuai kebutuhan, selimut, dan/atau kidware dan penyediaan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	1000	
		3. Penyediaan tempat penampungan pengungsi (tenda pengungsi, tenda keluarga, tenda dapur umum, tenda gulung, tenda logistik, veltbed, matras/tikar/alas tidur, dan/atau kelengkapan tempat penampungan sementara lainnya sesuai kebutuhan)	33	
		4. Penanganan khusus bagi kelompok rentan (merupakan bantuan khusus yang diberikan kepada Lanjut Usia, ibu hamil, Penyandang Disabilitas, dan Anak seperti popok, susu, toilet khusus disabilitas dsb.)	16	
		5. Pelayanan dukungan Psikososial (upaya/dukungan yang dilakukan oleh individu, kelompok/komunitas diluar diri dalam sebuah interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari yang penuh kasih sayang, cinta, perlindungan dan membantu penyesuaian diri terhadap masalah/situasi sulit yang dihadapi, seperti terapi kejiwaan, edukasi anak, hiburan/trauma healing, dsb.)	127	

4.6.3. Realisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Perhitungan Pencapaian SPM dilakukan dengan menggunakan Indeks Pencapaian SPM. Indeks Pencapaian SPM meliputi Capaian Penerima Pelayanan Dasar dengan bobot 80% dan Capaian Mutu Pelayanan Dasar dengan bobot 20%.





Indeks pencapaian SPM (IP SPM) adalah nilai capaian SPM yang diperoleh melalui penghitungan rata-rata persentase indeks pencapaian mutu minimal layanan dasar dikalikan bobot mutu dengan persentase indeks penerima layanan dasar dikalikan dengan bobot penerima.

Tabel 182. Realisasi Indeks Pencapaian SPM Urusan Sosial

No	Jenis Pelayanan	Capaian Penerima Pelayanan Dasar	Capaian Mutu Pelayanan Dasar	IP SPM
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti Sosial	100%	100%	
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di luar Panti Sosial	100%	100%	
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di luar Panti Sosial	100%	100%	
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	100%	100%	
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana alam dan sosial Daerah Kabupaten / Kota	100%	100%	
Indeks Pencapaian SPM Urusan Sosial				100% Tuntas Paripurna

Berdasarkan 5 jenis pelayanan SPM pada urusan sosial Tahun 2024 yang telah dilaksanakan, Indeks Pencapaian SPM Urusan sosial Tahun 2024 yaitu 100% dengan kategori Tuntas Paripurna. Adapun penjabaran Indeks Pencapaian SPM Urusan Sosial Tahun 2024 dijelaskan sebagai berikut:

a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti Sosial

Capaian Pelayanan Dasar pada Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti Sosial Tahun 2024 sebesar 100% dari target 100%, dengan Jumlah sasaran yang harus dilayani sebanyak 2.521 Warga Negara 2.521 Warga Negara Penyandang Disabilitas Terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti.





Tabel 183. Capaian Penerima Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Persentase	IP SPM (80%)
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti Sosial	2.521	2.521	100%	80%

Capaian Mutu Pelayanan Dasar pada Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti Sosial Tahun 2024 sebesar 100% dari target 100%.

Tabel 184. Capaian Mutu Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti Sosial

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Persentase	IP SPM (20%)
1	Layanan data dan pengaduan (layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada Dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial)	30	30	100,00%	
2	Penyediaan permakanan (merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh Dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada anak terlantar)	382	382	100,00%	
3	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat (layanan yang dilakukan oleh Dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh Dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	18	18	100,00%	
4	Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan)	29	29	100,00%	





No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Persentase	IP SPM (20%)
	dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)				
5	Penyediaan alat bantu (kursi roda, kaca mata, pemeriksaan dan pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)	51	51	100,00%	
6	Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	29	29	100,00%	
7	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	37	37	100,00%	
8	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar serta masyarakat dilakukan oleh Dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh Dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	37	37	100,00%	
9	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	2521	2521	100,00%	
10	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	2521	2521	100,00%	
11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga penyandang	2521	2521	100,00%	





No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Persentase	IP SPM (20%)
	disabilitas terlantar untuk tujuan reunifikasi)				
12	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali penyandang disabilitas terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi) *BISA DIISI -1 jika elemen data belum terpenuhi	Tutup Mutu	Tutup Mutu	100,00%	
13	Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya) *BISA DIISI -1 jika elemen data belum terpenuhi	Tutup Mutu	Tutup Mutu	100,00%	
Rata-Rata				100%	20%

b. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di luar Panti Sosial

Capaian Pelayanan Dasar pada Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di luar Panti Sosial Tahun 2024 sebesar 100% dari target 100%, dengan Jumlah sasaran yang harus dilayani sebanyak 445 Warga Negara dan 445 Warga Negara Anak Terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti.

Tabel 185. Capaian Penerima Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di luar Panti Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Persentase	IP SPM (80%)
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di luar Panti Sosial	445	445	100%	80%

Capaian Mutu Pelayanan Dasar pada Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di luar Panti Sosial Tahun 2024 sebesar 100% dari target 100%.





Tabel 186. Capaian Mutu Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di luar Panti Sosial

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Persentase	IP SPM (20%)
1	Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada Dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	10	10	100,00%	
2	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat (merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh Dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada anak terlantar)	10	10	100,00%	
3	Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh Dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh Dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	90	90	100,00%	
4	Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	28	28	100,00%	
5	Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	28	28	100,00%	
6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	13	13	100,00%	
7	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar serta masyarakat dilakukan oleh Dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh Dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	13	13	100,00%	





No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Persentase	IP SPM (20%)
8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	445	445	100,00%	
9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	335	335	100,00%	
10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga anak terlantar untuk tujuan reunifikasi)	445	445	100,00%	
11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali anak terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi) *BISA DIISI -1 jika elemen data belum terpenuhi	Tutup Mutu	Tutup Mutu	100,00%	
12	Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada anak terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya) *BISA DIISI -1 jika elemen data belum terpenuhi	Tutup Mutu	Tutup Mutu	100,00%	
Rata-Rata				100%	20%

c. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di luar Panti Sosial

Capaian Pelayanan Dasar pada Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di luar Panti Sosial Tahun 2024 sebesar 100% dari target 100%, dengan Jumlah sasaran yang harus dilayani sebanyak 3.476 Warga Negara dan 3.476 Warga Negara Lanjut Usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti.

Tabel 187. Capaian Penerima Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di luar Panti Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Persentase	IP SPM (80%)
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di luar Panti Sosial	3.476	3.476	100,00%	80%

Capaian Mutu Pelayanan Dasar pada Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di luar Panti Sosial Tahun 2024 sebesar 100% dari target 100%.





Tabel 188. Capaian Mutu Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di luar Panti Sosial

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Persentase	IP SPM (20%)
1	Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada Dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	10	10	100,00%	
2	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat (merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh Dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada lanjut usia terlantar)	6	6	100,00%	
3	Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh Dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh Dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	435	435	100,00%	
4	Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	43	43	100,00%	
5	Penyediaan alat bantu (kursi roda, kaca mata, pemeriksaan dan pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)	37	37	100,00%	
6	Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	1	1	100,00%	
7	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan	44	44	100,00%	





No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Persentase	IP SPM (20%)
	spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)				
8	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar serta masyarakat dilakukan oleh Dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh Dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	44	44	100,00%	
9	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	3476	3476	100,00%	
10	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	1250	1250	100,00%	
11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga lanjut usia terlantar untuk tujuan reunifikasi)	1	1	100,00%	
12	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali lanjut usia terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi) *BISA DIISI -1 jika elemen data belum terpenuhi	1	1	100,00%	
13	Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada lanjut usia terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya) *BISA DIISI -1 jika elemen data belum terpenuhi	Tutup Mutu	Tutup Mutu	100,00%	
Rata-Rata				100%	20%

d. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial

Capaian Pelayanan Dasar pada Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial Tahun 2024 sebesar 100% dari target 100%, dengan Jumlah sasaran yang harus





dilayani sebanyak 20 Warga Negara dan 20 Warga Negara Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial.

Tabel 189. Capaian Penerima Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Persentase	IP SPM (80%)
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	20	20	100,00%	80%

Capaian Mutu Pelayanan Dasar pada Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial Tahun 2024 sebesar 100% dari target 100%.

Tabel 190. Capaian Mutu Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Persentase	IP SPM (20%)
1	Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada Dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	2	2	100,00%	
2	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh Dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada gelandangan dan pengemis	20	20	100,00%	
3	Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh Dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh Dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	20	20	100,00%	
4	Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	20	20	100,00%	





No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Persentase	IP SPM (20%)
5	Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	20	20	100,00%	
6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	20	20	100,00%	
7	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis serta masyarakat dilakukan oleh Dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh Dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	20	20	100,00%	
8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	20	20	100,00%	
9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	4	4	100,00%	
10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga gelandangan dan pengemis untuk tujuan reunifikasi)	20	20	100,00%	
11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali gelandangan dan pengemis dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi) *BISA DIISI -1 jika elemen data belum terpenuhi	20	20	100,00%	
12	Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada gelandangan dan pengemis yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya) *BISA DIISI -1 jika elemen data belum terpenuhi	Tutup Mutu	Tutup Mutu	100,00%	
13	Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada disabilitas	2	2	100,00%	





No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Persentase	IP SPM (20%)
	terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada Dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial				
Rata-Rata				100%	20%

e. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana alam dan sosial Daerah Kabupaten / Kota

Capaian Pelayanan Dasar pada Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana alam dan sosial Daerah Kabupaten / Kota Tahun 2024 sebesar 100% dari target 100%.

Tabel 191. Capaian Penerima Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana Alam dan Sosial Daerah

No	Jenis Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Persentase	IP SPM (80%)
1	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana alam dan sosial Daerah	1.500	1.500	100,00%	80%

Capaian Mutu Pelayanan Dasar pada Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di luar Panti Sosial Tahun 2024 sebesar 100% dari target 100%.

Tabel 192. Capaian Mutu Layanan Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana Alam dan Sosial Daerah

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Persentase	IP SPM (20%)
1	Penyediaan permakanan (penyediaan permakanan secara keseluruhan untuk korban bencana alam, bencana sosial dan	1500	2338	100,00%	





No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Persentase	IP SPM (20%)
	bencana non-alam dalam bentuk bahan makanan dan makanan siap saji dan/atau makanan lainnya sesuai kebutuhan)				
2	Penyediaan sandang (pakaian laki-laki dewasa, pakaian dan kebutuhan khusus perempuan dewasa, pakaian anak laki-laki dan perempuan, pakaian seragam sekolah anak laki-laki, pakaian seragam sekolah anak perempuan, pakaian lainnya sesuai kebutuhan, selimut, dan/atau kidware dan penyediaan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	1000	1018	100,00%	
3	Penyediaan tempat penampungan pengungsi (tenda pengungsi, tenda keluarga, tenda dapur umum, tenda gulung, tenda logistik, veltbed, matras/tikar/alas tidur, dan/atau kelengkapan tempat penampungan sementara lainnya sesuai kebutuhan)	33	33	100,00%	
4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan (merupakan bantuan khusus yang diberikan kepada Lanjut Usia, ibu hamil, Penyandang Disabilitas, dan Anak seperti popok, susu, toilet khusus disabilitas dsb.)	16	16	100,00%	
5	Pelayanan dukungan Psikososial (upaya/dukungan yang dilakukan oleh individu, kelompok/komunitas diluar diri dalam sebuah interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari yang penuh kasih sayang, cinta, perlindungan dan membantu penyesuaian diri terhadap masalah/situasi sulit yang dihadapi, seperti terapi kejiwaan, edukasi anak, hiburan/trauma healing, dsb.)	127	127	100,00%	
Rata-Rata				100%	20%





4.6.4. Alokasi Anggaran

Dalam upaya pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Sosial, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah mengalokasikan melalui Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara pada Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 193. Alokasi Anggaran Penunjang Urusan Sosial

Jenis Layanan	Kegiatan/Sub Kegiatan	APBD	APBD-P	Realisasi	%
Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	5.144.089.590	4.553.406.590	4.311.800.788	94,69
	Penyediaan Permakanan	3.235.700.590	3.368.500.590	3.301.917.650	98,02
	Penyediaan Sandang	250.000.000	250.000.000	202.654.000	81,06
	Penyediaan Alat Bantu	600.000.000	465.000.000	392.209.168	84,35
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	150.000.000	211.102.000	207.243.939	98,17
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	733.389.000	83.804.000	67.158.000	80,14
	Pemberian layanan kedaruratan	75.000.000	75.000.000	54.071.200	72,09
	Pemberian Layanan Rujukan	100.000.000	100.000.000	86.546.831	86,55
Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana alam dan sosial Daerah Kabupaten / Kota	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	550.000.000	820.000.000	604.675.981	73,74
	Penyediaan Makanan	300.000.000	420.000.000	388.516.431	92,50
	Penyediaan Sandang	250.000.000	250.000.000	207.377.124	82,95
	Pelayanan dukungan Psikososial	0	150.000.000	8.782.426	5,85
Alokasi Anggaran SPM Urusan Sosial		5.694.089.590	5.373.406.590	4.916.476.769	91,50

4.6.5. Dukungan Personil

Sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota terdiri dari:





1. Tenaga Kesejahteraan Sosial; yaitu seseorang yang didik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di Lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial.
2. Pekerja Sosial; yaitu seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikasi kompetensi.
3. Penyuluh Sosial; yaitu seseorang yang mempunyai tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan sosial dibidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
4. Relawan Sosial; yaitu Relawan Sosial; yaitu seseorang dan/atau kelompok masyarakat, baik yang berlatar belakang pekerjaan sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di instansi sosial pemerintah atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan.

Selanjutnya pada Pasal 40 Permensos Nomor 9 Tahun 2018 tersebut diatur bahwa setiap personil penyelenggara kesejahteraan sosial tersebut harus tersertifikasi oleh lembaga sertifikasi profesi sesuai jenis SDM nya. Gambaran umum SDM penyelenggara kesejahteraan sosial di Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai berikut:

Tabel 194. Dukungan Personil Penunjang SPM Urusan Sosial

No	Jenis SDM	Status SDM	Jumlah	Keterangan
1	Pekerja Sosial	PNS	2	Pejabat Struktural
2	Tenaga Kesejahteraan Sosial	Non PNS	93	Pendamping Sosial dari Kemensos
3	Penyuluh Sosial	PNS	5	Fungsional Ahli Muda
4	Penyuluh Sosial	Non PNS	25	Penyuluh Sosial Masyarakat
5	Relawan Sosial	Non PNS	62	Anggota TAGANA dan PSM

Data tersebut menunjukkan bahwa di Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara belum tersedia SDM Pekerja Sosial yang seharusnya





memegang peran sentral dalam pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang sosial. Idealnya untuk setiap jenis pelayanan dasar diampu oleh 1 orang Pekerja Sosial, Mengacu pada ketentuan tersebut maka ketersediaan personal penyelenggara kesejahteraan sosial di Kabupaten Kutai Kartanegara sangatlah kekurangan. Sebagai contoh bahwa Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki 237 Desa/Kelurahan, sehingga setidaknya dibutuhkan minimal 237 relawan sosial. Setiap Puskesmas Desa/Kelurahan minimal memiliki 1 orang Relawan Sosial.

Penyuluh Sosial Fungsional yang ada di Dinas Sosial jumlahnya juga kurang jika dibandingkan dengan jumlah Kecamatan apalagi Desa/Kelurahan se-Kabupaten Kutai Kartanegara. Jika setiap kecamatan didampingi oleh 1 orang Penyuluh Sosial maka dibutuhkan setidaknya 20 orang Penyuluh Sosial Fungsional Ahli Muda. Keberadaan Penyuluh Sosial yang direkrut dan dibina oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur saat ini juga banyak yang sudah mengundurkan diri karena mendapat pekerjaan ditempat lain yang lebih menjanjikan dari sisi ekonomi.

4.6.6. Permasalahan dan Solusi

Pengumpulan Data

- Kesulitan dalam pengumpulan dokumen kependudukan dalam hal terjadi bencana sebagai bahan bukti dukung penyaluran bantuan - Belum tersedia alat bantu pengumpulan dan updating data - Proses verifikasi data yang memerlukan waktu cukup lama sehingga mempengaruhi validasi data

Perhitungan Kebutuhan

- Beberapa INDIKATOR SPM/ SUB KEGIATAN tidak tersedia secara khusus dalam bentuk program kegiatan/sub kegiatan

Perencanaan dan PANGANGGARAN

- Dinas sosial tidak membuat kegiatan terpisah bagi masing-masing sasaran SPM melainkan dalam 1 kegiatan langsung mencakup beberapa jenis layanan SPM sekaligus , misal dalam 1 DPA kegiatan Penyediaan Permakanan di dalamnya terdapat 3 sasaran





SPM yang dilayani sekaligus yaitu disabilitas telantar, anak telantar dan lansia telantar. Sedangkan dalam form perencanaan pemenuhan, masing-masing jenis layanan SPM harus diisi sesuai kegiatannya sendiri dan terpisah antara satu layanan SPM dengan yang lainnya, sesuai dengan isian capaian SPM.





BAB V PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2024 merupakan laporan kinerja pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah selama satu tahun, disusun guna memberikan gambaran terhadap kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan ketentuan pasal 70 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

LPPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2024 memuat Capaian Kinerja pada Urusan Wajib, Urusan Pilihan, dan fungsi penunjang urusan pemerintahan serta kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka melaksanakan tugas pembantuan. Selain hal tersebut juga dilaporkan Pencapaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2024 dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024.

Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 merupakan pelaksanaan tahun ketiga RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara dengan tema arah kebijakan pembangunan pada Tahun 2024 yaitu ***“Pengembangan Ekonomi Unggulan Daerah Berbasis Desa dan Kecamatan”***.

Pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024 pada indikator kinerja makro telah mencapai kinerja yang ditargetkan dicapai pada akhir tahun RPJMD Tahun 2026. Indeks Pembangunan Manusia, penekanan angka Pengangguran, pertumbuhan ekonomi menunjukkan perbaikan sesuai dengan target RPJMD. Sedangkan angka kemiskinan dan tingkat ketimpangan pendapatan yang masih relatif tinggi saat ini menjadi perhatian utama pemerintah daerah, dengan upaya untuk menurunkannya pada tahun 2025.

Secara menyeluruh penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 telah mencapai kinerja baik, hampir seluruh Indikator Kinerja Utama mencapai capaian kinerja di atas target yang





ditetapkan. Berbagai keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah pada tahun 2024 diraih berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak yaitu jajaran Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan DPRD serta masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara.

Penetapan arah kebijakan bukan lagi mengejar peringkat akan tetapi lebih fokus kepada proses, pelaksanaan dan hasil dari setiap urusan pemerintah sehingga dapat diambil langkah menetapkan kebijakan urusan pemerintah yang dianggap kurang baik dapat ditingkatkan serta yang sudah berjalan dengan baik agar tetap dipertahankan.

Pemerintah Kabupaten telah mencoba memenuhi komitmen bahwa perbaikan kinerja yang telah dicapai akan menjadi fondasi yang kokoh dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di masa akan datang dalam mewujudkan Kutai Kartanegara IDAMAN 2021-2026.

Demikian buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 ini disampaikan, semoga dapat menjadi bahan referensi utama dalam pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2024.





Pemerintah Kabupaten
Kutai Kartanegara

LPPD 2024

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Tahun Anggaran 2024